

FILSAFAT PEMERINTAHAN

The Study of Administration menegaskan bahwa reformasi di bidang pelayanan publik harus mencakup tidak hanya perubahan pada pegawai pemerintahan tetapi juga pada organisasi dan perubahan kantor pemerintah. Karya *Wilson* merupakan hasil dari study ilmu politik yang juga ilmu yang mempelajari ilmu pemerintahan yang lebih fokus pada praktik pemerintahan, seperti bagian eksekutif, operatif dan bagian yang terlihat dari pemerintahan. Fungsi pemerintah semakin hari semakin kompleks. Untuk itu administrasi harus mencakup hal-hal yang baru, seperti kegunaan, murah & pelayanan pemerintah. Ide suatu negara memiliki konsekuensi ideal berupa perubahan tercatat dan kesadaran beradministrasi. Itulah mengapa dibutuhkan ilmu administrasi/ Ilmu Pemerintahan, untuk menguatkan roda pemerintahan.

Thomas Woodrow Wilson
(Presiden Amerika Serikat ke-28 (1913–1921))

Filsafat Pemerintahan Karya Prof. DR. Budi Supriyatno, M.M., M.Si ini sangat fenomenal dan cocok untuk situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Saya sarankan para pejabat Birokrat/Aparat Negara bisa membaca karya yang bagus ini.

(Dr. Sunatri. S.Boedjonagoro. Dosen)



ISBN 978-602-1044-146



9 786021 044146

Prof. Dr. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi

FILSAFAT PEMERINTAHAN



ISBN : 978-602-1044-146



FILSAFAT PEMERINTAHAN

Prof. Dr. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi

FILSAFAT PEMERINTAHAN

@CV. MEDIA BRILIAN

Penulis

Prof. DR. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, M.M.,M.Si

Desain Grafis
Lilik Hariawan

Perpustakaan Nasional Dalam Terbitan (KTD)
ISBN 978-602-1044-146

Cetakan Pertama November 2022

Judul Buku : Filsafat Pemerintahan

Penulis : Prof. DR. Drs. H. Budi Supriyatno, M.M.,M.Si

Jumlah
Halaman : Vi +303

Penerbit : CV. Media Brilian

Keanggotaan : Anggota Ikatan Penerbit Indoneisa (IKAPI)

Desain Cover : Lilik Hariawan

Perpustakaan Nasional Dalam Terbitan (KTD)

ISBN : 978-602-1044-146

Ukuran Buku : A5

Bahasa : Indonesia

Cetakan
Pertama : November 2022

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang
memperbanyak sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa ijin
tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan suatu peristiwa yang sangat panjang namun akhirnya bisa terbit. Peristiwa yang sangat panjang karena keinginan penulis sudah sangat lama sekali yaitu ingin menyumbangkan pemikiran dalam bidang filsafat pemerintahan. Peristiwa yang ditempuh melalui pengalaman penulis sebagai berokrat atau aparatur negara dan menjadi dosen dan ditambah pengalaman penulis mengikuti seminar, training atau *shortcourse* di luar negeri. Untuk mempersiapkan karya ini sangat unik, karena buku ini sebenarnya sudah dipakai untuk bahan mengajar atau perkuliahan lebih dari 12 tahun di program pasca sarjana di perguruan tinggi di Indonesia.

Sesungguhnya penulis sangat prihatin melihat perkembangan buku di Indonesia. Apalagi buku bidang pemerintahan tergolong sangat sedikit, oleh karena itu penulis bertekad ingin meyumbangkan buku ini yang berjudul: Filsafat Pemerintahan.

Yang sangat menyedihkan lagi praktek di pemerintahan banyak terjadi korupsi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahah yang baik, “*seolah-olah*” tidak ada pedoman atau *Standar Operasional Prosedur (SOP)* untuk para aparatur negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sehingga membabibuta korupsi besar-besaran, kita bisa lihat setelah reformasi ini banyak pejabat pemerintah atau pejabat Negara ketangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai dari DPR, Menteri Gubernur, Bupati/Walikota dan pejabat eselon 1,2,3 dan 4, Polisi, Jaksa Pengacara, Pengusaha, DRP, DPRD. Ini menandakan bahwa aparatur Negara kita sedang sakit.

Disamping itu buku dalam dibidang pemerintahan kebanyakan hasil karya penulis luar negeri, sehingga harga yang sangat mahal yang sebagian mahasiswa tidak mampu membeli.

Keprihattinan tersebut ditambah pula para pakar di-bidang pemerintahan kurang menulis. Dengan alasan seperti ini semoga buku bermanfaat bagi mahasiswa maupun dosen dan juga bermanfaat bagi para aparatur negara atau birokrat.

Karya ini terdiri dari tujuh bab. Mulai dari bab 1 pendahuluan membahas tentang pemikir filsafat pemerintahan, pengertian filsafat, permasalahan dan cabang filsafat, perkembangan filsafat dunia, mazhab pemikiran filsafat, tujuan dan manfaat filsafat. Selanjutnya bab 2 metodologi ilmu pemerintahan membahas tentang pemerintahan, pengertian metodologi ilmu pemerintahan, sebelas metodologi ilmu pemerintahan. Bab 3 pemerintahan membahas pengertian pokok, hakekat ilmu pemerintahan, implementasi ilmu pemerintahan, ruang lingkup pemerintahan.

Bab 4 perkembangan ilmu pemerintahan membahas tentang masa kolonial, masa kemerdekaan, masa reformasi. Bab 5 filsafat pemerintahan membahas tentang pengertian filsafat pemerintahan, obyek filsafat pemerintahan, perkembangan ilmu pemerintah di Indonesia, posisi filsafat pemerintahan, landasan ilmu pemerintahan, tujuan dan fungsi filsafat pemerintahan, dan sumber filsafat pemerintahan. Bab 6 *Good Governance* membahas tentang hakekat good governance, asas good governance, indikator good governance, tujuan dan manfaat good governance. Bab 7 pemerintah daerah membahas tentang langkah tindakan pejabat, hakekat pemerintahan daerah, pemerintahan daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, fungsi pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah, dan pembatasan kewenangan,.

Penulis ucapan terimakasih kepada para mahasiswa yang secara tidak langsung penulis jadikan sebagai laboratorium hidup selama perkuliahan, sering saya lontar kasus atau permasalahan pemerintahan, sehingga menjadi perdebatan intelektual para mahasiswa dari berbagai latar belakang, bisa menambah kekayaan keilmuan atau intelektual dalam

**Prof. DR. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi ,
FILSAFAT PEMERINTAHAN**

penulisan buku ini.

Kepada PT. Media Brilian yang bersedia menerbitkan buku ini, penulis mengucapkan terimakasih banyak.

Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada almarhum kakek dan nenek yang mengasuh penulis ketika masih kecil dan selama hidupnya kakek nenek telah membimbing dan memberikan bekal kepada penulis menjadi manusia yang bekerja keras dan berdoa tanpa lelah. Semoga buku ini menambah kebahagiaan kakek nenek penulis di surga. Amin.

Jakarta, 29 November 2022

Penulis

Prof. Dr. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi

الله



DAFTAR ISI

1	KATA PENGANTAR	i
2	DAFTAR ISI	iii
3	BAB 1 FILSAFAT	1
	1.1. Pemikir Filsafat Pemerintahan.....	1
	1.2. Pengertian Filasafat.....	4
	1.3. Permasalahan dan Cabang Filsafat.....	11
	1.4. Perkembangan Filsafat Dunia.....	15
	1.5. Mazhab Pemikiran Filsafat	31
	1.6. Tujuan dan Manfaat Filsafat.....	42
	1.7. Daftar Pustaka.....	47
4	BAB 2 METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN	59
	2.1. Era Industri 4.0.....	59
	2.2. Metodologi Pemerintahan di Era Industri 4.0.....	65
	2.3. Daftar Pustaka	84
5	BAB 3 PEMERINTAHAN.....	88
	3.1. Pengertian Pokok	88
	3.2. Hakekat Ilmu Pemerintahan.....	95
	3.3. Ruang Lingkup Pemerintahan	101
	3.4. Implementasi Ilmu Pemerintahan	46
	3.5. Daftar Pustaka	103
6	BAB 4 PERKEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN	105
	4.1. Masa Kolonial.....	106
	4.2. Masa Kemerdekaan	111
	4.3. Tahun 1947 Akademi Ilmu Politik (AIP)	113
	4.4. Tahun 1956 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN)	114
	4.5. Tahun 1967 Institut Ilmu Pemerintahan (IIP)	115
	4.6. Tahun 1990-an Didirikan Jurusan Ilmu Pemerintahan	116
	4.7. Tahun 2004 IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri).....	117

4.8.	Tahun 2015 JPP resmi berganti DPP.....	117
4.9.	Daftar Pustaka.....	131
7	BAB 5 FILSAFAT PEMERINTAHAN.....	133
5.1.	Pengertian Filsafat Pemerintahan.....	133
5.2.	Obyek Filsafat Pemerintahan.....	141
5.3.	Pembangan Ilmu Pemerintah di Indonesia.....	147
5.4.	Posisi Filsafat Pemerintahan.....	151
5.5.	Landasan Ilmu Pemerintahan	157
5.6.	Tujuan, Fungsi dan Manfaat Filsafat Pemerintahan.....	171
5.7.	Sumber Filsafat Pemerintahan.....	179
5.8.	Daftar Pustaka.....	185
8	BAB 6. GOOD GOVERNANCE.....	193
6.1.	Hakekat Good Governace.....	193
6.2.	Asas Good Governace.....	204
6.3.	Indikator Good Governace	206
6.4.	Tujuan dan Manfaat Good Governsce	208
6.5.	Daftar Pustaka	214
9	BAB 7 PEMERINTAH DAERAH	216
7.1.	Langkah Tindakan Pejabat	216
7.2.	Hakekat Pemerintahan Daerah.....	223
7.3.	Pemerintahan Daerah di Indonesia.....	230
7.4.	Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	247
7.5.	Fungsi Pemerintahan Daerah.....	237
7.6.	Kewenangan Pemerintah Daerah	258
7.7.	Pembatasan Kewenangan.....	283
7.8.	Daftar Pustaka.....	288
10	INDEX.....	294
11	TENTANG PENULIS.....	301

الله





BAB 1

PENDAHULUAN

Filsafat adalah suatu pemikiran kritis yang mempelajari hakekat kebenaran yang mendalam dalam kehidupan di dunia ini. Filsafat lahir dan mulai berkembang ketika manusia merasa kagum melihat situasi dan kondisi terhadap dunia sekelilingnya.

1.1. Pemikir Filsafat Pemerintahan

Filsafat Pemerintahan yang merupakan cabang ilmu baru yang harus dikembangkan oleh para ilmuwan. Ilmu ini gabungan dari dua ilmu yang saling berdiri sendiri. Oleh karena itu untuk membahas ilmu filsafat pemerintahan perlu hati-hati agar tidak menyimpang terlalu jauh dari harapan para ilmuwan.

Ada beberapa pakar yang menyumbangkan ide-ide mereka dan membantu membangun fondasi bagi filsafat pemerintahan yang kita miliki saat ini. *Niccolo Machiavelli*, seorang filsuf *Italia*, yang hidup dari tahun *1469 – 1527*, menjadi terkenal dengan ide dan konsep yang brilliant tentang pemerintahan. *Machiavelli* dalam bukunya *The Prince*, sebuah panduan tentang bagaimana memerintah yang didedikasikan untuk *Lorenzo de'*

Medici, penguasa *Florence* pada waktu itu, dengan jelas mengungkapkan konsepnya tentang apa yang dia pikir harus dilakukan seorang penguasa untuk dihormati dan dikagumi. *Machiavelli* percaya bahwa siapa pun yang memiliki kekuasaan memiliki hak untuk memerintah.^[1]

Thomas Hobbes (1588 – 1679) adalah seorang filsuf Inggris dalam bukunya *Leviathan* meninggalkan dengan sangat jelas dalam karyanya mengatakan bahwa agar pemerintah menjadi kuat, ia harus memiliki otoritas pusat yang kuat.^[2] Ide-idenya memiliki dampak besar pada “*Federalisme*” selama langkah pertama penciptaan hukum Amerika Serikat.

Thomas Woodrow Wilson (1856 – 1924) adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-28 (1913–1921), dalam karyanya yang berjudul “*The Study of Administration*” menegaskan bahwa reformasi di bidang pelayanan publik harus mencakup tidak hanya perubahan pada pegawai pemerintahan tetapi juga pada organisasi dan perubahan kantor pemerintah.^[3] Karya ini *Wilson* merupakan hasil dari study ilmu politik yang juga ilmu yang mempelajari ilmu pemerintahan yang lebih fokus pada praktik pemerintahan, seperti bagian eksekutif, operatif dan bagian yang terlihat dari pemerintahan. Fungsi pemerintah semakin hari semakin kompleks. Untuk itu administrasi harus mencakup hal-hal yang baru, seperti kegunaan, murah & pelayanan pemerintah. Ide suatu negara memiliki konsekuensi ideal berupa perubahan tercatat dan

^[1] Niccolo Machiavelli. (1921). An edition of *Il Principe* (1551). The Prince. This edition was published in 1921 by Oxford University Press in London.

^[2] Thomas Hobbes. *Leviathan* (Wisehouse Classics - The Original Authoritative Edition). Publisher Lightning Source Inc. Publication Date 15/10/2017. ISBN 9176374327.

^[3] Woodrow Wilson (1887), dalam Shafritz, Hyde, Parkes (2004). *Classic of Public Administration* fifth edition. USA: Thomson Wadsworth.

kesadaran beradministrasi. Itulah mengapa dibutuhkan ilmu administrasi, untuk menguatkan roda pemerintahan.

George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) adalah seorang pemikir besar Jerman sekaligus filsuf terkemuka dan berpengaruh abad 18-19. **Hegel** merumuskan bentuk negara ideal baginya, pandangannya tentang negara tersebut dapat dilihat pada dua karyanya yaitu *The Philosophy of History*^[4] dan *The Philosophy of Right*.^[5] Tentu saja pandangannya tentang negara tidak lepas dari sistem filsafat yang dibangunnya. **Hegel** menunjukkan bahwa hakekat manusia dimasukkan dan diwujudkan dalam kehidupan negara-bangsa. Menurutnya, negara-bangsa merupakan totalitas organik yang mencakup pemerintahan dan institusi lain yang ada dalam negara termasuk keseluruhan budayanya.^[6] **Hegel** juga menyatakan bahwa totalitas dari budaya bangsa dan pemerintahannya merupakan individu sejati. “Individu sejarah dunia adalah negara-bangsa”, maksudnya negara merupakan individu dalam sejarah dunia.

Karl Heinrich Marx(1818 – 1883) seorang filsuf,ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis dan sosialis revolusioner asal Jerman, mengelaborasi konsep birokrasi dengan menganalisa dan “*mengkritik*” falsafah **Hegel**. Menurut **Marx**, dalam bukunya *Teori Markis*, mengatakan bahwa negara itu tidak mewakili kepentingan umum, tetapi mewakili khusus dari kelas dominan.^[7] Dari perspektif ini, birokrasi merupakan kepentingan

^[4]Hegel and the Translator, J. Sibree, M.A. (With Prefaces by Charles) (.2001). The Philosophy of History Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Bathoce Books Kitchener. 2001

^[5]G.W.F. Hegel, Philosophy of Right § 3R (T.M. Knox trans., 1952) (1821).

^[6]Marx, K. and Engels, F. (1848).The Communist Manifesto

^[7]Karl Marx and Frederick Engels, "Demands of the Communist Party" contained in the Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume

partikular yang mendominasi kepentingan partikular lainnya. Kepentingan partikular yang memenangkan perjuangan kelas itulah yang dominan dan berkuasa.^{1 8 1} Birokrasi merupakan suatu instrumen dimana kelas dominan melaksanakan dominasinya atas kelas lainnya. Dalam hal ini kepentingan birokrasi pada tingkat tertentu menjalin hubungan intim dengan kelas dominan dalam suatu negara. Dari sinilah netral atau tidak netral birokrasi pemerintahan mulai dibicarakan.

Para perdebatan para pemikir dan ilmuwan tersebut di atas telah memberikan landasan kuat untuk berpikir tentang filsafat pemerintahan. Untuk membahas filsafat pemerintahan lebih lanjut, sebelum melangkah lebih lanjut akan dibahas "*filsafat*" itu sendiri. Mengapa harus dibahas tentang filsafat? Karena merupakan titik awal dari judul karya ini "*filsafat pemerintahan*". Maka filsafat harus dibahas terlebih dahulu. Dan selanjutnya akan diteruskan pembahasan tentang pemerintahan dan Filsafat pemerintahan, dan seterusnya.

1.2. Pengertian Filsafat

Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang berbagai masalah umum dan mendasar dengan menggunakan logika, metode, dan sistem tertentu. Filsafat sebenarnya merupakan konsep dasar mengenai kehidupan ke depan manusia. Dalam suatu masyarakat pemikiran filsafat dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebudayaan masing-masing, misal Masyarakat *Amerika* akan bertumbuh berkembang sesuai dengan kebudayaan Amerika dan orang ASIA akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kebudayaan orang ASIA.

7 (International Publishers: New York, 1977) pp. 3–6.

^[8]*Op.cit.* Hegel and the Translator, J. Sibree, M.A. (With Prefaces by Charles) (.2001). The Philosophy of History.

Sejatinya Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dapat dikatakan bahwa filsafat merupakan ilmu yang mengajarkan tentang hakekat kebenaran yang dilakukan oleh manusia.

Filsafat dari bahasa Yunani "*philosophia*" secara harfiah bermakna "*pecinta kebijaksanaan.*"^[9] Filsafat merupakan kajian masalah umum dan mendasar tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa.^[10] Istilah ini kemungkinan pertama kali diungkapkan oleh *Pythagoras (570–495 SM)*. Metode yang digunakan dalam filsafat antara lain mengajukan pertanyaan, diskusi kritis, dialektik, dan presentasi sistematis.^[11]

Bicara Filsafat tidak akan terlepas dari pemikiran *Pythagoras*. Ajaran yang paling jelas dikemukakan oleh *Pythagoras* adalah *metempsychosis*, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi, dan setelah kematian, jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru.^[12] *Pythagoras* mungkin juga merupakan penggagas doktrin *musica universalis*,^[13] yang menyatakan bahwa

[9] Strong's Greek: 5385. *Philosophia* -- The Love or Pursuit of Wisdom. Biblehub.com.

[10] A.C. Grayling, *Philosophy 1: A Guide through the Subject* (Oxford University Press, 1998), p. 12: "The aim of philosophical inquiry is to gain insight into questions about knowledge, truth, reason, reality, meaning, mind, and value."

[11] Adler, Mortimer J. (28 March 2000). *How to Think About the Great Ideas: From the Great Books of Western Civilization*. Chicago, Ill.: Open Court. ISBN 978-0-8126-9412-3.

[12] Caterina Pellò. *The Lives of Pythagoras: A Proposal for Reading Pythagorean Metempsychosis*. <https://doi.org/10.1515/rhiz-2018-0007..>

[13] Taliya Khafizova. Article "Pythagoras Musica Universalis Theory in Global and Human Perspective" *Gerne American University*. <https://www.academia.>

planet-planet bergerak sesuai dengan persamaan matematika, sehingga menghasilkan simfoni musik yang tak terdengar.^[14] Namun demikian para pakar masih memperdebatkan apakah ajaran numerologi dan musik yang dikaitkan dengan nama *Pythagoras* itu benar-benar dikembangkan olehnya atau merupakan ciptaan pengikutnya setelah ia meninggal, khususnya *Filolaos* dari *Kroton*.^[15] Setelah Kroton berhasil mengalahkan tetangganya *Sibaris* sekitar tahun 510 SM,^[16] para pengikut *Pythagoras* berkonflik dengan para pendukung demokrasi, dampaknya gedung pertemuan kaum *pythagoreanis* dibakar. *Pythagoras* mungkin gugur selama peristiwa ini atau lolos ke *Metapontum* sampai ajalnya di tempat tersebut.

Pada zaman kuno, nama *Pythagoras* dikaitkan dengan berbagai penemuan matematika dan ilmiah, seperti *teorema Pythagoras*, *lima bangun ruang*, *teori kesebandingan*, *teori bumi bulat*, dan *gagasan bahwa bintang timur dan barat adalah planet* yang sama, yaitu *Venus*. Konon ia juga adalah orang pertama yang menyebut dirinya sebagai *filosuf* atau "*pecinta kebijaksanaan*" dan membagi dunia menjadi lima zona iklim. Namun, para ahli sejarah klasik masih memperdebatkan apakah *Pythagoras* benar-benar telah membuat temuan-temuan ini, dan banyak pencapaian yang dikaitkan dengan namanya mungkin sudah ada sebelumnya atau dicetuskan oleh rekan atau penerusnya. Selain itu, masih diperdebatkan apakah ia benar-

^[14] *Ibid.* Taliya Khafizova. Article "Pythagoras Musica Universalis Theory in Global and Human Perspective.

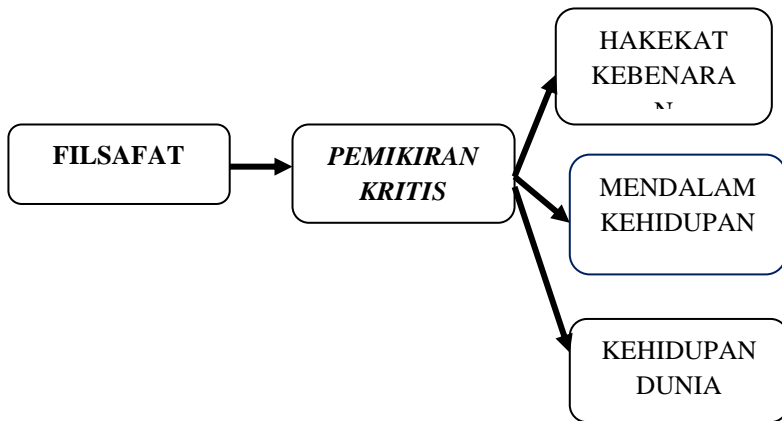
^[15] Philolaos is from Kroton. He was born around 470 BC.

^[16] Sybaris was an important city of Magna Graecia. It was situated on the Gulf of Taranto, in Southern Italy, between two rivers, the Crathis and the Sybaris.

benar telah bersumbangsih terhadap bidang matematika atau filsafat alam.

Pemikiran *Pythagoras* mempengaruhi *Plato*, dan dialog-dialog karya *Plato* khususnya *Timaios* menunjukkan pengaruh dari ajaran *pythagoreanisme*. Gagasan *pythagoreanisme* mengenai kesempurnaan matematis juga berdampak terhadap *seni Yunani Kuno*. Ajaran *pythagoreanisme* kembali bangkit pada abad pertama SM di kalangan penganut *platonisme* pertengahan, yang beriringan dengan kemunculan *neopythagoreanisme*. *Pythagoras* terus dianggap sebagai seorang filsuf ulung pada Abad Pertengahan, dan filsafatnya sangat berpengaruh terhadap ilmuwan seperti *Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, dan Isaac Newton*. Simbolisme *pythagoreanisme* juga digunakan oleh para pengamal *esoterisme* Barat modern, dan ajarannya seperti yang dirincikan dalam *Metamorphoses* karya penyair zaman Romawi *Ovidius* telah memengaruhi gerakan vegetarian modern.

Pengertian *Filsafat* menurut *Budi Supriyatno* “*adalah suatu pemikiran kritis yang mempelajari hakekat kebenaran yang mendalam dalam kehidupan di dunia ini*”. Makna dan hakekat dari definisi tersebut adalah *pertama* adanya pemikiran kritis yakni sebuah konsep pemikiran yang bisa diterima. *Kedua* adalah hakekat kebenaran mendalam yakni serangkaian konsep yang dipercayai dapat memecahkan masalah secara praktis. *Ketiga* dalam kehidupan di dunia artinya keberadaan manusia di dunia adalah sebuah takdir yang diciptakan Tuhan yang harus dijalankan sebaik-baiknya menjadi manusia yang berguna. Lihat Gambar 1.1. Filsafat dibawah ini.



Gambar 1.1. Filsafat oleh Budi Supriyatno

Sebagai referensi saya tampilkan beberapa Pengertian Filsafat menurut para pakar:

1. **Immanuel Kant (1724 -1804)**, yang sering disebut raksasa pemikir Barat, mengatakan, “Filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya empat persoalan, yaitu: metafisika, etika, antropologi.”^[17]
2. Menurut **Marcus Tullius Cicero (106 SM - 43SM)** ia seorang politikus dan ahli pidato Romawi, merumuskan,

*Filsafat adalah suatu pemikiran kritis yang mempelajari hakekat kebenaran yang mendalam dalam kehidupan di dunia ini.
Budi Supriyatno*

^[17] Immanuel Kant (1724 -1804) was a philosopher who was able to back seats the position of each of the sense and faith in their respective positions. Kant succeeded terminates modern sophistry. From this Kant have a place in the history of philosophy..

- “Filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya.”^[18]
3. **Plato (427SM-347SM)** seorang filsuf Yunani yang termasyhur murid **Socrates** dan guru **Aristoteles**, mengatakan “*Filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada (ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli).*”^[19]
 4. **Aristoteles (384 SM - 322SM)** mengatakan “Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika (filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda).”^[20]
 5. **Harold H. Titus**, menyatakan ”Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi.”^[21]
 6. **Bertrand Russel**, menyatakan “Filsafat adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah antara teologi dan sains. Sebagaimana teologi, filsafat berisikan pemikiran-pemikiran mengenai masalah-masalah yang pengetahuan definitif tentangnya, sampai sebegitu jauh, tidak bisa dipastikan;

^[18] Marcus Tullius Cicero (106 BC - 43SM) in the UK called "Tully" was born January 3 106 BC - died December 7, 43 BC, the philosopher, orator reliable skilled in rhetoric, lawyer, author, and the ancient Roman statesman who is generally regarded as Latin orator and prose style expert.

^[19] Plato was born around 427 BC - died around 347 BC) was a philosopher and mathematician, Greece, philosophical writer .

^[20] Aristotle (Greek: 'Αριστοτέλης Aristotle), (384 BC - 322 BC) was a Greek philosopher, a student of Plato and teacher of Alexander the Great.

^[21] Harold H. Titus, 1954. Ethic for Today, Published by New York, American Book Company.

namun, seperti sains, filsafat lebih menarik perhatian akal manusia daripada otoritas tradisi maupun otoritas wahyu.’^[22]

7. **Johan Gotlich Fickte**, menyatakan “Filsafat sebagai Wissens schäftslehre (ilmu dari ilmu-ilmu, yakni ilmu umum, yang jadi dasar segala ilmu. Ilmu membicarakan sesuatu bidang atau jenis kenyataan. Filsafat memperkatakan seluruh bidang dan seluruh jenis ilmu mencari kebenaran dari seluruh kenyataan.”^[23]
8. **Paul Nartorp**, menyatakan “Filsafat sebagai **Grunwissen- schat** (ilmu dasar hendak menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukkan dasar akhir yang sama, yang memikul sekaliannya.”^[24]

Sejatinya filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi dan memberikan argumentasi serta alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Filsafat merupakan pemikiran kritis yang mempelajari hakekat kebenaran yang mendalam dalam kehidupan di dunia ini.

^[22] Bertrand Arthur William Russell, 3rd Earl Russell (May 18, 1872- February 2, 1970) was a British philosopher, logician, mathematician, historian, and social. In 1950, he was awarded a Nobel Prize in Literature for Today, Published by New York, American Book Company.

^[23] Johann Gottlieb Fichte (German: May 19, 1762 – January 27, 1814) was a German philosopher. He was one of the founding figures of the philosophical.

^[24] Paul Nartorp, (live 1854 – 1924), Thinkers Philosophy of Science.

1.3. Permasalahan dan Cabang Filsafat

Filsafat lahir dan mulai berkembang ketika manusia merasa kagum melihat situasi dan kondisi terhadap dunia sekelilingnya. Kemudian mereka berpikir dan bertanya. Oleh karena itu, filsafat pada dasarnya adalah pemikiran reflektif, yang bersifat mamantulukan dalam arti menengok diri sendiri. Filsafat selalu bertanya dan mencari jawaban terhadap berbagai masalah yang sangat menganggumkan manusia sejak dahulu sampai sekarang. Beberapa hal yang sangat menganggumkan secara sistematis dapat dibedakan menjadi 6 (enam) jenis permasalahan sebagai berikut:

1. **Permasalahan Metafisikis.** *Permasalahan metafisi adalah permasalahan* berkaitan dengan keberadaan segala sesuatu di dalam alam semesta ini.
2. **Permasalahan Epistemologis.** Permasalahan epistemologis adalah permasalahan yang menyangkut asal mula pengetahuan.
3. **Permasalahan Metodologis.** Permasalahan metodologi adalah permasalahan yang berpusat pada metode memperoleh pengetahuan.
4. **Permasalahan Logis.** Permasalahan logis adalah permasalahan yang berkaitan dengan penalaran yang benar.
5. **Permasalahan etis.** Permasalahan etis adalah permasalahan yang berkaitan dengan moralitas manusia yang baik atau buruk pada perilaku yang benar atau salah pada tindakan manusia.
6. **Permasalahan estetis.** Permasalahan estetis adalah permasalahan yang berkaitan pada keindahan.

Berdasarkan enam jenis permasalahan di atas, "**bidang pengetahuan filsafat**" dibagi secara sistematis dalam enam cabang yaitu: *metafisika, epistemology, metodologi, logika, estika dan estetika*. Sebuah cabang yang ke tujuh yang harus ditambahkan

yaitu segi *sejarah*. Sejarah dari filsafat yang memotong secara melintang dari enam cabang itu, maupun sejarah menurut urutan waktu dan berdasarkan pembagian negara. Ke tujuh cabang filsafat membentuk seluruh bidang pengetahuan filsafat sistematis yang dibedakan dengan filsafat khusus dan keilmuan. Ketujuh *cabang filsafat* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Metafisika.** *Aristoteles* sebagai filsuf mempertahankan bahwa obyek metafisika yang tepat adalah kenyataan, keberadaan dan alam semesta.^[25] Secara tradisional, metafisika dicirikan sebagai bidang studi yang paling fundamental, paling komprehensif dan sepenuhnya kritis terhadap diri sendiri dibandingkan dengan semua bidang studi lainnya. Dalam perkembangannya yang terakhir ada filsuf yang berpendapat bahwa metafisika harus membahas manusia dalam kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakekat manusia dan pentingnya dalam alam semesta. Sedangkan *J. Donald Butler* menekankan pentingnya studi tentang manusia sebagai suatu lain dari metafisika dengan menyatakan bahwa manusia merupakan obyek studi yang penting dalam metafisika karena ia memiliki kedudukan khas sebagai subyek dan obyek.^[26]
2. **Epistemolog.** Epistemologi merupakan studi filsafat terhadap pengetahuan, khususnya kemungkinan asal mula, validitas, batas dasar dan segi-segi pengetahuan lainnya yang berkaitan. Dalam *the encyclopedia of philosophy*, **Epistemolog** didefinisikan sebagai cabang filsafat dengan sifat dasar dan

[25] Aristotle, “*Metaphysics*” Translated by W. D. Ross. This web edition published by eBooks@Adelaide. Last updated Wednesday, February 26, 2014 at 10:17. The University of Adelaide Library. University of Adelaide.

[26] James F. Armstrong, *J Donald Butler. A tribute (1908-1994)*. *This Memorial minute*, was Prepared by James F. Armstrong.

ruang lingkup dari pengetahuan, pra anggapan dan dasar-dasarnya serta reliabilitas umum dari tuntutan akan pengetahuan.^[27] Epistemologi adalah setua filsafat itu sendiri dan **Plato** dapat dikatakan sebagai penciptannya atau bapak dari **Epistemolog**.

3. **Metodologi**. Cabang filsafat ini menunjukkan pada studi filsafat tentang metode pada umumnya. Metodologi menurut **Budi Supriyatno** adalah *suatu tata cara yang dirancang dan dipakai dalam proses memperoleh pengetahuan*.^[28] Permasalahan metodologis dapat timbul tidak hanya dalam filsafat, melainkan juga dalam bidang berbagai ilmu dapat dibedakan menjadi metodologi filsafat dan metodologi ilmiah. Banyak filsuf yang menyadari bahwa tidak ada metode yang khas bagi filsafat, **William James** dalam bukunya *“Some Problems of Philosophy: A Beginning of an Introduction to Philosophy (1911)”*, mengatakan bahwa para filsuf dapat mempergunakan sesuatu apapun secara bebas.^[29]
4. **Logika**. Logika dapat dicirikan sebagai suatu teori tentang penyimpulan deduktif dengan aturan-aturan penyimpulan yang syah. **Logika** berasal dari kata Yunani kuno **logos** yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Menurut **Aristoteles**, logika adalah

^[27] The Encyclopedia of Philosophy © Copyright Internet Encyclopedia of Philosophy and its Authors ISSN 2161-0002.

^[28] Budi Supriyatno. (2018). Metodologi Ilmu Pengetahuan. Artikel. Oktober 2017

^[29] William James (1911), *Some Problems of Philosophy: A Beginning of an Introduction to Philosophy (1911)*, University of Nebraska Press 1996: ISBN 0-8032-7587-02.

- ajaran mengenai berpikir ilmiah yang masih ada hubungannya dari bentuk pikiran itu sendiri serta berbagai hukum yang menguasai pikiran.^[30] Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa diartikan dengan “*masuk akal*”. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang objek materialnya adalah berpikir dengan penalaran, dan objek formal logika adalah penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Logika lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani. Dalam usaha untuk menaruh pikiran-pikirannya serta pendapat-pendapatnya, filsuf-filsuf Yunani kuno tidak jarang mencoba membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan penalarannya. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi juga bisa dianggap sebagai cabang matematika. Logika tidak bisa dihindarkan dalam proses hidup mencari kebenaran. Konsep bentuk “*logis*” adalah inti dari logika. Konsep itu menyatakan bahwa kesahihan sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Dalam hal ini logika menjadi alat untuk menganalisis argumen, yakni hubungan antara kesimpulan dan bukti-bukti yang diberikan. Logika silogistik tradisional *Aristoteles* dan logika simbolik modern adalah contoh-contoh dari logika formal. Dasar penalaran dalam logika ada dua, yakni *deduktif* dan *induktif*.
5. *Etika*. Etika adalah merupakan studi yang meliputi persoalan “*moralitas*” pada umumnya. Dua istilah lain yang diterima adalah filsafat moral dan filsafat etis.

^[30] Aristotle’s Logic. Stanford Encyclopedia of Philosophy. First published Sat Mar 18, 2000; Substantive Revision Fri Feb 17, 2017.

6. *Estetika* secara tradisional dinyatakan sebagai cabang filsafat yang meliputi “*keindahan*” dan hal-yang indah pada alam dan seni. Pada permulaannya, satu-satunya konsep kunci dari estetika adalah keindahan. *Thomas Aquina*, mengatakan estetika ilmiah atau modern adalah penelaahan intelektual sangat bermacam-macam yang memanfaatkan semua ilmu yang relevan dari sumber lain untuk membahas seni dan peranannya yang berubah-ubah dalam peradaban.^[31]
7. *Sejarah Filsafat*. Sejarah filsafat adalah penulisan yang teliti terhadap sistem-sistem filsafat, penafsiran yang kritis dari pemikiran para filsuf terhadap persoalan filsafat dan cerita yang benar mengenai perkembangan filsafat dari masa ke masa.

Permasalahan dan cabang dapat disimpulkan sebagai berikut: metafisika, epistemology, metodologi, logika, estika dan estetika. Dan sejarah merupakan cabang ke tujuh.

1.4. Perkembangan Filsafat Dunia

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat ini tidak bisa dilepaskan dari peran dan pengaruh filsafat. Kelahiran filsafat mempunyai peran penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini. Sejarah perkembangan filsafat sangatlah perlu untuk dikaji, agar semua orang bisa paham, bagaimana pengaruh filsafat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.

^[31] Thomas Aquinas adalah seorang filsuf dan teolog yang terkenal pada abad pertengahan. Pemikiran Aquinas yang terkenal adalah merumuskan etika dan doktrin gereja. Pemikiran yang berasal dari ajaran Agustinus dan filsafat Aristoteles yang sangat berpengaruh dalam pemikiran di Eropa pada saat itu.

Filsafat Barat

Filsafat Barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia Barat atau *Occidental*. Pada umumnya filsafat terdiri dari dua garis besar, yaitu Filsafat Barat dan Filsafat Timur. Filsafat Barat berbeda dengan Filsafat Timur atau *Oriental*.^[32]

Permulaan dari sebutan Filsafat Barat ini dari keinginan untuk mengarah kepada pemikiran peradaban Barat. Masa awalnya dimulai dengan filsafat *Yunani Kuno*.^[33] Pada masa ini sebagian besar bumi sudah dicakup, termasuk *Amerika Utara* dan *Australia*. Penentuan wilayah yang menjadi bagian dalam menentukan aliran mana sebuah pemikiran atau falsafah itu lahir menimbulkan perdebatan. Perdebatan terjadi untuk menentukan wilayah seperti Afrika Utara, sebagian besar Timur Tengah, Rusia, dan lainnya.^[34] Dalam arti kontemporer, *Filosofi Barat* merujuk pada dua tradisi utama filsafat kontemporer: *filsafat analitik* dan *filsafat kontinental*.^[35]

Filsafat Barat adalah tradisi filosofis dunia Barat dan berasal dari pemikir *Pra-Sokrates* yang aktif di *Yunani Kuno* pada abad ke 6 SM. Seperti *Thales* sekitar *624-546 SM* dan *Pythagoras sekitar (570-495 SM)* yang mempraktikkan "*cinta kebijaksanaan*"^[36] dan juga disebut *physiologi* (murid *physis*, atau alam). *Socrates* adalah seorang filsuf yang sangat berpengaruh, yang bersikeras bahwa dia tidak memili-

[32] Robert Audi.1995. The Cambridge Dictionary Of Philosophy.Cambridge University Press:United Kingdom. Page. 580-617.

[33] Ibid. Robert Audi.1995. page.580-617.

[34] Ibid. Robert Audi.1995. page.580-617.

[35] Ibid. Robert Audi.1995. page.580-617.

[36] Hegel, Georg Wilhelm Friedrich; Brown, Robert F. (1 January 2006). Lectures on the History of Philosophy: Greek philosophy. Clarendon Press. hlm. 33. ISBN 978-0-19-927906-7.

ki *kebijaksanaan* tapimerupakan *pengejar* kebijaksanaan.^[37]

Filsafat Barat dapat dibagi menjadi tiga *era: Kuno yaitu Yunani-Romawi, Filsafat Abad Pertengahan yaitu Eropa Kristen, dan Filsafat Modern.*

1. *Yunani-Romawi* didominasi oleh ajaran filsafat Yunani yang muncul dari beberapa murid *Socrates*, seperti *Plato* yang mendirikan Akademi Platonis. Plato merupakan salah satu pemikir Yunani yang paling berpengaruh dalam keseluruhan pemikiran Barat.^[38] Murid *Plato, Aristoteles* juga sangat berpengaruh, ia mendirikan Sekolah Peripatetik. Tradisi lain termasuk *Sinisisme, Stoikisme, Skeptisisme, Yunani* dan *E pikureanisme*. Topik-topik penting yang dibahas oleh orang-orang Yunani termasuk metafisika dengan teori-teori yang kompeten seperti atomisme dan monisme, kosmologi, sifat kehidupan yang baik, kemungkinan pengetahuan dan sifat akal budi. Dengan bangkitnya kerajaan Romawi, filsafat Yunani juga semakin banyak dibahas dalam bahasa Latin oleh para filsuf Roma seperti *Cicero* dan *Seneca*.
2. *Filsafat Abad Pertengahan (abad ke 5 - 16)* adalah periode setelah jatuhnya kekaisaran Romawi Barat dan didominasi oleh bangkitnya kekristenan dan karenanya mencerminkan keprihatinan teologis *Yudeo-Christian* dan juga mempertahankan kontinuitas dengan pemikiran *Yunani-Romawi*. Masalah seperti keberadaan dan sifat Tuhan, sifat iman dan akal, metafisika, masalah kejahatan dibahas dalam periode ini. Beberapa pemikir utama Abad Pertengahan mencakup *St.Agustinus, Thomas Aquinas, Boethius, Anselm* dan *Roger Bacon*. Filsafat bagi para pemikir ini

^[37] Plato's "Symposium". www.perseus.tufts.edu. hlm. 201d and following. Diakses tanggal 22 April 2016.

^[38] *Ibid.* Plato's "Symposium". www.perseus.tufts.edu. hlm. 201.

dipandang sebagai penyokong untuk *Teologi (ancilla theologiae)* dan karena itu mereka berusaha menyelaraskan filsafat mereka dengan interpretasi mereka terhadap kitab suci. Periode ini mencetuskan perkembangan *Skolastikisme*, sebuah metode kritikal teks yang dikembangkan di universitas abad pertengahan berdasarkan pembacaan dan perdebatan yang dekat pada teks-teks kunci. *Periode Renaisans (1355-1650)* lebih melihat peningkatan fokus pada pemikiran klasik Yunani-Romawi dan pengaruh humanisme yang kuat.

3. *Filsafat Modern*. Filsafat Modern awal di dunia Barat dimulai dengan pemikir seperti *Thomas Hobbes* dan *René Descartes* tahun 1596-1650.^[39] Setelah perkembangan ilmu alam, filsafat modern lebih terfokus mengembangkan landasan pengetahuan sekuler dan rasional, beralih dari struktur otoritas tradisional seperti agama, pemikiran skolastik dan Gereja. Filsuf modern utama meliputi *Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume*, dan *Kant*.^[40] Filsafat abad ke-19 dipengaruhi oleh gerakan yang lebih luas yang disebut *the Enlightenment*,^[41] dan termasuk tokoh-tokoh seperti *Hegel* tokoh kunci dalam *idealisme Jerman*, *Kierkegaard* yang mengembangkan fondasi untuk

^[39] Diane Collinson. Fifty Major Philosophers, A Reference Guide. page. 125.

^[40] Rutherford, The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy, p. 1: "Most often this [period] has been associated with the achievements of a handful of great thinkers: the so-called 'rationalists' (Descartes, Spinoza, Leibniz) and 'empiricists' (Locke, Berkeley, Hume), whose inquiries culminate in Kant's 'Critical philosophy.' These canonical figures have been celebrated for the depth and rigor of their treatments of perennial philosophical questions..."

^[41] The Age of Enlightenment was an intellectual and philosophical movement that dominated the world of ideas in Europe during the 17th and 18th centuries.

eksistensialisme,^[42] *Nietzsche* seorang anti-Kristen yang terkenal,^[43] *JS Mill* yang mempromosikan *Utilitarianisme*, *Karl Marx* yang mengembangkan fondasi untuk *Komunisme*^[44] dan orang Amerika *William James* yang terkenal sebagai salah seorang pendiri *Mazhab Pragmatisme*.^[45] Abad ke 20 menjadi saksi perpecahan antara *filsafat analitik* dan *filsafat kontinental*, serta tren filosofis seperti *fenomenologi*, *eksistensialisme*, *Positivisme Logis*, *Pragmatisme* dan *Linguistik*.

Filsafat Timur

Filsafat Timur merupakan sebutan bagi pemikiran filosofis yang berasal dari dunia Timur atau Asia, seperti Filsafat Tiongkok, Filsafat India, Filsafat Jepang, Filsafat Islam, Filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Masing-masing jenis filsafat merupakan suatu sistem-sistem pemikiran yang luas dan plural.^[46] Misalnya saja,

^[42] Soren Kierkegaard is a figure of existentialism who first introduced the term "existence" first in the 20th century, Kirkegaard has the view that the entire reality of existence can only be experienced subject to human beings, and presupposes that truth is an individual who exists..

^[43] Nietzsche's philosophical bent was toward existentialism; he was one of the few existentialists to confess that, without God, life has no ultimate meaning (i.e., nihilism) and no objective moral values. With respect to morality, Nietzsche admitted, "You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist" (paraphrased from Thus Spoke Zarathustra, trans. by Walter Kaufmann, Penguin Books, 1966, p. 195).

^[44] Karl Marx was the first communist figure who was born in 1818 and came from Germany. Marx is very well known for his thoughts on socialism and communism. Marx is also famous for his book entitled *Das Kapital* which was published in 1867.

^[45] William James (11 January 1842 – 26 August 1910) was an American philosopher, best known as one of the founders of Pragmatism School.

^[46] Oliver Leaman.2000. *Eastern Philosophy:Key Readings*.London: Routledge.

filsafat India dapat terbagi menjadi filsafat Hindu dan filsafat Buddhisme, sedangkan filsafat Tiongkok dapat terbagi menjadi *Konfusianisme* dan *Taoisme*.^[47] Belum lagi, banyak terjadi pertemuan dan percampuran antara sistem filsafat yang satu dengan yang lain, misalnya *Buddhisme* berakar dari *Hinduisme*, namun kemudian menjadi lebih berpengaruh di Tiongkok ketimbang di India. Di sisi lain, filsafat Islam malah lebih banyak bertemu dengan filsafat Barat^[48] Akan tetapi, secara umum dikenal empat jenis filsafat Timur yang terkenal dengan sebutan "*Empat Tradisi Besar*" yaitu *Hinduisme*, *Buddhisme*, *Taoisme*, dan *Konfusianisme*.^[49]

Filsafat Timur memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan filsafat Barat, yang mana ciri-ciri agama terdapat juga di dalam filsafat Timur, sehingga banyak ahli berdebat mengenai dapat atau tidaknya pemikiran Timur dikatakan sebagai filsafat.^[50] Di dalam studi post-kolonial bahkan ditemukan bahwa filsafat Timur dianggap lebih rendah ketimbang sistem pemikiran Barat karena tidak memenuhi kriteria filsafat menurut filsafat Barat, misalnya karena dianggap memiliki unsur keagamaan atau mistik. Akan tetapi, sekalipun di antara filsafat Timur dan filsafat Barat terdapat perbedaan-perbedaan, namun tidak dapat dinilai mana yang lebih

[47] Taoisme & Konfusianisme - The Creme De La Creme dari Filsafat Tiongkok dan Kemajuan Ekonomi. Diunduh dari: <http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/item/264-taoisme--konfusianisme-the-creme-de-la-creme-dari-filsafat-tiongkok-dan-kemajuan-economi>.

[48] *Op.cit.* Oliver Leaman. 2000. *Eastern Philosophy: Key Readings*. London: Routledge.

[49] Jay Stevenson. 2000. *The Complete's Idiot's Guide to Eastern Philosophy*. Macmillan: Alpha Books..

[50] Ray Billington. 1997. *Understanding Eastern Philosophy*. London: Routledge.

baik, sebab masing-masing memiliki keunikannya sendiri.^[51] Selain itu, keduanya diharapkan dapat saling melengkapi khazanah filsafat secara luas.

Filsafat Asia (Buddha)

Filsafat **Buddha** diawali dengan pemikiran **Buddha Gautama** antara abad keenam dan keempat SM dan dipelihara dalam teks Buddhis awal. Pemikiran Buddhis bersifat *trans-regional dan trans-budaya*. Pemikiran ini berasal dari **India** dan kemudian menyebar ke **Asia Timur, Tibet, Asia Tengah, dan Asia Tenggara**, mengembangkan tradisi baru dan sinkretik di wilayah-wilayah yang berbeda tersebut. Beberapa aliran pemikiran Buddhis adalah tradisi filosofis yang dominan di **Tibet** dan negara-negara Asia Tenggara seperti **Sri Lanka** dan **Burma**. Filsafat Buddhis berkaitan dengan *epistemologi, metafisika, etika* dan *psikologi*. Akhir dari *dukkha* juga mencakup praktik meditasi.

Konsep inovatif utama meliputi **Empat Kebenaran Mulia, Anatta** bukan diri sendiri, sebuah kritik terhadap identitas pribadi tetap, ketidakkekalan (**Anicca**), dan sebuah *skeptisisme* tentang pertanyaan metafisik. Tradisi filosofis Buddhis kemudian mengembangkan psikologi fenomenologis kompleks yang disebut "**Abhidharma**".

Filsuf **Mahayana** seperti **Nagarjuna** dan **Vasubandhu** mengembangkan *teori Shunyata* yaitu *kekosongan semua fenomena* dan *Vijnapti-matra* yaitu penam pakan saja, sebuah bentuk fenomenologi atau idealisme transendental. Ajaran **Dignāga Pramāṇa** mempro mosikan bentuk kompleks epistemologi dan *logika Buddhis*. Setelah lenyapnya **Buddhisme** dari

^[51] Tim Redaksi Driyarkara. 1993. *Jelajah Hakikat Pemikiran Timur*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

India, tradisi filosofis ini terus berkembang dalam *tradisi Buddha Tibet, Buddha Asia Timur, dan Buddha Theravada*. Pada periode modern muncul kebangkitan *Modernisme Buddhisme* dan *Buddhisme Humanistik* di bawah pengaruh Barat dan perkembangan Buddhisme Barat dengan pengaruh dari psikologi modern dan filsafat Barat.

Filsafat Timur Tengah (Islam)

Mesir dan *Arab* adalah cikal bakal bagi filosofi literatur yang paling awal dikenal, dan saat ini sebagian besar didominasi oleh budaya Islam. Literatur kebijaksanaan awal dari daerah ini adalah aliran yang berusaha menginstruksikan orang untuk melakukan tindakan etis, kehidupan praktis dan kebajikan melalui cerita dan amsal. Di *Mesir Kuno*, teks-teks ini dikenal sebagai *sebayt (ajaran)* dan ini sangat penting bagi pemahaman kita tentang filsafat Mesir Kuno.

Astronomi Babilonia juga memasukkan banyak spekulasi filosofis tentang kosmologi yang mungkin telah mempengaruhi orang Yunani Kuno. Filosofi Yahudi dan filsafat Kristen adalah tradisi religius-religius yang berkembang baik di Timur Tengah maupun di Eropa, yang keduanya memiliki teks *Yudaik* awal tertentu dan kepercayaan monoteistik. Pemikir *Yahudi* seperti *Geonim* dari *Akademi Talmud di Babilonia* dan *Maimonides* terlibat dengan filsafat Yunani dan Islam. Kemudian *filsafat Yahudi* berada di bawah pengaruh intelektual Barat yang kuat dan mencakup karya *Musa Mendelsohn* yang mengantarkannya ke *Haskalah (the Jewish Enlightenment)*, *eksistensialisme Yahudi* dan *Yudaisme Reformasi*.

Filsafat Iran pra-Islam dimulai dengan karya *Zoroaster*, salah satu promotor pertama monoteisme dan dualisme antara yang baik dan yang jahat. Kosmogoni dualistic ini kemudian

mempengaruhi perkembangan filsafat Iran seperti *Manikheisme*, *Mazdakisme*, dan *Zurvanisme*. Setelah penaklukan Muslim, filsafat Islam awal mengembangkan tradisi filosofis Yunani dalam arah inovatif baru.

Zaman Keemasan Islam ini mempengaruhi perkembangan intelektual Eropa. Dua arus utama pemikiran Islam awal adalah *Kalam* yang berfokus pada teologi Islam dan falsafah yang didasarkan pada *Aristotelianisme* dan *Neoplatonisme*. Karya *Aristoteles* sangat berpengaruh di kalangan para ahli falsafah seperti *al-Kindi* (*abad ke-9*), *Ibnu Sina* (*980 - 10*) dan *Ibnu Rusyd* (*abad ke-12*). Yang lainnya seperti *Al-Ghazali* sangat kritis terhadap metode falsafah *Aristoteles*.

Pemikir Islam juga mengembangkan metode ilmiah, kedokteran eksperimental, teori optik dan filosofi hukum. *Ibn Khaldun* adalah seorang pemikir berpengaruh dalam filsafat sejarah. Di Iran, Mesir beberapa sekolah filsafat Islam terus berkembang setelah Zaman Keemasan dan mencakup berbagai arus seperti filsafat iluminasi, filsafat Sufi, dan teosofi transenden. Pada abad 19 dan 20 dunia Arab menjadi saksi dari *Nahda* yaitu kebangkitan, atau pencerahan yang mempengaruhi filsafat Islam kontemporer.

Filsafat dari Berbagai Negara

Bebragai negara ditemukan filosofi yang mengabdikan diri menjadi manusia bijak dan menyumbangkan pemikiran yang baik dalam dunia filsafat. Misalnya Filsafat Amerika, Filsafat Afirka, Filsafat Tiongkok, Fisafat India dan Fisafat Indonesia. Masih banyak lagi namun karena keterbatasan, maka hnnya menampilkan lima filsafat legara tersebut.

Filsafat Amerika

Filsafat Amerika pribumi adalah filosofi Penduduk Asli Amerika. Ada berbagai macam kepercayaan dan tradisi di antara budaya Amerika yang berbeda ini. Di antara beberapa penduduk asli Amerika di Amerika Serikat ada kepercayaan akan prinsip metafisik yang disebut "*Misteri Besar*" Konsep lain yang tersebar luas adalah *Orenda* atau "*kekuatan spiritual*". Menurut *Peter M. Whiteley*, untuk penduduk asli Amerika, "*Pikiran secara kritis diberitahu oleh pengalaman transendental (mimpi, penglihatan dan sebagainya) dan juga oleh akal.*"^[52] Praktik untuk mengakses pengalaman transendental ini disebut *Shamanisme*. Syamanisme adalah ajaran yang berdasarkan keyakinan bahwa roh yang ada di sekeliling manusia dapat menyusup dalam tubuh seorang *Syaman* (yaitu dukun atau tukang sihir) dalam upacara.^[53] Ciri lain dari pandangan dunia Amerika asli adalah perpanjangan etika mereka terhadap hewan dan tumbuhan non-manusia.^[54]

Di *Mesoamerika*, *filsafat Aztec* adalah tradisi intelektual yang dikembangkan oleh individu yang disebut *Tlamatini*^[55] mereka yang mengetahui sesuatu dan gagasannya dipelihara dalam berbagai kodeks *Aztec*. Pandangan dunia *Aztec* mengemukakan konsep energi universal atau kekuatan universal yang disebut *Ometeotl* yang dapat diterjemahkan sebagai "*Energi Kosmik ganda*" dan mencari cara untuk hidup seimbang dengan

[52] Whiteley; Native American philosophy, <https://www.rep.routledge.com/articles/native-american-philosophy/v-1>

[53] <http://kateglo.com/?mod=dictionary&action=view&phrase=syamanisme>

[54] Pierotti, Raymond; Communities as both Ecological and Social entities in Native American thought, <http://www.se.edu/nas/files/2013/03/5thNAScommunities.pdf>

[55] Miguel León: Use of "Tlamatini" in Aztec Thought and Culture: A Study of the Ancient Nahuatl Mind – Miguel León Portilla". Google Books. Diakses tanggal December 14 Juli 2021.

dunia "*licik yang terus berubah*". Teori dapat dilihat sebagai bentuk *Panteisme*.^[56] *Filsuf Aztec* mengembangkan teori metafisika, epistemologi, nilai, dan estetika. *Etika Aztec* difokuskan untuk mencari *tlamatiliztli* yaitu pengetahuan, kebijaksanaan yang didasarkan pada moderasi dan keseimbangan dalam semua tindakan seperti dalam pepatah Nahuatl "*kebaikan tengah sangat diperlukan*".^[57]

Peradaban Inca juga memiliki kelas elit filsuf-cendekiawan yang berperan penting dalam sistem pendidikan *Inca* sebagai guru agama, tradisi, sejarah dan etika. Konsep kunci pemikiran *Andean* adalah *Yanantin* dan *Masintin* yang melibatkan teori "*saling berlawanan komplementer*" yang melihat polaritas seperti laki-laki/perempuan, gelap/terang sebagai bagian dari keseluruhan yang harmonis.^[58]

Filsafat Afrika

Filsafat Afrika adalah filsafat yang dihasilkan oleh orang Afrika, filsafat yang menyajikan pandangan, gagasan dan tema dunia Afrika, atau filsafat yang menggunakan metode filosofis Afrika yang berbeda. Pemikiran modern Afrika telah disibukkan *Etnofilosofi*, dengan mendefinisikan makna filsafat Afrika beserta karakteristiknya yang unik dan apa arti dari menjadi orang Afrika.^[59]

Selama abad ke-17, filsafat Etiopia mengembangkan tradisi

^[56] IEP, Aztec Philosophy, <http://www.iep.utm.edu/aztec/>.

^[57] *Ibid.* IEP, Aztec Philosophy, <http://www.iep.utm.edu/aztec/>.

^[58] Webb, Hillary S.; Yanantin and Masintin in the Andean World: Complementary Dualism in Modern Peru Hardcover – March 15, 2012.

^[59] Bruce B. Janz, Philosophy in an African Place (2009), pp. 74–79, Plymouth, UK: Lexington Books, <https://books.google.com/books?isbn=0739136682>

sastra kuat seperti yang dicontohkan oleh *Zera Yacob*.^[60] Filsuf Afrika awal lainnya, *Anton Wilhelm Amo (lahir 1703-1759)* menjadi filsuf terhormat di Jerman.^[61] Ide filosofis Afrika yang berbeda antara lain: *Ujamaa*, gagasan Bantu tentang "**Kekuatan**", *Négritude*, *Pan Afrikanisme* dan *Ubuntu*.^[62] Pemikiran Afrika kontemporer juga mencakup perkembangan filsafat Profesional dan filsafat Afrikana, literatur filosofis diaspora Afrika yang mencakup arus eksistensialisme hitam oleh orang Afrika-Amerika. Pemikir Afrika modern telah dipengaruhi oleh *Marxisme*, *sastra Afrika-Amerika*, *teori kritis*, *teori ras kritis*, *Postkolonialisme* dan *Feminisme*.^[63]

Filsafat Tiongkok

Filsafat Tiongkok dimulai pada masa *Dinasti Zhou Barat* dan pada periode berikutnya setelah dinasti tersebut jatuh, yaitu ketika "*Seratus Aliran Pemikiran*" berkembang pada abad ke-6 sampai tahun 221 SM.^[64] Periode ini ditandai oleh perkembangan intelektualisme dan budaya yang signifikan dan bangkitnya ajaran filosofis utama di *China*, *Konfusianisme*, *legalisme*, dan *Taoisme* dan juga banyak ajaran lain yang kurang berpengaruh.

^[60] Zera Yacob was a seventeenth-century Ethiopian philosopher from the city Aksum.

^[61] Anton Wilhelm Amo or Anthony William Amo (1703 – 1759) was a philosopher from what is now Ghana.

^[62] Michael Jennings. *Ujamaa*.

<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190277734.013.172>. Published online: 26 September 2017.

^[63] Bruce B. Janz, *Philosophy in an African Place* (2009), pp. 74–79, Plymouth, UK: Lexington Books, <https://books.google.com/books?isbn=0739136682>.

^[64] Ebrey, Patricia (2010). *The Cambridge Illustrated History of China*. Cambridge University Press. hlm. 42.

Tradisi filosofis ini mengembangkan teori metafisik, politik dan etika seperti *Tao*, *Yin* dan *Yang*, *Ren* dan *Li Yang* bersama dengan *Buddhisme Tiongkok*, secara langsung mempengaruhi *filsafat Korea*, *filsafat Vietnam* dan *filsafat Jepang* yang mencakup *tradisi asli Shinto*.

Buddhisme mulai berdatangan di Tiongkok selama *Dinasti Han* pada 206 SM-220 M, melalui transmisi Jalur Sutra secara bertahap dan melalui pengaruh asli yang mengembangkan bentuk bahasa China yang berbeda seperti *Chan/Zen* yang tersebar di seluruh budaya Asia Timur. Selama dinasti Tiongkok berikutnya seperti *Dinasti Ming* pada 1368-1644 dan juga di *dinasti Joseon* pada 1392-1897 sebuah *kebangkitan Neo-Konfusianisme* yang dipimpin oleh para pemikir seperti *Wang Yangming* pada 1472-1529 menjadi ajaran pemikiran dominan yang dipromosikan oleh otoritas kekaisaran.

Di era Modern, pemikir Tiongkok memasukkan gagasan dari filsafat Barat. *Filsafat Marxis* Tiongkok berkembang di bawah pengaruh *Mao Zedong*, sementara pragmatisme Tiongkok berkembang di bawah *Hu Shih* dan *Konfusian Baru* meningkat dipengaruhi oleh *Xiong Shili*.

Filsafat India

Filsafat India dalam bahasa Sanskerta *dar'sana*: "pandangan dunia" atau "ajaran"^[65] adalah tradisi filosofis yang berasal dari anak benua India. Tradisi filsafat India umumnya diklasifikasikan sebagai ortodoks atau heterodoks - *āstika* atau *nāstika* -tergantung pada apakah mereka menerima otoritas *Weda* dan apakah mereka menerima teori *Brahman* dan *Atman*.^[66]

[65] Sanskrit. Einführung in die heilige Sprache Indiens". www.asien.net.

[66] Sanskrit. Einführung in die heilige Sprache Indiens". www.asien.net.

Aliran ortodoks umumnya mencakup *Nyaya*, *Vaisheshika*, *Samkhya*, *Yoga*, *Mīmāṃsā* dan *Vedanta*, dan aliran heterodoks yang umum antara lain: *Jain*, *Buddhis*, *Ajñana*, *Ajivika* dan *Cārvāka*. Beberapa teks filosofis yang paling awal bertahan adalah *Upanishad* dari Akhir periode *Veda* (1000-500 SM). Konsep filosofis India yang penting antara lain: *dharma*, *karma*, *samsara*, *moksha* dan *ahimsa*.

Filsuf India mengembangkan sebuah sistem penalaran *epistemologis (pramana)* dan logika, topik yang diselidiki antara lain *metafisika*, *etika*, *hermeneutika* dan *soteriologi*. Filosofi India juga meliputi topik seperti filsafat politik sebagaimana yang terlihat dalam *Arthashastra c. Abad ke-4 SM*, dan filosofi cinta seperti yang terlihat dalam *Kama Sutra*.

Enam aliran ortodoks yang umum dijumpai muncul pada awal Era Umum dan *Kekaisaran Gupta*.^[67] Aliran Hindu ini berkembang dari "*Hindu sintesis*" penggabungan *ortodoks brahmanikal* dan *elemen nir ortodoks* dari Buddhisme dan jainisme sebagai cara untuk menanggapi tantangan nir ortodoks.^[68]

Pemikiran Hindu juga menyebar ke timur hingga Kerajaan Sriwijaya di Indonesia dan Kekaisaran Khmer di Kamboja. Perkembangan selanjutnya meliputi pengembangan *Tantra* dan pengaruh Iran-Islam.

Buddhisme sebagian besar hilang dari India setelah penaklukan Muslim di benua India, mereka bertahan di wilayah Himalaya dan India selatan.^[69] Pada periode modern awal

[67] Students' Britannica India (2000), Volume 4, Encyclopædia Britannica, ISBN 978-0852297605, p. 316

[68] Hildebeitel, Alf (2007), Hinduism. In: Joseph Kitagawa, "The Religious Traditions of Asia: Religion, History, and Culture", Routledge.

[69] Garfield & Edelglass. The Oxford Handbook of World Philosophy, Chinese.

terjadi perkembangan *Navya-Nyāya* “*alasan baru*” di bawah filsuf seperti *Raghunatha Siromani (C.1460-1540)* yang mendirikan tradisi, *Jayarama Pancanana, Mahadeva Punatamakara dan Yashovijaya* yang merumuskan sebuah solusi Jain.^[70]

Pada era modern awal terjadi kebangkitan nasionalisme Hindu, gerakan reformasi Hindu dan *Neo-Vedanta* atau modernism Hindu yang pendukung utamanya memasukkan *Vivekananda, Mahatma Gandhi* dan *Aurobindo* dan untuk pertama kalinya mempromosikan gagasan tentang “*Hinduisme bersatu*”. Karena pengaruh kolonialisme Inggris, kebanyakan karya filosofis India modern ada dalam bahasa Inggris, termasuk karya pemikir seperti *Radhakrishnan, Krishna Chandra Bhattacharya, Bimal Krishna Matilal dan M. Hiriyanna*.

Filsafat Indonesia

Filsafat Indonesia adalah sebutan umum untuk tradisi kefilosofatan yang dilakukan oleh penduduk yang mendiami wilayah yang disebut Indonesia. Filsafat Indonesia diungkap dalam pelbagai bahasa yang hidup dan masih dituturkan di Indonesia (sekitar 587 bahasa) dan “*bahasa persatuan*” *Bahasa Indonesia* meliputi aneka mazhab pemikiran yang menerima pengaruh Timur dan Barat, disamping tema-tema filosofisnya yang asli.

Istilah *Filsafat Indonesia* berasal dari judul sebuah buku yang ditulis oleh *M. Nasroen*,^[71] yang di dalamnya ia menelusuri unsur-unsur filosofis dalam kebudayaan Indonesia. Semenjak itu, istilah tersebut kian populer dan mengilhami banyak penulis

^[70]Ganeri, Jonardon; *The Lost Age of Reason Philosophy In Early Modern India 1450–1700*, Oxford U. press.

^[71]Nasroen, M. (1967). *Falsafah Indoensia*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang. hlm. 14, 24, 25, 33, 38.

sesudahnya.

Para pakar filsafat Indonesia mendefinisikan kata "*Filsafat Indonesia*" secara berbeda, dan itu menyebabkan perbedaan dalam lingkup kajian Filsafat Indonesia. *M. Nasroen* tidak pernah menjelaskan definisi kata itu. Ia hanya menyatakan bahwa "*Filsafat Indonesia*" adalah bukan Barat dan bukan Timur, sebagaimana terlihat dalam konsep-konsep dan praktik-praktik asli dari *mupakat, pantun-pantun, Pancasila, hukum adat, gotong-royong, dan kekeluargaan*.^[72] *Sunoto* mendefinisikan "*Filsafat Indonesia*" sebagai *kekayaan budaya bangsa kita sendiri yang terkandung di dalam kebudayaan sendiri*,^[73] sementara *Parmono* mendefinisikannya sebagai *pemikiran-pemikiran yang tersimpul di dalam adat istiadat serta kebudayaan daerah*.^[74] *Sumardjo* mendefinisikan kata *Filsafat Indonesia* sebagai *pemikiran primordial... atau pola pikir dasar yang menstruktur seluruh bangunan karya budaya*.^[75]

Sedangkan penulis *Budi Supriyatno* mencoba memberikan definisi *Filsafat Indonesia adalah adalah suatu pemikiran kritis yang mempelajari hakekat kebenaran yang mendalam tentang budaya daerah, kehidupan dan perilaku manusia di Indonesia*. Dari pengertian ada beberapa makna sebagai berikut: *pertama* filsafat Indonesia merupakan pemikiran yang kritis. *Kedua* filsafat Indonesia mempelajari hakekat kebenaran yang mendalam tentang budaya Indonesia. *Ketiga* filsafat Indonesia juga

^[72] *Ibid.* Nasroen, M. (1967). Falsafah Indoensia.

^[73] Sunoto.(1987). Menuju Filsafat Indonesia. Yogyakarta: Hanindita Offset. 1987. page. ii.

^[74] Parmono. (1985). Menggali Unsur-Unsur Filsafat Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset. 1985. hlm. iii.

^[75] Sumardjo, Jakob (2003). Mencari Sukma Indonesia. Yogyakarta: AK Group. hlm. 22–23, 25, 53, 58

mempelajari kehidupan dan perilaku manusia Indonesia.

Sejatinya memahami filsafat Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan dan tidak membedakannya dengan kajian-kajian budaya dan antropologi. Secara kebetulan, *Bahasa Indonesia* sejak awal memang tidak memiliki kata "*filsafat*" sebagai entitas yang terpisah dari teologi, seni, dan sains. Sebaliknya, orang Indonesia memiliki kata generik, yakni, *budaya* atau *kebudayaan*, yang meliputi seluruh manifestasi kehidupan dari suatu masyarakat. Filsafat, sains, teologi, agama, seni, dan teknologi semuanya merupakan wujud kehidupan suatu masyarakat, yang tercakup dalam makna kata *budaya* tadi. Biasanya orang Indonesia memanggil filsuf-filsuf mereka dengan sebutan *budayawan*.^[76]

1.5. Mazhab Pemikiran Filsafat

Kata "*mazhab*" berasal dari bahasa *Arab*, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Mazhab Pemikiran Filsafat adalah sekumpulan orang yang berbagai karakteristik pandangan yang sama mengenai filsafat, disiplin, keyakinan, gerakan sosial, ekonomi, gerakan budaya, atau gerakan seni.

Mazhab sering kali dicirikan oleh eranya masing-masing, dan dengan demikian digolongkan ke dalam mazhab "*baru*" dan "*lama*". Dalam bidang pemikiran filsafat dan pemerintahan, terdapat sebuah kemufakatan untuk memiliki mazhab pemikiran "*modern*" atau "*klasik*". Contohnya adalah modern dan liberal klasik. Dikotomi ini sering kali merupakan komponen dari pergeseran paradigma. Meskipun demikian, dalam bidang tertentu, jarang terjadi hanya terdapat dua mazhab.

[76] Alisjahbana, S. Takdir (1977). Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia Ditinjau dari Jurusan Nilai-Nilai. Jakarta: Yayasan Idayu. hlm. 6-7.

Mazhab-mazhab sering kali dinamai berdasarkan pendirinya, semisal "*Mazhab Rinzai*" dalam kepercayaan *Zen* yang mengambil nama *Linji Yixuan*^[77] dan *Mazhab Asy'ariyah* dalam bidang *filsafat Islam awal* yang mengambil nama *Abu al-Hasan al-Asy'ari*.^[78] Mereka juga sering kali dinamai berdasarkan tempat bermulanya, semisal *the Mazhab Ionia* dalam bidang *filsafat yang dirintis di Ionia*^[79] dan *Mazhab Chicago* dalam bidang *arsitektur yang dirintis di Chicago, Illinois*^[80] dan *Mazhab Praha* dalam bidang linguistika, yang mengambil nama lingkaran linguistik yang ditemukan di *Praha*,^[81] atau *Mazhab Semiotika Tartu-Moskwa* yang perwakilannya menetap di *Tartu* dan *Moskwa*.^[82] Kategorisasi mazhab didasarkan pada tiga hal:

1. *Pada segi keaslian* yang dimaksud suatu *mazhab filsafat* tertentu seperti pada *mazhab etnik*.
2. *Pada Segi pengaruh yang diterima oleh suatu mazhab filsafat tertentu* seperti mazhab Tiongkok, mazhab India,

^[77] Línjì Yìxúan (Lin-chi I-hsüan; Japanese: Rinzai Gigen) (789–866) was the founder of the Linji school of Chán Buddhism during Tang Dynasty China..

^[78] Abul Hasan al-Asy'ari was born in 260 H/873M and died in 935 AD. Please note, He went through three marhalah (phases) in his life. The first phase: He believed in Mu'tazilah, was educated by his stepfather, Abu Ali al-Jubba'i, in Mu'tazilah education. He was in this Mu'tazilah faith for forty years.

^[79] Ionia is a land of unspoiled beauty and natural magic. Its inhabitants, living in scattered settlements across this massive island continent, are a spiritual people who seek to live in harmony and balance with the world.

^[80] Miami-Illinois: Shikaakwa; Anishinaabemowin: ZhigaagongCarrico, Natalya. "We're still here". *Chicago Reader*. Retrieved January 12, 2021.

^[81] Media related to Praha, Lučenec District at Wikimedia Commons. **Praha** is a village and municipality in the Lučenec District in the Banská Bystrica Region of Slovakia.

^[82] Moscow Population 2011 - The Russia Blog". Siberian Light. 5 Mei 2011. Diakses tanggal 12 Maret 2013.

- mazhab Islam, mazhab Kristiani, dan mazhab Barat), dan
3. *Pada kronologi historis*, seperti mazhab mazab colonial, orde lama, orde baru dan orde reformasi.

Berikut ini adalah sketsa mazhab-mazhab pemikiran dalam Filsafat Indonesia dan filsuf-filsuf mereka yang utama.

1. ***Mazhab Etnik***. Mazhab Etnik adalah suatu mazhab yang anggotanya atau kelompok etnisnya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama.^[83] Asumsi utamanya ialah mitologi, legenda, cerita rakyat, cara suatu kelompok etnis membangun rumahnya dan menye-lenggarakan upacara-upacaranya, sastra yang mereka hasilkan, epik-epik yang mereka tulis, semuanya melandasi bangunan filsafat etnis tersebut. "***Filsafat***" ini tidak dapat berubah; senantiasa sama, dari awal-mula hingga akhir dunia, dan senantiasa merupakan "***yang baik***". Filsafat ini mengajarkan setiap anggota kelompok etnis tersebut tentang asal-mula lahirnya kelompok etnis itu ke dunia (bahasa Jawa, *sangkan*) dan tentang tujuan (*telos*) hidup yang akan dicapai kelompok etnis itu (bahasa Jawa, *paran*), sehingga anggotanya tidak akan sesat dalam hidup. Mazhab ini melestarikan filsafat-filsafat etnis yang asli, karena filsafat itu telah dianut erat oleh anggota etnis sebelum mereka berhubungan dengan tradisi filosofis asing yang datang kemudian. Kebanyakan tokoh mazhab ini berasumsi bahwa orang Indonesia

^[83] R v Smith, [1987] 1 S.C.R. 1045 is a leading Supreme Court of Canada decision. The Court struck down a mandatory seven-year sentence requirement for the importation of drugs as a violation of the right against cruel and unusual punishment contrary to section 12 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms

kontemporer berada pada posisi **“buta”** terhadap nilai-nilai asli mereka. **Jakob Sumardjo**, berpandangan bahwa banyak orang Indonesia sekarang ***lupa melestarikan nilai-nilai asli mereka dan lupa masa-lalu, lupa asal-mula, mereka seperti orang hilang-ingatan yang mengabaikan sejarah nasional mereka sendiri.***^[84] Akibatnya, mereka terasingkan, teralienasi dari **“budaya-budaya ibu mereka.”**^[85] Gagalnya kebijakan pendidikan Indonesia, bagi **Jakob**, disebabkan oleh **“kebutaan”** terhadap budaya asli Indonesia ini.^[86] Karena itu, misi penting dari mazhab filsafat ini ialah menggali, mengingat, dan menghidupkan-kembali nilai-nilai etnis yang asli, karena nilai-nilai merupakan **“ibu” (lokalisasi adalah ibu manusia)**, sedangkan manusia ialah **“bapak”** keberadaan (***balita ialah bapak manusia.***)^[87]

2. **Mazhab Tiongkok.** Para filsuf etnik masih menganut filsafat mereka yang asli hingga kedatangan migrant Tiongkok antara tahun **1122-222 SM.** yang membawa-serta dan memperkenalkan **Taoisme** dan **Konfusianisme** kepada mereka.^[88] Dua filsafat asing itu bersama filsafat lokal saling bercampur dan berbaur; begitu tercampurnya, sehingga filsafat itu tak dapat lagi diceraiberaikan.^[89] Salah satu dari sisa baurnya filsafat-filsafat tadi, yang hingga kini

^[84] Jacob Sumardjo (2000). Filsafat Seni. Published 2000 by Penerbit ITB. Page. 23-25.

^[85] *Ibid.* Jacob Sumardjo (2000). page.53.

^[86] *Ibid.* Jacob Sumardjo (2000). page.58.

^[87] *Ibid.* Jacob Sumardjo (2000). page.22.

^[88] Larope, J. (1986). IPS Sejarah. Surabaya: Penerbit Palapa. hlm. 4.

^[89] SarDesai, D.R. (1989). Southeast Asia: Past & Present. San Fransisco: Westview Press. hlm. 9-13.

masih dipraktikkan oleh semua orang Indonesia, adalah ajaran *Hsiao* dari *Konghucu* yaitu *menghormati orang tua*. Ajaran itu menegaskan bahwa seseorang harus menghormati orangtuanya melebihi apapun. Ia harus mengutamakan orangtuanya sebelum ia mengutamakan orang lain. Mazhab Tiongkok kelihatan eksklusif, karena semata banyak dikembangkan oleh sedikit anggota etnis Tiongkok di Indonesia. Meskipun demikian, filsafat yang disumbangkan oleh mazhab ini bagi tradisi kefilosofan di Indonesia, sangat penting. *Sun Yat-senisme*, *Maoisme*, dan *Neo-maoisme* merupakan filsafat-filsafat penting yang menyebar-luas seantero Indonesia pada awal 1900-an. Filsuf-filsuf utama dari mazhab ini, di antara yang lainnya, adalah: *Tjoe Bou San*, *Kwee Hing Tjiat*, *Liem Koen Hian*, *Kwee Kek Beng*, dan *Tan Ling Djie*.

2. *Mazhab India*. Mazhab India adalah pembauran filsafat terus berlanjut bersamaan dengan kedatangan kaum *Brahmana Hindu*^[90] dan penganut *Buddhisme* dari *India* antara tahun 322 SM-700 M.^[91] Mereka memperkenalkan kultur Hindu dan kultur Buddhis kepada penduduk asli, sementara penduduk asli meresponinya dengan

^[90] J.C. Van Leur's (1974). Teori Mahan dan Sejarah Kepulauan Indonesia (Terjemahan Karangan-karangan Belanda). Published 1974 by Bhratara. Teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. van Leur. Ia berpendapat bahwa Hindunisasi di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana, golongan pemuka agama di India. Menurutnya, para penguasa mengundang para Brahmana India untuk keperluan upacara keagamaan sekaligus untuk mengangkat status sosial mereka.

^[91] Hiorth, Finngeir (1983). Philosophers in Indonesia: Southeast Asian Monograph Series No.12. Townsville: James Cook University of North Queensland. hlm. 4. ISBN 0-86443-083-3.

menyintesa dua filsafat India itu menjadi satu versi baru, yang terkenal dengan sebutan *Tantrayana*.^[92] Pengertian *tantrayana* adalah aliran Budha esoterik yang berdasarkan pada ajaran tantra. Tantra secara harfiah berarti benang, yang dalam perkembangannya mengalami pergeseran arti menjadi gulungan kertas, kitab, atau tradisi yang menggenggam segala sesuatu, termasuk aturan, ajaran, ritual, tata bahasa, dan filsafat. Ini jelas tercermin pada bangunan *Candi Borobudur* oleh *Dinasti Sailendra* pada *tahun 800-850 M*.^[93] *Rabindranath Tagore, seorang filsuf India* yang mengunjungi Borobudur pertama kalinya, mengakui candi itu sebagai candi yang *tidak-India*, karena relik-relik yang dipahatkan padanya merepresentasikan pekerja-pekerja lokal yang berbusana gaya Jawa asli.^[94] Ia juga mengakui bahwa tarian-tarian asli Jawa yang terilhami dari epik-epik India tidak menyerupai tarian-tarian India, meskipun tarian-tarian dua negeri tersebut bersumber dari sumber yang sama. *Konghucu* dan *Buddhisme* dua filsafat yang saling berlawanan di India bersama-sama dengan filsafat Jawa asli

^[92] Tsong-kha-pa Blo-bzang-grags-pa, (2005). *Tantric ethics : an explanation of the precepts for Buddhist Vajrayāna practice* (edisi ke-1st Wisdom ed). Boston, Mass.: Wisdom Publications. ISBN 0861712900. OCLC 60664335.

^[93] Dinasti Sailendra adalah dinasti yang berkuasa di Jawa khususnya pada Kerajaan Mataram Kuna Periode tahun 800-850 M di Jawa Tengah. Dinasti ini menurunkan raja-raja besar yang memerintahkan pembangunan candi-candi kerajaan berukuran besar seperti Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Kalasan, Candi Mendut, Candi Lumbung dan lain-lain..

^[94] Rabindranath Tagore juga dikenal dengan nama Gurudev adalah seorang Brahma Samaj, penyair, dramawan, filsuf, seniman, musikus dan sastrawan Bengali. Ia terlahir dalam keluarga Brahmana Bengali, yaitu Brahmana yang tinggal di wilayah Bengali, daerah di anakbenua India antara India dan Bangladesh.

dapat didamaikan di Indonesia oleh kejeniusan *Sambhara Suryawarana*, *Mpu Prapanca*, dan *Mpu Tantular*.

3. **Mazhab Islam.** Mazhab Islam sepuluh abad proses Indianisasi ditantang oleh kedatangan *Sufisme Persia*, dan Sufisme mulai mengakar dalam perbincangan kefilosofatan sejak awal tahun 1400-an hingga seterusnya. Perkembangan Sufisme itu dipicu oleh berdirinya kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan Islam yang masif di Indonesia.^[95] Raja-raja dan sultan-sultan seperti *Sunan Giri*, *Sunan Bonang*, *Sunan Kalijogo*, *Sunan Kudus*, *Sultan Trenggono*, *Sunan Gunungjati*, *Pakubuwana II*, *Pakubuwana IV*, *Sultan Ageng Tirtayasa*, *Sultan Alauddin Ri'ayat Syah*, *Engku Haji Muda Raja Abdullah Riau hingga Raja Muhammad Yusuf* adalah *raja-sufi*; mereka mempelajari Sufisme dari guru-guru Sufi terkemuka.^[96] Sufisme di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua kelompok: *Ghazalisme*^[97] dan *Ibn Arabisme*.^[98] *Ghazalisme* utamanya terinspirasi oleh ajaran-ajaran Al-Ghazali, sedangkan *Ibn Arabisme* dari doktrin-doktrin *Ibn Arabi*. Sufi-sufi dari jalur *Al-Ghazali* seperti *Nuruddin Al-Raniri*, *Abdurrauf Al-*

^[95] Nasr, Syed Hossein (1991). *Islamic Spirituality II: Manifestations*. New York: Crossroad. hlm. 262, 282–287

^[96] Pengaruh Islam terhadap Budaya Jawa dan Sebaliknya: Seri Kliping Perpustakaan Nasional dalam Berita Vol.II No.1. Jakarta: Sub Bagian Humas Perpustakaan Nasional RI. 2001. hlm. 12–39.

^[97] al-Ghazâlî, 1506, *Logica et philosophia Algazelis Arabis*, Venice: P. Liechtenstein. Reprint Frankfurt (Germany): Minerva, 1969.

^[98] Anqâ mughrib fî khatm al-awliyâ' wa shams al-maghrib, G. T. Elmore (trans.), *Islamic Sainthood in the Fullness of Time: Ibn al-'Arabi's Book of the Fabulous Gryphon*, Leiden: E. J. Brill, 1999.

Singkeli,^[99] *Abd al-Shamad Al-Palimbangi*,^[100] dan *Syekh Yusuf Makassar*,^[101] sementara yang dari jalur *Ibn Arabi* adalah *Hamzah Al-Fansuri*,^[102] *Al-Sumatrani*,^[103] *Syekh Siti Jenar*.^[104] *Wahhabisme-Arab* juga pernah diadopsi oleh *Raja Pakubuwana IV*^[105] dan *Tuaniku Imam Bonjol*,^[106]

^[99] Syaikh Abdurrauf bin Ali al Fansuri al Singkeli atau Singkili (1620-1693), seorang ulama ahli fiqh dan tasawuf yang beraliran Syathariyah serta bermadzab Ahlu sunnah wal jamaah.

^[100] Abd al-Shamad al-Palembani, Ulama Nusantara yang Mendamaikan Ibn 'Arabi dan Al-Ghazali. Nama lengkapnya Sayyid Abd Al-Shamad Al-Palembani bin Abd Al-Rahman Al-Jawi, lahir di Palembang pada tahun 11116H/1704M.

^[101] Syekh Yusuf merupakan ulama besar dari Sulawesi yang berperan besar dalam dakwah di Afrika.

^[102] Hamzah al-Fansuri atau dikenal juga sebagai Hamzah Fansuri adalah seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-16. Ia berasal dari Barus' ada pula sarjana yang berpendapat ia lahir di Ayutthaya, ibukota lama kerajaan Siam.

^[103] Syeikh Syamsuddin Al-Sumatrani:: Sheikh Shamsuddin al-Sumatrani yang hidup abad 16-17 Masihi. Beliau adalah Sheikhu Islam atau Mufti besar Aceh semasa zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Sayyid al-Mukammil (1589-1604).

^[104] Sri Susuhunan Pakubuwana IV (lahir: Surakarta, 1768 – wafat: Surakarta, 1820) adalah raja ketiga Kasunanan Surakarta yang memerintah tahun 1788 – 1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus, karena naik takhta dalam usia muda dan berwajah tampan..

^[105] Syeikh Syamsuddin Al-Sumatrani:: Sheikh Shamsuddin al-Sumatrani yang hidup abad 16-17 Masihi. Beliau adalah Sheikhu Islam atau Mufti besar Aceh semasa zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Sayyid al-Mukammil (1589-1604).

^[106] Tuaniku Imam Bonjol (lahir di Bonjol, Luhak Agam, Pagaruyung, 1772 – wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lotta, Pineleng, Minahasa, 6 November 1864) adalah salah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padi pada tahun 1803–1838.

yang misi utamanya ialah menghapus *Sufisme* dan menggantikannya dengan ajaran-ajaran *Quranik*.^[107] Di saat Modernisme Islamik, yang memiliki program yaitu menyintesis ajaran-ajaran Islam dengan filsafat Pencerahan Barat, dimulai oleh *Muhammad Abduh* dan *Jamaluddin Al-Afghani* di Mesir tahun 1800-an, maka muslim-muslim di Indonesia juga mengadopsi dan mengadaptasinya. Ini tampak jelas dalam karya-karya yang dihasilkan oleh *Syaikh Ahmad Khatib, Syaikh Thaher Djalaluddin, Haji Abdul Karim Amrullah, Kyai Ahmad Dahlan, Mohammad Natsir, Oemar Said Tjokroaminoto, Haji Agus Salim, Haji Misbach*, dan lain-lain.^[108]

4. *Mazhab Barat*. Mazhab Barat sejak pemerintah kolonial Belanda di Indonesia menerapkan “*Politik Hati Nurani*” (*Politik Etis*) pada awal tahun 1900-an, lembaga-lembaga pendidikan bergaya Belanda menjamur dimana-mana dan terbuka untuk anak-anak pribumi dari kelas-kelas feodal, yang hendak bekerja di lembaga-lembaga kolonial. Sekolah-sekolah berbahasa Belanda itu mengajarkan Filsafat Barat sebagai mata-pelajarannya. Misalnya Filsafat Pencerahan-filsafat yang diajarkan secara amat terlambat di Indonesia, setelah 5 abad kemunculannya di Eropa.^[109] Banyak alumni sekolah tersebut yang melanjutkan studi mereka di universitas-universitas Eropa. Mereka lantas muncul sebagai kelompok elit baru di Indonesia yang

^[107] Perkembangan Kebatinan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang. 1971. hlm. 62–64.

^[108] Noor, Deliar (1996). Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES.

^[109] Larope, J. (1986). IPS Sejarah. Surabaya: Penerbit Palapa. hlm. 4.

merupakan generasi pertama *intelligentsia* bergaya Eropa, yang kelak menganut Filsafat Barat untuk menggantikan filsafat etnik mereka yang asli. Filsafat Barat mengilhami banyak lembaga sosio-politis Indonesia modern. Pemerintahan Republik Indonesia, konstitusinya serta distribusi kekuasaan (*distribution of power*), partai politik dan perencanaan ekonomi nasional jangka-panjang, semuanya dilakukan atas model Barat. Bahkan ideologinya "*Pancasila*" terinspirasi dari ideal-ideal Barat tentang humanisme, demokrasi- sosial, dan sosialisme nasional *Nazi Jerman*, seperti yang tampak dalam pidato-pidato anggota Badan Pemeriksa Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945.^[110] Fakta ini menggiring pada kesimpulan, bahwa "*Indonesia Modern*" dibangun di atas cetak-biru Barat. Sangat menarik untuk diamati, bahwa meskipun elit itu menganut Filsafat Barat sepenuh hati, mereka masih merasa perlu mengadaptasikan filsafat itu kepada kegunaan dan situasi Indonesia yang kontemporer dan konkret. Misalnya, *Soekarno*, yang mengadaptasi demokrasi Barat dengan situasi rakyat Indonesia yang masih berjiwa feodalistik, sehingga ia menciptakan apa yang kemudian disebut *Demokrasi Terpimpin*.^[111] *D.N. Aidit* dan *Tan Malaka* mengadaptasikan *Marxisme-Leninisme* dengan situasi Indonesia^[112] dan *Sutan Syahrir* yang mengadaptasikan Demokrasi-Sosial dengan konteks Indonesia.^[113]

[110] Risalah Sidang 1995:10-79).

[111] Di Bawah Bendera Revolusi. Jakarta: Panitia Penerbitan. 1963. hlm. 376.

[112] Aidit, D. N. (1964). The Indonesian Revolution and The Immediate Tasks of Communist Party of Indonesia. Beijing: Foreign Languages Press. hlm. i-iv.

[113] Rae, Lindsay (1993). McIntyre, Angus, ed. "Sutan Syahrir and the Failure

5. **Mazhab Kristiani.** Mazhab Kristiani melalui ajaran Kristen mendarat di Indonesia menurut catatan ensiklo-pedia dicatat jelas keberadaannya pada abad ke-10 dan ke-11.^[114] Pertama-tama yang datang ialah pedagang-pedagang Portugis, lalu kapitalis-kapitalis Belanda yang berturut-turut menyebarkan ajaran Katolik dan ajaran *Calvin*.^[115] *Fransiskus Xaverius*, pewarta Katolik pertama dari *Spanyol* yang menumpang kapal Portugis, menerjemahkan *Credo, Confession Generalis, Pater Noster, Ave Maria, Salve Regina*, dan *Sepuluh Perintah Tuhan* ke bahasa Melayu antara tahun 1546-1547, yang melaluinya ajaran Katolik dapat disebar-luaskan kepada penduduk Hindia Belanda.^[116] Gereja-gereja Katolik pun didirikan dan penganut Katolik Indonesia berjejalan, namun tak lama kemudian para pastor Katolik diusir dan umatnya dipaksa untuk pindah ke *Kalvinisme* oleh penganut-penganut Calvin Belanda yang datang ke Indonesia pada sekitar tahun 1596. Gereja Reformasi Belanda didirikan sebagai gantinya. *Jan Pieterszoon Coen*, salah seorang Gubernur-Jenderal VOC tahun 1618, adalah contoh dari penganut *Kalvinis* yang saleh. Ia mendudukkan semua pewarta

of Indonesian Socialism". Indonesian Political Biography: In Search of Cross-Cultural Understanding. Monash University: 46.

[114] Adolf Heuken, "Chapter One: Christianity in Pre-Colonial Indonesia", dalam A History of Christianity in Indonesia, Jan Arintonang and Karel Steenbrink (Editor), hlm. 3-7, Leiden/Boston: Brill, 2008, ISBN 978-90-04-17026-1.

[115] "Calvin" Archived 21 September 2015 at the Wayback Machine. Random House Webster's Unabridged Dictionary.

[116] Lubis, Mochtar (1990). Indonesia: Land Under the Rainbow. Singapore City: Oxford University Press. hlm. 78, 85, 99.

Kalvinis di bawah kendalinya.^[117] Sekolah-sekolah Katolik bergaya Portugis-Hispanik dan lembaga-lembaga pendidikan Kalvinis bergaya Belanda terbuka untuk penduduk Hindia Belanda. Tidak hanya diajarkan teologi di dalamnya, tapi juga Filsafat Kristen. Satu sekolah lalu menjadi beribu-ribu jumlahnya. Hingga kini masih ada universitas-universitas swasta Katolik dan Protestan yang mengajarkan Filsafat Kristen di dalamnya. Misioner-misioner dan pewarta-pewarta Injil dari Barat yang telah bertitel *Master* dalam bidang filsafat dari universitas Eropa, berdatangan untuk memberikan kuliah pada universitas Kristen Indonesia.^[118] Dari universitas-universitas tersebut keluarlah banyak lulusan yang menguasai Filsafat Kristen, seperti *Leo Kleden, Nico Syukur Dister, J.B. Banawiratma, Franz Magnis-Suseno, Paulus Budi Kleden, Ignaz Kleden, Kondrat Kebung, Robert J. Hardawiryana, Y.B. Mangunwijaya, TH. Sumartana, Martin Sinaga*, dan lain-lain.

1.6. Tujuan dan Manfaat Filsafat

Menurut *Harold H. Titu*, filsafat adalah suatu usaha memahami alam semesta, maknanya dan nilainya. Apabila tujuan ilmu adalah kontrol, dan tujuan seni adalah kreativitas, kesempurnaan, bentuk keindahan komunikasi dan ekspresi, maka tujuan filsafat adalah pengertian dan kebijaksanaan (*understanding and wisdom*).^[119]

^[117] Lubis, Mochtar (1990). Indonesia: Land Under the Rainbow. Singapore City: Oxford University Press. hlm. 78, 85, 99.

^[118] Hiorth, Finngeir (1983). Philosophers in Indonesia: Southeast Asian Monograph Series No.12. Townsville: James Cook University of North Queensland. hlm. 4. ISBN 0-86443-083-3.

^[119] Harold H. Titu. (1970). Living Issues in Philosophy. Published by New York : Van Nostrand Reinhold Co.

Radhakrishnan dalam bukunya, *History of Philosophy*, menyebutkan, tugas filsafat bukanlah sekadar mencerminkan semangat masa ketika kita hidup, melainkan membimbingnya maju. Fungsi filsafat adalah kreatif, menetapkan nilai, menetapkan tujuan, menentukan arah dan menuntun pada jalan baru. Filsafat hendaknya mengilhamkan keyakinan kepada kita untuk menopang dunia baru, mencetak manusia-manusia yang menjadikan penggolongan-penggolongan berdasarkan “*nation*”, ras, dan keyakinan keagamaan mengabdikan kepada cita mulia kemanusiaan. Filsafat tidak ada artinya sama sekali apabila tidak universal, baik dalam ruang lingkungannya maupun dalam semangatnya.^[120]

Berbeda dengan pendapat *De Vos* berpendapat bahwa *filsafat tidak hanya cukup diketahui, tetapi harus dipraktikkan dalam hidup sehari-hari. Orang mengharapkan bahwa filsafat akan memberikan kepadanya dasar-dasar pengetahuan, yang dibutuhkan untuk hidup secara baik. Filsafat harus mengajar manusia, bagaimana ia harus hidup secara baik. Filsafat harus mengajar manusia, bagaimana ia harus hidup agar dapat menjadi manusia yang baik dan bahagia.*^[121]

Sedangkan *Budi Supriyatno* berpendapat bahwa *tujuan filsafat adalah mencari hakikat kebenaran sesuatu, baik dalam logika, maupun etika.* Sejatinya tujuan filsafat adalah *mencari kebenaran* orang untuk berfikir objektif atas dasar yang jelas. Contohnya, ketika kita melihat manusia tapi hanya melihat dari postur tubuhnya atau fisiknya seperti tampang ganteng atau cantik

^[120] Sarvepalli Radhakrishnan (1953). *History of Philosophy Eastern and Western Volume 2 Hardcover* – January 1, 1953 Published by George Allen & Unwin.

^[121] George A. De Vos and Walter H. Slote (1998). *Confucianism and The Family* (Sunny Series in Chinese Philosophy and Culture. Published by State University of New York Press (July 10, 1998).

saja, tanpa melihat perilaku maka kita akan gagal menggunakan filsafat dalam berfikir. Karena filsafat bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Secara lebih rinci tujuan filsafat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. ***Menjadikan manusia bisa mendidik dan membangun diri sendiri.*** Maknanya bahwa sifat watak atau karakter manusia yang mendalami filsafat akan sadar dalam menjalani kehidupan yang mampu menahan diri dari kepentingan subyektif untuk menjadikan hidup yang lebih obyektif. Sehingga bisa mencapai kehidupan yang bebas dan terasa sampai mendalam dalam arti lahir batin. Manusia yang berusaha mempertahankan sikap yang obyektif terhadap diri sendiri, manusia tersebut pantas di sebut "***berkepribadian***", semakin mendekati kesempurnaan, dan semakin memiliki "***kebijaksanaan***".
2. ***Menjadikan manusia dapat berpikir sendiri.*** Dengan berpikir filsafat menjadi orang bisa "***berdiri sendiri***" mandiri terutama dalam kerohanian, mempunyai pendapat sendiri. Jika perlu dapat dipertahankan dan menyempurnakan arah manusia berpikir secara kritis, dan mencari kebenaran dalam apa yang dikatakan orang baik dalam buku-buku maupun dalam informasi lainnya baik.
3. ***Menjadi pedoman.*** Filsafat bisa menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalkankan kehidupan yang baik. Bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk.
4. ***Mendorong pada calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya.*** Mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan.

Manfaat Filafat

Manfaatnya filsafat adalah sebagai alat mencari kebenaran dari gejala fenomena yang ada, mempertahankan, menunjang dan berdiri netral terhadap pandangan ilmu lainnya. Memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup dan pandangan dunia. Memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan itu sendiri, seperti ekonomi, politik, hukum, pemerintahan dan lain-lain.

Dari uraian tersebut di atas, manfaat filsafat dapat dijabarkan yang lebih detail lagi seperti berikut adalah :

1. Berfilsafat filsafat diharapkan manusia akan mampu dan dapat berpikir sendiri secara benar, baik dan bijak.
2. Berfilsafat akan menjadi manusia mampu lebih mendidik diri, dan akan lebih membangun diri sendiri lebih baik.
3. Bagi seorang pendidik yang berfilsafat akan mempunyai peran yang istimewa karena dengan filsafat akan mampu memberikan dasar-dasar dari ilmu pengetahuan lainnya yang dikuasai oleh seorang pendidik, baik ilmu mendidik, ilmu pemerintahan maupun ilmu lainnya.
4. Berfilsafat hidup manusia akan dipimpin oleh pengetahuan, sehingga mengetahui kebenaran-kebenaran yang menjadi dasar-dasar kehidupan sendiri.
5. Berfilsafat memberikan dasar-dasar pengetahuan manusia yang dapat memberikan pandangan yang luas sehingga seluruh pengetahuan yang ketahu merupakan satu kesatuan utuh.
6. Berfilsafat manusia dapat memaknai hakikat hidup manusia, baik dalam lingkup pribadi maupun berma-syarikat.
7. Berfilsafat manusia selalu dilatih, dididik untuk berpikir

- secara universal, multidimensional, komprehensif, dan mendalam. Sehingga akan menjadikan manusia yang cerdas, kritis, sistematis, dan objektif dalam melihat dan memecahkan beragam problema kehidupan, sehingga mampu meraih kualitas, keunggulan dan kebahagiaan hidup.
8. Berfilsafat dapat menggapai kebijakan dan memiliki nilai. Nilai dalam arti dapat diperoleh dengan berpikir secara mendalam. Nilai sangat penting untuk mengatur kehidupan yang lebih baik dan benar.
 9. Berfilsafat dapat mencari kebenaran, karena filsafat adalah jalan mencari kebenaran dan proses berpikir mendalam.
 10. Berfilsafat dapat memahami diri sendiri dan masyarakatnya, sehingga menghilangkan egoisme, dan meningkatkan kesadaran.
 11. Berfilsafat untuk mengubah kehidupan. Artinya dengan filsafat manusia akan terdorong untuk mengubah segala sesuatu yang ternyata telah jauh menyimpang dari nilai-nilai kebenaran. Dalam hal ini, juga berarti bahwa filsafat juga tak dapat dipisahkan dari kerja mengubah kehidupan yang lebih baik dan benar.



1.7. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Abdurrauf, Syaikh bin Ali al Fansuri al Singkeli atau Singkili (1620-1693), seorang ulama ahli fiqh dan tasawuf yang beraliran Syathariyah serta bermadzab Ahlu sunnah wal jamaah.
- [2]. Adler, Mortimer J. (28 March 2000). How to Think About the Great Ideas: From the Great Books of Western Civilization. Chicago, Ill.: Open Court. ISBN 978-0-8126-9412-3.
- [3]. Aidit, D. N. (1964). The Indonesian Revolution and The Immediate Tasks of Communist Party of Indonesia. Beijing: Foreign Languages Press. hlm. i–iv.
- [4]. Alf, Hildebeitel (2007), Hinduism. In: Joseph Kitagawa, "The Religious Traditions of Asia: Religion, History, and Culture", Routledge
- [5]. Al-Fansuri, Hamzah atau dikenal juga sebagai Hamzah Fansuri adalah seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-16. Ia 'berasal dari Barus' ada pula sarjana yang berpendapat ia lahir di Ayutthaya, ibukota lama kerajaan Siam.
- [6]. Al-Ghazâlî, 1506, *Logica et philosophia Algazelis Arabis*, Venice: P. Liechtenstein. Reprint Frankfurt (Germany): Minerva, 1969.
- [7]. Alisjahbana, S. Takdir (1977). *Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia Ditinjau dari Jurusan Nilai-Nilai*. Jakarta: Yayasan Idayu. hlm. 6–7.
- [8]. al-Palembani, Abd al-Shamad Ulama Nusantara yang Mendamaikan Ibn 'Arabi dan Al-Ghazali. Nama lengkapnya Sayyid Abd Al-Shamad Al-Palembani bin Abd Al-Rahman Al-Jawi, lahir di Palembang pada tahun `11116H/1704M.

- [9]. Anqâ mughrib fî khatm al-awliyâ' wa shams al-maghrib, G. T. Elmore (trans.), Islamic Sainthood in the Fullness of Time: Ibn al-'Arabî's Book of the Fabulous Gryphon, Leiden: E. J. Brill, 1999.
- [10]. Aquinas , Thomas adalah seorang filsuf dan teolog yang terkenal pada abad pertengahan. Pemikiran Aquinas yang terkenal adalah merumuskan etika dan gereja. Pemikiran yang berasal dari ajaran Agustinus dan filsafat Aristoteles yang sangat berpengaruh dalam pemikiran di Eropa pada saat itu.
- [11]. Aristotle (384 BC - 322 BC) was a Greek philosopher, a student of Plato and teacher of Alexander the Great.
- [12]. Aristotle, "*Metaphysics*" Translated by W. D. Ross. This web edition published by eBooks@Adelaide. Last updated Wednesday, February 26, 2014 at 10:17. The University of Adelaide Library. University of Adelaide.
- [13]. Aristotle's Logic. Stanford Encyclopedia of Philosophy. *First published Sat Mar 18, 2000; Substantive Revision Fri Feb 17, 2017.*
- [14]. Armstrong, James F. *J Donald Butler. A tribute (1908-1994). This Memorial minute, was Prepared by James F. Armstrong.*
- [15]. Audi, Robert (1995). The Cambridge Dictionary Of Philosophy. Cambridge University Press: United Kingdom. Page. 580-617.
- [16]. Billington, Ray. (1997). *Understanding Eastern Philosophy*. London: Routledge.
- [17]. Calvin, Archived 21 September 2015 at the Wayback Machine. Random House Webster's Unabridged Dictionary.
- [18]. Collinson, Diane. Fifty Major Philosophers, A Reference

- Guide. page. 125.
- [19]. De Vos, George A. and SLote, Walter H. (1998). Confucianism and The Family (Sunny Series in Chinese Philosophy and Culture. Published by State University of New York Press (July 10, 1998).
- [20]. Di Bawah Bendera Revolusi. Jakarta: Panitya Penerbitan. 1963. hlm. 376.
- [21]. Dinasti Sailendra adalah dinasti yang berkuasa di Jawa khususnya pada Kerajaan Mataram Kuna Periode tahun 800-850 M di Jawa Tengah. Dinasti ini menurunkan raja-raja besar yang memerintahkan pembangunan candi-candi kerajaan berukuran besar seperti Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Kalasan, Candi Mendut, Candi Lumbung dan lain-lain..
- [22]. Ebrey, Patricia (2010). The Cambridge Illustrated History of China. Cambridge University Press. hlm. 42.
- [23]. Ganeri, Jonardon; The Lost Age of Reason Philosophy In Early Modern India 1450–1700, Oxford U. press.
- [24]. Garfield (Editor), Edelglass (Editor); The Oxford Handbook of World Philosophy, Chinese philosophy.
- [25]. Gottlieb, Johann Fichte (German: May 19, 1762 – January 27, 1814) was a German philosopher. He was one of the founding figures of the philosophical.
- [26]. Grayling, A.C. (1998). Philosophy 1: A Guide through the Subject (Oxford University Press, 1998), p. 1: "The aim of philosophical inquiry is to gain insight into questions about knowledge, truth, reason, reality, meaning, mind, and value."
- [27]. Hasan al-Asy'ari, Abul was born in 260 H/873M and died in 935 AD. Please note, He went through three marhalah (phases) in his life. The first phase: He believed in

Mu'tazilah, was educated by his stepfather, Abu Ali al-Jubba'i, in Mu'tazilah education. He was in this Mu'tazilah faith for forty years.

- [28]. Hegel and the Translator, J. Sibree, M.A. (With Prefaces by Charles) (.2001). *The Philosophy of History Georg Wilhelm Friedrich Hegel*. Bathoce Books Kitchener. 2001
- [29]. Hegel, G.W.F. *Philosophy of Right § 3R* (T.M. Knox trans., 1952) (1821).
- [30]. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich; Brown, Robert F. (1 January 2006). *Lectures on the History of Philosophy: Greek philosophy*. Clarendon Press. hlm. 33. ISBN 978-0-19-927906-7.
- [31]. Heuken, Adolf "Chapter One: Christianity in Pre-Colonial Indonesia", dalam *A History of Christianity in Indonesia*, Jan Aritonang and Karel Steenbrink (Editor), hlm. 3-7, Leiden/Boston: Brill, 2008, ISBN 978-90-04-17026-1.
- [32]. Hiorth, Finngeir (1983). *Philosophers in Indonesia: Southeast Asian Monograph Series No.12*. Townsville: James Cook University of North Queensland. hlm. 4. ISBN 0-86443-083-3.
- [33]. Hiorth, Finngeir (1983). *Philosophers in Indonesia: Southeast Asian Monograph Series No.12*. Townsville: James Cook University of North Queensland. hlm. 4. ISBN 0-86443-083-3.
- [34]. Hobbes, Thomas (2017). *Leviathan* (Wisehouse Classics - The Original Authoritative Edition). Publisher Lightning Source Inc. Publication Date 15/10/2017. ISBN 9176374327..
- [35]. <http://kateglo.com/?mod=dictionary&action=view&phrase=syamanisme>
- [36]. IEP, Aztec Philosophy, <http://www.iep.utm.edu/aztec/>.

- [37]. Imam Bonjol , Tuanku (lahir di Bonjol, Luhak Agam, Pagaruyung, 1772 – wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lotta, Pineleng, Minahasa, 6 November 1864) adalah salah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803–1838.
- [38]. Ionia is a land of unspoiled beauty and natural magic. Its inhabitants, living in scattered settlements across this massive island continent, are a spiritual people who seek to live in harmony and balance with the world.
- [39]. J.C. Van Leur's (1974). Teori Mahan dan Sejarah Kepulauan Indonesia (Terjemahan Karangan-karangan Belanda). Published 1974 by Bhratara. Teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. van Leur. Ia berpendapat bahwa Hindunisasi di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana, golongan pemuka agama di India. Menurutnya, para penguasa mengundang para Brahmana India untuk keperluan upacara keagamaan sekaligus untuk mengangkat status sosial mereka.
- [40]. James, William (1911), *Some Problems of Philosophy: A Beginning of an Introduction to Philosophy* (1911), University of Nebraska Press 1996: ISBN 0-8032-7587-02.
- [41]. James, William (11 January 1842 – 26 August 1910) was an American philosopher, best known as one of the founders of Pragmatism School..
- [42]. Janz, Bruce B. *Philosophy in an African Place* (2009), pp. 74–79, Plymouth, UK: Lexington Books, [https://books.google.com/books? isbn=0739136682](https://books.google.com/books?isbn=0739136682)
- [43]. Janz, Bruce B. *Philosophy in an African Place* (2009), pp.

- 74–79, Plymouth, UK: Lexington Books, <https://books.google.com/books?isbn=0739136682>.
- [44]. Jennings, Michael. (2017) Ujamaa. [https://doi.org/ 10.1093/acrefore/9780190277734.013.172](https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190277734.013.172). Published online: 26 September 2017.
- [45]. Kant, Immanuel (1724 -1804) was a philosopher who was able to back seats the position of each of the sense and faith in their respective positions. Kant succeeded terminates modern sophistry. From this Kant have a place in the history of philosophy..
- [46]. Khafizova, Taliya. Article “Pythagoras Musica Universalis Theory in Global and Human Perspective” Girne American University. <https://www.academia.edu/30935375/Pythagoras..>
- [47]. Kierkegaard, Soren is a figure of existentialism who first introduced the term "existence" first in the 20th century, Kirkegaard has the view that the entire reality of existence can only be experienced subject to human beings, and presupposes that truth is an individual who exists..
- [48]. Larope, J. (1986). IPS Sejarah. Surabaya: Penerbit Palapa. hlm. 4.
- [49]. Lubis, Mochtar (1990). Indonesia: Land Under the Rainbow. Singapore City: Oxford University Press. hlm. 78, 85, 99.
- [50]. Machiavelli, Niccolo (1921). An edition of Il Principe (1551). The prince. This edition was published in 1921 by Oxford University Press in London.
- [51]. Marx, K.and Engels, F. (1848).The Communist Manifesto
- [52]. Marx, Karl was the first communist figure who was born in 1818 and came from Germany. Marx is very well known for his thoughts on socialism and communism.

- Marx is also famous for his book entitled *Das Kapital* which was published in 1867.
- [53]. Media related to Praha, Lučenec District at Wikimedia Commons. Praha is a village and municipality in the Lučenec District in the Banská Bystrica Region of Slovakia.
- [54]. MiamiIllinois:Shikaakwa; Anishinaabemowin: Zhigaagon g*Carrico, Natalya*. "We're still here". *Chicago Reader*. Retrieved January 12, 2021.
- [55]. Miguel León: Use of "Tlamatini" in Aztec Thought and Culture: A Study of the Ancient Nahuatl Mind – Miguel León Portilla". Google Books. Diakses tanggal December 14 Juli 2021.
- [56]. Moscow Population 2011 - The Russia Blog". Siberian Light. 5 Mei 2011. Diakses tanggal 12 Maret 2021.
- [57]. Nartorp, Paul (live 1854 – 1924), Thinkers Philosophy of Science.
- [58]. Nasr, Syed Hossein (1991). *Islamic Spirituality II: Manifestations*. New York: Crossroad. hlm. 262, 282–287
- [59]. Nasroen, M. (1967). *Falsafah Indoensia*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang. hlm. 14, 24, 25, 33, 38.
- [60]. Nietzsche's philosophical bent was toward existentialism; he was one of the few existentialists to confess that, without God, life has no ultimate meaning (i.e., nihilism) and no objective moral values. With respect to morality, Nietzsche admitted, "You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist" (paraphrased from Thus Spoke Zarathustra, trans. by Walter Kaufmann, Penguin Books, 1966, p. 195).
- [61]. Noor, Deliar (1996). *Gerakan Modern Islam di Indonesia*

- 1900-1942. Jakarta: LP3ES.
- [62]. Nuruddin Muhammad, Syekh Ibnu 'Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamid ar-Raniri al-Quraisyi atau populer dengan nama Syekh Nuruddin Al-Raniri adalah ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani (Iskandar II).
- [63]. Oliver Leaman. 2000. *Eastern Philosophy: Key Readings*. London: Routledge.
- [64]. Pakubuwana IV, Sri Susuhunan (lahir: Surakarta, 1768 – wafat: Surakarta, 1820) adalah raja ketiga Kasunanan Surakarta yang memerintah tahun 1788 – 1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus, karena naik takhta dalam usia muda dan berwajah tampan..
- [65]. Parmono. (1985). *Menggali Unsur-Unsur Filsafat Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset. 1985. hlm. iii.
- [66]. Pellò, Caterina. *The Lives of Pythagoras: A Proposal for Reading Pythagorean Metempsychosis*. <https://doi.org/10.1515/rhiz-2018-0007>..
- [67]. Pengaruh Islam terhadap Budaya Jawa dan Sebaliknya: Seri Kliping Perpustakaan Nasional dalam Berita Vol.II No.1. Jakarta: Sub Bagian Humas Perpustakaan Nasional RI. 2001. hlm. 12–39.
- [68]. *Perkembangan Kebatinan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang. 1971. hlm. 62–64.
- [69]. Pierotti, Raymond; *Communities as both Ecological and Social entities in Native American thought*, http://www.se.edu/nas/files/2013/03/5th_NAScommunities.pdf
- [70]. Plato was born around 427 BC - died around 347 BC) was a philosopher and mathematician, Greece, philosophical writer .
- [71]. Plato's "Symposium". www.perseus.tufts.edu. hlm. 201d

- and following. Diakses tanggal 22 April 2016.
- [72]. R v Smith, [1987] 1 S.C.R. 1045 is a leading Supreme Court of Canada decision. The Court struck down a mandatory seven-year sentence requirement for the importation of drugs as a violation of the right against cruel and unusual punishment contrary to section 12 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms
- [73]. Radhakrishnan, Sarvepalli (1953). *History of Philosophy Eastern and Western Volume 2 Hardcover* – January 1, 1953 Published by George Allen & Unwin.
- [74]. Rae, Lindsay (1993). McIntyre, Angus, ed. "Sutan Syahrir and the Failure of Indonesian Socialism". *Indonesian Political Biography: In Search of Cross-Cultural Understanding*. Monash University: 46.
- [75]. Risalah Sidang 1995:10-79).
- [76]. Rutherford, *The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy*, p. 1: "Most often this [period] has been associated with the achievements of a handful of great thinkers: the so-called 'rationalists' (Descartes, Spinoza, Leibniz) and 'empiricists' (Locke, Berkeley, Hume), whose inquiries culminate in Kant's 'Critical philosophy.' These canonical figures have been celebrated for the depth and rigor of their treatments of perennial philosophical questions."
- [77]. Sanskrit. (2000). *Einführung in die heilige Sprache Indiens*". www.asien.net.
- [78]. Sar,Desai, D.R. (1989). *Southeast Asia: Past & Present*. San Fransisco: Westview Press. hlm. 9-13.
- [79]. Senn, Eter R (1971) *Social Sciences : Methodology, Sciences*
- [80]. Stevenson, Jay. 2000. *The Complete's Idiot's Guide to*

- Eastern Philosophy*. Macmillan: Alpha Books..
- [81]. Strong's Greek: 5385. Philosophia -- The Love or Pursuit of Wisdom. Biblehub.com.
- [82]. Students' Britannica India (2000), Volume 4, Encyclopædia Britannica, ISBN 978-0852297605, p. 316
- [83]. Sumardjo, Jakob (2003). Mencari Sukma Indonesia. Yogyakarta: AK Group. hlm. 22–23, 25, 53, 58
- [84]. Sunoto.(1987). Menuju Filsafat Indonesia. Yogyakarta: Hanindita Offset. 1987.
- [85]. Supriyatno. Budi (2017). Metodologi Ilmu Pengetahuan. Artikel. Oktober 2017
- [86]. Syamsuddin, Syeikh Al-Sumatrani: Sheikh Shamsuddin al-Sumatrani yang hidup abad 16-17 Masihi. Beliau adalah Sheikhul Islam atau Mufti besar Aceh semasa zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Sayyid al-Mukammil (1589-1604).
- [87]. Syamsuddin, Syeikh Al-Sumatrani:: Sheikh Shamsuddin al-Sumatrani yang hidup abad 16-17 Masihi. Beliau adalah Sheikhul Islam atau Mufti besar Aceh semasa zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Sayyid al-Mukammil (1589-1604).
- [88]. Sybaris was an important city of Magna Graecia.It was situated on the Gulf of Taranto, in Southern Italy, between two rivers, the Crathis and the Sybaris..
- [89]. Tagore, Rabindranath juga dikenal dengan nama Gurudev adalah seorang Brahmo Samaj, penyair, dramawan, filsuf, seniman, musikus dan sastrawan Bengali. Ia terlahir dalam keluarga Brahmana Bengali, yaitu Brahmana yang tinggal di wilayah Bengali, daerah di anakbenua India antara India dan Bangladesh.
- [90]. Taoisme & Konfusianisme - The Creme De La Creme

- dari Filsafat Tiongkok dan Kemajuan Ekonomi. Diunduh dari: <http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/item/264-taoisme--konfusianisme-the-creme-de-la-creme-dari-filsafat-tiongkok-dan-kemajuan-ekonomi>.
- [91]. The Encyclopedia of Philosophy © Copyright Internet Encyclopedia of Philosophy and its Authors ISSN 2161-0002.
- [92]. The Age of Enlightenment was an intellectual and philosophical movement that dominated the world of ideas in Europe during the 17th and 18th centuries.
- [93]. Tim Redaksi Driyarkara. 1993. *Jelajah Hakikat Pemikiran Timur*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [94]. Titu, Harold H. (1970). *Living Issues in Philosophy*. Published by New York : Van Nostrand Reinhold Co.
- [95]. Titus, Harold H. 1954. *Ethic for Today*, Published by New York, American Book Company.
- [96]. Tsong-kha-pa Blo-bzang-grags-pa, (2005). *Tantric ethics : an explanation of the precepts for Buddhist Vajrayāna practice* (edisi ke-1st Wisdom ed). Boston, Mass.: Wisdom Publications. ISBN 0861712900. OCLC 60664335.
- [97]. Tullius, Marcus Cicero (106 BC - 43SM) in the UK called "Tully" was born January 3 106 BC - died December 7, 43 BC, the philosopher, orator reliable skilled in rhetoric, lawyer, author, and the ancient Roman statesman who is generally regarded as Latin orator and prose style expert.
- [98]. Webb, Hillary S.; Yanantin and Masintin in the Andean World: Complementary Dualism in Modern Peru Hardcover – March 15, 2012.
- [99]. Whiteley; Native American philosophy, <https://www.rep.routledge.com/articles/native-american-philosophy/v-1>

- [100]. Wilhelm, Anton “Amo or Anthony William” (1703 – 1759) was a philosopher from what is now Ghana.
- [101]. William Russell, Bertrand Arthur 3rd Earl Russell (May 18, 1872- February 2, 1970) was a British philosopher, logician, mathematician, historian, and social. In 1950, he was awarded a Nobel Prize in Literature for Today, Published by New York, American Book Company.
- [102]. Wilson, Woodrow (1887), dalam Shafritz, Hyde, Parkes (2004). *Classic of Public Administration* fifth edition. USA: Thomson Wadsworth.
- [103]. Yacob, Zera was a seventeenth-century Ethiopian philosopher from the city Aksum.
- [104]. Yìxuán, Línjì (Lin-chi I-hsüan; Japanese: Rinzai Gigen) (789–866) was the founder of the Linji school of Chán Buddhism during Tang Dynasty China..
- [105]. Yusuf, Syekh merupakan ulama besar dari Sulawesi yang berperan besar dalam dakwah di Afrika.



BAB 2

METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN

Di era revolusi industry 4.0 bisa merubah situasi dan kondisi bangsa dan negara. Revolusi Industri 4.0 adalah sebuah kegiatan yang mengkolaborasikan teknologi siber atau berhubungan dengan internet dan teknologi otomatisasi. Kalau tidak berubah akan tergilas era ini. Metodologi Pemerintahan di era ini juga harus berubah mengikuti perkembangan zaman ini.

2.1. Era Industri 4.0

Di era revolusi industry 4.0 bisa merubah situasi dan kondisi bangsa dan negara. Mau tida mau harus berubah, kalau tidak berubah akan tergilas era ini. Apa sih industry 4.0? Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif.^[122] Industri 4.0 menghasilkan "*pabrik cerdas*". Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik,

[122] Kagermann, H., W. Wahlster and J. Helbig, eds., 2013: Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group.

menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat.

Istilah "**Industrie 4.0**" berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah **Jerman** yang mengutamakan komputerisasi pabrik.^[123] Istilah "**Industrie 4.0**" diangkat kembali di **Hannover Fair tahun 2011**.^[124] Pada **Oktober 2012, Working Group on Industry 4.0** memaparkan rekomendasi pelaksanaan Industri 4.0 kepada **Pemerintah Federal Jerman**. Anggota kelompok kerja Industri 4.0 diakui sebagai bapak pendiri dan perintis Industri 4.0. Laporan akhir Working Group Industry 4.0 dipaparkan di **Hannover Fair tanggal 8 April 2013**.^[125]

Budi Supriyatno memberikan **definsi Revolusi Industri 4.0 adalah sebuah kegiatan yang mengkolaborasikan teknologi siber atau berhubungan dengan internet dan teknologi otomatisasi**. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah "**cyber physical system**".

Revolusi Industri 4.0 adalah sebuah kegiatan yang mengkolaborasikan teknologi siber atau berhubungan dengan internet dan teknologi otomatisasi.

Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi. Dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah.

^[123] BMBF-Internetredaktion (21 January 2016). "Zukunftsprojekt Industrie 4.0 - BMBF". Bmbf.de. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-05-05. Diakses tanggal 2021. Ausutus 2021.

^[124] "Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4. industriellen Revolution". Vdi-nachrichten.com (dalam bahasa Jerman). 1 April 2011. Diarsipkan dari [versi asli](#) tanggal 2013-03-04. Diakses tanggal 2016-11-30..

^[125] Industrie 4.0 Plattform Last download on 15. Juli 2013.

Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun sesungguhnya, tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini.

Dalam Revolusi Industri 4.0, setidaknya ada lima teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu: *Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing dan Additive Manufacturing*.

1. *Internet of Things (IoT)*

IoT merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan (*interrelated connection*) untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antarmanusia atau interaksi manusia dan komputer. Sistem IoT mengintegrasikan empat komponen, yaitu: perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, dan antarmuka pengguna. Contoh aplikasi IoT di Indonesia: *Gowes (IoT untuk bike sharing), eFishery (IoT pemberi pakan ikan otomatis), Qlue (IoT untuk smart city), dan Hara (IoT untuk pangan dan pertanian)*.

2. *Big Data*

Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. Big Data dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Penyedia Layanan Big Data Indonesia, antara lain:

- a. *Sonar Platform;*
- b. *Paques Platform;*
- c. *Warung Data;*
- d. *Dattabot.*

3. *Artificial Intelligence (AI)*

AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. AI bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi. Aplikasi chatbot dan pengenalan wajah (*face recognition*) merupakan salah satu contoh penerapan AI.

4. *Cloud Computing*

Komputasi awan (*cloud computing*) adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, dimana pengguna komputer diberikan hak akses (*login*) menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasi peladen (*server*) melalui internet. Contohnya, hosting situs web berbentuk peladen virtual. Ada tiga jenis model layanan dari komputasi awan, yaitu:

- a. *Cloud Software as a Service (SaaS)*, layanan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh infrastruktur awan;
- b. *Cloud Platform as a Service (PaaS)*, layanan untuk menggunakan platform yang telah disediakan, sehingga pengembang hanya fokus pada pengembangan aplikasi;
- c. *Infrastructure as a Service (IaaS)*, layanan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan, dimana konsumen dapat memproses, penyimpanan, berjaringan, dan memakai sumber daya komputasi lain yang diperlukan oleh aplikasi. Produk-produk cloud computing di Indonesia:
 - 1) *K-Cloud*;
 - 2) *CloudKilat*;
 - 3) *Dewaweb*;
 - 4) *IDCloudHost*;
 - 5) *FreeCloud*.

5. *Addictive Manufacturing*

Additive manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Gambar desain digital yang telah dibuat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Teknologi additive manufacturing mampu memproduksi lebih banyak desain dan memproduksi barang yang tidak bisa dibuat dengan teknologi manufaktur tradisional.

Prinsip Industri 4.0

Ada empat prinsip rancangan dalam Industri 4.0. Prinsip-prinsip ini membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengimplementasikan skenario-skenario Industri 4.0.^[126]

1. ***Interoperabilitas*** (*kesesuaian*): Kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan satu sama lain lewat Internet untuk segala **Internet of Things (IoT)**. IoT akan mengotomatiskan proses ini secara besar-besaran.^[127]
2. ***Transparansi informasi***: Kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor. Prinsip ini membutuhkan pengumpulan data sensor mentah agar menghasilkan informasi konteks bernilai tinggi.
3. ***Bantuan teknis: Pertama***, kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh agar bisa membuat keputusan bijak dan menyelesaikan masalah genting yang

^[126] Hermann, Pentek, Otto, 2016: Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios, accessed on 4 May 2016.

^[127] "IOT role in industry 4.0". 19 May 2016 – via TechExpert..

mendadak. *Kedua*, kemampuan sistem siber-fisik untuk membantu manusia secara fisik dengan melakukan serangkaian tugas yang tidak menyenangkan, terlalu berat, atau tidak aman bagi manusia.

4. *Keputusan mandiri*: Kemampuan sistem siber-fisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin. Bila terjadi pengecualian, gangguan, atau ada tujuan yang berseberangan, tugas didelegasikan ke atasan.

Masalah Industri 4.0 di Indonesia

Masalah kesiapan perpindahan ke industri 4.0 Indonesia terletak pada “SDM” dan pemerataan, beberapa sektor industri di Indonesia masih belum mendekati Industri 4.0, contoh saja pada pejabat pemerintah dalam rapat kerja ke daerah masih menggunakan perjalanan dinas, dan diadakan di hotel mewah, sedangkan di negara maju eropa sudah menggunakan internet, dilakukan di kantor masing-masing, lebih praktis lebih efisiensi dan lebih efektif, mengurangi biaya transportasi dan penginapan serta sewa ruangan rapat di hotel.^[128]

Masalah lainnya terletak pada banyaknya penduduk Indonesia yang tidak memiliki SDM memadai, karena diperkirakan dengan masuknya industri ini akan memangkas tenaga manusia dengan kemampuan SDM rendah dan kemungkinan meningkatkan angka pengangguran.^[129]

Cara pemerintah mengatasi hal tersebut dimulai dari pembangunan infrastruktur untuk pemerataan distribusi di berbagai

^[128] Budi Supriyatno. (2019) . Era Industri 4.0. Artikel.

^[129] Ridwan Aji Pitoko (24 April 2018), Aprillia Ika, ed., Apindo: Revolusi Industri 4.0 Bisa Mengancam Tenaga Kerja Lokal, diakses tanggal 14 April 2019

sektor dan perombakan kurikulum pendidikan guna menghadapi perkembangan industri ini.^[130]

Selain itu, perlu diperhatikan dengan baik mengenai keamanan informasi, keamanan di dunia siber, dan keamanan di dalam jaringan komputer, terkait dengan data dan informasi, guna mencapai tujuan organisasi, privasi, dan kenyamanan pengguna layanan pada era Industri 4.0^[131]

2.2. Metodologi Pemerintahan di Era Industri 4.0

Metodologi Pemerintahan di era Industri 4.0 harus berubah mengikuti perkembangan zaman. Apalagi Metode Pemerintahan merupakan istilah yang kurang dipahami, nampak rumit sekali sehingga sulit untuk dimengerti. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri. Ditambah dengan era baru industry 4.0 ini semakin tambah rumit. Sejatinya filsafat pemerintahan itu selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam suatu negara atau pemerintahan. Seorang sarjana atau pakar pemerintahan sering dianggap terlalu sibuk memikirkan persoalan yang sulit dijangkau. Padahal, permasalahan pokok filsafat pemerintahan adalah persoalan yang “*selalu*” dipikirkan oleh semua orang. Sebagai seorang hidup disuatu negara yang ada dalam pemerintahan selalu mempertanyakan, memikirkan dan merenungkan seperti:

1. Kenapa pemerintahan seperti ini, dan tidak boleh melaksanakan pemerintahan seperti itu?
2. Pada saat ada wabah corona (2020-2021), mengapa

^[130] Eduardo Simorangkir (12 April 2019), Hadapi 'Robot', RI Mau Rombak Habis-habisan Kurikulum Pendidikan, diakses tanggal 14 April 2019.

^[131] Eka Pratama, I Putu Agus (30/06/2020). "Memahami Peran Information Security, Cyber Security, dan Network Security Bagi Organisasi di Era Industri 4.0 |Udayana Networking | Universitas Udayana". udayananetworking.unud.ac.id. Diakses tanggal 2020-06-30.

- pemerintah berusaha keras mencegah terjadinya corona untuk melindungi warganya?
3. Kenapa sistem pemerintahan tidak boleh otoriter?
 4. Kenapa sebagian orang menginginkan pemerintahan demokrasi, dan mengapa harus begitu?.
 5. Mengapa pemerintahan harus melayani rakyatnya?
 6. Kenapa pemerintah harus mengikuti perkembangan industri 4.0
 7. Kenapa aparaturnya sampai hati berbuat korupsi? dan seterusnya.

Pertanyaan seperti itu sebetulnya sudah menjadi objek pemikiran rakyat dan juga menjadi filosofis pemerintahan. Oleh karena itu sebetulnya kita semua secara tidak langsung sudah berfilsafat yaitu mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan filosofis pemerintahan. Terlibat dalam perbincangan filosofis dan memegang salah satu sudut pandang filosofis pemerintahan.

Bedanya para pakar, para sarjana, para ilmuwan melakukan semua itu dengan cara yang sistematis dengan menggunakan “*metodologi*”, sehingga menghasilkan kadar

Metodologi ilmu pemerintahan adalah suatu metode yang digunakan dalam mempelajari ilmu pemerintahan, baik yang bersifat teori maupun yang bersifat praktis.

keilmuan yang lebih tinggi dan terarah dalam filsafat pemerintahan. Oleh karena itu dalam bab ini akan dibahas metodologi pemerintahan. Apabila dalam menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan teknologi industri 4.0. dengan internet, whatsapp (WA), facebook dan lain-lainnya, masyarakat bahkan akan lebih cepat dapat informasi dari pejabat pemerintah yang lebih akurat. Selama ini pemerintah kalah cepat informasi dari masyarakat termasuk informasi hoak atau kabar berita bohong. Sehingga masyarakat sering percaya dengan informasi

hoak. Oleh karena itu pemerintah tidak cepat beralih ke informasi menggunakan internet seperti WA untuk menandingi membanjirnya informasi hoak dari masyarakat yang kontra dengan pemerintahan. Oleh karena itu gunakanlah informasi dengan industry 4.0.

Pengertian Metode Ilmu Pemerintahan

Metodologi ilmu pemerintahan merupakan suatu metode yang mengembangkan ilmu pemerintahan. Implementasinya diperlukan berbagai pendekatan dengan ilmu-ilmu lainnya yang mempunyai sifat multidisiplin. Dalam mempelajari metodologi pemerintahan dikenal adanya metodologi ilmu dan metodologi penelitian.

Menurut *Eter R Senn (1971)* bahwa metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.^[132] Sedangkan pendapat *TH Huxley* bahwa yang dimaksud dengan metode ilmiah merupakan ekspresi mengenai cara bekerja pikiran.^[133]

Budi Supriyanto, mengatakan metodologi ilmu pemerintahan adalah suatu metode yang digunakan dalam mempelajari ilmu pemerintahan, baik yang bersifat teori maupun yang bersifat praktis. Sesungguhnya metodologi ilmu pemerintahan adalah mempelajari cara mencari penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan praktek penyelenggaraan

^[132] Eter R Senn (1971) *Social Sciences : Methodology, Sciences Sociales – Méthodologie*. Publisher Boston, Holbrook Press. Collection : Library; Printdisabled; Internetarchivebooks. Digitizing: Sponsor Kahle/Austin Foundation. Contributor: Internet Archive.

^[133] Thomas Henry Huxley. *The Method of Scientific Investigation*. <https://www.phy.ilstu.edu/ptefiles/310content/nature/huxley.html>.

pemerintahan bersifat empiris yang masih belum diketahui secara jelas.

Pada saat menemukan permasalahan pemerintahan, maka ilmu pemerintahan mencari jawaban pada praktek penyelenggaraan pemerintahan yang nyata. Karena ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang dimulai dengan fakta dan diakhiri dengan fakta, melalui teori dapat diketahui kadar **“intelektual”** yang landasannya adalah rasionalitas dan digabungkan dengan pengalaman yang bersifat empiris.

Sebagai ilmu terapan, ilmu pemerintahan lebih berorientasi pada segi penggunaan dalam aktivitasnya, yang mencakup proses penyelenggaraan negara, baik yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan maupun yang dilakukan oleh masyarakat. Pengembangan ilmu pemerintahan yang didasarkan pada berbagai proses dengan cara pikir yang berbeda, namun mempunyai karakteristik yang sama diterima secara umum, maka ilmu pemerintahan banyak di kembangkan oleh para pakar untuk berkembang lebih baik lagi.

Dalam pemikiran ***Budi Supriyatno***, pada era industry 4.0 dan era reformasi ini sudah seharusnya metodologi ilmu pemerintahan dapat dipakai dalam menegakkan pemerintahan yang berdaulat. Dalam hasil penelitian para pakar pemerintahan mampu menegakkan kedaulatan rakyat. Artinya hasil dari pemikiran pakar dapat implemantasikan untuk menegakan pemerintahan yang baik. Maknanya adalah pemimpin **“pemerintahan”** baik ***presiden atau perdana menteri*** yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum, dalam menjalankan pemerintahan tidak berada **“dibawah”** bayangi-bayangi oleh kekuasaan partai politik. Artinya **“Preisden bukan petugas partai politik.”** Walaupun awalnya kandidat presiden diusulkan atau diusung oleh partai politik, **“saat tugas negara dimulai, maka**

tugas politik sudah berhenti". Presiden harus konsentrasi menjalankan tugas negara dan tugas pemerintahan untuk kepentingan rakyatnya bukan kepentingan partai politik. Pemimpin pemerintahan (Presiden, atau Perdana Menteri) sebagai suatu sistem yang berdaulat mempunyai legitimasi dari masyarakatnya dan dibutuhkan masyarakat untuk melaksanakan kedaulatan, ketertiban hukum dalam negara, sehingga kesejahteraan dan keamanan rakyatnya terjamin.

Pemikiran ini yang diharapkan dari filsafat pemerintahan dan diharapkan oleh rakyat pemegang kedaulatan. Makanya metodologi pemerintahan perlu direformasi dari dulu yang bersifat teoritis dan kaku serta sulit diimplementasikan di lapangan kegiatan birokrasi pemerintahan, dirubah menjadi metodologi teoritis dan praktis yang bisa diimplementasikan secara baik oleh aparatur negara dalam melaksanakan pekerjaan kenegaraan. Inilah metodologi pemerintahan yang dibutuhkan pada era sekarang ini.

Sebelas Metodologi Pemerintahan

Metodologi pemerintah harus terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman di era ***Industri 4.0*** dan ***informasi***" yang begitu pesat ini, maka metodologi pemerintahan ikut berkembang dengan pesat pula, misal menggunakan internet seperti wibesite, google, yahoo, wahtshap, dan sebagainya untuk memperoleh data, dan dengan menggunakan program ***Statistikal Package for the Social Sciens (SPSS)*** untuk pengolahan data yang lebih akurat dibandingkan dengan pengolahan data manual. Hal ini merupakan suatu langkah maju dalam metodologi ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan mengenai cara mengerjakan tugas pemerintahan. Menurut ***Budi Supriyatno***, paling sedikit ***ilmu pemerintahan mempunyai Sebelas*** metodologi yang bisa dipakai untuk melakukan pekerjaan penelitian yang

berkaitan dengan pemerintahan. *Sebelas* metodologi ilmu pemerintahan tersebut dapat diraikan sebagai berikut:

1. *Metodologi Digital*

Dalam praktiknya sehari-hari kita jumpai kata "*digital*." Mungkin masih banyak yang awam terhadap kata ini. Namun secara praktis, digital adalah berkaitan dengan teknologi internet atau media online. Selama ini, istilah *digital* identik dengan internet atau online. Data digital, misalnya, yang mempunyai makna dengan data online. Demikian juga data digital tak lain adalah data melalui internet dan media digital adalah media yang tersaji atau tersedia di internet. Pengertian kata *digital* di *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* adalah berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu; berhubungan dengan penomoran.^[134]

Digital berasal dari kata *Digitus*, dalam bahasa Yunani berarti "*jari-jemari*". Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah sepuluh.^[135] Dapat disebut juga dengan istilah *Bit (Binary Digit)*. Peralatan canggih, seperti komputer, pada prosesoranya memiliki serangkaian perhitungan biner yang rumit. Contoh digital adalah gambar digital, perangkat digital misalnya: televisi, komputer, printer, dan lain-lainnya, serta basis data.

Dalam bahasa (*Inggris*), digital berasal dari kata digit yang artinya (1) jari tangan/kaki; (2) bijian, angka dari satu sampai sembilan; dan (3) jari sebagai ukuran panjang kira-kira 3/4 inci. Dalam Kamus Bahasa Inggris, digital diartikan sebagai (1) yang

^[134] Sumber data: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Online <https://kbbi.id/>.

^[135] Sumber data : Wikipedia, The Free Encyclopedia. Online : <https://en.wikipedia.org/wiki/Digital>.

berhubungan dengan jari; (2) komputer mesin hitung yang mempergunakan angka-angka untuk sistim-sistim perhitungan tertentu. ^[136] Dari uraian tersebut di atas *Budi Supriyatno* simpulkan pengertian *metodologi pemerintahan digital adalah metodologi yang menggunakan teknologi internet atau media online untuk mendapatkan dan mengolah data dan informasi yang dibutuhkan tentang pemerintahan*. Dengan demikian sudah selayaknya pakar ilmu pemerintahan menggunakan metodologi digital untuk mengembangkan ilmu pemerintahan yang lebih baik dan cepat.

Pemanfaatan metodologi digital dalam pengumpulan data untuk kepentingan kegiatan riset perlu dukungan dengan akses jaringan internet. Metodologi digital kini semakin melebar dan meluas ke seluruh penjuru dunia, namun masih menghadapi tantangan yang besar dengan informasi dan kesenjangan infrastruktur baik secara geografis maupun kelompok masyarakatnya secara umum khususnya yang kurang paham terhadap teknologi (*gabtek = gagab teknologi*) digital ini. Sesungguhnya ketersediaan jaringan internet yang baik dan memadai akan membantu pengumpulan data berbasis digital atau dalam jaringan (*online*). Dalam implementasi metodologi digital itu, dapat mewujudkan proporsional responden, ketersediaan pilihan teknik sampling, dan mampu merekam kondisi atau fenomena social atau fenomena aparatur pemerintaha selayaknya metode tatap muka.

Sejatinya metode pengumpulan data tanpa tatap muka bukan hal baru di ranah penelitian sosial humaniora. Itu dimulai tahun 1990 dengan pergeseran publikasi cetak ke publikasi digital

^[136] *Ibid.* Wikipedia, The Free Encyclopedia. Online :
<https://en.wikipedia.org/wiki/Digital>.

seperti *open-access repositories*, dan berkembang dengan penggunaan survei berbasis dalam jaringan (daring) untuk pengumpulan data primer dan retrieving data melalui Big Data.^[137]

Bahkan pada tahun 2001 LIPI sudah merintis pelaksanaan penelitian etnografi berbasis internet, dan berlanjut dengan penggunaan platform-platform survei berbasis daring seperti *Survey Monkey* atau *Googleform*.^[138] Inovasi instrumen-instrumen riset berbasis internet terus berkembang pesat. Hal ini sangat membantu peneliti untuk riset berskala besar dalam waktu singkat dan lokasi yang sulit dijangkau peneliti kalau melalui tatap muka.

Metodologi digital merupakan sebuah pendekatan dalam penelitian sosial-humaniora untuk mendapatkan data primer dan sekunder tanpa melakukan interaksi tatap muka namun berbasis teknologi informasi dengan menggunakan sarana komunikasi seperti komputer, Ipad, tablet, dan telepon pintar, yang selanjutnya dapat diproses otomatisasi ataupun manual.

Platform dalam jaringan (online) seperti *Zoom*, *Webex*, atau *Googleform* sangat rasional digunakan dalam kegiatan penelitian meskipun secara statistik harus lebih diperhatikan dari sisi validitas dan realibilitas. Contohnya: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melakukan digitalisasi terhadap 382.568 artikel yang dikelola oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) LIPI,^[139] dan banyak manfaatnya.

^[137] Sumber Data LIPI (2021) Metode digital untuk riset harus didukung akses internet. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1573743/lipi-metode-digital-untuk-riset-harus-didukung-akses-internet>.

^[138] *Ibid.* LIPI (2021) Metode digital.

^[139] *Ibid.* LIPI (2021) Metode digital.

Manfaat Riset Dengan Metodologi Digita.

Manfaat riset dengan metodologi digital pemerintahan antara lain:

- a. Memperoleh data yang lebih cepat, luas jangkauannya dan lebih mudah, tidak harus pergi ke tempat lokasi/instansi.
- b. Memperoleh target populasi yang lebih banyak/luas.
- c. Menekan biaya koleksi/pengumpulan data dan informasi dibandingkan metodologi konvensional.
- d. Hasilnya dapat ditampilkan lebih cepat, sehingga peneliti bisa melihat hasil karya sendiri.
- e. Menghemat waktu, karena bisa dilakukan di depan computer atau bisa mencari data yang dibutuhkan melalui internet.

Para pakar atau ilmuwan, para dosen, para peneliti dan para mahasiswa ilmu pemerintahan silahkan mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan metodologi digital ini.

2. Metodologi Pemerintahan Teknik Reportase

Menurut Budi Supriyatn, Metode pemerintahan teknik reportase adalah metode pengumpulan data untuk penelitian atau penulisan karya ilmiah atau berita yang akan dipublikasikan, baik di journal atau di media tempatnya bekerja.

Dalam era reformasi ini, metodologi teknik reportasi banyak digunakan oleh para peneliti, penulis artikel dan wartawan atau reportase. Pengertian reportase menurut ***Merriam-Webster Dictionary***: "***writing intended to give an account of observed or documented events***"(tulisan yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang peristiwa yang diamati atau didokumentasikan).^[140] Metodologi teknik reportase terdiri dari

[140] Merriam-Webster Dictionary. An Encyclopædia Britannica Company
<https://www.merriam-webster.com>.

tiga hal berikut ini:

- a. **Observasi.** Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, atau pakar untuk memperoleh data yang akurat dan kemudian memahami secara benar dari sebuah fenomena yang diteliti.
- b. **Wawancara.** Wawancara adalah percakapan yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk menggali informasi atau keterangan dari narasumber atau pelaku yang memiliki informasi.
- c. **Riset Data.** Riset Data adalah suatu penyelidikan, pemeriksaan, pencermatan, percobaan yang dengan menggunakan arsip, buku, atau referensi, data yang ada, atau dokumen. Riset data sering disebut Studi Literatur/Riset Dokumentasi. Kegiatan ini membutuhkan ketelitian dengan menggunakan metode tertentu untuk memperoleh suatu hasil dengan tujuan tertentu. Kegiatan Riset data meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Riset data merupakan kegiatan dalam koridor keilmiah yang harus sesuai dengan bidang ilmu pemerintahan.

Contoh Metodologi Teknik Reportase: Pejabat Ketangkap KPK

Peneliti datang ke lokasi penangkapan pejabat pemerintah yang tertangkap langsung oleh KPK karena diduga korupsi. Di sana peneliti mengamati jalannya penangkapan koruptor, menyimak perilaku koruptor, mengamati petugas KPK kemudian mengambil foto/memotret, lalu wawancara dengan petugas KPK dan pelaku, misalnya: berapa uang yang ditangan koruptor, berapa jumlah uang yang dikorup, dari lembaga pemerintahan mana? sebagainya. Cara pengumpulan data untuk laporan berupa naskah, buku atau berita meliputi 5W+1H:

- a. *What (kejadian/acara apa)*. Apa kejadian atau aksi penangkapan koruptor?
- b. *Who (siapa)*. Siapa pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi tersebut?.
- c. *When (kapan/waktu)*. Kapan pejabat tersebut korupsi, kapan ditangkap?
- d. *Where (tempat atau lokasi kejadian)*. Dimana pejabat ditangkap? Lembaga atau kementerian mana mereka bekerja?
- e. *Why (mengapa, tujuan acara, latar belakang)*. Mengapa pejabat tersebut korupsi, setor ke partai pendukung? Atau alasan lain.
- f. *How (bagaimana jalannya acara)*. Bagaimana jalannya penangkapan: bentrok dengan petugas, tertib, melarikan diri.?

Teknik Reportase merupakan keterampilan baik yang biasanya dimiliki wartawan, namun peneliti atau pakar pemerintahan bisa juga menggunakan metodologi reportase ini.

3. Metode Pemerintahan Kritis

“*Kritis*” dalam arti terus menerus bertanya. *Budi Supriyatno* mendefinisikan *Metode pemerintahan kritis adalah sebuah metode yang selalu mempertanyakan secara kritis baik internal maupun eksternal dalam dirinya (manusia) dalam lingkup ilmu pemerintahan*. Dengan demikian tidak berhenti pada “*sebuah klaim kebenaran*” tentang hal-hal fundamental dan selalu mencari jawaban secara rasional dan bertanggung jawab khususnya dalam ilmu pemerintahan. Metode kritis bersifat bertanya, menganalisa, dan mengolah data dari berbagai pendapat, kemudian “*disistematiskan*” yang dapat menjelaskan sebuah jawaban yang terbaru dan terlengkap dari berbagai pertanyaan. Dengan cara bertanya secara kritis akan mendapatkan jawaban yang bisa

dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan? misalnya:

- a. Bagaimana bentuk pemerintahan suatu negara?
- b. Bagaimana pemerintahan yang demokratis?
- c. Bagaimana pemerintah mensejahterakan rakyatnya.?
- d. Bagaimana pemerintah mengatasi wabah virus Corona? dan seterusnya.

Dengan pertanyaan tersebut kemudian akan menemukan jawaban setelah melakukan penelitian dan menganalisa serta mengolah data yang didapat dari survey lapangan dan survey instansional. *Plato and Sokrates*^[141] adalah filosof yang menggunakan dan mengembangkan metode ini. *Plato and sokrates* selalu bertanya secara kritis. Oleh karena itu, para pakar ilmu pemerintahan harus selalu kritis, dan selalu bertanya dan mencari jawaban-jawaban rasional. Di sinilah terletak tanggung jawab pakar pemerintahan, yakni dimana filsafat pemerintahan secara kritis terus menerus mempertanyakan dan juga harus berani menawarkan jawaban-jawaban rasionalnya bagi permasalahan pemerintahan.

4. Metode Pemerintahan Intuitif.

Budi Supriyatno mengatakan *metode pemerintahan intuitif adalah yang mengandalkan kecerdasan atau intelektual dan rasional manusia*. Contoh : Hasil penelitian saya tahun 2017 menemukan bahwa mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi

[141]"La Politica" (2014). Socrates, Plato dan Aristoteles filosof kenamaan Yunani, Ketiga tokoh inilah yang sukses membangkitkan peradaban Yunani bahkan lahirnya negara demokrasi klasik di zamannya. Ini bisa ditemukan dalam rumus dan metode kritik dalam bukunya "La Politica". Dimuat dalam Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «Política». *Diccionario de la lengua española* (23.^a edición). Madrid: Espasa. ISBN 978-84-670-4189-7.

negeri di Indonesia khusus lima perguruan tinggi negeri (UI, ITB, UGM, UNDIP, ITS) memiliki intelegensi lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi swasta di Indonesia. Metode yang dikembangkan oleh *Bergson and Plotinus*^[142] ini sering dikatakan tidak bertumpu pada kecerdasan dan rasionalisasi manusia, tetapi “*tidak bersifat anti-intelektual*”. Metode ini mengajak kita berpikir dalam semangat untuk bisa menganalisis suatu keyakinan tanpa “*terjerat*” oleh rasio dan logika. Agak sulit untuk dibayangkan namun akan mengalir ketika dicoba dilakukan metode ini.

5. Metode Pemerintahan Skolastik.

Metode Pemerintahan Skolastik adalah metode pengajaran yaitu menunjukkan kaitan yang erat dengan metode mengajar. Contohnya: Seseorang pakar menyampaikan suatu pokok bahasan filsafat pemerintahan, misalnya: *Peranan pemerintahan di era demokrasi*. Atau contoh lain: *Peranan Pemerintahan kerajaan/ Monarchi di era reformasi*. Kemudian pokok bahasan tersebut akan diberi penafsiran dan komentar oleh pakar lain. Agar topik dipahami, semua istilah, ide dan kenyataan dirumuskan, dibedakan dan diuji dari segala sisi. Terjadinya pro dan kontra kemudian dihimpun dan dibandingkan. Melalui proses ini, yang disebut “*lectio*” (*lectio kata latin artinya bacaan*) diharapkan tercapai suatu pemahaman baru yang lebih baik. Metode ini berkembang pada abad Pertengahan oleh *Thomas Aquinas (1225-1247)*^[143] merupakan salah satu penganjurnya. Pada masa Klasik,

[142] Henri Bergson and Plotinus (2019), *For Plotinus’ Legacy: Studies in the Transformation of ‘Platonism’ from Early Modernism to the Twentieth Century*, edited Stephen Gersh, Cambridge University Press, 2019, Chapter 10, 233–56.

[143] Thomas Aquinas (2015). *Scholastic and Modern Formalism: A Continuous Path Down*. Junio 22, 2015. Exposition in the *Thomistic Studies 2014: ens-esse*;

Aristoteles juga dikatakan sebagai pengguna metode ini. Namun, jika tidak berhasil, maka akan dilanjutkan ke tahap “*disputatio*” (*disputatio kata latin perdebatan*) sehingga ilmu filsafat pemerintahan akan lebih mantap.

6. Metode Pemerintahan Empiris-Eksperimental

Metode pemerintahan empiris-eksperimental adalah metode filsafat yang berdasarkan pengalaman yakni sebuah pendekatan induktif. Jadi mengoleksi data-data di lapangan lalu mencoba untuk melakukan sebuah kesimpulan melalui generalisasi. Melihat beberapa data, lalu mengambil pola umum. Metode Induktif adalah suatu metode yang menarik kesimpulan dari fakta dan data yang diperoleh. Observasi dan eksperimen dilakukan untuk mengenai gejala-gejala dengan tepat dan saksama, sedang hipotesis dan induksi membuat rumusan dari hukum-hukumnya. Metode berpikir induktif dimana cara berpikir dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Untuk itu, penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Contoh dari induksi : Misalnya saat ini (2020-2021 baru ada wabah Covid 19. Maka semua pemerintahan berusaha mencegah wabah tersebut:

- a. Pemerintahan Indonesia berusaha mencegah wabah corona Covid 19.

the return to the fundament]. This work is about *Modern formalism or essentialism*. After having seen some historical works about the sources of Saint Thomas Aquinas' thought, these two works about *scholastic* and *modern formalism* are focused on showing a wrong understanding of the primacy of the *actus essendi* in the *ens*. By Franciescvsv Svarez Gra. 2015.

- b. Pemerintahan Amerika berusaha mencegah wabah corona Covid 19.
- c. Pemerintahan di seluruh negara berusaha mencegah wabah corona Covid 19.

Jadi, kesimpulannya setiap semua pemerintahan di negara manapun di dunia ini mencegah wabah corona.

Para penganut empiris dengan pendekatan induktif sangat dipengaruhi oleh sistem dan metode *Descartes*, terutama dalam menekankan data kesadaran dan pengalaman individual yang tidak dapat diragukan lagi.^[144] Bagi mereka, pengalaman adalah sumber pengetahuan yang lebih dipercaya ketimbang rasio. *David Hume (1711-1776)* adalah penyusun filsafat Empirisme ini dan menjadi antitesa terhadap Rasionalisme.^[145] Perbedaan utama metode ini dari metode dekrates adalah metode ini juga membutuhkan eksperimen yang ketat guna mendapatkan bukti kebenaran empiris yang sejati.

7. Metode Pemerintahan Deduksi

Metode Deduksi adalah metode yang menganalisis fakta dan data yang diperoleh dengan menguraikannya. **Deduksi** berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. *Budi Supriyatno* menyatakan, *metode deduksi adalah proses penalaran dari pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu*. Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya. Metode deduksi umumnya dipakai pada bidang matematika

^[144] Descartes. Descartes' Method. First published Wed Jun 3, 2020. Descartes' method is one of the most important pillars of his philosophy and science.

^[145] Tamas Demeter. (2012). Hume's Experimental Method. May 2012. British Journal for the History of Philosophy. DOI:10.1080/09608788.2012.670842. (Authors: Tamas Demeter. Hungarian Academy of Sciences).

untuk membuat turunan-turunan rumus yang lebih simpel. Penalaran deduktif menghubungkan premis-premis dengan kesimpulan. Jika semua premi benar dan aturan logika deduktif ditaati, maka kesimpulan ini tentu benar. contoh penalaran deduksi:

- a. Premis 1: Semua Sistem Pemerintahan Presidentil dipimpin oleh presiden terpilih.
- b. Premis 2: Sistem Pemerintahan Amerika Presidentil.
- c. Kesimpulan: Kepala Pemerintahan Amerika adalah Presiden.

Premis pertama menyatakan bahwa semua sistem pemerintahan presidentil atau diklasifikasikan sebagai "**Presiden**" memiliki atribut "**Presidentil**". Premis kedua menyatakan bahwa "**Amerika**" diklasifikasikan sebagai "**Presidentil**" jadi termasuk anggota dari himpunan "**Presiden**". Kesimpulannya kemudian menyatakan bahwa Kepala Pemeritnahan Amerika "**Presiden**".

8. Metodologi Pemerintahan Transendental

Metode filafat Pemerintahan Transendental adalah metode yang menggunakan aplikasi prinsip dasar dari pemahaman murni yang melampaui batas-batas pengalaman. Metode ini juga sering disebut dengan *metode neo-skolastik*. **Immanuel Kant (1724-1804)** merupakan pelopor metode ini.^[146] Pemikiran **Kant** merupakan titik-tolak periode baru bagi filsafat pemerintahan Barat. **Kant** mendamaikan dua aliran yang berseberangan: rasionalisme dan empirisme. Dari satu sisi, **Kant** mempertahankan objektivitas, univesalitas dan keniscayaan suatu pengertian. Di sisi lain, **Kant** juga menerima pendapat bahwa

^[146] Edward N. Zalta: Principal Editor: Kant's Transcendental Arguments. *First published Fri Aug 21, 2009; substantive revision Fri Mar 2, 2018. And see you too.* The Stanford Encyclopedia of Philosophy organizes scholars from around the world in philosophy and related disciplines to create and maintain an up-to-date reference work.

pengertian berasal dari fenomena yang tidak dapat melampaui batas-batasnya. *Kant* menempatkan kebenaran bukan pada konsep tunggal, tetapi dalam pernyataan dan kesimpulan lengkap. *Kant* membedakan dua jenis pengertian:

- a. *Pengertian Analistis*, yakni pengertian yang selalu bersifat apriori, misalnya dalam ilmu pasti. Menurut *Budi Supriyatno*, *analisis adalah sebuah evaluasi tentang kondisi dari pernyataan yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan dan alasan yang memungkinkan suatu perbedaan pendapat yang muncul pada saat melakukan penelitian. Contohnya: Pengaruh korupsi pejabat terhadap kinerja aparatur daerah.*
- b. *Pengertian sintesis*, pengertian ini dibagi menjadi dua yakni: *aposteriori* singular yang dasar kebenarannya pengalaman subjektif seperti ungkapan “*Saya ingin marah melihat korupsi di pemerintahan ini*”, dan *apriori* yang merupakan pengertian universal dan pasti seperti ungkapan “*Korupsi bikin rakyat marah*”. Seperti efek pemberantasan korupsi yang sebetulnya ada sebagian orang apriori tidak dapat membuat jera. Namun sebagian orang percaya termasuk saya (penulis) sendiri pemberantasan korupsi akan membuat koruptor jera. Di dalam pengertian dan penilaian metode ini terjadi kesatuan antara subjek dan objek, kesatuan antara semua bentuk. Hal ini menuntut adanya kesatuan kesadaran yang disebut “*transcendental unity of apperception*”. *Budi Supriyatno* mengatakan, *Transcendental unity of apperception is the meaningful organization, within the consciousness, of individual objects of perception.* (Kesatuan *transcendental* dari persepsi adalah organisasi yang bermakna, di dalam kesadaran, dari objek persepsi individu).

9. Metodologi Pemerintahan Fenomenologis

Metodologi pemerintahan *fenomenologi* merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Fenomena disini merupakan makna aslinya yang berasal dari bahasa Yunani: *phainomai*, artinya adalah “yang terlihat”. Jadi fenomena adalah data yang disadari dan yang masuk dalam pemahaman. Metode fenomenologi dilakukan dengan melakukan tiga reduksi terhadap objek, yaitu: a. mereduksi suatu objek formal dari berbagai hal tambahan yang tidak substansial. b. mereduksi objek dengan menyisihkan unsur-unsur subjektif seperti perasaan, keinginan dan pandangan. Pencarian objek murni tersebut disebut dengan *reduksi eidetis*. c. reduksi ketiga bukan lagi mengenai objek atau fenomena, tetapi merupakan mengarah ke subjek, dan mengenai terjadinya penampakan diri sendiri. Dasar-dasar dalam kesadaran yang membentuk suatu subjek disisihkan. Intinya metode ini melihat sesuatu dengan objektif tanpa melihat sisi subjektifnya seperti kepentingan, perasaan, atau tekanan sosial. **Contohnya:** *Bayangkan bagaimana rasa amarahnya ketika seorang Presiden dituduh PKI, padahal dia orang Indonesia asli yang Pancasilais, bahkan saat terjadi pembontakan PKI dia masih bayi, mungkin dia secara tidak sadar akan mencari siapa dalang yang menyebarkan isu hoak murahan itu, bahkan marah.* Inilah contoh mereduksi memasukan tambahan yang tidak substansial. Metode Fenomenologis ini dipopulerkan oleh *Edmund Husserl* (1859-1938).^[147]

^[147] Edmund Husserl. (1983). *First Book: General Introduction to a Pure Phenomenology*. Published by Springer Science & Business Media. 30 Sep 1983.

10. Metode Pemerintahan Perbandingan

Metode filsafat pemerintahan perbandingan adalah metode yang mengukur sesuatu berdasarkan perbedaan dan persamaan sesuatu yang lain yang sejenis.

Contoh :

- a. Pola pemerintahan demokrasi disenangi seluruh bangsa dunia.
- b. Amerika negara yang demokrasi, dan Indonesia juga menganut demokrasi.
- c. Tetapi Amerika lebih demokrasi “*dibangdiakan*” dengan Indonesia, karena negara Amerika sistem demokrasinya sudah lebih lama “*dibangdiakan*” dengan negara Indonesia.

11. Metode Sejarah

Metode Sejarah adalah Metode yang menganalisis kenyataan perjalanan waktu atau sejarah. Penelitian sejarah adalah salah satu penelitian mengenai pengumpulan dan evaluasi data secara sistematis, berkaitan dengan kejadian masa lalu untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab, pengaruh atau perkembangan kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Contohnya :

- a. Sejarah Pemerintahan Indonesia mulai dari zaman kerajaan sekarang.
- b. Sejarah Pemerintahan Indonesia sejak orde lama sampai era reformasi, dan sebagainya.



2.3. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Aquinas, Thomas (2015). Scholastic and Modern Formalism: A Continuous Path Down. Junio 22, 2015. Exposition in the Thomistic Studies 2014: ens-esse; the return to the fundament]. This work is about Modern formalism or essentialism. After having seen some historical works about the sources of Saint Thomas Aquinas' thought, these two works about scholastic and modern formalism are focused on showing a wrong understanding of the primacy of the actus essendi in the ens. By Franciescvsv Svarez Gra. 2015.
- [2]. Bergson, Henri and Plotinus (2019), For Plotinus' Legacy: Studies in the Transformation of 'Platonism' from Early Modernism to the Twentieth Century, edited Stephen Gersh, Cambridge University Press, 2019, Chapter 10, 233–56.
- [3]. BMBF-Internetredaktion (21 January 2016). "Zukunftsprojekt Industrie 4.0 - BMBF. Bmbf.de. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-05-05. Diakses tanggal 2021. Ausutus 2021.
- [4]. Demeter, Tamas. (2012). Hume's Experimental Method. May 2012. British Journal for the History of Philosophy. DOI:10.1080/09608788.2012.670842. (Authors: Tamas Demeter. Hungarian Academy of Sciences).
- [5]. Descartes. Descartes' Method. First published Wed Jun 3, 2020. Descartes' method is one of the most important pillars of his philosophy and science. This entry introduces readers to Descartes' method and its applications in optics, meteorology, geometry, and

metaphysics.

- [6]. Henry Huxley, Thomas. The Method of Scientific Investigation. [https:// www. phy. ilstu. edu/ ptefiles/ 310content/ nature/huxley.html](https://www.phy.ilstu.edu/ptefiles/310content/nature/huxley.html).
- [7]. Hermann, Pentek, Otto, 2016: Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios, accessed on 4 May 2016.
- [8]. Husserl, Edmund. (1983). First Book: General Introduction to a Pure Phenomenology. Published by Springer Science & Business Media. 30 Sep 1983.
- [9]. Industrie 4.0 Plattform Last download on 15. Juli 2013.
- [10]. Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4. industriellen Revolution. Vdi-nachrichten. Com (dalam bahasa Jerman). 1 April 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-03-04. Diakses tanggal 2016-11-30..
- [11]. IOT role in industry 4.0". 19 May 2016 – via Tech-Expert..
- [12]. Kagermann, H., and W. Wahlster and J. Helbig, eds., 2013: Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group.
- [13]. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Online <https://kbbi.id/>.
- [14]. La Política (2014). Socrates, Plato dan Aristotels filosof kenamaan Yunani, Ketiga tokoh inilah yang sukses membangkitkan peradaban Yunani bahkan lahirnya negara demokrasi klasik di zamannya. Ini bisa ditemukan dalam rumus dan metode kritik dalam bukunya "La Política". Dimuat dalam Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «Política». Diccionario de la lengua española (23.^a

- edición). Madrid: Espasa. ISBN 978-84-670-4189-7.
- [15]. LIPI (2021) Metode digital untuk riset harus didukung akses internet. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1573743/lipi-metode-digital-untuk-riset-harus-didukung-akses-internet>.
- [16]. Merriam-Webster Dictionary. An Encyclopædia Britannica Company <https://www.merriam-webster.com>.
- [17]. N. Zalta, Edward: Principal Editor: Kant's Transcendental Arguments. First published Fri Aug 21, 2009; substantive revision Fri Mar 2, 2018. And see you too. The Stanford Encyclopedia of Philosophy organizes scholars from around the world in philosophy and related disciplines to create and maintain an up-to-date reference work.
- [18]. Pitoko, Aji Ridwan (24 April 2018), Aprillia Ika, ed., Apindo: Revolusi Industri 4.0 Bisa Mengancam Tenaga Kerja Lokal, diakses tanggal 14 April 2019
- [19]. Pratama, Eka dan Putu Agus, I (30/06/2020). "Memahami Peran Information Security, Cyber Security, dan Network Security Bagi Organisasi di Era Industri 4.0 |Udayana Networking | Universitas Udayana". udayananetworking.unud.ac.id. Diakses tanggal 2020-06-30.
- [20]. R Senn, Eter (1971) Social Sciences : Methodology, Sciences Sociales – Méthodologie. Publisher Boston, Holbrook Press. Collection :Library; Printdisabled; Internetarchivebooks. Digitizing: Sponsor Kahle/Austin Foundation. Contributor: Internet Archive.
- [21]. Simorangkir, Eduardo (2019), Hadapi 'Robot', RI Mau Rombak Habis-habisan Kurikulum Pendidikan, diakses tanggal 14 April 2019.

- [22]. Supriyatno, Budi. (2019) . Era Industri 4.0. Artikel.
- [23]. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Online : <https://en.wikipedia.org/wiki/Digital>.



BAB 3

PEMERINTAHAN

Subyek ilmu pemerintahan telah berkembang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda antara satu pakar dengan yang lainnya. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing pakar memiliki latar belakang disiplin ilmu dan pengalaman yang saling berbeda. Dengan latar belakang yang saling berbeda ini, bisa dimaklumi jika kata “pemerintahan” memiliki pengertian yang beragam pula. Pemerintahan dapat diartikan sebagai pejabat atau pelaksana kekuasaan negara, di dalamnya termasuk eksekutif, Legialatif dan Yudikatif yang melaksanakan wewenangnya untuk mewujudkan tujuan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

3.1. Pengertian Pokok

Jika seseorang ingin membahas filsafat pemerintahan, maka perlu memahami terlebih dahulu istilah yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Dalam konteks ini, ada beberapa pengertian pokok terkait dengan ilmu filsafat pemerintahan yang perlu diketahui. Manfaat dari pengertian tersebut adalah, sebagai titik tolak pembahasan lebih lanjut dan memudahkan pembahasan

selanjutnya. Ada beberapa pengertian pokok yang akan dikedepikan dalam buku ini, seperti:

1. Pemerintah,
2. Pemerintahan,
3. Ilmu Pemerintahan;
4. Filsafat Pemerintahan.

1. ***Pemerintah***

Berbagai pendapat menyebutkan, subyek ilmu pemerintahan telah berkembang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda antara satu pakar dengan yang lainnya. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing pakar memiliki latar belakang disiplin ilmu dan pengalaman yang saling berbeda. Dengan latar belakang yang saling berbeda ini, bisa dimaklumi jika kata “***pemerintah***” memiliki pengertian yang beragam pula. Secara etimologi, kata “***pemerintah***” dapat diartikan sebagai “***perintah***” atau “***menyuruh***” atau “***disuruh***”, artinya melakukan sesuatu kegiatan yang bersifat menyuruh atau disuruh atau melakukan sesuatu pekerjaan “***memerintah***” atau ***diperintah***.^[148] Menurut ***Budi Supriyatno***, ada tiga golongan yang diperintah :^[149]

1. Sebagian besar masyarakat yang terdiri dari sekumpulan kelompok kecil yang mempunyai keyakinan penuh untuk taat pada pemerintah dari pemerintah sekalipun tidak ada sanksi-sanksi;
2. Kelompok masyarakat yang kepatuhannya terbawa-bawa tanpa memperhatikan hal-hal yang pasti dari permulaannya atau kemungkinan adanya sanksi-sanksi.
3. Kelompok masyarakat yang mengetahui kemungkinan

^[148] Lihat Budi Supriyatno (2009). Manajemen Pemerintahan. Media Brilian. Page 12.

^[149] *Ibid.* Budi Supriyatno (2009). Page 12.

adanya sanksi-sanksi sebagai faktor yang dipertimbangkan, namun juga dengan sukarela ber-kehendak mentaati perintah.

Pada hakekatnya ada dua makna kegiatan dari kata perintah, yaitu yang memerintah atau menyuruh, dan yang diperintah atau disuruh, *dikongkon* (Bahasa Jawa, Indonesia).^[150] Artinya, yang memerintah mempunyai kekuasaan menyuruh kegiatan yang bersifat perintah. Sedangkan yang diperintah berkewajiban untuk melaksanakan perintah

Pemerintah dibedakan dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan sempit, di mana keduanya berada dalam ruang lingkup yang berbeda. Pemerintah dalam arti luas maupun dalam arti sempit, tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Menurut *Budi Supriyatno, pemerintah dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara*. Pengertian disini lengkap ada legislatif atau parlemen (DPR/MPR), ada eksekutif presiden atau perdana menteri ada lembaga yudikatif yang menangani huklum/peradilan mahkamah agung, mahkamah konstitusi dan lainnya. Sedangkan *pemerintah dalam arti sempit adalah, segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif*.^[151] Pengertian ini hanya pemerintahan saja yaitu Presiden atau perdanama menteri, beserta jajarannya (para menterinya), misalnya Pemerintahan *Joseph Robinette Biden Jr*. Sering dipanggil *Joe Biden* Presiden Amerika. Pemerintahan *Vladimir Putin* Perdana Menteri Rusia.

Dalam *encyclopedia* dinyatakan, “*The word government is*

^[150] Budi Supriyatno menggunakan istilah bahasa lokal yaitu bahasa Jawa Ngoko atau bahasa Jawa Kasar : “Dikongkon” artinya disuruh atau diperintah.

^[151] Ibid. Budi Supriyatno (2009). Page 12.

ultimately derived from the Greek kybernan, which means “to steer”.^[152] (Kata pemerintah berasal dari bahasa Yunani “*Kybernan*” yang berarti “*untuk mengemudi*”). *To steer* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah “*pemerintah*”.

Pakar lain *Apeldoorn* menyatakan, “*pemerintahan adalah salah satu di antara arti perkataan “negara”*. Jika menengok sejarah abad pertengahan, perkataan *stato, state, estate*, dipakai dalam arti jabatan maupun untuk menyatakan pejabat atau orang yang memerintah. Sedangkan pendapat *Machiavelli* agak lain, dalam hal pengertian antara “*bentuk negara*” dan “*sistem pemerintahan*”. Dalam bukunya “*Il Principe*”, *Machiavelli* menyatakan, “*All states and dominions which hold or have held sway over mankind are either republics or monarchies.*”^[153] (*Semua negara, semua kekuasaan pemerintahan yang pernah atau sekarang dikendalikan untuk memerintah manusia, bersifat republik atau monarki*). *Machiavelli* secara tidak langsung telah mempergunakan perkataan “*state*” maupun “*dominions*” dalam satu nafas terhadap klasifikasi republik atau monarki.

Lain lagi dengan pandangan *Duguit* yang mempergunakan istilah “*sistem pemerintahan*” dalam mengupas tentang monarki dan republik, di samping istilah “*bentuk negara*” yang dipergunakannya dalam mengupas perbedaan antara negara kesatuan dan federasi.^[154] Padahal, monarki dan republik memiliki pengertian tentang bentuk negara, sedangkan federasi adalah

^[152] <http://wikipedia.org/wiki/Government>.P.1. 12/9/2020.

^[153] Machiavelli, “The Prince”, New American Library, New York, 1957, p. 37.

[154] J. W. Garner (1912). Reviewed Work: *Traité de Droit Constitutionnel* by Leon Duguit. *Journal. The American Political Science Review*. Published by: American Political Science Association. Vol. 6, No. 1 (Feb., 1912), pp. 124-128 (5 pages).

susunan negara. Memang, suatu negara pada hakekatnya mempunyai sistem pemerintahan tertentu, karena bentuk negara sukar dipisahkan dari sistem pemerintahannya. Namun, "**bentuk negara**" dan "**sistem pemerintahan**" adalah dua aspek yang berbeda dalam suatu negara. Sekalipun demikian, mempertentangkan bentuk negara dan sistem pemerintahan dengan tujuan mencari perbedaan pengertian antara negara dan pemerintah, tetap masih belum dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah "**pemerintah**" itu sendiri.

Namun, menurut *Apeldooren*, "**pemerintah**" sekurang-kurangnya memiliki tiga pengertian seperti yang dicatat *Utrecht* sebagai berikut:^[155]

- a. Pemerintah sebagai gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata luas. Jadi, yang meliputi badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemerintah dalam pengertian ini disebut penguasa.
- b. Pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara. Contohnya raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain sebagai kepala pemerintahan dan/atau sebagai kepala negara.
- c. Pemerintah sebagai organ eksekutif, dalam arti kepala negara bersama-sama dengan menteri-menterinya.

2. **Pemerintahan**

Seperti telah disebutkan, pemerintah adalah badan atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan negara. Setelah ditambah akhiran "**an**" menjadi pemerintahan, pengertian tersebut akan berbeda dan maknanya berubah. Kalau pemerintah adalah "**lembaganya**", sedangkan

^[155] Utrecht, "Pengantar Dalam Hukum Indonesia," Ichtiar, Jakarta, 1962, h. 403-404.

pemerintahan adalah pelaksana dari lembaga tersebut, yaitu *”pejabatnya”* atau *“pelaksana”*, dan sering disebut *“aparatur”* yang melaksanakan pemerintahan. Dengan demikian, menurut penulis *Budi Supriyatno*, *pemerintahan dapat diartikan sebagai pejabat atau pelaksana kekuasaan negara, di dalamnya termasuk eksekutif, Legialatif dan Yudikatif yang melaksanakan wewenangnya untuk mewujudkan tujuan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.*^[156] Dari pengertian ini *Budi Supriyatno* menekankan pada pelaksana atau orang yang melaksanakan pemerintahan. Contohnya, Pemerintahan *George W Bush* sebagai *Presiden Amerika (Mantan Presiden)*, Pemerintahan *Soeharto* sebagai *Presiden Indonesia (Mantan Presiden)*, sebagai pejabat kekuasaan negara (Perdana Menteri, Presiden atau Raja seperti di Saudi Arabia) dan lembaga negara lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung yang melaksanakan kewenangan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara. Dalam hal ini, termasuk para pejabat di bawahnya. Makna dari pengertian tersebut adalah: *Pertama*, adanya pejabat pelaksana kekuasaan negara. *Kedua*, melaksanakan wewenang yang diberikan kepadanya. *Ketiga*, adanya upaya mewujudkan tujuan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Karena itu, pemahaman tentang pemerintahan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemerintahan merupakan gabungan penguasa lembaga negara yang meliputi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.
2. Pemerintahan adalah pelaksana kekuasaan negara seperti Perdana Menteri, Presiden dan Raja di Arab Saudi.
3. Pemerintahan yang di dalamnya terdapat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan yaitu Presiden atau Perdana Menteri,

^[156] *Ibid.* Budi Supriyatno (2009). Page 14.

dibantu para Menteri dalam kabinet dan pejabat-pejabat di bawahnya seperti Direktur Jenderal, Deputy, dan lain-lain.

3. Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan, dalam bahasa Belanda *Bestuurwetenschap*, merupakan cabang ilmu baru dibanding ilmu sosial lainnya, karena itu definisinya pun beragam. Setiap pakar mempunyai definisi-definisi sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya yang sangat mempengaruhi pemikirannya. Berikut, beragam definisi dari beberapa pakar:

Rosental dalam *Openbaar Bestuur*, menyatakan, *De bestuurwetenschap is de wetenschap die zich uitsluitend bezighoudt met de studie van de interns en externe werking van de structure en processen van het openbaar bestuur.*^[157] (Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum).

Pakar lain, *Brasz*, dalam *Inleiding Tot De Bestuurwetenschap* mengatakan, *De Bestuurswetenschap waaronder het verstaat de wetenschap die zich bezighoudt met de wijze waarop de openbare dienst is ingericht en functioneert, intern en naar buiten tegenover de burgers.*^[158] (Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun eksternal terhadap para warganya).

Sedangkan menurut *Budi Supriyatno (2009)* dalam *bukunya Manajemen Pemerintahan. Ilmu Pemerintahan dapat*

^[157] Goerge R. Terry, "Principles of Management," Richard D. Irwiun, Inc. Third edition 1961. P.32.

^[158] H.A. Brasz, "Inleiding Tot De Bestuurwetenschap" Vuga Boekrij, 1975. P1.

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kinerja aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan negara. Makna dari pengertian tersebut: *Pertama*, mempelajari kinerja aparatur pemerintahan. *Kedua*, mempelajari pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. *Ketiga*, mempelajari adanya perwujudan tujuan negara.

4. Filsafat Pemerintahan

Filsafat pemerintahan tidak memberikan petunjuk teknis memerintah tetapi *“memberikan pemahaman dan arah tindakan”* yang seharusnya dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yang baik dan benar. Oleh karena itu menurut *Budi Supriyatno Filsafat Pemerintahan diartikan sekumpulan sikap dan pemikiran yang kritis terhadap kepercayaan dan perilaku yang dijunjung tinggi oleh aparatur pemerintahan.* Makna dari pengertian tersebut adalah *pertama*, sekumpulan sikap dan pemikiran yang kritis. *Kedua*, kepercayaan aparatur pemerintah dan. *Ketiga*, perilaku yang dijunjung tinggi dari aparatur pemerintah. Filsafat Pemerintahan ini akan dibahas dalam bab tersendiri dalam bab 5.

3.2. Hakekat Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan merupakan kegiatan memerintah yang dilakukan oleh pejabat atau pemerintah yang melakukan kekuasaan pemerintahan atas nama negara terhadap orang yang *“memerintah”* dalam hal ini rakyat. Filsafat pemerintahan tidak memberikan petunjuk teknis *“memerintah”* atau *“diperintah,”* tetapi memberikan pemahaman dan arah tindakan bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pemerintahan yang layak dan benar.

Ilmu Pemerintahan selain termasuk ilmu teoritis empiris,

juga termasuk ilmu praktis atau ilmu terapan, karena akan langsung diterapkan kepada masyarakat. Ilmu Pemerintahan termasuk ilmu campuran karena disamping berkembang secara teoritis menurut ilmu murni juga berkembang secara praktis dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Ketidajelasan antara pemerintahan sebagai ilmu dan pemerintahan sebagai seni, tidak perlu dipertentangkan, namun yang penting adalah bagaimana bisa menjadikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara, sehingga negara itu dapat maju dan berkembang, masyarakatnya hidup aman, sejahtera dan damai.

Studi tentang pemerintahan sudah tua umurnya yaitu, sejak Zaman *Tiongkok Kuno*, *Hindu Kuno* dan *Zaman Yunani Kuno* sudah diajarkan praktik-praktik dan pelajaran tentang pemerintahan. Akan tetapi *Robert M. MacIver*, mempertentangkan apakah ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang berdiri sendiri, karena pemerintahan baginya merupakan mitos yang tampak berubah-ubah pada berbagai ruang dan waktu.^[159]

Di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang, perkembangan ilmu pemerintahan sebagai lembaga sudah cukup menggembirakan namun yang menjadi masalah sekarang adalah esensi dan eksistensi ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang dapat diandalkan belum tuntas memiliki syarat sebagai ilmu. Dilihat sari segi tahap-tahap perkembangannya, ilmu pemerintahan telah melewati tahap klasifikasi, bahkan sudah berada pada tahap komparasi. Selanjutnya untuk menjadi ilmu, maka ilmu pemerintahan harus membangun dirinya sehingga dapat mencapai tahap kuantifikasi.

^[159] Robert M. MacIver. (1965). *The Web of Government*. New York: Free Press (1965).

Peranan Filsafat dalam ilmu pemerintahan menjadi penting bahkan bisa dikatakan “*sangat*” penting, karena melalui studi atau kajian filsafat dan kritik filsafat dapat diketahui apa yang menjadi kelemahan ilmu pemerintahan dan sekaligus diketahui pula caranya untuk memperkuat landasan ilmiahnya.

Dilihat dari Teori Pertumbuhan Pengetahuan dari **Karl Popper**, yang menyatakan bahwa pengetahuan bertolak dari problem dan ilmu bertolak hanya dengan problem.^[160] Ilmu pemerintahan oleh sejumlah sarjana Ilmu Politik, dipersoalkan mengenai ada atau tidaknya ilmu tersebut. Artinya Ilmu Pemerintahan menghadapi problem utamanya, yaitu tentang keberadaannya masih dipertanyakan, ada atau tidaknya ilmu tersebut. Polemik terhadap Ilmu Pemerintahan telah berlangsung lama dan menahun. Bagi **Karl Popper** problem tersebut sangat menguntungkan bagi ilmu yang bersangkutan.^[161] Karena bertolak dari “*Teori Pertumbuhan Pengetahuan*”, problem yang dialami oleh Ilmu Pemerintahan harus menjadi pendorong terhadap tumbuhnya upaya-upaya untuk mempertahankan dan memperkuat landasan ilmiahnya. Obyek ilmu pemerintahan menjadi dua yang sebagai landasan berpikir yakni :

1. Bila Ilmu Pemerintahan dapat dibedakan antara obyek materia dan obyek formanya, maka sebagai disiplin ilmu Pemerintahan menjadi tegas dan jelas untuk dibedakan dengan ilmu-ilmu lainnya.
2. Bila Ilmu Pemerintahan dapat dikondisikan untuk dapat mengikuti prosedur metode problem solving, maka sebagai sebuah ilmu dapat tumbuh dan berkembang secara mantap.

^[160] Karl Popper (1966). *Objective Knowledge. A Realist View of Logic, Physics, and History* (1966). Source: *Objective Knowledge* (1972) published by: Clarendon Press. The second last chapter is reproduced here.

^[161] *Ibid.* Karl Popper (1966).

Hakekat Ilmu Pemerintahan sama dengan Hakekat Ilmu Pengetahuan lainnya, hanya obyek formanya yang membedakan. Secara universal elemen-elemen yang membentuk Ilmu Pengetahuan juga berlaku sama untuk elemen-elemen yang membentuk Ilmu Pemerintahan. Keberadaan Ilmu Pemerintahan harus dapat dilihat dengan *“standard operasional dan prosedur”* yang sama dengan ilmu pengetahuan lainnya.

Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan memiliki struktur dan prosedur yang sama. Menurut *Budi Supriyatno*, *struktur ialah kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis, sedangkan prosedur adalah metode ilmiah yang merupakan suatu rangkaian langkah yang tertib, dan berjalan dengan langkah yang benar dan teratur*. Dan ilmu pemerintahan sudah memenuhi persyaratan ini.

Melihat sejarah *Yunani Kuno* untuk membahas hubungan antara filsafat politik dan ilmu pemerintahan. Hal ini sangat penting guna memperoleh silsilah antara ilmu induk dan ilmu cabang. Melalui tokoh *Filsafat Politik Plato* dapat dipelajari bagaimana awal mula terjadinya pemikiran tentang apa yang disebut *"politik"* dan hubungannya dengan Ilmu Pemerintahan. *Budi Supriyatno* mengatakan *bahwa lapangan penyelidikan Ilmu Pemerintahan adalah menyangkut tugas, pokok dan fungsi serta tanggung jawab dan peranan yang menuntut adanya keterlibatan yang sangat besar dari aparatur pemerintah untuk dapat meningkatkan kemakmuran rakyat banyak*. Inilah hakekat ilmu pemerintahan.

3.3. Ruang Lingkup Ilmu Pemerintahan

Ruang lingkup pemerintahan menurut para pakar berbeda-beda karena latar belakangnya sangat mempengaruhi pendapatnya. Menurut *Soltau and Gilchrist*, ruang lingkup Ilmu Pemerintahan

meliputi: ^[162]

1. Pemerintahan menurut keadaannya sekarang,
2. Pemerintahan sebagaimana yang lalu,
3. Pemerintahan sebagaimana harusnya.

Sedangkan menurut *C.F Strong* dalam bukunya *Modern Political Constitution*, menyatakan pemerintah adalah organisasi tertinggi. ^[163] Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kementerian-kementerian, suatu arti yang biasa kita pakai dalam pembicaraan pada dewasa ini. Pemerintahan, dalam arti luas, diberi tanggung jawab pemeliharaan perdamaian dan keamanan negara, di dalam maupun di luar. Pemerintahan harus memiliki. ^[164]

1. kekuasaan militer atau pengawasan atas angkatan bersenjata;
2. kekuasaan legislatif atau sarana pembuatan hukum;
3. kekuasaan keuangan yaitu kesanggupan memungut uang yang cukup untuk membayar biaya untuk mempertahankan negara dan menegakan hukum yang dibuatnya atas nama negara.

Menurut pandangan di atas pemerintahan mempunyai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan kehakiman, yang boleh kita sebut tiga cabang pemerintahan. Sementara itu *Samuel Edward Finer (S.E. Finer)* menyatakan bahwa istilah *government*, paling sedikit mempunyai empat arti: ^[165]

^[162] Soltau, Roger Henry (1951). *An Introduction to Politics*. Longmans, Green and Company.

^[163] C.F Strong. (1950. *Modern Political Constitutions; An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. (New York: Macmillan Company. 1950. Pp. 383.). Published online by Cambridge University Press: 01 August 2014.

^[164] *Ibid.* C.F Strong. (1950. *Modern Political Constitutions*.

^[165] Samuel Edward Finer. (1997). *The History of Government from the Earliest Times: Ancient monarchies and empires*, Volume 1 Published by Oxford

1. menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain;
2. menunjukkan masalah-masalah (hal ikhwal) negara, di mana kegiatan atau proses-proses di atas dijumpai;
3. menunjukkan orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah;
4. menunjukkan cara, metode atau sistem masyarakat tertentu diperoleh.

Sedangkan *J.A Corry* menyatakan bahwa pemerintah merupakan pengejawantahan yang konkret dari negara yang terdiri dari badan-badan dan orang-orang yang melaksanakan tujuan-tujuan negara.^[166] Setidak-tidaknya untuk negara-negara demokrasi, maka pemerintah pada saat khusus manapun adalah lebih kecil dari negara. Tidak hanya ahli-ahli dari luar yang mengajukan masalah pemerintahan ini, melainkan ada pula dari Indonesia sendiri.

Pendapat *Aristoteles* menyebutkan lingkup pemerintahan adalah mempelajari bentuk-bentuk pemerintahan.^[167] Sedangkan *Budi Supriyatno berpendapat ruang lingkup Ilmu Pemerintahan menyangkut perencanaan, program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari keputusan politik menjadi kebijakan pemerintah.*^[168] Pemerintah harus melakukan perencanaan kebijakan ke depan untuk kesejahteraan rakyatnya, terus bagaimana dengan programnya bisa dilaksanakan tidak, misalnya

University Press, 1997.

^[166] *J.A Corry.* (1963). *The Changing Conditions of Politics.* Published December 15th 1963 by University of Toronto Press (first published March 28th 1963)

^[167] Op.cit *Aristoteles.*

^[168] Budi Supriyatno (2020). *Ruang Lingkup Ilmu Pemerintahan di Indonesia.* Perkuliahan Program Pasca Sarjana Universitas Satyagama. Jakarta.Indonesia.

Pemerintahan Presiden Soeharto Program Pembangunan lima tahunan, tahun pertama melaksana apa, kedua apa dan seterusnya. Dan Program tersebut dilaksanakan, dan dimonitoring atau dipantau sesuai dengan rencana tidak pelaknakan program, dan terakhir dievaluasi. hasil apakah apakah pelaksanaan program tersebut bisa berjalan rencana dan programnya? Apakah rencana dan program itu bermanfaat untuk rakyat? Hasil evaluasi itu menentukan program selanjutnya. Maka ruang lingkup ilmu pemerintah sangat luas sekali yakni semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

3.4. Implementasi Ilmu Pemerintahan

Dari aspek ontologis ilmu pemerintahan, baik menyangkut definisi maupun objek material dan formal, belum dijumpai adanya kesepahaman. Meskipun demikian ada beberapa titik persamaan mendasar di kalangan ilmuwan pemerintahan, yaitu: *Pertama*, bahwa ilmu pemerintahan itu ada dan sedang berkembang ke arah kemandirian. *Kedua*, adanya berbagai paradigma pemerintahan merupakan tanda bahwa ilmu pemerintahan bersifat teoritik konseptual dan tidak semata-mata praktis profesional. Dengan demikian, pemerintahan bukanlah semata-mata keterampilan belaka melain sudah menjadi ilmu pengetahuan.

Sangat luas dimensi-dimensi yang tercakup dalam disiplin ilmu ini akhirnya banyak menimbulkan masalah *kefilsafat-ilmuan*, khususnya dalam upaya penentuan epistemologis dan aksiologisnya. *Persoalan pertama* berkaitan dengan penentuan batas-batas ilmu pemerintahan termasuk fokus dan lokusnya. Sedangkan *persoalan kedua* lebih mengarah pada nilai guna atau segi kemanfaatan keilmuan.

Berkaitan dengan nilai gunanya atau implementasinya, ilmu pemerintahan memiliki nilai fungsi ganda yakni "*fungsi*

akademik” dalam penemuan dan pengembangan keilmuan dan *“fungsi non-akademik”*. Di Indonesia implementasi fungsi yang pertama telah dimulai sejak akhir tahun 1940-an bersamaan dengan mulai diterapkannya pola *Universitas Gajah Mada* dalam pengajaran ilmu sosial dan politik. Pola Universitas Gajah Mada berbeda dengan pola *Universitas Indonesia*. *Pertama*, studi hubungan internasional diselenggarakan oleh satu jurusan yang dinamakan Jurusan Hubungan Internasional yang merupakan salah satu dari enam jurusan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. *Kedua*, pola Pola Universitas Gajah Mada mempunyai jurusan Ilmu Pemerintahan yang sedikit berbeda dengan sub-departemen Politik dan Pemerintahan Indonesia pada pola *Universitas Indonesia*. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa Jurusan Ilmu Pemerintahan juga menawarkan beberapa mata kuliah yang erat kaitannya dengan Ilmu Administrasi. Beberapa diantaranya adalah Teori Organisasi dan Manajemen Pemerintahan, Kebijakan Pemerintah, Analisis Kebijakan Pemerintah. Mata kuliah-mata kuliah seperti itu tidak ditawarkan oleh Departemen Ilmu Politik. Dan sampai sekarang ilmu pemeritnahan telah diimplementasikan di kementerian dalam negeri.



3.5. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Strong, C.F. (1950. *Modern Political Constitutions; An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form.* (New York: Macmillan Company. 1950. Pp. 383.). Published online by Cambridge University Press: 01 August 2014.
- [2]. Brasz, H.A. “Inleiding Tot De Bestuurwetenschap” Vuga Boekrij, 1975. P1.
- [3]. Corry, J.A. (1963). *The Changing Conditions of Politics.* Published December 15th 1963 by University of Toronto Press (first published March 28th 1963)
- [4]. Finer, Samuel Edward. (1997). *The History of Government from the Earliest Times: Ancient monarchies and empires, Volume 1* Published by Oxford University Press, 1997.
- [5]. Garner, J. W. (1912). Reviewed Work: *Traité de Droit Constitutionnel* by Leon Duguit. *Journal. The American Political Science Review.* Published by: American Political Science Association. Vol. 6, No. 1 (Feb., 1912), pp. 124-128 (5 pages).
- [6]. <http://wikipedia.org/wiki/Government>.P.1. 12/9/2020.
- [7]. Machiavelli, “The Prince”, *New American Library*, New York, 1957, p. 37.
- [8]. MacIver, Robert M. . (1965). *The Web of Government.* New York: Free Press (1965).
- [9]. Popper, Karl (1966). *Objective Knowledge. A Realist View of Logic, Physics, and History* (1966). Source: *Objective Knowledge* (1972) published by: Clarendon Press. The second last chapter is reproduced here.

Prof. DR. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi
FILSAFAT PEMERINTAHAN

- [10]. Soltau, Roger Henry (1951). An Introduction to Politics. Longmans, Green and Company.
- [11]. Supriyatno, Budi (2009). Manajemen Pemerintahan. Media Brilian. Page 12.
- [12]. Supriyatno, Budi (2020). Konsep Ruang Lingkup Ilmu Pemerintahan di Indonesia. Artikel. Untuk Bahan Perkuliahan Program Pasca Sarjana Universitas Satyagama. Jakarta.Indonesia.
- [13]. Supriyatno, Budi menggunakan istilah bahasa lokal yaitu bahasa Jawa Ngoko atau bahasa Jawa Kasar : “Dikongkon” artinya disuruh atau diperintah.
- [14]. Terry, Goerge R. “Principles of Management,” Richard D. Irwiun, Inc. Third edition 1961. P.32.
- [15]. Utrecht, “Pengantar Dalam Hukum Indonesia,” Ichtiar, Jakarta, 1962, h. 403-404.





BAB 4

PERKEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Proses perkembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan pemerintahan penjajahan Hindia Belanda di Indonesia, pada masa inilah berbagai pengetahuan ilmu pemerintahan mulai dikenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien untuk kepentingan Pemerintah kolonial Belanda. Kolonialisme yang terjadi di tanah air Indonesia oleh bangsa Belanda dalam waktu yang begitu panjang, menjadikan banyak aspek dari sistem pemerintahan yang berlaku di negeri Belanda juga diterapkan di Indonesia. Sehingga menyebabkan sistem tersebut memiliki pengaruh yang besar sekali dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia hingga dewasa ini.

Proses perkembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia dapat dilihat dari masa ke masa seperti berikut ini:

4.1. Masa Kolonialisme

Proses pertumbuhan Ilmu Pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan pemerintahan penjajahan Hindia Belanda di Indonesia, pada masa inilah berbagai pengetahuan ilmu pemerintahan mulai dikenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien untuk kepentingan Pemerintah kolonial Belanda. Kolonialisme yang terjadi di tanah air kita oleh bangsa Belanda dalam waktu yang begitu panjang, menjadikan banyak aspek dari sistem pemerintahan yang berlaku di negeri Belanda juga diterapkan di Indonesia. Sehingga menyebabkan sistem tersebut memiliki pengaruh yang besar sekali dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia hingga dewasa ini. Selain itu, pergeseran juga terjadi melalui transmisi budaya ilmu pengetahuan, maka perkembangan Ilmu Pemerintahan di negeri Belanda semenjak jaman *Kameralisme* hingga lahirnya *Bestuurswetenschap* dan *Bestuurswetenschappen*^[169] dalam abad ke-20 memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan pemikiran-pemikiran tentang pemerintahan di Indonesia. Salah satu aspek dari sistem pemerintahan Belanda yang diterapkan adalah upaya untuk menciptakan suatu pemerintahan pusat yang kuat, yang dapat mengendalikan otoritas dari pemerintahan-pemerintahan regional dan lokal.^[170] Untuk itu diciptakan sebuah asas yang disebut dengan asas dekonsentrasi, yang pelaksanaannya dipercayakan kepada suatu korps pegawai khusus yaitu

^[169] Herman Matthijs, M. Theo Jans, Hedwig de Koker. (2005). *Bestuurswetenschappen: de overheid: Instellingen en Beleid*. Published by Intersentia nv.

^[170] Sentralistik adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Kolonial Belanda saat itu.

Binnenlandsch Bestuur Scorps,^[171] yang kemudian dialih-bahasakan kedalam Bahasa Indonesia menjadi "*Pangrehpraja*."^[172] Pendidikan Pemerintahan Era Kolonial secara rinci sebagai berikut:

- a. **Masa Kolonial Tahun 1880.** Pendidikan formal dalam bidang pemerintahan di Indonesia *dimulai pada tahun 1880*, dengan didirikan "*Hoofden School*" di Kota *Bandung* yang disediakan bagi para bumi putra yang memenuhi syarat. Peran Ilmu Pemerintahan masih dalam politik Kolonial. Pendidikan bersifat politik untuk kepentingan Belanda.
- b. **Masa Kolonial 1909.** Pendidikan hukum secara formal mulai dikenal masyarakat Indonesia pada tahun 1909 dengan dibukanya *Rechtsschool* (Sekolah Hukum) oleh *Gubernur Jenderal J. B. Van Heutsz* dan dioperasikan dengan memberlakukan *Reglement voor de Opleiding voor Inlandsche Rechtskundigen* atau *Reglemen* untuk Sekolah Pendidikan Ahli Hukum Pribumi, dengan diundangkan dalam *Stb.No. 93/1909*. *Rechtsschool* bukanlah perguruan tinggi, melainkan setingkat Sekolah Menengah Kejuruan, lebih tepatnya penggabungan SMP 3 tahun + SMK 3 tahun. Atas dasar *Ethische Politiek* dan perkembangan ekonomi Belanda yang memaksa pemerintah Belanda membuka wilayah jajahannya untuk penanaman modal swasta, pembentukan *Rechtsschool*

[171] See. G. C Zijlmans (Author). (1985). *Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst: Het corps Binnenlands Bestuur op Java, 1945-1950* (Dutch Edition) (Dutch) Hardcover Publisher: Bataafsche Leeuw January 1, 1985.

[172] *Pangreh praja* bahasa Belanda *Inlands Bestuur* atau *Inlandsch Bestuur* adalah salah satu dari dua bentuk birokrasi pemerintahan di Hindia Belanda, di samping *Binnenlands Bestuur*.

itu dimaksudkan untuk mendidik orang-orang Indonesia agar dapat menjadi hakim *Landraad* yang merupakan pengadilan sehari-hari bagi golongan pribumi dan yang disamakan. Tujuan pendidikannya adalah untuk menghasilkan teknisi atau ahli hukum. Namun tujuan politik pendirian *Rechtsschool* pada dasarnya adalah demi kepentingan Belanda sendiri yang memerlukan terpeliharanya ketertiban dan keamanan (*rust en orde*) di wilayah jajahannya untuk melancarkan penanaman modal dan mengembangkan industry.^[173] Masa studi *Rechtsschool* adalah 6 tahun yang terbagi dalam 2 bagian yakni bagian "*Persiapan*" (*voorbereidende afdeeling*) selama 3 tahun, dan bagian "*Keahlian Hukum*" (*rechtskundige afdeeling*) untuk masa 3 tahun berikutnya. Yang dapat diterima menjadi murid *Rechtsschool* adalah lulusan *HIS (Hollandsch Inlandsche School)* atau *Sekolah Dasar* pada masa kolonial yang harus masuk bagian "*Persiapan*" terlebih dahulu. Bagi lulusan *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO – Sekolah Menengah Pertama)* pada masa kolonial, dan Sekolah Menengah Pamong Praja atau *MOSVIA* dapat langsung diterima pada bagian "*Keahlian Hukum*". Pada bagian "*Persiapan*" diberikan mata pelajaran: Bahasa Belanda, Bahasa Prancis, Sejarah Umum, Matematika, dan Pengetahuan Alam (seperti pelajaran pada tingkat MULO/SMP). Pada bagian "*Keahlian Hukum*" diberikan mata pelajaran: Pengantar Ilmu Hukum, Tata Negara Belanda, Tata Negara Hindia Belanda, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Rakyat atau *Volksrecht*, Hukum Adat, Hukum Acara, Bahasa Melayu, dan Bahasa

^[173]Kurikulum RHS dengan masa studi 4 tahun.

Belanda.^[174] Peran Ilmu Pemerintahan, masih didominasi ilmu hukum. Tetapi peranan Ilmu Pemerintahan sudah nampak jelas sebagai pelaksana tugas pemerintahan.

- c. **Masa Kolonial Tahun 1910.** Sebelum RHS, pada tahun 1910 diselenggarakan *OSVI (Opleiding School Voor Indlanche Ambtenaaren)*^[175] di **Bandung, Serang, Magelang, Blitar, Madiun** dan **Pekalongan**. Sekolah ini menerima tamatan sekolah dasar. Dapat dikatakan Pendidikan OSVIA diikuti oleh tamatan *HIS (Holand Indlandshe School)* dengan pendidikan selama 5 (lima) tahun. *Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren* adalah sekolah pendidikan bagi calon pegawai-pegawai bumiputra pada zaman Hindia Belanda. Setelah lulus mereka dipekerjakan dalam pemerintahan kolonial sebagai pamong praja. Sekolah ini dimasukkan ke dalam sekolah ketrampilan tingkat menengah dan mempelajari soal-soal *administrasi pemerintahan*. Masa belajarnya lima tahun, tetapi tahun 1908 masa belajar ditambah menjadi tujuh tahun. Pada umumnya murid yang diterima di sekolah ini berusia 12-16 tahun. Sebelumnya sekolah *OSVIA* bernama *Hoofden School* (sekolah para pemimpin).^[176]
- d. **Masa Kolonial 1924. *Rechtshoogeschool te Batavia***^[177] atau

^[174] Ibid. urikulum RHS dengan masa studi 4 tahun.

^[175] Soerjosoedarmo, R. Soemendar. (1985). Perkembangan Konsep Ilmu Pemerintahan- Makalah Disampaikan pada Seminar IPP, Jakarta.

^[176] OSVIA, Ensiklopedi Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta.

^[177] Mulai tanggal 1 Agustus 1935 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan aturan tentang penggunaan ejaan baru... di antaranya ejaan 'hoogeschool' menjadi 'hogeschool', 'hoogere burgerschool' - 'hogere burgerschool', 'algemeene' - 'algemene', dan seterusnya.

Sekolah Tinggi Hukum biasa disingkat menjadi **RH te Batavia**, **RH te Weltevreden**, atau **RHS** yang dibuka sejak **28 Oktober 1924** di *Batavia* sekarang *Jakarta*, adalah perguruan tinggi hukum pertama dan lembaga pendidikan tinggi kedua di Hindia Belanda setelah empat tahun sebelumnya THS Bandung dibuka.^[178] Dari kedua pendidikan hukum *Balanda* itu belum mengajarkan ilmu pemerintahan secara jelas namun dalam prakteknya sudah terlihat ketetanegaraan ini adalah embrio dari ilmu pemerintahan.

- e. **Masa Kolonial 1927 MOSVIA. OSVIA** ditingkatkan menjadi *MOSVIA (Modelbare Opleiding School Vor Indlansche Ambtenaaren)* Tahun 1927 yang diselenggarakan di *Magelang* dan *Bandung*. Yang dididik adalah tamatan *MULO (Meer Uit Scoolbreid Lageran School)* dengan masa pendidikan 3 (tiga) tahun. Pendidikan bagi pegawai pemerintahan Dalam Negeri ditingkatkan lagi dengan diselenggarakan *Bestuurs Academie* di *Jakarta* dan *Bestuurschool*. Dalam aturan untuk menjalankan peraturan tentang pengangkatan dan penetapan gaji pegawai negeri di Jawa *Zei Sei Zin Nomor 120 Tahun 1944* ditetapkan:
- 1) Tamatan *Bestuur Acadmie* disamakan dengan tamatan sekolah tinggi.

[178] Pada tanggal 3 Juli 1920 sekolah tinggi pertamadi Hindia Belanda, yaitu Technische Hoogeschool (Sekolah Tinggi Teknik), yang dikenal dengan singkatan namanya THS didirikan di Bandung. Pada tanggal 28 Oktober 1924 Rechtshoogeschool (RHS atau Sekolah Tinggi Hukum) yang merupakan institusi pendidikan tinggi kedua dibuka di Jakarta, dan tiga tahun kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1927 Geneeskundige Hoogeschool (GHS atau Sekolah Tinggi Kedokteran) yang merupakan institusi pendidikan tinggi ketiga dibuka di Jakarta.

- 2) Tamatan *Bestuurschool* disamakan sekolah tinggi. Para lulusannya sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan *Pemerintahan Hindia Belanda*. Dimasa kedudukan pemerintah Hindia Belanda, penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda dibedakan atas pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan pribumi yaitu *Binnenlands Bestuur Corps (BBC)* dan pemerintahan yang tidak langsung dipimpin oleh kaum atau golongan dari keturunan *Inlands Bestuur Corps (IBC)*. Peran Ilmu Pemerintahan sudah kelihatan dalam menangani kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda.
- f. **Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945.** Pegawai yang bertugas menyelenggarakan "*Pemerintahan*" yang semula dikenal dengan sebutan *Bestuurs Ambtenaaren* pada zaman Belanda, pada jaman pendudukan Jepang, diubah menjadi "*Pengreh Praja*" oleh Jepang, di Solo diselenggarakan *Sekolah Pengreh Praja (SPP)* ditinjau dari segi penyelenggaraannya Sekolah Pangreh Praja bermaksud bersifat khusus.

4.2. Masa Kemerdekaan

Setelah merdeka, barulah Indonesia menerima pengaruh dari sistem pemerintah *Anglo-Amerika*,^[179] serta menerima pengaruh dari perkembangan *Ilmu Public Administration*.^[180] Istilah

[179]Anglo-Amerika adalah orang-orang yang merupakan penduduk Anglo-Amerika yang berbahasa Inggris. Biasanya mengacu pada negara dan kelompok etnis di Amerika yang berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa asli yang terdiri dari mayoritas orang yang berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa pertama.

[180]Administrasi Publik / Public Administration atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting

Pangrehpraja semenjak Indonesia merdeka kemudian berubah menjadi "**Pamongpraja**".

- a. **Tahun 1946 Kualifikasi Pendidikan Darurat.** Setelah proklamasi kemerdekaan, **Korps Pamongpraja** ikut serta secara aktif dalam usaha mewujudkan sistem pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Secara resmi, kesetiaan dari korps ini dinyatakan dalam pertemuan mereka di **Solo** pada permulaan Tahun **1946**. Namun demikian banyak pegawai Pamongpraja Republik Indonesia pada waktu itu yang mempunyai kualifikasi darurat.^[181] Dalam pada itu pemerintah federal diwilayah-wilayah yang didudukinya juga mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang banyak diantaranya juga bersifat darurat.
- b. **Tahun 1949.** Semenjak berdirinya Negara **Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949** pengangkatan-pengangkatan darurat itu juga masih tetap dilakukan baik oleh pemerintah RIS maupun oleh Negara-Negara Bagian. Tentunya dapat dimengerti jika Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggantikan Negara Republik Indonesia Serikat pada awal-awal kemerdekaan menghadapi berbagai problema dalam penyelenggaraannya, misalnya bagaimana menyusun suatu aparatur di pemerintahan yang belum mampu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara Negara.

^[181] Kualifikasi pendidikan Darurat dalam pengertian bahwa kualifikasi keahlian masih rendah. Pegawai yang direkrut untuk jabatan pamong praja masih rendah pendidikan Sekorlah Rakyat, bahkan bariu kelas 3.

tetapi juga dapat diterima khalayak ramai dan inilah problema pokok dan menonjol yang dihadapi oleh pemerintahan Indonesia pada waktu itu. Pada tahap-tahap permulaan, faktor *aksestabilitas* memang merupakan syarat utama akan tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, barulah faktor *kapabilitas* yang diutamakan. Untuk memperoleh tenaga-tenaga yang berkemampuan di pemerintahan, dirintis dan dikembangkan kembali pendidikan Kepamongprajaan. *Pendidikan yang sudah ada sebelum tahun 1949*, yaitu SMA *Pamongpraja di Solo* dan *Sekolah Menengah Pamongpraja di Purwokerto* yang masing-masing terdiri dari satu angkatan saja, sangat tidak berarti bila untuk mengisi ruang yang disebut sebagai *the lower middle rank officials*, bahkan *the lower rank officials* yang kosong dan harus diisi oleh tenaga dengan pendidikan yang sesuai. Oleh karena itu, kekurangan tenaga yang terdidik, khususnya di Kecamatan dan Kewedanan menjadi sangat besar.

4.3. Tahun 1947 Akademi Ilmu Politik (AIP)

- a. *Tahun 1947*. Berdirinya *Akademi Ilmu Politik (AIP)*. Cikal bakal *Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP)* berawal dari didirikannya *Akademi Ilmu Politik (AIP) di Yogyakarta pada Tahun 1947*. Pendirian AIP dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga birokrasi di Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri dan Departemen Penerangan pada masa revolusi kemerdekaan.
- b. *Tahun 1949*. *AIP diintegrasikan ke dalam Universitas Gadjah Mada*. Tiga tahun setelah berdirinya, AIP diintegrasikan ke dalam Universitas Gadjah Mada yang didirikan pada Tahun 1949. Dalam perkembangannya, jurusan-jurusan yang ada di AIP seperti *Ilmu Pemerintahan*,

Ilmu Hubungan Internasional dan *Publisiteit* (Komunikasi) digabungkan ke dalam Fakultas *Hukum, Sosial dan Politik (HSP, 1949)*, hingga bergabung dengan *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada Tahun 1955*.

- c. *Tahun 1955. Fakultas Sosial dan Politik (FSP)*. Dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 5379/Kab. Tanggal 15 September 1955, Bagian Sosial dan Politik dipisahkan dari fakultas HSP menjadi fakultas tersendiri yaitu Fakultas Sosial dan Politik (FSP).

4.4. Tahun 1956 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN)

Sekretaris Jenderal Kementerian Negeri bersama orang-orang lain yang dipandang berpengalaman dalam bidang kepomong-prajaan menyusun kurikulum pada Lembaga Pendidikan khusus dan tersendiri yang bernama *Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN)*. Mengenai segi keilmiahan, kurikulum APDN tetap berorientasi kepada Fakultas Sosial Politik Universitas Gajah Mada, setelah kurikulum tersebut matang, APDN kemudian diresmikan pembukaannya pada tahun 1956 oleh Presiden Pertama Republik Indonesia *Ir. Soekarno* di Malang Provinsi Jawa Timur.^[182]

APDN mengawali sistem pendidikan secara dipimpin pada tingkat Universitas di Indonesia dan yang pertama kali pula menerapkan sistem semester. Dibandingkan dengan kurikulum dari Fakultas Sosial Politik Universitas Gajah Mada, maka kurikulum APDN kelihatan jauh lebih padat mengingat sisipan-

^[182] Aries Djaenuri (2016). Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan. Diktat Matakuliah Dasar-Dasar Pemerintahan. Jakarta.

sisipan dari mata kuliah praktis seperti diuraikan diatas. Namun kurikulum dengan sajian matakuliah yang padat itu dapat diselenggarakan dengan baik berkat pemanfaatan waktu dalam rangka studi terpimpin. Perkuliahan di APDN berlangsung selama 6 semester (3 tahun), dimana lulusannya diberi gelar *Bachelor of Art (BA)*. Isinya adalah sarjana muda “*plus*” seperti yang dicitacitakan, merupakan kualifikasi yang dipandang mencukupi untuk jabatan-jabatan kepomongprajaan yang termasuk *the lower middle rank positions*. Apabila mereka ditugaskan untuk memimpin wilayah maka mereka dipandang mampu untuk menjadi administrator pemerintahan ditingkat kecamatan dengan kata lain mampu untuk menjabat sebagai camat. Untuk menduduki jabatan-jabatan yang diklasifikasikan sebagai *the higher- middle rank positions*, apalagi untuk dapat menduduki jabatan yang diklasifikasikan sebagai *the higher rank position*, maka tamatan APDN itu harus dapat menuntaskan wawasan ilmiahnya tanpa mengabaikan ciri tentang penguasaan bidang-bidang pekerjaan yang lebih bersifat teknis yang memang dimaksudkan sejak semula.

4.5. Tahun 1967 Institut Ilmu Pemerintahan (IIP)

Tahun 1967. Setelah didirikannya APDN kemudian didirikan pula studi lanjutannya, semacam tingkat *Doktorandus (Drs)* yang perkuliahannya memakan waktu sekitar dua tahun. Lembaga lanjutatan dari APDN ini mulanya direncanakan akan berdiri pada tahun 1959. Rencana ini agak mengalami hambatan dalam realisasinya disebabkan kondisi politik yang belum stabil. Namun setelah lahirnya Pemerintah Orde Baru rencana tersebut dapat diwujudkan dengan lahirnya *Institut Ilmu Pemerintahan (IIP)* pada tanggal 25 Mei 1967 yang pembentukannya dilandaskan pada Keputusan Presiden RI No. 119 Tahun 1967,

juncto (jo) Keputusan Bersama Menteri Dalam negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.8 tahun 1967.^[183] Sementara itu pada berbagai perguruan tinggi seperti universitas negeri maupun swasta mulai mengembangkan sebuah program kurikulum yang mengarah pada studi Ilmu Pemerintahan baik sebagai sebuah jurusan dari suatu fakultas ataupun sebagai sebuah bagian dari suatu Fakultas. Sebagai contoh adalah Fakultas Tata Praja Makassar yang kemudian menjadi salah satu unsur penting dari Universitas Hasanuddin Makassar, dimana pada tahun 1957 *Mr.Tjia Kok Tjiang* telah berusaha mengembangkan Ilmu Pemerintahan dengan kuliah umum yang berjudul: “*Arti dan Bidang Ilmu Pemerintahan*”.

4.6. Tahun 1990-an Didirikan Jurusan Ilmu Pemerintahan

Tahun 1990-an. Didirikannya jurusan Ilmu Pemerintahan sejak tahun 1990an diberbagai universitas negeri di provinsi-provinsi, maka Ilmu Pemerintahan telah menjadi salah satu program studi dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang kita kenal hari ini. Diantaranya universitas-universitas tersebut adalah Universitas Hasanuddin Makassar, Padjadjaran di Bandung, Diponogoro di Semarang, Sam Ratulangi di Manado, Universitas Riau di Pekanbaru, Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Mulawarman di Samarinda dan lain-lain.^[184]

^[183] *Ibid.* Aries Djaenuri (2016). Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan.

^[184] Alfian dan Hidayat Mukmin (ed). (1985). Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia serta Peranannya Dalam Pementapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.Jakarta: Rajawali Press.

4.7. Tahun 2004 IPDN

Tahun 2004. Sedangkan jalur profesional dipersiapkan untuk melahirkan tenaga-tenaga yang terampil sebagai kader-kader pemerintahan yang berasal institusi kedinasan/ akademi yang berasal dari Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang sejak tahun 2004 dilebur dengan *Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN)* sehingga sekarang bernama *Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)* dan berada dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dengan demikian, *fungsi akademik Ilmu Pemerintahan* secara pelan tapi pasti akan mampu mengejar ketertinggalannya dari pesatnya pengembangan keilmuan ilmu-ilmu sosial lainnya. **Institut Pemerintahan Dalam Negeri** Bahasa Inggris: *Institute of Governance of Home Affairs* disingkat "*IPDN*" adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Berdasarkan Keppres No. 87 Tahun 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menggabungkan *Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN)* dengan *Institut Ilmu Pemerintahan (IIP)* menjadi *IPDN*.

4.8. Tahun 2015 JPP Resmi Berganti DPP

Tahun 2015. Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) juga mengalami perubahan nama menjadi Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP). JPP tahun 2015 resmi berganti kembali dengan nama Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP). DPP telah menjadi bagian dari perkembangan keilmuan politik dan pemerintahan serta turut berkontribusi dalam pembangunan bangsa. DPP menjadi kiblat dari pengembangan ilmu politik dan pemerintahan di Indonesia. Patut untuk dicatat bahwasanya :

- a. Ilmu Pemerintahan mulai diberikan;
- b. Mata kuliah tersebut merupakan kurikulum jurusan pemerintahan, terutama mata kuliah dari ilmu hukum;
- c. Setelah datang bantuan dari *International Cooperation Administration/ICA-AID* dari Amerika Serikat beserta para ahli dan pakar-pakar Administrasi Publiknya. Mata kuliah Administrasi Publik (*Publik Administration*) mulai mewarnai jurusan pemerintahan sehingga dipandang perlu diadakan jurusan ilmu Administrasi Negara, disamping menghidupkan kembali jurusan Ilmu Pemerintahan yang pada saat itu masih bernama jurusan Ilmu Usaha Negara;
- d. Setelah dikirim beberapa tenaga pengajar ke Inggris dan Amerika Serikat untuk program doktor dan master, maka pengaruh Ilmu Politik pada kurikulum jurusan Ilmu Pemerintahan mulai meningkat.

Berdasarkan rangkaian kesejarahan, Perkembangan terakhir perjalanan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mandiri, ditempuh melalui jalur akademik maupun jalur profesional. Jalur akademik dimaksudkan untuk menghasilkan tenaga ilmuwan pada jenjang S1, S2, atau S3 dari berbagai Universitas dan Sekolah Tinggi. Ilmu Pemerintahan sebagai suatu ilmu pengetahuan mulai diajarkan setelah Indonesia merdeka. Sejak tahun 1990-an perguruan-perguruan tinggi yang membuka jurusan Ilmu Pemerintahan pada awal mulanya antara lain Universitas Gajah Mada, baru kemudian disusul oleh universitas besar lainnya seperti Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Hassanudin dan Universitas Satyagama salah satu Universitas Swasta di Jakarta telah mempunyai program sarjana, pasca sarjana dan Doktor Ilmu Pemerintahan. Kini Ilmu pemerintahan berkembang pesat diseluruh Indonesia.

Lihat Tabel 4.1. Perjalanan Sejarah Ilmu Pemerintahan di Indonesia.

NO	MASA/ TAHUN	NAMA PENDIDIKAN	PERAN ILMU PEMERINTAHAN
1.	MASA KOLONIAL a. <i>Tahun 1880</i>	<i>Hoofden School</i> di Kota Bandung. Pendidikan disediakan bagi para bumi putra yang memenuhi syarat.	1. Peran Ilmu Pemerintahan, masih dalam politik Kolonial. 2. Pendidikan bersifat politik untuk kepentingan Kolonial.
	c. <i>Tahun 1909</i>	<i>Rechtsschool</i> (Sekolah Hukum) untuk Sekolah Pendidikan Ahli Hukum Pribumi), Setingkat Sekolah Menengah Kejuruan, lebih tepatnya penggabungan SMP 3 tahun + SMK 3 tahun.	Peran Ilmu Pemerintahan, masih didominasi ilmu hukum.
	d. <i>Tahun 1924</i>	<i>Rechtshoogeschool te Batavia</i> (Sekolah Tinggi Hukum) biasa disingkat menjadi RH te Batavia, RH te Weltevreden , atau RHS di Batavia sekarang Jakarta, adalah perguruan tinggi hukum	Peran Ilmu Pemerintahan dari pendidikan hukum <i>Balanda</i> itu belum mengajarkan ilmu pemerintahan secara jelas namun dalam prakteknya sudah terlihat ketetaneeraan ini adalah embrio dari ilmu pemerintahan

Prof. DR. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi
FILSAFAT PEMERINTAHAN

		pertama dan lembaga pendidikan tinggi kedua di Hindia Belanda setelah empat tahun sebelumnya THS Bandung dibuka.	
d	Tahun 1910 Masa Kolonial OSVI (Opleiding School Voor Indlanche Ambtenaaren)	OSVI di Bandung, Serang, Magelang, Blitar, Madiun dan Pekalongan. Sekolah ini menerima tamatan sekolah dasar. Dapat dikatakan Pendidikan OSVIA diikuti oleh tamatan HIS (Holand Indlandshe School) dengan pendidikan selama 5 (lima) tahun.	Peran Ilmu Pemerintahan dalam Sekolah ini dimasukkan ke dalam sekolah ketrampilan tingkat menengah dan mempelajari soal-soal administrasi pemerintahan.
e	Tahun 1927 Masa Hindia Belanda MOSVIA (Modelbare Opleiding School Vor Indlansche Ambtenaaren)	Pada Tahun 1927 OSVIA ditingkatkan menjadi MOSVIA yang diselenggarakan di Magelang dan Bandung.	Peran Ilmu Pemerintahan sudah kelihatan dalam menangani kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda.
f	Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945	Sekolah Pengreh Praja (SPP) ditinjau dari segi penyelenggaraannya	Peran Ilmu Pemerintahan mendukung Pegawai yang bertugas menyelenggarakan

Prof. DR. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi
FILSAFAT PEMERINTAHAN

		a Sekolah Pangreh Praja bermaksud bersifat khusus.	<i>Pemerintahan.</i>
2	MASA KEMERDEKA AN	Indonesia menerima pengaruh dari sistem pemerintah <i>Anglo-Amerika.</i>	Peran Ilmu Pemerintahan sudah nampak jelas: 1. Setelah merdeka, barulah Indonesia menerima pengaruh dari sistem pemerintah <i>Anglo-Amerika.</i> 2. Menerima pengaruh dari perkembangan <i>Ilmu Public Administration.</i> 3. Istilah <i>Pangrehpraja</i> semenjak Indonesia merdeka kemudian berubah menjadi <i>“Pamongpraja”.</i>
	a. Tahun 1946.	Setelah proklamasi kemerdekaan, <i>Korps Pamongpraja</i> ikut serta secara aktif dalam usaha mewujudkan sistem pemerintahan .	Peran Ilmu Pemerintahan: Pegawai Pamongpraja Republik Indonesia pada waktu itu yang mempunyai kualifikasi darurat.

Prof. DR. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi
FILSAFAT PEMERINTAHAN

	b. Tahun 1949	Semenjak berdirinya Negara <i>Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949</i> menyusun suatu aparatur di pemerintahan.	Peran Ilmu Pemerintahan menyusun aparatur di pemerintahan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima aparatur yang belum mampu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. 2. Pada tahap-tahap permulaan, faktor <i>akseptabilitas</i> memang merupakan syarat utama karena daruat. 3. Barulah faktor <i>kapabilitas</i> yang diutamakan. 4. Untuk memperoleh tenaga-tenaga yang berkemampuan di pemerintahan, dirintis dan dikembangkan kembali pendidikan Kepamongprajaan.
3	TAHUN 1947 AIP	Berdirinya Akademi Ilmu Politik (AIP) di Yogyakarta	Ilmu Pemerintah sudah merambat dibirokrasi pemerintahan
	a. Tahun 1947	Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) berawal dari didirikannya Akademi Ilmu Politik (AIP) di Yogyakarta pada Tahun 1947	<i>Peran ilmu Pemerintahan:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Cikal bakal Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) berawal dari didirikannya Akademi Ilmu Politik (AIP) di Yogyakarta pada

Prof. DR. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi
FILSAFAT PEMERINTAHAN

			<p>Tahun 1947.</p> <p>b. Pendirian AIP dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga birokrasi di Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri dan Departemen Penerangan .</p>
	c. Tahun 1949 AIP	Tahun 1949. Tiga tahun setelah berdirinya, AIP diintegrasikan ke dalam Universitas Gadjah Mada yang didirikan pada Tahun 1949.	<p>Peran Ilmu Pemerintahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AIP diintegrasikan ke dalam Universitas Gadjah Mada yang didirikan pada Tahun 1949. 2. Dalam perkembangannya, jurusan-jurusan yang ada di AIP seperti Ilmu Pemerintahan, Ilmu Hubungan Internasional dan Publisiteit (Komunikasi) digabungkan ke dalam Fakultas Hukum, Sosial dan Politik (HSP, 1949)
c	Tahun 1955 FSP	Tahun 1955. Dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Nomor	<p>Peran Ilmu Pemerintahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan bagian Sosial dan

Prof. DR. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi
FILSAFAT PEMERINTAHAN

		5379/Kab. Tanggal 15 September 1955..	Politik dipisahkan dari fakultas HESP menjadi fakultas tersendiri yaitu Fakultas Sosial dan Politik (FSP).
4	TAHUN 1956 APDN	Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Tahun 1956	Peran Ilmu Pemerintahan: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Negeri bersama orang-orang dipandang berpengalaman dalam bidang kepomongprajaan menyusun kurikulum pada Lembaga Pendidikan khusus dan tersendiri yang bernama <i>Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN)</i> . 2. Mengenai segi keilmiahan, kurikulum APDN tetap berorientasi kepada Fakultas Sosial Politik Universitas Gajah Mada, 3. setelah kurikulum tersebut matang, APDN kemudian diresmikan pembukaannya pada tahun 1956 oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno di Malang Provinsi Jawa Timur

Prof. DR. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi
FILSAFAT PEMERINTAHAN

5	TAHUN 1967 IIP	Institut Ilmu Pemerintahan (IIP)	Peran Ilmu Pemerintahan lebih banyak
	<i>Tahun 1967 IIP</i>	Institut Ilmu Pemerintahan (IIP)	<p>Peran Ilmu Pemerintahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah didirikannya APDN kemudian didirikan pula studi lanjutannya, semacam tingkat Doktorandus (Drs) yang perkuliahannya memakan waktu sekitar dua tahun. 2. Lembaga sambungan/ lanjutatan dari APDN ini mulanya direncanakan akan berdiri pada tahun 1959. 3. Rencana ini agak mengalami hambatan dalam realisasinya disebabkan kondisi politik yang belum stabil. 4. Namun setelah lahirnya Pemerintah Orde Baru rencana tersebut dapat diwujudkan dengan lahirnya Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) pada tanggal 25 Mei 1967 yang pembentukannya dilandaskan pada

Prof. DR. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi
FILSAFAT PEMERINTAHAN

			<p>Keputusan Presiden RI No. 119 Tahun 1967. juncto (jo) Keputusan Bersama Menteri Dalam negeri dan Menteri Penddidikan dan Kebudayaan No.8 tahun 1967.</p> <p>5. Sementara itu pada berbagai perguruan tinggi/ universitas negeri maupun swasta mulai mengembangkan sebuah program kurikulum yang mengarah pada studi Ilmu Pemerintahan baik sebagai sebuah jurusan dari suatu fakultas ataupun .</p>
6	TAHUN 1990-AN.	Didirikannya jurusan Ilmu Pemerintahan di berbagai Universitas	<p>Peran Ilmu Pemerintahan:</p> <p>1. didirikannya jurusan Ilmu Pemerintahan sejak tahun 1990an diberbagai universitas negeri di provinsi-provinsi, maka Ilmu Pemerintahan telah menjadi salah satu program studi dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang kita kenal hari ini.</p> <p>2. Diantaranya universitas-universitas tersebut adalah</p>

Prof. DR. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi
FILSAFAT PEMERINTAHAN

			<p>Universitas Hasanuddin Makassar (dulu Ujung Pandang), Padjadjaran di Bandung, Diponogoro di Semarang, Sam Ratulangi di Manado, Universitas Riau di Pekanbaru, Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Mulawarman di Samarinda dan lain-lain.</p>
7	TAHU 2004 IPDN	Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 2004	<p>Peran Ilmu Pemerintahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur profesional dipersiapkan untuk melahirkan tenaga-tenaga yang terampil sebagai kader-kader pemerintahan yang berasal institusi kedinasan/ akademi yang berasal dari Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang sejak tahun 2004 dilebur dengan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). 2. Sekarang bernama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan berada dibawah naungan Kementrian Dalam Negeri

Prof. DR. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi
FILSAFAT PEMERINTAHAN

			<p>Republik Indonesia.</p> <p>3. Dengan demikian, fungsi akademik Ilmu Pemerintahan secara pelan tapi pasti akan mampu mengejar ketertinggalannya dari pesatnya pengembangan keilmuan ilmu-ilmu sosial lainnya.</p> <p>4. Institut Pemerintahan Dalam Negeri Bahasa Inggris: <i>Institute of Governance of Home Affairs</i> disingkat "IPDN" adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia</p> <p>5. IPDN bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.</p> <p>6. Berdasarkan Keppres No. 87 Tahun 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. DR. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi
FILSAFAT PEMERINTAHAN

			<p>emutuskan untuk menggabungkan <i>Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) menjadi IPDN.</i></p>
8	TAHUN 2015. JPP	Tahun 2015. Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) juga mengalami perubahan nama menjadi Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP)	<p>Peran Ilmu Pemerintahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2015. Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) juga mengalami perubahan nama menjadi Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP), 2. Tahun 2015 resmi berganti kembali dengan nama Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP). 3. DPP telah menjadi bagian dari perkembangan keilmuan politik dan pemerintahan serta turut berkontribusi dalam pembangunan bangsa. 4. DPP menjadi kiblat

Prof. DR. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi
FILSAFAT PEMERINTAHAN

			<p>dari pengembangan ilmu politik dan pemerintahan di Indonesia.</p> <p>5. Patut untuk dicatat bahwasanya : Ilmu Pemerintahan mulai diberikan.</p> <p>6. Bantuan dari <i>International Cooperation Administration/ICA-AID</i> dari Amerika Serikat beserta para ahli dan pakar-pakar Administrasi Publiknya. Mata kuliah Administrasi Publik (Publik Administration) mulai mewarnai jurusan pemerintahan.</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan urutan kesejarahan sebagaimana yang dirunut diatas, tentunya juga terdapat perubahan dan pergeseran paradigmatik yang terjadi pada Ilmu Pemerintahan di Indonesia.



4.9. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Administrasi Publik / Public Administration atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara Negara.
- [2]. Alfian dan Hidayat Mukmin (ed). (1985). Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia serta Peranannya Dalam Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Jakarta: Rajawali Press.
- [3]. Anglo-Amerika adalah orang-orang yang merupakan penduduk Anglo-Amerika yang berbahasa Inggris. Biasanya mengacu pada negara dan kelompok etnis di Amerika yang berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa asli yang terdiri dari mayoritas orang yang berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa pertama.
- [4]. Aries Djaenuri (2016). Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan. Diktat Matakuliah Dasar-Dasar Pemerintahan. Jakarta.
- [5]. Kualifikasi pendidikan Daruat dalam pengertian bahwa kualifikasi keahlian masih rendah. Pegawai yang direkrut untuk jabatan pamong praja masih rendah pendidikan Sekorlah Rakyat, bahkan bariu kelas 3.
- [6]. Matthijs, Herman., Jans, M. Theo and Koker, Hedwig de . (2005). Bestuurswetenschappen: de overheid: Instellingen en Beleid. Published by Intersentia nv.
- [7]. Mulai tanggal 1 Agustus 1935 Pemerintah Hindia

Belanda mengeluarkan aturan tentang penggunaan ejaan baru di antaranya ejaan 'hoogeschool' menjadi 'hogeschool', 'hoogere burgerschool' - 'hogere burgerschool', 'algemeene' - 'algemene', dan seterusnya.

- [8]. OSVIA, Ensiklopedi Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta.
- [9]. Pangreh praja bahasa Belanda Inlands Bestuur atau Inlandsch Bestuur adalah salah satu dari dua bentuk birokrasi pemerintahan di Hindia Belanda, di samping Binnenlands Bestuur.
- [10]. Soerjosoedarmo, R. Soemendar. (1985). Perkembangan Konsep Ilmu Pemerintahan- Makalah Disampaikan pada Seminar IPP, Jakarta.
- [11]. Technische Hoogeschool (Sekolah Tinggi Teknik), yang dikenal dengan singkatan namanya THS didirikan di Bandung. Pada tanggal 28 Oktober 1924 Rechtshoogeschool (RHS atau Sekolah Tinggi Hukum) yang merupakan institusi pendidikan tinggi kedua dibuka di Jakarta, dan tiga tahun kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1927 Geneeskundige Hoogeschool (GHS atau Sekolah Tinggi Kedokteran) yang merupakan institusi pendidikan tinggi ketiga dibuka di Jakarta.
- [12]. Zijlmans, G. C. (1985). *Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst: Het corps Binnenlands Bestuur op Java, 1945-1950 (Dutch Edition)* (Dutch) Hardcover Publisher: Bataafsche Leeuw January 1, 1985.





BAB 5

FILSAFAT PEMERINTAHAN

Filsafat Pemerintahan diartikan sekumpulan sikap dan pemikiran yang kritis terhadap kepercayaan dan perilaku yang dijunjung tinggi oleh aparatur pemerintahan. Filsafat pemerintahan memiliki beberapa manfaat diantaranya: menolong perencanaan, membentuk asas, pedoman terbaik, sandaran intelektual. corak pribadi. Filsafat pemerintahan bisa memberi corak pribadi khas dan istimewa sesuai dengan prinsip good governance, memahami pemerintahan, mengasah hati dan pikiran, mengasah kemampuan, dan membantu berpikir rasional.

5.1. Pengertian Filsafat Pemerintahan

Hobbes dalam bukunya *Leviathan*, mengatakan bahwa tanpa perlindungan dari pemerintah yang berkuasa, manusia kehilangan keamanan.^[185] Pernyataan filsafat hobbes ini ingin menyatakan bahwa manusia yang hidup ini membutuhkan pejabat pemerintah

[185] Thomas Hobbes. *Leviathan* (Wisehouse Classics - The Original Authoritative Edition). Publisher Lightning Source Inc. Publication Date 15/10/2017. ISBN 9176374327.

yang berkuasa untuk memberikan perlindungan agar manusia merasa hidupnya aman dan nyaman. Membangun negara berdaulat yang didasarkan pada kekuatan keamanan. Pemerintah ini dapat dilihat sebagai pelindung orang terhadap Keadaan Alam yang luar biasa dan oleh karena itu merupakan perlindungan yang dibutuhkan orang dari ancaman kematian.^[186]

Kalimat Hobbes ini merupakan pembuka dari bab ini akan dibahas tentang Filsafat Pemerintahan. Terdapat banyak pemaknaan filsafat yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penting untuk menentukan makna filsafat yang akan dirangkaikan dengan makna pemerintahan. Beberapa pendapat mengenai makna filsafat yang diungkapkan oleh para filsuf dapat dikombinasikan hingga menjadi pemaknaan tersendiri. Untuk itu, makna **“filsafat pemerintahan”** yang akan digunakan disini yaitu semua pengetahuan yang sifatnya mendasar tentang pemerintahan.

Wilson dalam karyanya yang berjudul **“The Study of Administration”** menegaskan bahwa reformasi di bidang pelayanan publik harus mencakup tidak hanya perubahan pada pegawai pemerintahan tetapi juga pada organisasi dan perubahan kantor pemerintah. **Wilson** mengajarkan kepada kita bahwa mempelajari ilmu pemerintahan yang lebih fokus pada praktik pemerintahan, seperti bagian eksekutif, operatif dan bagian yang terlihat dari pemerintahan. Fungsi pemerintah semakin hari semakin kompleks. Untuk itu administrasi harus mencakup hal-hal yang baru, seperti kegunaan, murah & pelayanan pemerintah. Ide suatu negara memiliki konsekuensi ideal berupa perubahan tercatat dan kesadaran beradministrasi. Itulah mengapa dibutuhkan ilmu administrasi, untuk menguatkan roda pemerintahan.

[186] *Ibid.* Thomas Hobbes. Leviathan (Wisehouse Classics - The Original Authoritative Edition).

Hegel merumuskan bentuk negara ideal baginya, pandangannya tentang negara tersebut dapat dilihat pada dua karyanya yaitu *The Philosophy of History*^[187] dan *The Philosophy of Right*.^[188] Tentu saja pandangannya tentang negara tidak lepas dari sistem filsafat yang dibangunnya. *Hegel* menunjukkan bahwa hakekat manusia dimasukkan dan diwujudkan dalam kehidupan negara-bangsa. Menurutnya, negara-bangsa merupakan totalitas organik yang mencakup pemerintahan dan institusi lain yang ada dalam negara termasuk keseluruhan budayanya.^[189] *Hegel* juga menyatakan bahwa totalitas dari budaya bangsa dan pemerintahannya merupakan individu sejati. “Individu sejarah dunia adalah negara-bangsa”, maksudnya negara merupakan individu dalam sejarah dunia.

Marx dalam bukunya *Teori Markis*, mengatakan bahwa negara itu tidak mewakili kepentingan umum, tetapi mewakili khusus dari kelas dominan.^[190] Dari perspektif ini, birokrasi merupakan kepentingan partikular yang mendominasi kepentingan partikular lainnya. Kepentingan partikular yang memenangkan perjuangan kelas itulah yang dominan dan berkuasa.^[191] Birokrasi merupakan suatu instrumen dimana kelas dominan melaksanakan dominasinya atas kelas lainnya. Dalam hal ini kepentingan birokrasi pada tingkat tertentu menjalin hubungan intim dengan kelas

^[187]Hegel and the Translator, J. Sibree, M.A. (With Prefaces by Charles) (.2001). *The Philosophy of History Georg Wilhelm Friedrich Hegel*. Bathoche Books Kitchener. 2001

^[188]G.W.F. Hegel, *Philosophy of Right* § 3R (T.M. Knox trans., 1952) (1821).

^[189]Marx, K. and Engels, F. (1848).*The Communist Manifesto*

[190]Karl Marx and Frederick Engels, "Demands of the Communist Party" contained in the *Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels: Volume 7* (International Publishers: New York, 1977) pp. 3–6.

^[191]*Op.cit.* Hegel and the Translator, J. Sibree, M.A. (With Prefaces by Charles) (.2001). *The Philosophy of History*.

dominan dalam suatu negara. Dari sinilah netral atau tidak netral birokrasi pemerintahan mulai dibicarakan.

Para perdebatan para pemikir dan ilmuwan tersebut di atas telah memberikan landasan kuat untuk berpikir tentang filsafat pemerintahan. Meskipun filsafat pemerintahan tidak memberikan petunjuk teknis memerintah tetapi “*memberikan pemahaman dan arah tindakan*” yang seharusnya dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yang baik dan benar. Oleh karena itu menurut *Budi Supriyatno Filsafat Pemerintahan diartikan sekumpulan sikap dan pemikiran yang kritis terhadap kepercayaan dan perilaku yang dijunjung tinggi oleh aparatur pemerintahan*. Makna dari pengertian tersebut adalah *pertama*, sekumpulan sikap dan pemikiran yang kritis. *Kedua*, kepercayaan aparatur pemerintah dan. *Ketiga*, perilaku yang dijunjung tinggi dari aparatur pemerintah. Lihat Gambar 5.1. Filsafat Pemerintahan dibawah ini.



Gambar 5.1. Filsafat Pemerintahan oleh Budi Supriyatno

Dari gambar tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Pertama, Sikap Kritis dan Pemikiran terhadap Pemerintahan*. Sikap dan pemikiran kritris terhadap pemerintahan merupakan cara yang baik menuju pemerintahan demokrasi. Sikap kritis dan pemikiran memanfaatkan akalunya untuk

memahami hakikat kebenaran kegiatan pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur pemerintahan. Karena tanpa adanya sikap dan pemikiran kritis dari masyarakat pemerintahan bisa berjalan tidak sesuai dengan harapan rakyatnya, bisa melakukan penyimpangan, termasuk penyimpangan demokrasi dan penyimpangan penggunaan anggaran (*Korupsi, kolusi dan nefotoisme*). Sebagai warga negara khususnya yang memiliki kemampuan intelektual tinggi haruslah berani mengkritisi aparatur atau pejabat pemerintah yang dikatakan menyimpang dari tujuan negara. Sikap dan pemikiran kritis harus **“terus”** dibangun di negara yang demokratis. Contohnya: *dalam penanganan pademi Covid 19 (2020-2021) pemerintah memberikan vaksin gratis, kemudian ada informasi pemerintah mau memberikan vaksin gotong royong. Kemudian masyarakat menyikapi secara kritis bahwa vaksin gotong royong akan merugikan rakyat, karena harus bayar, sedangkan anggaran vaksin sudah disediakan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR.* Aparatur pemerintah harus mengedepankan kepentingan bersama, jangan hanya mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompoknya yang bisa merugikan rakyat. Dan masyarakat intelektual harus selalu memberikan masukan kepada pemerintahan dengan berpikir kritis. Sikap dan pemikiran kritis terhadap aparatur pemerintahan harus yang berdasarkan data dan fakta yang valid (sah) serta argumen yang tepat. Warga negara yang demokrasi hendaknya selalu memberikan masukan kepada aparatur pemerintahan dengan sikap dan pemikiran yang kritis kritis terhadap kebijakan dan pelaksanaan jalannya pemerintahan. Sikap dan pemikiran kritis ini haruslah didukung oleh sikap yang bertanggung jawab kepada apa yang dikritisi.

2. ***Kedua, kepercayaan aparatur pemerintah.*** Upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah tergantung pada kemampuan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi standar profesional. Untuk tujuan itu aparatur pemerintah di segala bidang, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut memiliki kompetensi teknis, akademis, leadership dan kompetensi etis yang dapat diandalkan. Artinya, dalam penyelenggaraan pemerintah tidak lagi mengedepankan kedekatan emosional, kedaerahan, kekeluargaan, balas budi dan sejenisnya. Apalagi sampai menggunakan pendekatan yang salah, seperti melalui ***“keagamaan”*** bisa memecah belah rakyat. ***Contohnya: Pilkada DKI tahun 2017, antara Anis Baswedan dan Ahok menggunakan unsur emosi agama, pilkada selesai masyarakat masih emosi.*** Sebagain besar di negara berkembang termasuk Indonesia kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah mengalami ***“degradasi”*** dari waktu ke waktu. Sering kita lihat di TV dan berita di media banyak pejabat pemerintah ketangkap KPK, hal ini menunjukkan tentang kelemahan, kebobrokan terhadap aparatur pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Aparatur sering melakukan kolusi, korupsi dan nefotisme terhadap kegiatan pemerintahan atau proyek pembangunan dari anggaran pemerintahan yang mengakibatkan masyarakat merasa ***“dikecewakan”***. Terlepas dari fenomena tersebut, para penyelenggara pemerintah di semua lini patut segera melakukan otokritik, minimal agar tidak terus-menerus terlena dalam buaian yang justru membunuh jati diri, karakter bahkan wibawa pemerintah secara luas.

3. ***Ketiga, perilaku yang dijunjung tinggi dari aparatur pemerintah.*** Perilaku merupakan suatu kegiatan atau aktivitas dari manusia. ***Budi Supriyatno mengatakan perilaku aparatur ialah semua aktivitas dari apartur yang selalu diamati secara langsung oleh masyarakatnya.*** Baik buruknya perilaku aparatur akan dinilai oleh masyarakat. Menghadapi perubahan yang cepat dengan peradaban teknologi informasi tinggi dan tututan masyarakat yang cepat, maka aparatur harus meningkatkan kompetensi teknis dan didukung perilaku terutama dalam ***“penalaran moral”*** yaitu perilaku yang harus dijunjung tinggi sebagai aparatur yang menjalankan tugas pelayanan masyarakat. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya aparatur negara khususnya proses pengambilan kebijakan dan implementasi yang tepat yang menekankan pada perilaku yang baik. Perlunya terobosan yang tepat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik. Apalagi ketika berhadapan dengan tututan masyarakat dalam peradaban kemajuan pola pikir masyarakat dewasa ini. Agar dapat mengembalikan jati diri, karakter dan wibawa pemerintah, maka sudah saatnya dibutuhkan sebuah penopang berupa kompetensi teknis, yang sinergi pada tuntutan etika atau perilaku yang dapat mendorong responsifitas pamerintah terhadap kebutuhan public.Kompetensi etis menurut ***J.S.Bowman (2015)***, meliputi manajemen nilai, pengembangan sekaligus penalaran moral, baik moralitas individu maupun publik, serta etika organisasi.

Filsafat Pemerintahan adalah sekumpulan sikap dan pemikiran yang kritis terhadap kepercayaan dan perilaku yang dijunjung tinggi oleh aparatur pemerintahan.

Budi Supriyatno

Apabila ketgia hal tersebut dijadikan acuan, maka peletakan publisitas dan potitioning Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemeritah daerah akan lebih baik, dicintai dan dipercayai rakyat. Disinilah letak filsafat pemerintahan yang dimaksudkan. Karena pemerintahan itu sendiri meliputi banyak hal seperti **kekuasaan, kebijakan, pelayanan, pemberdayaan, pengaturan, perundangan, pelak-sanaan pembangunan** dan lain-lainnya.

Dalam konteks ini *Budi Supriyatno* menegaskan, bahwa Ilmu Pemerintahan dapat dijadikan alat untuk menjelaskan :

1. **Pengaturan Masyarakat.** Pengaturan masyarakat yang dimaksud adalah aparatur pemerintah membuat dan melakukan kebijakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib, terarah dan teratur dalam meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan bersama.
2. **Pelayanan Publik.** Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur negara/pemerintah dalam mengimplementasikan hak masyarakat yang menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing lembaga pemerintah, atau pelayanan public dalam memenuhi kewajiban kepada masyarakat yang menjadi hak warga negara yang dikelola oleh lembaga pemerintah/ lembaga negara.

Sebagai salah satu cabang ilmu, ilmu pemerintah yang akan berkembang terus harus semakin fungsional untuk mengkritisi kinerja yang dilakukan aparatur pemerintahan. Dengan demikian ilmu pemerintahan bisa diaplikasikan kedalam praktik kepemerintahan, tidak hanya sekedar teoritis yang dibicarakan di **“menara gading”** atau kampus sebagai program studi yang hanya sekedar teoritis, tetapi teori itu bisa dipraktekan secara teknik di lapangan.

5.2. Obyek Filsafat Pemerintahan

Setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai obyek. Obyek dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: *obyek material* dan *obyek forma*.

Obyek material adalah sasaran material suatu penyelidikan, pemikiran atau penelitian ilmu. Obyek material juga berarti hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Obyek material mencakup baik yang konkret maupun yang abstrak, yang materil maupun yang non-materil. Bisa pula berupa hal-hal, masalah-masalah, ide-ide, konsep-konsep dan sebagainya. Objek material dari ilmu pemerintahan adalah realitas pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya, totalitas dari fungsi kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif. Istilah obyek material sering juga disebut pokok persoalan. Pokok persoalan dalam ilmu pemerintahan dibedakan atas dua arti, yaitu:

1. Pokok persoalan ini dapat dimaksudkan sebagai bidang pemerintahan dari penyelidikan faktual. Misalnya: penyelidikan tentang perilaku aparatur termasuk bidang pemerintahan. Pejabat korupsi termasuk masalah pemerintahan.
2. Kumpulan pertanyaan pokok yang saling berhubungan. Misalnya: perilaku aparatur yang buruk, dan pejabat korupsi keduanya berkaitan dengan pemerintahan yang buruk. Kedua dapat dikatakan memiliki pokok persoalan yang sama, namun juga dikatakan berbeda. Perbedaan ini dapat diketahui apabila dikaitkan dengan corak-corak pertanyaan yang diajukan dan aspek-aspek yang diselidiki dari pemerintahan tersebut.

Suatu obyek material dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan ilmu yang berbeda-beda.

Obyek formal adalah pendekatan secara cermat dan bertahap menurut segi-segi yang dimiliki obyek materi dan menurut kemampuan seseorang. Obyek formal diartikan juga sebagai sudut pandang yang ditujukan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut pandang darimana obyek material itu disorot. Obyek formal suatu ilmu tidak hanya memberikan keutuhan ilmu, tetapi pada saat yang sama membedakannya dari bidang-bidang lain.

Terdapat perbedaan dari para ahli tentang *objek formal* dari ilmu pemerintahan. Hal ini disebabkan para ahli dalam memberikan definisi tentang ilmu pemerintahan ini berdasarkan latar belakang dan pengalamannya sendiri-sendiri, sehingga memberikan dampak "*perbedaan*" pada objek forma ilmu pemerintahan. Namun demikian objek materianya sama yaitu pemerintah atau negara.

Untuk memperluas pemahaman tentang ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri dengan obyek telaaahannya *Budi Supriyatno* ilmu pemerintahan memiliki obyek yang dipelajarinya, yaitu pemerintahan. Telah disebutkan dalam bab sebelumnya *Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kinerja aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan negara.*^[192] Pemerintahan disini dipandang sebagai segala kegiatan yang terorganisir, bersumber pada kedaulatan, dan berlandaskan pada dasar negara mengenai rakyat, serta wilayah negara demi tercapainya tujuan. Suatu tugas dan fungsi hanya dapat dilaksanakan jika disertai kewenangan dan kekuasaan. Oleh karena itu, seringkali pemerintahan juga dapat dikatakan sebagai kekuasaan Negara. Kekuasaan negara menurut *A.M Donner*

^[192] *Op.cit.* Budi Supriyatno.

terbagi menjadi dua jenis: *taak en doelstelling* (penentuan tugas dan tujuan) dan *uitvoering* (eksekusi atau pelaksanaan terhadap tugas dan tujuan yang telah ditetapkan).^[193] Menurut *A.M. Donner* terdapat beberapa pembedaan kekuasaan pemerintahan jika kita dilihat dari segi sifat hakikat fungsi yang ada dalam suatu negara, yang dibagi menjadi dua golongan, yakni :^[194]

1. Kekuasaan yang menentukan tugas (*taakstelling*) dari alat-alat pemerintah atau kekuasaan yang menentukan politik negara.
2. Kekuasaan yang menyelenggarakan tugas yang telah ditentukan atau merealisasikan politik negara yang telah ditentukan sebelumnya (*verwezenlijking van de taak*).

Hal senada juga dikemukakan oleh *Herman Finner*, bahwa pemerintahan itu meliputi : (1) *The process of politics*, and (2) *The process of administration*. Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa obyek studi Ilmu Pemerintahan itu meliputi proses perumusan kebijakan pemerintah (dalam area politis) dan proses pelaksanaan kebijakan (dalam area administrative/teknis), sehingga *Herman Finner* dalam bukunya *Theory and Practice of Modern Government* mengatakan dengan sebuah jargon yang ramah ditelinga kita yaitu “*Government is Politics Plus Administration*.”^[195] Menurut *Mac Iver*, merumuskan pengertian Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari pemerintahan suatu Negara dan tentang asal mula terjadinya pemerintahan, serta kondisi yang ditimbulkan dari

^[193] A.M. Donner (2015). Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. Retrieved 27 July 2015.

^[194] *Ibid.* A.M. Donner's.

^[195] Herman Finer (1932). *The Theory and Practice of Modern Government*. Vols. I and II. New York: Dial Press, Linciln Mac Veagh, 1932.

adanya bentuk-bentuk pemerintahan yang ada, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, mekanisme pemerintahan, kepemimpinan pemerintah-an, fungsi-fungsi pemerintahan.^[196]

Pendapat *MacIver*, objek formal dan Ilmu Pemerintahan sangat luas, tidak spesifik pada satu *focus of interest*.^[197] Kejelasan objek dibagi kedalam objek material dan objek forma dari Ilmu Pemerintahan sebagai berikut:

1. ***Objek Material Ilmu Pemerintahan*** adalah realitas pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya, totalitas dari fungsi kekuasaan Legislatif Eksekutif dan Yudikatif.
2. ***Objek Forma Ilmu Pemerintahan*** adalah realitas pemerintahan dalam arti sempit, yaitu fungsi kekuasaan Eksekutif. ***Atau yang telah disebutkan di atas obyek Forma Ilmu Pemerintahan adalah hubungan-hubungan pemerintahan, gejala, dan peristiwa pemerintahan.***

Bertolak dari beberapa pengertian dan pendapat diatas, dapat dikemukakan bahwa "***obyek material***" dari ilmu pemerintahan adalah "**Negara**" dapat dikatakan pemerintah sebagai salah satu unsur dari Negara. Sedangkan "***obyek forma***" nya adalah kegiatan-kegiatan pemerintahan dan hubungan- hubungan pemerintahan bisa bersifat politis dan bisa bersifat teknis. Berdasarkan pemahaman tersebut tampak bahwa ilmu pemerin-tahan termasuk dalam rumpun ilmu-ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai obyek materianya bersama-sama dengan ilmu- ilmu kenegaraan lainnya seperti ilmu politik, ilmu administrasi negara/publik, ilmu hukum, dan ilmu negara itu sendiri.

Dengan demikian, ilmu pemerintahan tetap bisa "***dibedakan***" dengan ilmu- ilmu kenegaraan lainnya terutama

^[196] Robert Morrison MacIver. (2005). *Politics and Society* Published by Transaction Publishers, 1 Jun 2005.

^[197] *Ibid.* Robert Morrison MacIver.

dengan ilmu politik. Ilmu Politik terfokus pada kajian fenomena kekuasaan, sedangkan ilmu pemerintahan memusatkan perhatian pada fenomena kekuasaan dalam berbagai ranah publik seperti: kewenangan atau kekuasaan yang legal. Pengkajian kekuasaan dalam ranah publik inilah yang membedakan kajian ilmu pemerintahan dengan kajian ilmu politik yang pada umumnya mendalami fenomena kekuasaan dalam ranah private kekuasaan murni.

Objek forma bersifat spesifik karena merupakan pusat perhatian suatu disiplin ilmu pengetahuan. Selanjutnya juga memberikan perbedaan dan persamaan ilmu-ilmu kenegaraan yang terdiri dari ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hukum tata negara. ilmu negara ditinjau dari objek material dan objek formanya.

Persamaan dari ilmu-ilmu kenegaraan tersebut terletak pada objek materinya, yaitu negara. Sedangkan, perbedaannya terletak pada *Objek Forma*-nya seperti berikut:

1. ***Objek Forma dari Ilmu Pemerintahan adalah hubungan-hubungan pemerintahan, gejala, dan peristiwa pemerintahan.***
2. ***Objek Forma dari Ilmu Politik*** adalah kekuasaan, kepentingan rakyat, group penekan.
3. ***Objek Forma dari Ilmu Administrasi*** Negara adalah pelayanan, organisasi, manajemen, dan birokrasi.
4. ***Objek Forma dari Ilmu Negara*** adalah konstitusi, timbul dan tenggelamnya negara.
5. ***Objek Forma dari Ilmu Hukum*** adalah peraturan perundang-undangan.

Perbedaan Obyek Materi dan Obyek Forma ilmu kenegaraan tersebut, perhatikan tabel 5.1. berikut :

Tabel 5.1. PERBEDAAN OBYEK MATERI DAN OBYEK FORMA ILMU KENEGARAAN

NO	DISIPLIN ILMU PENGETAHUAN	OBYEK MATERI	OBYEK FORMA
1	Ilmu Pemerintahan	Negara: fungsi kekuasaan Negara: Legislatif Eksekutif dan Yudikatif.	Hubungan pemerintahan, gejala-gejala pemerintahan, peristiwa pemerintahan.
2	Ilmu Politik	Negara: pembentukan, pembagian kekuasaan dalam negara.	Kekuasaan , partai politik, organisasi masyarakat, kepentingan, tekanan.
3	Ilmu Administrasi Negara	Negara: aktivitas aparatur untuk tercapainya tujuan negara	Pelayanan , organisasi pemerintahan, dan manajemen pemerintahan.
4	Ilmu Hukum	Negara: himpunan perintah atau larangan, mengatur tata tertib dalam negara	Hukum , peraturan perundangan, konstitusi dan konvensi.
5	Ilmu Negara	Negara: Asal mula Negara, Hakekat Negara Bentuk – bentuk Negara dan pemerintahan.	Konstitusi , pertumbuhan dan perkembangan Negara, lahir dan tenggelamnya negara

Keterangan :

1. *Objek materia bersifat umum* karena topik yang dibahas

secara global tentang pokok persoalan.

2. **Objek forma bersifat khusus dan spesifik** karena merupakan pusat perhatian suatu disiplin ilmu pengetahuan.

5.3. Pengembangan Ilmu Pemerintah ke Depan

Pengembangan ilmu pemerintahan dewasa ini termasuk cukup menggembirakan. Sudah mulai banyak perguruan tinggi yang mengembangkan program S1, S2 maupun S3 bidang pemerintahan. Diharapkan pada masa-masa mendatang akan semakin banyak teori dan konsep pemerintahan yang dihasilkan dan dapat diimplementasikan dalam kegiatan pemerintahan.

Seiring dengan paradigma pengembangan ilmu lainnya yang mengarah pada pendekatan *konvergensi* sebagai pengganti pendekatan *divergensi* dari *Immanuel Wallerstein* dengan konsep “*world system*”-nya, maka ilmu pemerintahan juga perlu dikembangkan melalui pendekatan *konvergensi*. Artinya pemisahan secara tajam antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lainnya sudah selayaknya tidak digunakan lagi.^[198] Melalui pendekatan konvergensi, ilmu pemerintahan justru akan dapat dikembangkan dengan pesat karena akan leluasa meminjam teori dan konsep dari berbagai ilmu lainnya, tanpa perlu mengingat lagi *locus* dan *focus* suatu ilmu. Bagi masyarakat, ilmu apapun harus dapat menjelaskan gejala dan atau peristiwa yang sedang menjadi pembahasan secara logis, rasional serta sistematis, sehingga ilmu tersebut bermanfaat bagi kehidupan.

Dilihat dari berbagai literatur aktual mengenai pemerintahan, nampak kecenderungannya mengarah pada penguatan manajemen

^[198]Wallerstein, Immanuel. 1974. *The modern World System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. New York: Academic Press.

pemerintahan. Buku-buku terkenal seperti karangan *Osborne & Gaebler (1992)*,^[199] *Michael Barzelay (1987)*,^[200] *E.S. Savas (1987)*,^[201] *Ingraham & Romzek and Associates (1994)*,^[202] *Budi Supriyatno (Manajemen Pemeirntahan Puls Duabelas Langkah Strategis: 2009)* menekankan perlunya penguatan manajemen pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari pandangan *Drucker (1995)* yang mengatakan bahwa kegagalan organisasi pemerintah sebagai institusi penyedia jasa layanan lebih banyak disebabkan oleh aspek manajemennya.^[203] Dilihat dari perkembangan ilmu manajemen yang sudah sampai pada generasi kelima (G5), maka manajemen yang digunakan pada sektor pemerintah barulah pada tahap generasi kedua (G2) ataupun generasi ketiga (G3). Sehingga sudah selayaknya apabila pemerintahan, baik sebagai ilmu pengetahuan memanfaatkan kemajuan ilmu manajemen.

Salah satu perubahan besar yang terjadi pada umat manusia di dunia disebabkan oleh perubahan manajemen. *Peter F.*

[199] Osborne & Gabler (1992) dalam bukunya *Reinventing Government : How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector*, berargumen bahwa sektor publik perlu melakukan transformasi dengan menyuntikan semangat kewirausahaan pada para pejabat publik dan organisasi publik.

[200].Barzelay(1982):*Breaking Through Bureaucracy*:masyarakat bosan dan muak pada birokrasi yang rakus dan bekerja lamban.

[201] E.S Savas (1987) dalam bukunya *Privatization : The Key To Better Government*, menawarkan privatisasi sebagai sebuah alternatif solusi dalam penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi lebi efektif dan efisien. Menurut Savas privatisasi merupakan kunci pokok kearah pemerintahan yang lebih baik.

[202] Patricia W. Ingraham, Barbara S. Romzek & Associates, *New paradigms for government—Issues for changing public service*. Jossey-Bass Publishers, San Francisco, CA, 1994. 352 pages, ISBN 1-55542-656-5.

[203]Peter F.Drucker (1966):*The Age of Discotinuity*:kemungkinan bangkrutnya birokrasi.

Drucker, sebagai Bapak Manajemen Modern mengatakan bahwa **“manajemen adalah penemuan terbesar abad ke-21.”** [204]

Secara teoretis, ilmu manajemen yang semula merupakan bagian dari ilmu ekonomi sudah berkembang sampai generasi *kelima*. *Savage* mengatakan bahwa manajemen telah sampai pada generasi kelima dengan nama **“Human Networking Management.”** [205] Pada generasi *kelima*, manajemen sudah sepenuhnya menggunakan jaringan manusia berbasis komputer. Hal ini berbeda dari manajemen pada generasi sebelumnya yaitu generasi pertama sampai generasi kelima sebagai berikut:

1. *Manajemen generasi pertama* yang dinamakan **“Jungle Management”** digunakan pada institusi yang masih sederhana dengan ciri tidak ada pembagian tugas yang jelas. Kegiatan dijalankan tanpa perencanaan dan lebih bersifat naluriah.
2. *Manajemen generasi kedua* yang dinamakan **“Management by Direction”** yang dikembangkan oleh ilmuwan antara lain *Terry, Taylor, Gullick, Koontz et al,* [206] dan para pakar seangkatannya. Ciri utama manajemen generasi kedua adalah dominannya peran kepemimpinan dalam menentukan keberhasilannya. Sebagian besar organisasi pemerintah masih menggunakan model manajemen generasi kedua. Hal ini ditandai dengan dominannya peran pimpinan unit atau lembaga dalam mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan

[204] Peter F. Drucker(1999): Management challenges for the 21st century. Oxford: Butterworth-Heinemann.

[205] Savage, Charles M., 5th Generation Management-Integrating Enterprises through Human Networking, Digital Press, USA, 1990.

[206] *Terry, Taylor, Gullick, Koontz et al*, dalam Koontz & Weirich, Essentials of Management, Tata McGraw Hill.

kegiatannya. Di Indonesia, praktik ini diperkuat pada masa pemerintahan Orde Baru yang menggunakan manajemen militer dalam mengelola negara.

3. **Manajemen generasi ketiga** yang dinamakan “*Management by Objective*” dengan tokoh utamanya **Peter F. Drucker**. Lima langkah dalam manajemen berdasarkan sasaran menurut **Drucker** adalah sebagai berikut : ^[207]
 - a. determine or revise the organizational objectives;
 - b. translating the organizational objectives to employees;
 - c. stimulate the participation of employees in determining of the objectives;
 - d. monitoring of progress;
 - e. evaluate and reward achievement.Ciri utama manajemen generasi ketiga adalah mengutamakan hasil atau “*kuantitas*”, tetapi belum memberi perhatian pada kualitas.
4. **Manajemen generasi keempat** yang dinamakan “*Total Quality Management*” dengan ciri mengutamakan “*kualitas dan kepuasan pelanggan*”. Tokohnya antara lain adalah **W.Edwards Deming, Joseph M Juran**, serta **Brian L. Joiner**. *Total Quality Management* atau “*Manajemen Mutu Total*” membagi lingkaran kedalam empat kategori yakni: **Plan; Do; Check; Act** atau **PDCA**. Idealnya, perubahan pada aspek manajemen diikuti dengan perubahan pada aspek organisasi dan sebaliknya sehingga diperoleh perubahan yang seimbang dan selaras. Dalam kenyataannya, perubahan manajemen ternyata tidak diikuti oleh perubahan model organisasinya.
5. **Manajemen generasi kelima**. **Manajemen generasi ke-**

^[207]Obcit. Peter F. Drucker(1999): Management challenges for the 21st century.

empat nampaknya melahirkan “*embrio*” bagi lahirnya ilmu manajemen *generasi kelima*, yang isinya merupakan perpaduan *antara ilmu pemerintahan dan ilmu manajemen manajemen sudah sepenuhnya menggunakan jaringan manusia berbasis komputer*. Terlebih lagi, nilai yang dimaksimumkan dari ilmu pemerintahan bukan hanya *Efektivitas*, melainkan sudah menjadi *Efektivitas, Efisiensi, Equity/Keadilan, serta Ekonomik*).

Dalam manajemen pemerintahan keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui berbagai tahapan. Tahapan ini seyogyanya memanfaatkan kemajuan “*ilmu manajemen*” seperti manajemen generasi kelima yang mengarah kepada efektivitas, efisiensi, equity atau keadilan, serta ekonomik. Sesungguhnya kontribusi yang sangat besar dalam mengembangkan ilmu pemerintahan adalah “*aparatur pemerintah.*” Alasannya adalah kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan dengan mempraktikkan ilmu pemerintahan secara baik dan benar serta konsisten. Kalau aparatur mampu melaksanakan manajemen pemerintahan secara baik maka program pemerintahan akan dapat berjalan dengan baik, sehingga bisa tercapinya tujuan pemerintah yang mewujudkan rakyat yang adil dan makmur. Oleh karena itu pengembangan ilmu pemerintahan akan baik bila bisa aparatur memanfaatkan perkembangan ilmu pemerintahan dengan menggabungkan ilmu manajemen.

5.4. Posisi Filsafat Pemerintahan

Dalam menentukan posisi filsafat pemerintahan sama persis dengan menentukan arah bagi perjalanan studi pemerintahan itu sendiri. Jika filsafat pemerintahan diposisikan pada makna

pemerintahan sebagaimana konstruksi *Kybernologi* maka tiga langkah penting diperlukan disana.

1. *Memahami filsafat pemerintahan sebagai sebuah sistem berpikir*. Langkah ini penting mengingat karena beberapa karya ilmiah yang menyatakan bahwa filsafat pemerintahan kehilangan arah karena gagal memisahkan filsafat dari teologi, mitos, dan karya sastra. Benar bahwa semua pemikiran filsafat berawal dari mitos dan juga teologi. Tetapi kedua hal yang disebut terakhir berhenti manakala filsafat melangkah pada tujuannya untuk menjelaskan makna. Pertanyaan-pertanyaan filsafat jauh merasuk, menggoncang, menyanggah, dan meminta penjelasan atas segala hal yang dalam mitos dan teologi diterima sebagai hal yang tidak dapat dipertanyakan. Memasukan tulisan teologi dalam kajian filsafat pemerintahan sama sekali tidak bermanfaat kecuali justru untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang dasar dan makna dari semua pernyataan teologis itu sendiri. Filsafat adalah, sebagaimana dipahamkan **Bertrand Russell** merupakan bidang kajian yang terletak ditengah-tengah antara teologi dan sains.^[208] Semua pengetahuan definitif, lanjut **Russell**, ada dalam sains. Semua dogma yang melampaui pengetahuan definitif ada dalam teologi. Antara sains dan teologi, terdapat wilayah tak bertuan yang ditempati filsafat.^[209] Filsafat, sejak kemunculannya di *Yunani* pada **abad 6 SM** hingga saat ini – dari *Thales*^[210]

[208] Bertrand Russell (1998). "6: Principia Mathematica" .Autobiografi . Pers Psikologi. ISBN 9780415189859 .

[209] *Ibid.* Bertrand Russell (1998).

[210] Thales dari Miletos adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat Barat pada abad ke-6 SM.

hingga *Habermas*^[211] tidak lain adalah suatu sistem berpikir. Sebagai sistem berpikir, filsafat merupakan gambaran utuh pikiran manusia yang dimulai dari ide hingga diwujudkan dalam motif tindakan.

2. **Menetapkan Fokus.** Menetapkan fokus kajian terhadap pertanyaan-pertanyaan pokok dalam filsafat pemerintahan. *Jonathan Wolff* mengemukakan hanya ada dua pertanyaan pokok dalam filsafat yang mengkaji kekuasaan. Yakni ^[212]:
 - a. Pertanyaan tentang siapa mendapatkan apa.
 - b. Pertanyaan tentang siapa yang berkata apa.

Pertanyaan pertama sangat dekat dengan konstruksi *kybernologi* tentang pemerintah selaku penyedia layanan masyarakat dan jasa publik. Peran pemerintah selaku penguasa yang adil dipertanyakan dalam konstruksi filsafat pemerintahan yang mengangkat pertanyaan ini. Tidak diragukan bahwa *kybernologi* berjalan diatas langkah filsafat *Hobbes* yang mengkonstruksikan kondisi asali pemerintahan sebagai situasi kelangkaan (*scarcity*).^[213] Tetapi meskipun ditolak oleh *Locke*^[214] dan *Rousseau*,^[215] teori tentang kelangkaan hampir tidak terbantahkan. Pemerintah dimata

^[211] Jurgen Habermas adalah seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman. Ia adalah generasi kedua dari Mazhab Frankfurt.

^[212] Jonathan Wolff An (2006) Introduction to Political Philosophy Paperback – 23 Mar. 2006. Published by Oxford Page 1.

^[213] William R. Allen. (1976) Scarcity And Order: The Hobbesian Problem And The Humean Resolutionsocial Science Quarterly. Journal Article Vol. 57, No. 2, Scarcity And Society (September, 1976), Pp. 263-275.

^[214] JohnLocke, (1689) *Two Treatises of Government*, Peter Laslett (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 1988. Citations are to *Two Treatises* then treatise and section.

^[215] Clifford Orwin, Nathan Tarcov (1997). *The Legacy of Rousseau* University of Chicago Press. Mar 29, 1997.

Hobbes^[216] dan juga *Kybernologi*, hadir untuk mengatasi kelangkaan ini. Bagi *Kybernologi*, tugas pemerintah adalah membagi secara adil, sehingga masyarakat merasa pemerintah hadir dalam melayani kebutuhannya.

Menurut **Budi Supriyatno**, pernyataan tentang adilnya pemerintah akan menjadi sumber dimana dahaga filsafat pemerintahan dipuaskan.^[217] Tetapi filsafat pemerintahan tidak cuma memuaskan dahaga. Filsafat pemerintahan membutuhkan kekuatan untuk terus bergerak maju. kekuatan itu didapat dari upaya menjawab pertanyaan kedua **Wolff**: siapa berkata apa?^[218] Pertanyaan ini mengarah pada subjek pemerintahan.

Subjek pemerintahan adalah pribadi pelaku pemerintahan. Subjek itu aparatur yang berkewajiban melayani kebutuhan public, menurut **Budi Supriyatno** “*pamong rakyat*” atau aparatur itu pelayan masyarakat. Bukan minta “*dilayani*” tetapi “*melayani*.”^[219] Upaya menjawab pertanyaan siapa mengatakan apa adalah pekerjaan menghadirkan aparatur atau birokrat seperti aktor sebagai seorang artis yang melayani dengan seni, menampilkannya dalam wajah ramah seperti *ki lurah semar bodronoyo* sang penuntun.^[220] Atau

^[216] *Ibid.* William R. Allen. (1976) Scarcity And Order: The Hobbesian Problem And The Humean Resolutionsocial Science Quarterly.

^[217] Budi Supriyatno. (2017) Peran Pemerintah harus adil. Meurpakan sumber dari Filsafat Pemerintah. .

[²¹⁸] *Opcit.* Jonathan Wolff An (2006) Introduction to Political Philosophy Paperback – 23 Mar. 2006. Published by Oxford Page 1.

^[219] Budi Supriyatno.(2009). Manajemen Pemerintahan (Plus dua belas langkah strategis). Media Brilian, page 23.

^[220] *Ibid.* Budi Supriyatno.(2009). Manajemen Pemerintahan (Plus dua belas langkah strategis). page23.

menghadirkannya dalam rupa seorang *pamong* yang memberikan bimbingan dan tuntutan yang baik, sabar dan adil kepada rakyat. Seorang aparatur harusnya seperti itu memberikan sumber daya yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Seorang aparatur tidak membedakan atau terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), semua masyarakat mempunyai hak yang sama. Filsafat pemerintahan sejatinya mencari asal-usul, tujuan, dan makna subjek pemerintahan, yang focusnya melakukan pelayanan kepada rakyat yang adil.

3. *Menyusun Kerangka Kerja Filsafat Pemerintahan.* Menyusun Kerangka Kerja Filsafat Pemerintahan sebuah langkah sulit, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sejak *Platon* hingga *Hobbes*, kerangka kerja filsafat pemerintahan, lebih tepatnya filsafat politik, bertalian dengan aspek-aspek pengaturan tata negara. Aspek pelayanan masyarakat adalah ruang kosong tak bertuan. ***Kemudian pertanyaannya adalah:*** Siapa “*pelayan*” masyarakat itu? Bila kita telusuri “*pemerintahan*” dalam konstruksi *Kybernologi* adalah upaya mengubah perspektif umum pemerintahan itu sendiri dari wajah “*pengatur*” menjadi “*pelayan*.”^[221] Pencarian pijak atas konstruksi ini mungkin bukan pada karya *Platon* yang berjudul “*repubik*” tetapi justru pada karyanya yang berjudul “*Krito*”. Kajian *Krito* lebih dekat dengan *Kybernologi* karena didalamnya memuat moral para penuntun yang taat hukum, setia kepada negara, dan rela menderita demi kebenaran – semua ciri yang dibutuhkan untuk membentuk seorang

^[221] Budi Supriyatno.(2009). Semar adalah Punokawan Pandawa. Punakawan adalah abdi dalem, abdi Negara yang hidupnya dipersiapkan untuk melayani.

apartur seperti *Ki Lurah Semar Badrayana* dalam menjalankan tugas pemerintahan untuk melayani masyarakat dengan etika dan moral yang baik.^[222] Dalam posisi subjek pemerintahan sebagai hakim yang adil, filsafat *Thomas Hobbes* merupakan rujukan pokok dalam hal kelangkaan.^[223] Tetapi sifat pelayanan lebih dekat dengan filsafat *Rousseau*. Penggalan dan pencarian yang terus menerus di dalam *Hobbes and Rousseau* memungkinkan filsafat pemerintahan mengajukan serangkaian teori tentang dasar-dasar moral pemerintahan.^[224] Metode dialektika *Hegel*^[225] sebagaimana dipraktikkan *Marx* tentu saja bermanfaat dalam pengembangan studi filsafat pemerintahan.^[226] Sesungguhnya *Hegel* menghadirkan aparatur untuk rakyatnya. *Dengan urain tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kerangka kerja filsafat pemerintahan adalah* menjalankan tugas pemerintahan oleh aparatur untuk melayani masyarakat dengan adil tidak diskriminasi didasari dengan etika dan moral yang baik.

^[222] *Ibid.* Budi Supriyatno.(2009). Semar adalah Punokawan Pandawa.

^[223] Thomas Hobbes *Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil.* buku yang ditulis oleh Thomas Hobbes (1588-1679) dan diterbitkan pada tahun 1651.

^[224] See Article Maurice Cranston and Richard S. Peters. (1972). *Hobbes and Rousseau: A Collection of Critical Essays.* Edited by (New York: Anchor Books. 1972.

^[225] Hegel's Dialectical Method, see Hegel. "Section in question from Hegel's Science of Logic". Marxists.org. Retrieved 2011-11-03.

^[226] See Marx became a Fellow of the highly prestigious Royal Society of Arts, London, in 1862. *Elements of the Philosophy of Right (Grundlinien der Philosophie des Rechts)* 1821.

5.5. Landasan Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu ilmu pengetahuan jika jelas dan tegas landasannya. Landasan ilmu pemerintahan tersebut adalah *ontologi, epistimologi dan aksiologi*. Ketiga landasan tersebut diuraikan seabgai berikut:

1. *Landasan Ontologi*

Landasan ontologi merupakan jawaban atas pertanyaan utama yaitu apa yang ingin diketahui ilmu atau apa telaah ilmu. Ilmu berbeda dengan pengetahuan. Ilmu mengkaji masalah-masalah yang telah diketahui atau yang ingin diketahui yang tidak terselesaikan dalam pengetahuan sehari-hari.

Sejatinya ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling "*kuno*" dan berasal dari *Yunani*. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti *Thales, Plato, dan Aristoteles*.^[227]

Pengertian ontologi secara etimologi berasal dari bahasa *Yunani* yakni "*Onto*" yang memiliki pengertian sebagai suatu yang sungguh-sungguh ada dan adanya itu benar, atau kenyataan yang sesungguhnya. Sedangkan "*logos*" memiliki arti sebagai kata, ilmu, studi tentang teori.

Sedangkan pengertian ontologi secara terminologi, memiliki pengertian ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang benar-benar ada dan adanya itu benar. Teori tersebut membahas mengenai kebenaran yang ada atau ciri hakiki dari keberadaan.

Ontologi sangat menarik untuk dibahas mulai dari peradaban kuno sebelum masehi hingga sekarang ini, tidak hentinya para ahli untuk memberikan pengertian ontologi. Beberapa

[227]Thales, Plato, dan Aristoteles. Greek figures who have an ontological view are known.

pengertian ontologi menurut para pakar sebagai berikut:

Aristoteles, mengatakan bahwa pengertian ontologi adalah teori atau studi tentang being atau wujud misalnya karakteristik dasar terhadap suatu realitas.^[228] **Caluberg** menyatakan ontology merupakan ilmu pertama studi tentang yang ada sejauh ada.^[229] Studi ini dianggap berlaku untuk semua entitas, termasuk Allah dan semua ciptaan dan mendasari baik teologi maupun fisika. **Baumgarten** mendefinisikan ontologi sebagai studi tentang predikat yang paling umum atau abstrak dari semua hal pada umumnya.^[230]

Budi Supriyatno memberikan pengertian *ontologi adalah suatu ilmu yang membahas tentang sesuatu kebenaran yang berhubungan pada sifat dan hakekat sesuatu yang ada.*^[231] Definisi tersebut menekankan tentang ide bahwa ontologi memberikan dua cara pandang terhadap kebenaran yang berhubungan pada sifat dan hakekat yang ada.

Ontologi ilmu meliputi apa hakekat ilmu itu, apa hakekat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak terlepas dari persepsi filsafati tentang apa dan

[228]Aristoteles. (Born 384 BCE-322), He was the author of a philosophical and scientific system. Ontology is the study of being.

[229]Johannes Clauberg (24 February 1622 – 31 January 1665) was a German theologian and philosopher. Clauberg was the founding Rector of the first University of Duisburg, He is known as a "scholastic cartesian Caluberg stated that ontology is the first science to study what exists insofar as it exists.

[230]Alexander Gottlieb Baumgarten, (born July 17, 1714-died May 26, 1762, Frankfurt an der Oder), German philosopher and educator who coined the term aesthetics and established this discipline as a distinct field of philosophical inquiry. Baumgarten defines ontology as the study of the most general or abstract predicates of all things in general

[231]Budi Supriyatno (2019). Makna dan Hakekat Ontologi. Artikel Juli 2019. Jakarta.

bagaimana. Faham “*monism*” yang terpecah menjadi idealisme dan spiritualisme, materilisme, dualisme, pluralisme dengan berbagai nuansanya merupakan paham ontologi yang pada akhirnya menentukan pendapat bahkan “*keyakinan*” kita masing-masing mengenai apa dan bagaimana “*ada*” sebagaimana manifestasi kebenaran yang kita cari.

Pendekatan ontologi dalam realitanya ada dua macam sudut pandang:

1. *Kuantitatif*, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak?
2. *Kualitatif*, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu? *contohnya* Aparatur pemerintah harus disiplin, Pejabat tidak boleh korupsi, Presiden harus disumpah.

Secara sederhana ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis.

Beberapa aliran dalam bidang ontologi yakni: monisme, dualisme, materialisme, idealisme, agnostisisme.

- a. *Monisme*: Monisme merupakan aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang asa itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Para filosof Pra-*Socrates* seperti *Thales*, *Demokritos*, *Anaximander* dan *Plato* dan *Aristoteles*^[232] termasuk dalam kelompok Monism. Sementara *filosof Modern* seperti *Kant* dan *Hegel*^[233] adalah penerus kelompok Monisme, terutama pada pandangan “*idealisme*” mereka. Ontologi merupakan salah satu diantara lapangan-lapangan penyelidikan filsafat yang paling kuno.

[232]Thales, Democritus, Anaximander and Plato and Aristotle belong to the group Monism.

[233]Kant and Hegel are the Modern successors to the Monism group.

Pertama kali diperkenalkan oleh filosof Yunani bernama *Thales* atas perenungannya terhadap air yang terdapat dimana-mana, dan sampai pada kesimpulan bahwa “*air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu*”.^[234] *Thales* menitikberatkan pendiriannya pada “*segala sesuatu berasal dari satu substansi saja*”.

- b. **Dualisme:** Dualisme merupakan aliran yang meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu: *materi (jasad)* dan *jasmani (spiritual)*. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan azali. Hubungan antara keduanya itulah yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerja sama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. *Descartes* adalah contoh filosof **Dualisme** dengan istilah dunia kesadaran atau rohani dan dunia ruang atau kebendaan.^[235] *Aristoteles* menamakan kedua hakikat itu sebagai materi dan forma yang bentuk yang berupa rohani saja. Umumnya manusia dengan mudah menerima prinsip dualisme ini, karena kenyataan lahir dapat segera ditangkap panca indera kita, sedangkan kenyataan batin dapat segera diakui adanya akal dan perasaan hidup.
- c. **Materialisme: Materialisme** merupakan aliran yang

[234]Thales of (624/623 – 548/545 BC) was a Greek mathematician, astronomer and pre-Socratic philosopher from Miletus in Ionia, Asia Minor. He was one of the Seven Sages of Greece. Thales concludes, water is the deepest substance which is the origin of all things.

[235]Descartes was born on March 31, 1596, in La Haye en Touraine, a small town in central France, which has since been renamed after him to honor its most famous son. Descartes is an example of a philosopher of Dualism with the terms world of consciousness (spiritual) and the world of space (material).

menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Menurut paham materialisme bahwa jiwa atau roh itu hanyalah merupakan proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu. Materialisme terkadang disamakan orang dengan *naturalisme*. Namun sebenarnya terdapat perbedaan antara keduanya. Naturalisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada. Tuhan yang di luar alam tidak ada. Sedangkan yang dimaksud alam disana ialah segala-galanya meliputi benda dan roh. Sebaliknya materialisme menganggap roh adalah kejadian dari benda, jadi tidak sama nilainya dengan benda. Filsafat Yunani yang pertama kali muncul juga berdasarkan materialisme, mereka disebut filsafat alam (nature filosofie). Mereka menyelidiki asal-usul kejadian alam ini pada unsur-unsur kebendaan yang pertama. **Thales (625-545 S.M)** menganggap bahwa unsur asal itu *air*.^[236] **Anaximandros (610-545 S.M)** menganggap bahwa unsur asal itu *apeiron* yakni suatu unsur yang tak terbatas^[237]. **Anaximenes (585-528 S.M)** menganggap bahwa unsur asal itu *udara*.^[238] Dan tokoh yang terkenal dari aliran ini adalah **Demokritos (460-360 S.M)** menggap bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak

[236] *Op.cit* Thales of (624/623 – 548/545 BC).

[237] Anaximandros (610-545 B.C.) was a philosopher of the Miletus School and a student of Thales. Anaximandros thought that the original element was *apeiron*, that is, an infinite element.

[238] Anaximenes (585-528 BC) the last of Milesian (School of thought founded in the 6th century BC) triad and Greek pre-Socratic philosopher of nature. Anaximenes thought that the original element was air.

jumlahnya tak dapat dihitung dan sangat halus.^[239] Atom-atom itulah yang menjadi asal kejadian peristiwa alam. Pada Demokritos inilah tampak pendapat materialisme klasik yang lebih tegas.

- d. ***Idealisme***: idealisme merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari ***roh*** (sukma) atau yang sejenis. Intinya sesuatu yang tidak berbentuk dan yang tidak menempati ruang. Menurut aliran ini materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan roh. Alasan yang terpenting dari aliran ini adalah manusia menganggap roh lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Roh dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelmaan saja.
- e. ***Agnostisisme***: Agnostisisme adalah aliran yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada baik yang berupa materi ataupun yang rohani. Aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal yang transenden. Contoh paham Agnostisisme adalah para filosof Eksistensialisme, seperti ***Jean Paul Sartre*** yang juga seorang ***Ateis***.^[240] ***Sartre*** menyatakan tidak ada hakikat ada (*being*) manusia, tetapi yang ada adalah keberadaan (*on being*)-nya.

[239]Democritus (460-360 B.C.) was a philosopher born in Greece. He was a student of Leukippos, the founder of the school of Atomism. Apart from being a philosopher, Democritus was also known to master many skills. Democritus thought that the nature of this nature is an innumerable and very fine atom.

[240]Jean-Paul Sartre (21 June 1905 – 15 April 1980) was a French contemporary philosopher and writer. Sartre stated that there is no essence of human being, but that what exists is his on being.

2. *Epistemologi*

Kata *epistemologi* berasal dari bahasa Yunani klasik *episteme* yang berarti "*pengetahuan*" dan akhiran *logi*, yang berarti teori, ilmu. *Epistemologi* studi tentang teori, artinya cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan.^[241] Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Banyak perdebatan dalam epistemologi berpusat pada empat bidang:

- a. analisis filsafat terkait hakikat dari pengetahuan dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep-konsep seperti kebenaran, keyakinan, dan justifikasi,^[242]
- b. berbagai masalah skeptisisme,
- c. sumber-sumber dan ruang lingkup pengetahuan dan justifikasi atas keyakinan, dan
- d. kriteria bagi pengetahuan dan justifikasi.

Epistemologi membahas pertanyaan-pertanyaan seperti "Apa yang membuat kebenaran yang terjustifikasi dapat dijustifikasi?"^[243] Apa artinya apabila mengatakan bahwa

[241] Porter, Noah, ed. (1913). "Epistemology". Webster's Revised Unabridged Dictionary. G & C. Merriam Co. hlm. 501. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 October 2013. Diakses tanggal 10 Juli 2021. E*pis`te*mol"o*gy (?), n. [Gr. knowledge + -logy.] The theory or science of the method or grounds of knowledge.

[242]Steup, Matthias. Zalta, Edward N., ed. "Epistemology". Stanford Encyclopedia of Philosophy (edisi ke-Spring 2014). See too. Borchert, Donald M., ed. (1967). "Epistemology". Encyclopedia of Philosophy. 3. Macmillan.

Jean-Paul Sartre (21 June 1905 – 15 April 1980) was a French contemporary philosopher and writer. Sartre stated that there is no essence of human being, but that what exists is his on being.

[243]Steup, Matthias (8 September 2017). Zalta, Edward N., ed. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University.

seseorang mengetahui sesuatu?^[244] dan pertanyaan yang mendasar, Bagaimana kita tahu bahwa kita tahu?^[245]

Istilah epistemologi pertama kali digunakan oleh filsuf Skotlandia **James Frederick Ferrier** pada tahun 1854.^[246] Namun, menurut **Brett Warren, Raja James VI** dari Skotlandia sebelumnya telah mempergunakan konsep filosofis ini dan menggunakannya sebagai personifikasi, dengan istilah **Epistemon**, pada tahun 1591.^[247]

Dalam suatu perdebatan filosofis, **Raja James VI** dari Skotlandia menulis karakter **Epistemon** sebagai personifikasi dari sebuah konsep filosofis. Tujuannya untuk menanggapi suatu debat dengan argumen apakah persepsi-persepsi yang dikembangkan oleh agama kuno persepsi yang dilakukan oleh para penyihir semestinya dihukum di tengah keberadaan masyarakat Kristen. Argumen King James menampilkan bahwa melalui karakter Epistemon, yang mendasarkan argumennya pada ide-ide teologis terkait penalaran dan kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat, sementara itu lawannya **Philomathes** mengambil sikap filosofis pada aspek hukum di dalam masyarakat, tetapi berusaha untuk memperoleh pengetahuan yang lebih besar dari Epistemon, istilah Yunani untuk **ilmuwan**. Pendekatan filosofis ini menandakan **Philomath** yang mencari pengetahuan yang lebih besar melalui **epistemologi** dengan menggunakan teologi.^[248]

[244]Carl J. Wenning. "Scientific epistemology: How scientists know what they know"(PDF)..

[245]"The Epistemology of Ethics". 1 September 2011.

[246] Encyclopædia Britannica Online, 2007

[247]King James; Warren, Brett. The Annotated Daemonologie. A Critical Edition. In Modern English. 2016. hlm. x-xi. ISBN 1-5329-6891-4.

[248]Seorang philomath adalah pecinta belajar dan belajar. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani philos "kekasih", "mencintai", manth belajar.

Dialog ini digunakan oleh Raja James untuk mendidik masyarakat tentang berbagai konsep, termasuk konsep sejarah dan etimologi dari subjek yang diperdebatkan. *J.F. Ferrier* menciptakan *epistemologi* dalam model "*ontology*", untuk menetapkan bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang bertujuan untuk menemukan makna dari pengetahuan, dan menyebutnya awal yang sesungguhnya dari filsafat.^[249] Kata ini setara dengan konsep *Wissenschaftslehre*, yang digunakan oleh filsuf Jerman *Johann Fichte* dan *Bernard Bolzano* untuk proyek-proyek yang berbeda sebelum digunakan kembali oleh *Husserl*. Para filsuf Prancis kemudian memberi istilah *épistémologie* makna yang sempit sebagai 'teori pengetahuan. Di antaranya, *Émile Meyerson* yang membuka karyanya *Identitas* dan *Realitas*, yang ditulis pada tahun 1908.^[250]

Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan ruang lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Epistemologi ilmu meliputi sumber, sarana dan tatacara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai mencapai pengetahuan. Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologik akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan kita pilih. Akal budi, pengalaman, atau kombinasi antara akal, pengalaman, intuisi merupakan sarana yang dimaksud dalam epistemologi, sehingga dikenal adanya model-model epistemologi seperti: rasionalisme, empirisisme, kritisme atau rasionalisme kritis, positivism, dan fenomenologi dengan berbagai variasinya. Ditunjukkan pula

[249]Ferreira, Phillip, "James Frederick Ferrier" in A. C. Grayling, Naomi Goulder, and Andrew Pyle (eds.), *Continuum Encyclopedia of British Philosophy*, London: Thoemmes Continuum, 2006, ii. 1085-1087.

[250]Suchting, Wal. "Epistemology". *Academic Search Premier*: 331-345..

bagaimana kelebihan dan kelemahan sesuatu model epistemologi beserta tolok ukurnya bagi pengetahuan itu seperti teori koherensi, korespondensi, pragmatis, teori inter-subjektif dan hermenetics.

Jika dikaji dari aspek epistimologi, dimana epistimologi pada hakekatnya membahas secara mendalam berkenaan dengan metode-metode dan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kebenaran ilmiah, maka Ilmu Pemerintahan dalam proses mencari kebenaran ilmiah juga menggunakan metode-metode dan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh ilmu sosial lainnya. Metode-metode yang dibangun berdasarkan pada metode penelitian sosial dan metode penelitian dalam wilayah pemerintahan, yang pada akhirnya diperoleh metodologi Ilmu Pemerintahan.

Dari sisi metodologi inilah kekhasan Ilmu Pemerintahan dapat dilihat dan dikembangkan baik dalam kerangka pengembangan Ilmu Pemerintahan itu sendiri sebagai ilmu pengetahuan dan juga digunakan untuk memecahkan masalah-masalah pemerintahan yang terjadi dalam waktu tertentu dan lingkungan tertentu. Pada akhirnya, pertanyaan berikutnya yang perlu diajukan untuk menyoroti Ilmu Pemerintahan dari perspektif filsafat ilmu adalah aspek aksiologis atau apa manfaat Ilmu Pemerintahan terhadap kehidupan manusia pada umumnya dan pemecahan masalah-masalah pemerintahan pada khususnya.

3. *Aksiologi*

Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya.^[251] Jadi yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang

^[251]Hartman, Robert S. (1967). *The Structure of Value*. USI Press. 384 pages.

terdapat dalam suatu pengetahuan.^[252] Aksiologi berasal dari kata Yunani: *axion* (nilai) dan *logos* (teori), yang berarti teori tentang nilai.

Pertanyaan di wilayah ini menyangkut, antara lain:

- a. Untuk apa pengetahuan ilmu itu digunakan?
- b. Bagaimana kaitan antara cara penggunaannya dengan kaidah-kaidah moral?
- c. Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral?
- d. Bagaimana kaitan metode ilmiah yang digunakan dengan norma-norma moral dan professional? (filsafat etika).

Dalam aksiologi, ada dua komponen mendasar, yakni Etika (moralitas) dan Estetika (keindahan).

Etika adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas tentang masalah-masalah moral. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam maupun terhadap Tuhan sebagai sang pencipta.^[253]

Aksiologi meliputi nilai-nilai (values) yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik atau pun fisik material. Lebih dari itu nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu *conditio sine quanon* yang wajib dipatuhi dalam kegiatan kita, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu. Aksiologi mencakup nilai-

^[252] Findlay, J. N. (1970). *Axiological Ethics*. New York: Macmillan. ISBN 0-333-00269-5. 100 pages.

^[253] Rescher, Nicholas (2005). *Value Matters: Studies in Axiology*. Frankfurt: Ontos Verlag. ISBN 3-937202-67-6. 140 pages.

nilai sebagaimana etika dan moral yang secara imperatif menjadi dasar dan arah pengalihan, penelitian dan penerapan ilmu.

Landasan aksiologi ilmu berkaitan dengan masalah arah yang dituju oleh ilmu tersebut. Ilmu dikembangkan manusia pada mulanya sebagai teori yaitu bertujuan untuk mendalami pengertian diri manusia dan alam sekitarnya, sehingga manusia dapat sampai pada inti dirinya. Ilmu dimaksudkan agar manusia mampu menjadi manusia yang sungguh-sungguh menyadari diri dan kedudukannya yang unik dalam jagat raya ini.

Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam satu kesatuan hubungan yang menyeluruh. Maksudnya adalah suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras serta bepola baik melainkan harus juga mempunyai kepribadian.^[254]

Aksiologi adalah studi tentang arti nilai, yang sejatinya tujuan mempelajarinya adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan dua aspek utama, yaitu etika dan estetika. Dalam hal ini misalnya, pertanyaan tentang apa yang pada akhirnya baik, buruk, benar, dan salah berkaitan dengan berbagai jenis etika. Sedangkan pertanyaan tentang apa yang harus dianggap seni, apa yang indah, dan isu-isu terkait yang berkaitan dengan estetika.

Meskipun pertanyaan tentang nilai sama tuanya dengan filsafat itu sendiri, "*aksiologi*" merujuk terutama pada tulisan-tulisan para *fenomenolog* Austro-Jerman seperti *Franz Brentano, Alexius Meinong, Max Scheler, dan Nicolai Hartmann*. Pengaruh mereka telah disebarkan ke dunia Anglophone melalui

^[254] Cushan, Anna-Marie. Investigations into Facts and Values: Groundwork for a theory of moral conflict resolution (PDF). Melbourne: Ondwelle.

tulisan *G.E. Moore, W.D. Ross, Roderick Chisholm*, dan yang terbaru *Robert Nozick*.

Para aksiolog berusaha untuk mencirikan gagasan nilai secara umum, di mana nilai moral hanyalah satu spesies. Mereka membantah melawan Kant, bahwa kebaikan tidak secara eksklusif berasal dari kemauan, tetapi ada dalam hierarki objektif.

Mereka menekankan sejauh mana melalui emosi dan perasaan manusia menemukan nilai-nilai. Gagasan tentang tindakan benar dipahami secara turunan dalam istilah nilai-nilai yang diungkapkan emosi. Buku *Ralph Barton Perry, General Theory of Value (1926)*, disebut sebagai magnum opus dari pendekatan baru tentang nilai. Ia berteori, nilai adalah "*objek apa pun yang diminati*". Belakangan, dia menjelajahi delapan "*alam*" nilai: moralitas, agama, seni, sains, ekonomi, politik, hukum, dan adat istiadat.

Biasanya ada perbedaan antara nilai instrumental dan nilai intrinsik (antara apa yang baik sebagai sarana dan apa yang baik sebagai tujuan). *John Dewey, dalam Human Nature and Conduct (1922) dan Theory of Valuation (1939)*, mem-presentasikan interpretasi pragmatis dan mencoba memecah perbedaan antara cara dan tujuan ini.

Meskipun upaya terakhir lebih cenderung merupakan cara untuk menekankan poin yang banyak hal-hal aktual dalam kehidupan manusia (seperti kesehatan, pengetahuan, dan kebajikan) baik dalam kedua pengertian tersebut. Filsuf lain, seperti *C.I. Lewis, Georg Henrik von Wright, dan W.K. Frankena*, telah melipatgandakan perbedaan. Membedakan, misalnya, antara nilai instrumental (baik untuk beberapa tujuan) dan nilai teknis (pandai melakukan sesuatu) atau antara nilai kontribusi (menjadi baik sebagai bagian dari keseluruhan) dan nilai akhir (menjadi baik secara keseluruhan).

Banyak jawaban berbeda diberikan untuk pertanyaan “Apa yang secara intrinsik baik?” Hedonis mengemukakan bahwa itu ialah kesenangan yang meliputi pragmatis, kepuasan, pertumbuhan, atau penyesuaian; Kantians mengemukakan bahwa itu ialah niat baik; Humanis mengemukakan bahwa itu ialah realisasi diri yang harmonis; Umat Kristen mengemukakan bahwa itu ialah cinta Tuhan.

Pluralis, seperti *G.E. Moore*, *W.D. Ross*, *Max Scheler*, dan *Ralph Barton Perry*, berpendapat bahwa ada sejumlah hal yang secara intrinsik baik. Moore, bapak pendiri Filsafat Analitik, mengembangkan teori keutuhan organik, berpendapat bahwa nilai suatu agregat tergantung pada bagaimana mereka digabungkan.

Karena “*fakta*” melambangkan objektivitas dan “*nilai*” menunjukkan subjektivitas, hubungan nilai dengan fakta adalah hal yang sangat penting dalam mengembangkan teori objektivitas nilai dan penilaian terhadap nilai. Sementara ilmu-ilmu deskriptif seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan agama komparatif semuanya berusaha memberikan gambaran faktual tentang apa yang sebenarnya dihargai, serta penjelasan kausal tentang persamaan dan perbedaan terhadap penilaian, tetap menjadi tugas filsuf untuk bertanya tentang tujuan mereka.

Filsuf bertanya apakah sesuatu itu bernilai karena diinginkan, seperti yang dipegang oleh subjektivis seperti Perry, atau apakah diinginkan karena memiliki nilai, seperti yang diklaim oleh para objektivis seperti *Moore* dan *Nicolai Hartmann*.

Pengertian Aksiologi Menurut Para Ahli

Adapun definisi aksiologi menurut para ahli, antara lain:

Kattsoff (2004), Pengertian aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan.

Bramel berpendapat bahwa aksiologi bisa dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu;

- a. *Moral conduct*, yaitu tindakan moral, bidang yang satu ini melahirkan disiplin khusus, yang kita kenal dengan istilah etika.
- b. *Esthetic expression*, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini menimbulkan atau melahirkan suatu keindahan.
- c. *Sosio-political life*, yaitu kehidupan social politik, yang akan melahirkan atau memunculkan filsafst sosio-politik.

5.6. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Filsafat Pemerintahan

Tujuan Filsafat

Tujuan Filsafat terhadap Ilmu Pemerintahan adalah:

1. Mendalami unsur - unsur pokok ilmu Pemerintahan, sehingga secara menyeluruh dapat memahami sumber, hakikat dan tujuan ilmu Pemerintahan.
2. Memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu Pemerintahan, sehingga dapat memahami gambaran tentang proses ilmu pemerintahan secara histories.
3. Menjadi pedoman bagi mendalami studi ilmu pemerintahan terutama untuk membedakan persoalan di pemerintahan.
4. Mendorong pada calon ilmuan dan ilmuan khususnya ilmu pemerintahan untuk konsisten dalam mendalami ilmu pemerintahan dan mengembangkannya.

Tujuan Pemerintahan

Selama ribuan tahun sejarah manusia, tujuan “*implisit atau eksplisit*” pemerintah adalah untuk melayani kepentingan para penguasanya, baik itu raja, presiden atau perdana menteri, diktator, aristokrasi, atau kelas penguasa. Setelah lahirnya “*demokrasi*” di Yunani kuno sekitar 500 SM, muncul ide pemerintah *dari, oleh*

dan *untuk* rakyat. Sejak itu, gagasan itu telah menyebar ke seluruh dunia. Tetapi bahkan negara-negara demokrasi yang paling maju pun masih secara tidak proporsional melayani tujuan dan kepentingan kelompok atau golongannya sendiri secara istimewa. Selain itu, gagasan populer bahwa "pemerintah yang terbaik yang paling sedikit hanya melindungi hak individu atas "kehidupan, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan untuk rakyatnya."

Oleh karena itu tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Dengan kata lain, adalah "*pelayanan*" kepada masyarakat, tidak untuk "*melayani*" dirinya sendiri atau kelompoknya, tetapi untuk melayani masyarakat, yakni menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemajuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Dalam pembukaan Konstitusi Amerika Serikat, yang secara ringkas mengemukakan gagasan para perumus tentang apa itu pemerintah: *We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defence, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.*^[255] (Kami rakyat Amerika Serikat, untuk membentuk persatuan yang lebih sempurna, menegakkan keadilan, menjamin ketenangan rumah tangga, menyediakan pertahanan bersama, memajukan kesejahteraan umum, dan mengamankan berkah kebebasan bagi diri kita sendiri dan keturunan kita, menahbiskan dan menetapkan Konstitusi ini untuk Amerika

^[255] Lihat Budi Supriyatno (2009) Manajemen Pemerintahan (Plus duabelas langkah strategi). Media Brilaian.

Serikat).

Secara umum tugas-tugas pokok mencakup tujuan pemerintahan sebagai berikut:

1. Melindungi hak asasi manusia, kebebasan, kesetaraan, perdamaian, dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.
2. Menjunjung tinggi dan menjalankan konstitusi sehingga setiap warga negara diperlakukan dengan adil.
3. Menjaga perdamaian dan keamanan di dalam masyarakat dengan menerapkan hukum secara adil.
4. Melindungi kedaulatan bangsa dari berbagai unsur yang mengancam, baik dari dalam maupun dari luar.
5. Membuat dan menjaga sistem moneter sehingga memungkinkan perdagangan domestik dan internasional berjalan dengan baik.
6. Menarik pajak dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara bijak sehingga pengeluaran negara tepat sasaran.
7. Membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.
8. Menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain dengan cara membangun kerjasama di berbagai bidang.

Fungsi Filsafat Pemerintahan

Jika belajar filsafat pemerintahan, maka akan semakin bisa menangani atau menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti makna realitas dan tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan kepada masyarakat, yang tidak berada dalam wewenang organisasi non pemerintahan. Dengan demikian belajar filsafat pemerintahan akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut: ***Pertama***, belajar Filsafat Pemerintahan dapat memberikan bimbingan kepada manusia bersikap arif, berwawasan luas

terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh aparatur negara atau pemerintahan. Aparat yang melayani dan masyarakat yang dilayani diharapkan bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mengidentifikasikannya agar jawaban-jawaban bisa didapat dengan mudah.

Kedua, Filsafat Pemerintahan bisa membentuk pengalaman kehidupan aparatur atau masyarakat secara lebih kreatif dari dasar pandangan hidup atau ide-ide yang muncul sebab keinginannya.

Ketiga, Filsafat bisa berupa sikap kritis seseorang dalam menghadapi permasalahan, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan lainnya (interaksi dengan pemerintah, masyarakat, komunitas, agama, dan hal-hal lain di luar dirinya).

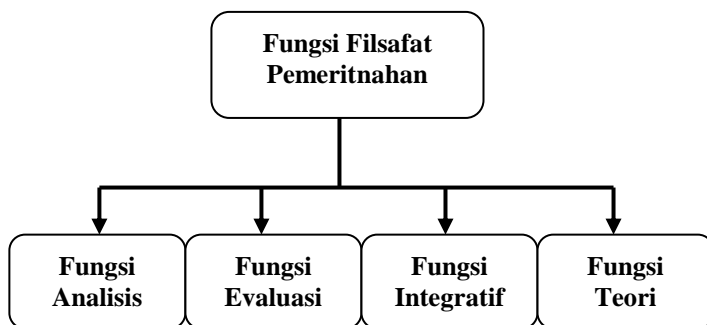
Keempat, Filsafat pemerintahan bagi para ilmuwan / akademisi diperlukan kemampuan menganalisis, yakni analisis kritis secara komprehensif dan sintesis atas berbagai permasalahan ilmiah yang dituangkan dalam sebuah riset atau kajian ilmiah khususnya ilmu pemerintahan. Filsafat dilaksanakan dalam sebuah suasana pengetahuan yang mementingkan kontrol atau pengawasan. Oleh sebab itu, nilai ilmu pengetahuan timbul dari kegunaannya, sedangkan fungsi filsafat timbul dari nilainya.

Menurut **Budi Supriyatno**, fungsi pemerintahan dibagi menjadi 2 fungsi yakni fungsi teoritis dan fungsi praktis. Secara teoritis fungsi pemerintahan adalah meliputi **fungsi analisis, fungsi evaluasi, fungsi integrative, dan fungsi teori**. **Fungsi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:**

1. **Fungsi analisis**. Fungsi Analisis adalah pemikiran yang mendalam untuk mengerti dan memecahkan persoalan-persoalan pemerintahan yang ada.
2. **Fungsi evaluasi**. Fungsi evaluasi adalah untuk menilai seberapa jauh antara teori dan praktek pemerintahan itu benar atau salah. Bagaimana suatu tindakan aparatur

pemerintahan dianggap baik atau buruk dalam menjalankan tugasny. Dan apa pedoman, etika, norma dan prosedur yang dipakai oleh para aparatur.

3. **Fungsi Integratif.** *Fungsi Integratif* adalah pemahaman yang luas tentang pemerintahan yang dihimpun dalam suatu pemahaman komprehensif, mendalam dan menyeluruh. Sebab semua realita pada hakikatnya selalu ada dalam antara hubungan dan interaksi baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu konteks sistem pemerintahan.
4. **Fungsi Teori.** Fungsi teori adalah semua pandangan, berpikir, dan perbuatan aparatur pemeritnahan didasarkan atas asas-asas pemerintahan sebagai suatu teori. Teori ialah landasan bagi praktek kebenaran yang akan teruji dalam praktek aparatur sebagai pelaksana, apakah sesuai atau tidak antara teori dan praktek dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai norma untuk menilai benar atau salah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pemeritnahan. Lihat Gambar 1.4. Fungsi Filsafat Pemeritnahan dibawah ini.



Sedangkan fungsi praktis atau implementasi, fungsi pemerintahan meliputi : fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi

pembangunan, dan fungsi pemberdayaan. Fungsi-fungsi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Fungsi Pelayanan.** Pemerintahan memiliki fungsi pelayanan, yang meliputi pelayanan publik (public service) dan pelayanan sipil (civil service) yang menghargai kesetaraan. Pemerintah pusat berwenang melayani urusan pertahanan keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter, dan peradilan. Pemerintah Daerah melayani semua urusan yang tidak dilakukan oleh pemerintah pusat. Missal pembangunan prasarana dan sarana, pendidikan, social dan lain-lanya.
2. **Fungsi Pengaturan.** Fungsi pengaturan dilaksanakan oleh pemerintahan dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Dalam hal ini, pihak pemerintah menjamin jalannya pemerintahan berlangsung baik dengan membuat aturan undang-undang yang berlaku bagi semua warga negara tanpa terkecuali.
3. **Fungsi Pembangunan.** Dalam sistem pemerintahan, pemerintah juga harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Fungsi pembangunan menjamin jalannya pemerintahan di sebuah negara.
4. **Fungsi Pemberdayaan.** Fungsi pemerintahan selanjutnya adalah fungsi pemberdayaan. Adanya fungsi ini mendukung terselenggaranya otonomi daerah agar pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi masyarakat agar lebih meningkat.

Manfaat Filsafat Pemerintahan

Dalam pemerintahan diyakini bahwa manusia dengan potensi yang memiliki kemampuan filosofis dan ilmiah. Potensi inilah yang secara spesifik melahirkan daya Filsafat Ilmu. Filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat Ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan campuran yang eksistensinya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara filsafat dan ilmu.

Dengan demikian, Filsafat Ilmu merupakan satu-satunya medium resmi untuk memperbincangkan ilmu. Dalam kaitannya dengan ilmu, filsafat tidak lebih dari model pandang atau perspektif filosofis terhadap ilmu. Karena itu, tidak menawarkan materi-materi ilmiah, tetapi sekedar tinjauan filosofis mengenai pengetahuan yang dicapai oleh suatu ilmu. Bidang Filsafat Ilmu meliputi epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Dalam ranah Pemerintahan, ketiga bidang filsafat ilmu ini perlu dijadikan landasan filosofis, terutama untuk kepentingan pengokohan dan pemerintahan itu sendiri.

Baik Filsafat ilmu, filsafat Pemerintahan sangat penting untuk dikaji, setidaknya filsafat pemerintahan memiliki beberapa manfaat. Diantara *manfaat* itu ialah:

1. ***Menolong Perencanaan.*** Filsafat Pemerintahan dapat menolong perencanaan bagi aparatur pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kewajiban dalam suatu negara untuk membentuk pemikiran sehat terhadap proses pemerintahan dan proses pembangunan.
2. ***Membentuk Asas.*** Filsafat Pemerintahan dapat membentuk asas yang dapat ditentukan dengan pandangan pengkajian yang umum dan yang khusus.

3. ***Pedoman Terbaik.*** Filsafat Pemerintahan dapat dipakai sebagai pedoman terbaik untuk evaluasi kegiatan dan program pemerintahan dalam arti yang menyeluruh.
4. ***Sandaran intelektual.*** Filsafat Pemerintahan dapat pakai sebagai sandaran intelektual yang digunakan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang hakekat pemerintahan.
5. ***Corak pribadi.*** Filsafat Pemerintahan bisa memberi corak pribadi khas dan istimewa sesuai dengan prinsip good Governance.
6. ***Memahami pemerintahan.*** Filsafat pemerintahan bisa membantu manusia untuk menilai dan memahami pemerintahan tidak hanya dari permukaannya saja, dan tidak hanya dari sesuatu yang terlihat oleh mata saja, tapi jauh lebih dalam dan lebih luas.
7. ***Mengasah hati dan pikiran.*** Filsafat Pemerintahan dapat membantu manusia untuk lebih kritis terhadap fenomena pemerintahan yang berkembang, Hal ini akan membuat manusia tidak begitu saja menerima segala sesuatu tanpa terlebih dahulu mengetahui maksud dari pemberian dari pemerintahan.
8. ***Mengasah kemampuan.*** Filsafat Pemerintahan dapat dipakai sebagai alat mengasah kemampuan dalam melakukan penalaran. Penalaran ini akan membedakan argumen, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis, melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang lebih luas dan berbeda dari Pemerintahan.
9. ***Membantu berpikir rasional.*** Filsafat Pemerintahan dapat dipakai membangun cara berpikir rasional yang luas dan mendalam, dengan integral dan koheren, serta dengan sistematis, metodelis, kritis, analitis, dan logis tentang pemerintahan.

5.7. Sumber Hukum Pemerintahan

Sumber hukum pemerintahan itu berasal dari peraturan perundangan, nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sosial budaya yang berasal dari kehidupan kemasyarakatan serta berasal dari adat kebiasaan dan yang sejenisnya. Sumber hukum pemerintahan setiap negara berbeda-beda namun ada dalam kesamaannya yakni peraturan perundangan, lihat beberapa negara dibawah ini.

1. **Amerika Serikat.** Di Amerika Serikat ada empat sumber hukum, yaitu *hukum konstitusi, hukum administrative, statuta yakni hukum resmi yang tertulis di suatu negara,* dan *common law*^[256] yang mencakup hukum kasus. Sumber hukum yang terpenting adalah Konstitusi Amerika Serikat, dan segala sesuatu berada di bawahnya, dan takluk kepadanya. Tak boleh ada hukum yang berkontradiksi dengan Konstitusi Amerika Serikat. Misalnya, bila Kongres menyetujui sebuah statuta yang berlawanan dengan konstitusi, maka Mahkamah Agung dapat menganggap hukum itu “*inkonstitusional*” dan membatalkannya.
2. **Inggris.** Sistem hukum di Inggris dan Wales,^[257] sekaligus merupakan dasar sistem hukum umum yang dipakai oleh kebanyakan negara Persemakmuran (*Commonwealth*)^[258] Sistem hukum ini mulai dipakai saat “*Kerajaan Britania Raya*” dibangun dan dikelola, lalu membentuk sebuah dasar jurisprudensi di negara-negara Persemakmuran. Hukum Inggris diberlakukan secara ketat di Inggris dan Wales.

^[256] U.S. Code collection at Cornell University’s Legal Information Institute.

^[257] Jurisdiction Of Courts In England And Wales And Their Recognition Of Foreign Insolvency Proceedings”. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-06-09. Diakses tanggal 2008-12-23.

^[258] The Common Law in the British Empire

Walaupun Wales telah memiliki sebuah Dewan Penyerahan, setiap legislasi yang diajukan oleh Dewan ini sudah diatur ketentuan pengajuannya dalam Undang-Undang Pemerintahan Wales tahun 2006,^[259] legislasi oleh Parlemen Britania Raya, dan oleh perintah sebuah dewan yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Pemerintah Wales tahun 2006. Lebih jauh lagi bahwa legislasi, juga dengan peraturan yang dibuat oleh badan pemerintah di Inggris dan Wales, ditafsirkan oleh Dewan Hakim Bersama Inggris dan Wales.^[260] *Esensi hukum umum Inggris adalah bahwa hukum ini dibuat oleh hakim yang duduk di pengadilan dengan menerapkan logika dan pengetahuan mereka tentang sistem hukum terdahulu (stare decisis). Keputusan pengadilan tertinggi di Inggris dan Wales bersifat mengikat bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya. Inggris dan Wales adalah konstituen dari Britania Raya, yang merupakan anggota dari Uni Eropa (UE) dan hukum UE juga berlaku di Britania Raya.*^[261] Uni Eropa terdiri dari negara-negara yang memakai hukum sipil sehingga hukum sipil juga berlaku di Inggris dalam bentuk hukum UE. Dewan Kehakiman Uni Eropa, sebuah pengadilan hukum perdata, memandu pengadilan di Inggris dan Wales untuk mengikuti hukum UE. Hukum tertua dalam sistem hukum Inggris adalah Undang-Undang *Marlborough* yang

^[259] See. The Government of Wales Act 2006 (GOWA 2006) changed the role of the National Assembly, so that it became a fully-fledged legislature. <https://law.gov.wales/constitution-government/devolution/gowa-06/constitution-government/devolution/gowa-06>.

^[260] Website of the government in Wales". Diakses tanggal 2021-06-28.

^[261] K-Zone law - The impact of the EU on UK law.

dibuat pada tahun 1267.^[262] Tiga bagian dari **Magna Carta** yang merupakan sebuah perkembangan penting dalam sistem hukum Inggris sebenarnya sudah disahkan pada tahun 1215,^[263] hanya saja disahkan kembali pada tahun 1295 karena para pembuat memutuskan untuk mengubah ulang isi Magna Carta.

3. **Tiongkok.** Pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok adalah Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok. Konstitusi ini adalah "*hukum tertinggi*" di Republik Rakyat Tiongkok yang diadopsi dari hasil Kongres Rakyat Nasional ke-5 pada 4 Desember 1982, dengan revisi lebih lanjut setiap lima tahun. Konstitusi ini merupakan yang keempat dalam sejarah Republik Rakyat Tiongkok, menggantikan konstitusi 1954, konstitusi 1975 dan konstitusi 1978. Secara teknis konstitusi ini sebagai "*otoritas hukum tertinggi*" dan "*hukum dasar negara*", akan tetapi banyak putusan Partai Komunis Tiongkok yang memiliki sejarah melanggar ketentuan konstitusi dan menyensor seruan agar partai lebih mematuhi konstitusi.^[264] Selain itu, klaim pelanggaran hak konstitusional tidak dapat digunakan dalam pengadilan di Tiongkok. Komite Konstitusi dan Hukum Kongres Rakyat Nasional sebagai komite khusus legislatif yang bertanggung jawab untuk meninjau konstitusi, tidak pernah memutuskan undang-undang atau peraturan yang tidak konstitusional.^[265]

^[262] The Statuta of Marlborough Act. 1267

^[263] The Magna Carta (Latin for "Great Charter") was a charter issued in England on 15 June 1215 which restricted the British monarchy, since the time of King John, from absolute power.

^[264] The Constitution of the People's Republic of China" (PDF). Purdue University. Diakses tanggal 30 Juni 2021.

^[265] Matthieu, Burnay (November 2018). Global Constitutionalism from

4. **Rusia.** Konstitusi *Federasi Rusia* pada tahun 1993, Konstitusi Rusia yang diadopsi pada tanggal 12 Desember 1993 tentang hasil suara populer dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden Rusia pada 15 Oktober 1993 № 1633. Para memegang suara populer di rancangan Konstitusi Federasi Rusia. *The popular vote* istilah (dan bukan “referendum”) digunakan untuk menghindari situasi, Undang-Undang tentang Referendum dari *Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia* atau disingkat *RSFS Rusia*, menurut yang Konstitusi dapat diubah hanya dengan suara mayoritas dari para pemilih negara. Konstitusi Federasi Rusia pada tahun 1993 mulai berlaku pada hari publikasi.^[266] Menurut *Viktor Sheinis*, salah satu penulis Konstitusi Rusia,^[267] peneliti utama dari Lembaga Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional, “*Presiden Proyek*” Konstitusi telah dibuat di bawah naungan tiga orang, *Sergei Sergeevich Alexeyev*, *Anatoly Sobchak*, dan *Sergei Mikhailovich Shakhrai*, mereka adalah pemimpin, tetapi hanya dalam pertemuan konstitusional dihadiri oleh lebih dari 800 peserta, bekerja pengacara yang berbeda. *Sergei Shakhrai* mengidentifikasi dua penulis utama dari Konstitusi – sendiri dan Alekseev Sergei dengan bekerja sama, menghasilkan proyek umum baru dari Konstitusi Rusia, yang kemudian disampaikan oleh

European and East Asian Perspectives. Cambridge University Press. hlm. 225–244. ISBN 9781108264877.

^[266] Russian Newspaper – December 25, 1993.

^[267] Viktor Sheinis (2018) Opinion. On Its 25th Birthday, Russia's Constitution Is Still Worth Defending (Op-ed) But if we want to return to the democratic path declared during perestroika, our constitution will need an overhaul. By Viktor Sheinis. The Moscow Time. Independen News Paper Rusia.. Dec. 11, 2018.

referendum nasional Presiden Rusia, dan menjadi Konstitusi bertindak Federasi Rusia sebagai hasil dari pemungutan suara yang diselenggarakan pada 12 Desember 1993.^[268]

5. **Indonesia.** Sumber hukum pemerintahan Indonesia yaitu nilai-nilai keutamaan pemerintahan itu dipahami keberadaannya telah tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka yaitu dimulai sejak jaman perjuangan melawan penjajah Belanda dahulu, bahkan jauh sebelumnya, nenek moyang bangsa Indonesia seperti *Maha Patih Gajah Mada* yang mengangakat "*Sumpah Palapa.*" Nilai-nilai bersumber hukum di Indonesia antara lain:
- a. Perjuangan Sang Maha Patih Gajah Mada yang mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Gajah Mada yang menjabat mulai 1273 saka atau tahun 1351 dan wafat tahun 1364
 - b. Para Pejuang, Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi 1945.
 - c. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - d. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Mengatur tentang kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga pemerintah dan organisasi pemerintahan, hak dan kewajiban serta larangan bagi anggota organisasi pemerintah.
 - e. Nilai-nilai sosial budaya: adat kebiasaan setempat seperti perilaku tentang kepantasan dan ketidak pantasan serta kesopanan.
 - f. Nilai-nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan merupakan salah satu nilai yang mengikat kehidupan sehari-hari yang terbentuk sebagai akibat adanya

^[268] *Op cit.* Russian Newspaper" – December 25, 1993.

hubungan vertikal dan horizontal. Dibanding dengan nilai-nilai agama, nilai sosial budaya mungkin jauh lebih adaptif. Nilai sosial budaya yang berlaku dari masyarakat kadangkala mewarnai pola perilaku dari masyarakat yang bersangkutan, terdapat hubungan interaksi antara nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dengan nilai-nilai filsafat dan etika pemerintahan.



5.8. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Allen, William R. (1976) Scarcity And Order: The Hobbesian Problem And The Humean Resolutionsocial Science Quarterly. Journal Article Vol. 57, No. 2, Scarcity And Society (September, 1976), Pp. 263-275.
- [2]. Allen, William R. (1976) Scarcity And Order: The Hobbesian Problem And The Humean Resolutionsocial Science Quarterly.
- [3]. Anaximandros (610-545 B.C.) was a philosopher of the Miletus School and a student of Thales. Anaximandros thought that the original element was apeiron, that is, an infinite element.
- [4]. Anaximenes (585-528 BC) the last of Milesian (School of thought founded in the 6th century BC) triad and Greek pre-Socratic philosopher of nature. Anaximenes thought that the original element was air.
- [5]. Aristoteles. (Born 384 BCE-322), He was the author of a philosophical and scientific system. Ontology is the study of being.
- [6]. Barzelay(1982):Breaking Through Bureaucracy: masyarakat bosan dan muak pada birokrasi yang rakus dan bekerja lamban.
- [7]. Baumgarten, Alexander Gottlieb (born July 17, 1714-died May 26, 1762, Frankfurt an der Oder), German philosopher and educator who coined the term aesthetics and established this discipline as a distinct field of philosophical inquiry. Baumgarten defines ontology as the study of the most general or abstract predicates of all things in general
- [8]. Clauberg, Johannes (24 February 1622 – 31 January 1665)

was a German theologian and philosopher. Caluberg was the founding Rector of the first University of Duisburg, He is known as a "scholastic cartesian Caluberg stated that ontology is the first science to study what exists insofar as it exists.

- [9]. Cranston, Maurice and Peters, Richard S.. (1972). Hobbes and Rousseau: A Collection of Critical Essays. Edited by (New York: Anchor Books. 1972.
- [10]. Cushman, Anna-Marie. Investigations into Facts and Values: Groundwork for a theory of moral conflict resolution (PDF). Melbourne: Ondwelle.
- [11]. Democritus (460-360 B.C.) was a philosopher born in Greece. He was a student of Leukippos, the founder of the school of Atomism. Apart from being a philosopher, Democritus was also known to master many skills. Democritus thought that the nature of this nature is an innumerable and very fine atom.
- [12]. Descartes was born on March 31, 1596, in La Haye en Touraine, a small town in central France, which has since been renamed after him to honor its most famous son. Descartes is an example of a philosopher of Dualism with the terms world of consciousness (spiritual) and the world of space (material).
- [13]. Donner, A.M. (2015). Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. Retrieved 27 July 2015.
- [14]. Drucker, Peter F. (1966):The Age of Discotinuity: kemungkinan bangkrutnya birokrasi.
- [15]. Drucker, Peter F. (1999): Management challenges for the 21st century. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- [16]. Encyclopædia Britannica Online, 2007
- [17]. Ferreira, Phillip, "James Frederick Ferrier" in A. C.

- Grayling, Naomi Goulder, and Andrew Pyle (eds.), *Continuum Encyclopedia of British Philosophy*, London: Thoemmes Continuum, 2006, ii. 1085-1087.
- [18]. Findlay, J. N. (1970). *Axiological Ethics*. New York: Macmillan. ISBN 0-333-00269-5. 100 pages.
- [19]. Finer, Herman (**1932**). *The Theory and Practice of Modern Government*. Vols. I and II. New York: Dial Press, Linciln Mac Veagh, 1932.
- [20]. Hartman, Robert S. (1967). *The Structure of Value*. USI Press. 384 pages.
- [21]. Hegel's Dialectical Method, see Hegel. "Section in question from Hegel's Science of Logic". Marxists.org. Retrieved 2011-11-03.
- [22]. Hobbes, Thomas. (2017). *Leviathan* (Wisehouse Classics - The Original Authoritative Edition). Publisher Lightning Source Inc. Publication Date 15/10/2017. ISBN 917637-4327.
- [23]. Hobbes, Thomas. *Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil*. buku yang ditulis oleh Thomas Hobbes (1588-1679) dan diterbitkan pada tahun 1651.
- [24]. Ingraham, Patricia W, and Romzek, Barbara S. & Associates, *New paradigms for government—Issues for changing public service*. Jossey-Bass Publishers, San Francisco, CA, 1994. 352 pages, ISBN 1-55542-656-5.
- [25]. James, King and Warren, Brett. *The Annotated Daemonologie. A Critical Edition*. In Modern English. 2016. hlm. x-xi. ISBN 1-5329-6891-4.
- [26]. Jean-Paul Sartre (21 June 1905 – 15 April 1980) was a French contemporary philosopher and writer. Sartre stated that there is no essence of human being, but that what

- exists is his on being.
- [27]. Jurgen Habermas adalah seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman. Ia adalah generasi kedua dari Mazhab Frankfurt.
- [28]. Jurisdiction Of Courts In England And Wales And Their Recognition of Foreign Insolvency Proceedings". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-06-09. Diakses tanggal 2008-12-23.
- [29]. Kant and Hegel are the Modern successors to the Monism group.
- [30]. K-Zone law - The impact of the EU on UK law.
- [31]. Locke, John (1689) *Two Treatises of Government*, Peter Laslett (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 1988. Citations are to *Two Treatises* then treatise and section.
- [32]. MacIver, Robert Morrison . (2005). *Politics and Society* Published by Transaction Publishers, 1 Jun 2005.
- [33]. Marx became a Fellow of the highly prestigious Royal Society of Arts, London, in 1862. *Elements of the Philosophy of Right (Grundlinien der Philosophie des Rechts)* 1821.
- [34]. Matthieu, Burnay (November 2018). *Global Constitutionalism from European and East Asian Perspectives*. Cambridge University Press. hlm. 225–244. ISBN 9781108264877.
- [35]. Orwin, Clifford, Nathan Tarcov (1997). *The Legacy of Rousseau*
- [36]. Osborne & Gabler (1992) dalam bukunya *Reinventing Government : How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector*, berargumen bahwa sektor publik perlu melakukan transformasi dengan menyuntikan

semangat kewirausahaan pada para pejabat publik dan organisasi publik.

- [37]. Porter, Noah, ed. (1913). "Epistemology". Webster's Revised Unabridged Dictionary. G & C. Merriam Co. hlm. 501. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 October 2013. Diakses tanggal 10 Juli 2021. E*pis`te*mol"o*gy (?), n. [Gr. knowledge + -logy.] The theory or science of the method or grounds of knowledge.
- [38]. Rescher, Nicholas (2005). Value Matters: Studies in Axiology. Frankfurt: Ontos Verlag. ISBN 3-937202-67-6. 140 pages.
- [39]. Russell, Bertrand (1998). "6: Principia Mathematica" .Autobiografi . Pers Psikologi. ISBN 9780415189859 .
- [40]. Russian Newspaper – December 25, 1993.
- [41]. Russian Newspaper” – Dece
- [42]. Sartre, Jean-Paul (21 June 1905 – 15 April 1980) was a French contemporary philosopher and writer. Sartre stated that there is no essence of human being, but that what exists is his on being.
- [43]. Savage, Charles M. 5th Generation Management- Integrating Enterprises through Human Networking, Digital Press, USA, 1990.
- [44]. Savas, E.S (1987) dalam bukunya Privatization : The Key To Better Government, menawarkan privatisasi sebagai sebuah alternatif solusi dalam penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi lebi efektif dan efisien. Menurut Savas privatisasi merupakan kunci pokok kearah pemerintahan yang lebih baik.
- [45]. Steup, Matthias (8 September 2017). Zalta, Edward N., ed. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University.

- [46]. Steup, Matthias. Zalta, Edward N., ed. "Epistemology". Stanford Encyclopedia of Philosophy (edisi ke-Spring 2014). See too. Borchert, Donald M., ed. (1967). "Epistemology". Encyclopedia of Philosophy. **3**. Macmillan.
- [47]. Suchting, Wal. "Epistemology". Academic Search Premier: 331–345..
- [48]. Supriyatno, Budi (2019). Makna dan Hakekat Ontologi. Artikel Juli 2019. Jakarta.
- [49]. Supriyatno, Budi. (2009). Manajemen Pemerintahan (Plus dua belas langkah strategis). Media Brilian, page 23.
- [50]. Supriyatno, Budi. (2017) Peran Pemerintah harus adil. Meurpakan sumber dari Filsafat Pemerintah. .
- [51]. Supriyatno, Budi.(2009). Semar adalah Punokawan Pandawa. Punakawan adalah abdi dalem, abdi Negara yang hidupnya dipersiapkan untuk melayani.
- [52]. Terry, Taylor, Gullick, Koontz et al, dalam Koontz & Weirich, Essentials of Management, Tata McGraw Hill.
- [53]. Thales (624/623 – 548/545 BC) was a Greek mathematician, astronomer and pre-Socratic philosopher from Miletus in Ionia, Asia Minor. He was one of the Seven Sages of Greece. Thales concludes, water is the deepest substance which is the origin of all things.
- [54]. Thales dari Miletos adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat Barat pada abad ke-6 SM.
- [55]. Thales, Democritus, Anaximander and Plato and Aristotle belong to the group Monism.
- [56]. Thales, Plato, dan Aristoteles. Greek figures who have an ontological view are known.
- [57]. The Common Law in the British Empire.
- [58]. The Constitution of the People's Republic of China" (PDF).

- Purdue University. Diakses tanggal 30 Juni 2021.
- [59]. The Epistemology of Ethics. 1 September 2011.
- [60]. The Magna Carta (Latin for "Great Charter") was a charter issued in England on 15 June 1215 which restricted the British monarchy, since the time of King John, from absolute power.
- [61]. The Statuta of Marlborough Act. 1267
- [62]. The Government of Wales Act 2006 (GOWA 2006) changed the role of the National Assembly, so that it became a fully-fledged legislature. <https://law.gov.wales/constitution-government/devolution/gowa-06/constitution-government/devolution/gowa-06>.
- [63]. Trauernicht, Clay. Brook, Barry W. Murphy, Brett P., Williamson, Grant J, and David M J S Bowman. Local and Global Pyrogeographic Evidence that Indigenous Fire Management Creates Pyrodiversity. *Ecology Evolution*. 2015 May; 5(9): 1908–1918. Published Online 2015 Apr 14. doi: 10.1002/ece3.1494
- [64]. U.S. Code collection at Cornell University's Legal Information Institute.
- [65]. University of Chicago Press. Mar 29, 1997.
- [66]. Viktor Sheinis (2018) Opinion. On Its 25th Birthday, Russia's Constitution Is Still Worth Defending (Op-ed) But if we want to return to the democratic path declared during perestroika, our constitution will need an overhaul. By Viktor Sheinis. *The Moscow Time*. Independen News Paper Rusia.. Dec. 11, 2018.
- [67]. Wallerstein, Immanuel. 1974. *The modern World System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. New York: Academic Press.

- [68]. Website of the government in Wales. Diakses tanggal 2021-06-28.
- [69]. Wenning, Carl J.. "Scientific epistemology: How scientists know what they know"(PDF)..
- [70]. Wolff , Jonathan (2006) An Introduction to Political Philosophy Paperback – 23 Mar. 2006. Published by Oxford Page 1.





BAB 6

GOOD GOVERNANCE

Good Governance adalah pelaksanaan kegiatan manajemen pemerintahan dan manajemen pembangunan yang menjamin adanya kesetaraan antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha yang sinergi dan saling menguntungkan. Dalam good governance ada 14 aspek penentu, yaitu: Kepemimpinan, Koordinator, Kompeten, Komitmen, Konsisten, omunikator, Kepercayaan, Katalisator, Kooperatif, Keterbukaan, Efektifitas dan efisiensi, Kemitraan, Akuntabilitas, dan Penegakkan Hukum.

6.1. Hakekat Good Governance

Good Governance adalah suatu peyelegaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta menghindari terjadinya penyimpangan. Kata “*baik*” disini dimaksudkan adalah untuk mengikuti kaidah-kaidah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep pemikiran yang cerdas yang mengacu kepada proses pengambilan “*keputusan*” yang pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara benar. *Good Governance* merupakan suatu konsensus antara pemerintah, warga negara/masyarakat, dan

sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik bagi suatu negara. *Good Governance* juga merupakan pemikiran yang telah dirancang secara “*baik*” agar semua program yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan hasil yang semaksimal. Good Governance juga merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang taat dengan peraturan sehingga dalam proses pengambilan keputusan tersebut dapat dihindari adanya usaha untuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Penelitian menunjukkan bahwa bahwa di negara-negara berkembang, perilaku korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dikalangan pejabat pemerintah menyebabkan memburuknya efektivitas pemerintahan.^[269] Analisis Bank Dunia menekankan pentingnya program *good governance*, yang di dalamnya mencakup kebutuhan akan kepastian hukum, pers yang bebas, penghormatan pada Hak Asasi Manusia (HAM), dan keterlibatan warga negara dalam kebijakan pemerintahan. Bank Dunia memberikan definisi *Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.*^[270]

Menurut *Pierre, J. and Peters, G.B.* menyatakan governance is “*thinking about governance means thinking about how*

^[269] Budi Supriyatno (2019). Artikel Penelitian Korupsi di Negara Berkembang. 17 Juli 2019.

^[270] World Bank (1983). World Development Report. Washington : World Bank. 1983. Baca juga: The World Bank (2019), “Worldwide Governance Indicators”, available at: <https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-wide-governance-indicators> (accessed 15 May 2020).

to steer the economy and society and how to reach collective goals.” (Berpikir tentang pemerintahan berarti berpikir tentang bagaimana mengarahkan ekonomi dan masyarakat dan bagaimana mencapai tujuan bersama.^[271]

United National Development Planning (UNDP), mendefinisikan good

governance is “the exercise of political, economic and social resources for development of society.”^[272]

(pelaksanaan sumber daya politik, ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat), penekanan utama dari

Good Governance dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan kegiatan manajemen pemerintahan dan manajemen pembangunan yang menjamin adanya kesetaraan antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha yang sinergi dan saling menguntungkan.

definisi diatas adalah pada aspek ekonomi, politik dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik *good governance*, seperti: adanya partisipasi, transparansi, akuntabel, efektif dan efisien. Selain itu mengembangkan kepastian hukum (*rule of law*), responsif, *consensus oriented*, serta *equity and inclusiveness*. Karakteristik ini bisa ditambah lagi dengan yang diberikan oleh lembaga-lembaga lain yang berkompeten.

Selanjutnya dalam konsep menurut UNDP tersebut, ada tiga pilar *Good Governance* yang penting, yaitu:^[273]

1. Kesejahteraan rakyat (*economic governance*).

[271] Pierre, J. and Peters, G.B. (2000), *Governance, Politics and the State*, Macmillan, New York, NY.

[272] UNDP (1997). *About Principles Good Governance*. In 1997, UNDP formulated 9 Principles Good Governance that must be upheld in order to implementation.

[273] Ibid. UNDP.

2. Proses pengambilan keputusan (*political governance*).
3. Tata laksana pelaksanaan kebijakan (*administrative governance*).

Sejatinya sistem *Good Governemance* sendiri muncul akibat dari rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Banyak pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan praktik korupsi dan sebagainya, Hal inilah yang mengakibatkan munculnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menyimpang dari apa yang menjadi tujuannya.

Menurut *Budi Supriyatno*, Dalam Bukunya *Manajemen Pemerintahan (Plus Duabelas Langkah Strategis: 2009)* manajemen pemerintahan yang baik / *good governance* dapat didefinisikan **sebagai pelaksanaan kegiatan manajemen pemerintahan dan manajemen pembangunan yang menjamin adanya kesetaraan antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha yang sinergi dan saling menguntungkan.**^[274] Dalam *good governance* ada 14 aspek penentu, yaitu:^[275]

1. **Kepemimpinan:** Aparatur pemerintah harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) sehingga mampu menciptakan visi dan misi untuk mendorong majunya manajemen pemerintahan dalam mencapai kesejahteraan rakyat.
2. **Koordinator:** Aparatur pemerintah harus mampu berkoordinasi dengan sektor atau lembaga organisasi lain sehingga tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling tumpang tindih atau bertentangan.

[274] Budi Supriyatno (2009). *Manajemen Pemerintahan (Plus Duabelas Langkah Strategis*. Media Brilian. 2009).p.198.

[275] *Ibid.* Budi Supriyatno (2009). 199.

3. **Kompeten:** Aparatur pemerintah harus mempunyai perpaduan kemampuan *knowledge*, *skill* dan *attitude*. Kemampuan ini diimplementasikan secara dinamis, sehingga dapat menghasilkan karya yang inovatif dan kreatif, serta melahirkan “*instink bisnis*” dan bersemangat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. **Komitmen:** Aparatur pemerintah harus mempunyai janji, tekad dan semangat untuk sebesar-besarnya mendahulukan kepentingan masyarakat. Komitmen ini tidak sebatas diyakini dan diucapkan, tetapi harus diperlihatkan dalam tindakan dan perilaku. Hal ini penting, karena masyarakat kita umumnya lebih senang dengan bukti dari pada janji.
5. **Konsisten:** Aparatur pemerintah harus berketetapan hati dan taat pada asas atau peraturan perundangan dalam menjalankan tugas sebaik-baiknya secara konsisten, didasari hati tulus dan jujur, dalam ucapan maupun tindakan.
6. **Komunikator:** Aparatur pemerintah harus mampu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan. Informasi yang benar adalah, informasi yang tidak direkayasa untuk kepentingan politik atau kepentingan lain.
7. **Kepercayaan:** Aparatur pemerintah harus berusaha meningkatkan kepercayaan pada masyarakat, membangun citra yang baik, mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebaik-baiknya.
8. **Katalisator:** Aparatur pemerintah harus mampu menjadi pemicu terjadinya perubahan dan memunculkan paradigma baru, atau pembaharuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
9. **Kooperatif:** Aparatur pemerintah harus mampu melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, sehingga

memudahkan pelaksanaan kegiatan.

10. **Keterbukaan:** Aparatur pemerintah harus mampu menciptakan keterbukaan yang dibangun di atas dasar kebebasan arus informasi, sehingga proses-proses kegiatan kelembagaan dan informasi-informasi lain, secara langsung dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
11. **Efektifitas dan efisiensi:** Aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas harus berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya secara optimal.
12. **Kemitraan:** Aparatur pemerintah harus mampu menciptakan kemitraan dengan masyarakat maupun pengusaha dalam menjalankan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan.
13. **Akuntabilitas:** Aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan semua tindakan atau kegiatan yang dilaksanakannya, baik secara administrasi keuangan maupun produk (*output* maupun *outcome*).
14. **Penegakkan Hukum:** Aparatur pemerintah harus menjamin adanya kepastian hukum, termasuk penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum.

Dari 14 kunci manajemen pemerintahan yang baik tersebut dapat dilihat indikator dan perangkat kerjanya pada Tabel 9.2. Indikator Manajemen Pemerintahan yang baik di bawah ini.

**TABEL 9.2. INDIKATOR MANAJEMEN PEMERINTAHAN
 YANG BAIK oleh Budi SUPriyatno**

N O	ASPEK /KUNCI GOOD GOVERNANCE	INDIKATOR	PERANGKAT KERJA
1	2	3	4
1	KEPEMIMPINAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai wawasan ke depan. 2. Memiliki kemampuan menggerakkan bawahan. 3. Mampu menciptakan misi dan visi yang dapat mendorong tercapainya kesejahteraan rakyat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan yang memberikan kekuatan hukum pada visi dan misi. 2. Kebijakan pada penciptakan dan strategi tercapainya kesejahteraan.
2	KOORDINATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menciptakan kerjasama dengan lembaga lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pogram kerja sama yang dapat dilaksanakan.
3	KOMPETEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai kinerja tinggi. 2. Melaksanakan tugas dan fungsi. 3. Memiliki kreatifitas dan kemauan inovasi. 4. Memiliki kualifikansi di bidangnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya. 2. Sistem reward and punishment (Penghargaan dan Sanksi) yang jelas. 3. Sistem pengembangan SDM.
4	KOMITMEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesadaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan yang

Prof. DR. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi
FILSAFAT PEMERINTAHAN

		<p>dan kamuan untuk melakukan tugas secara baik, jujur dan disiplin.</p> <p>2. Adanyan kesadaran untuk menjadi pelayan atau abdi negara yang baik.</p>	<p>menjamin perlindungan aparatur yang menjalankan tugas secara konsisten.</p> <p>2. Penghargaan dan sanksi dalam melaksanakan tugas.</p>
5	KONSISTEN	<p>1. Mempunyai sikap yang tegas dan taat hukum dan jujur.</p> <p>2. Mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.</p>	<p>1. Peraturan yang tegas dalam menciptakan hukum.</p> <p>2. Pedoman pelaksanaan tugas.</p>
6	KOMUNIKATOR	<p>1. Mampu menyampaikan informasi yang benar.</p> <p>2. mampu meyakinkan dan bisa dipercaya.</p>	<p>1. Pedoman penyampaian informasi.</p> <p>2. Media komunikasi.</p>
7	KEPERCAYAAN	<p>1. Mempunyai sifat jujur.</p> <p>2. Mampu membangun citra yang baik.</p> <p>3. mampun menjalankan tugas tanpa KKN</p>	<p>1. Pedoman pelaksanaan tugas.</p> <p>2. Moral aparatur</p>
8	KATALISATOR	<p>1. Mampu menjadi agen perubahan.</p> <p>2. mampu menciptakan paradigma baru yang meningkatkan kesejahteraan</p>	<p>1. Peraturan pelaksanan tugas.</p> <p>2. Kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas.</p>

Prof. DR. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi
FILSAFAT PEMERINTAHAN

		rakyat.	
9	KOOPERATIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menciptakan kerjasama dengan lembaga lain. 2. Mampu menciptakan kegiatan multi sektor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan /pedoman yang dapat menciptakan kerjasama multi sektor.
10	KETERBUKAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya informasi yang benar dari setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik. 2. Adanya akses pada informasi yang benar akurat dan adil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundangan yang menjamin implementasi kebijakan yang baik. 2. Jaringan internet.
11	EFEKTIF DAN EFISIEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber yang optimal. 2. Adanya perbaikan berkelanjutan. 3. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Indikator kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. 2. Standar dan indikator kinerja untuk menilai efektif dan efisien pelayanan.

Prof. DR. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi
FILSAFAT PEMERINTAHAN

		kerja.	
12	KEMITRAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menciptakan pemahaman pola kemitraan. 2. Mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk berkarya dan bermitra. 3. mampu mencitakan kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi. 	<p>Peraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan, pemerintah, dunia usaha swasta. Program Pemberdayaan.</p>
4	AKUNTABILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban untuk setiap pekerjaan terkait dengan waktu, sasaran, tujuan, dan pemanfaatan dana. 2. Keseuaian dengan antara pekerjaan dengan standar pelaksanaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan atau Prosedur/mekanisme kerja. 2. Laporan Pertanggungjawaban pekerjaan. 3. Sistem pemantauan kinerja.

Prof. DR. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi
FILSAFAT PEMERINTAHAN

14	PENEGAKKAN HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman terhadap peraturan perundangan. 2. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan peraturan. 3. Kesadaran dan kepatuhan kepada peraturan, dan tidak akan melakukan penyimpangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung. 2. Sosialisasi peraturan.
----	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam proses perkembangan good governance yang pesat seperti itu, maka good government dengan kunci dan aspek-aspeknya yang menjadi salah satu tiang penyangga eksistensi ilmu pemerintahan. Melalui ontologi, epistemologi dan aksiologi, akan dapat mengarahkan pada strategi pengembangan ilmu pemerintahan tidak hanya menyangkut *etik dan filosofi*, bahkan sampai pada dimensi pelayanan baik kepada masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan “perenungan” kembali secara mendasar oleh para aparatur negara atau birokrat pemerintahan tentang hakekat pemerintahan, pengelolaan pemerintahan, atau tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, serta tidak melakukan penyimpangan yang merugikan negara. Pada setiap perenungan yang mendasar tersebut, bisa mengantarkan kembali ke alam pikir kita yang ingin membangun pemerintahan yang lebih baik dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Untuk itu kembali ke filsafat pemerintahan guna menanyakan berbagai hal mendasar dalam diri kita atau aparatur pemerintahan yang sedang menjalankan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Dalam melaksanakan tugasnya aparatur diharapkan juga mampu mengem-

bangkan kaidah-kaidah ilmu pemerintahan dengan penuh tanggung jawab yang bisa diimplementasikan kepada pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih bebas korupsi. Dengan kata lain Good Governance.

6.2. Asas Good Governance

Dalam Good Governance perlu menetapkan dasar bagi gerak langkah aparatur pemerintahan dalam melakukan kegiatan pemerintahan. Norma hukum menjadi landasan yang tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara demokrasi, agar setiap kebijakan yang dibuat tetap berdasarkan kehendak rakyat. Kepastian hukum menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk tetap menjamin keutuhan hak dan kewajiban masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik terdapat asas-asas umum penyelenggaraan Good Governance, hal ini menjadi suatu dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Asas-asas umum pemerintahan adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum. Pengertian asas-asas umum Good Governance merupakan etika yang hidup dan berkembang dalam lingkungan pemerintahan. Asas-asas umum Good Governance berfungsi sebagai pegangan bagi aparatur negara dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara agar bisa berjalan baik sesuai dengan peraturan perundangan. Asas-asas Good Governance yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas. Asas-asas good governance dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Asas Kepastian Hukum.** Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
2. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.** Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
3. **Asas Kepentingan Umum.** Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. **Asas Keterbukaan.** Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
5. **Asas Proporsionalitas.** Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara.
6. **Asas Profesionalitas.** Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundnag-undangan yang berlaku.
7. **Asas Akuntabilitas.** Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. **Asas efisiensi dan efektivitas.** Efisiensi dan efektivitas menjadi suatu landasan yang harus digunakan dalam melakukan kegiatan pemerintahan. Efisiensi dan efektifitas merupakan dua asas yang terkandung dalam asas-asas *good*

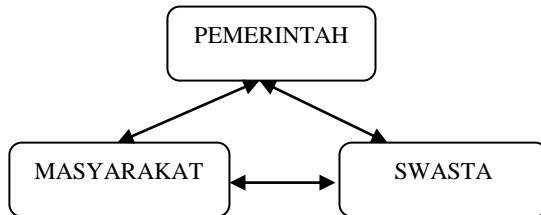
governance, kedua asas ini menunjuk pada kemampuan yang tinggi untuk mengoptimalkan kemanfaatan segala sumber daya dan dana yang tersedia dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan. Kedua asas ini menitikberatkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang tepat guna tanpa penghamburan-hamburan sumber daya dan dana. Sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal dan berjalan dengan efisien serta efektif dalam pengerjaannya.

6.3. Indikator Good Governance

Kenyataannya untuk mewujudkan *good governance* tidak hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan terdapat tiga pihak atau *stakeholders* yang harus bekerjasama, yaitu *pemerintah*, *masyarakat*, dan *pihak swasta*. Mereka bertugas:

1. *Pemerintah* memiliki peran sentral dalam mengambil keputusan dan mengatur jalannya pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. *Masyarakat* memiliki peran untuk ikut berpartisipasi dan mendukung segala keputusan, kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan
3. *Swasta* memiliki peran untuk mendukung pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembukaan dan perluasan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat.

TIGA PIHAK / *STAKEHOLDERS* YANG HARUS
BEKERJASAMA MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE



Selanjutnya peran tiga *stakeholders* tersebut mempunyai indikator yang berlaku baik dalam mensejahterakan rakyat. Sejatinnya indikator ini adalah tugas dari domain lembaga yang pembentuk good governance itu sendiri. Indikator tersebut antara lain:

1. Pemerintah

- a. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan.
- b. Menyediakan public service yang efektif dan akuntabel.
- c. Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).
- d. Melindungi lingkungan hidup.
- e. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik.

2. Masyarakat

- a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi.
- b. Mempengaruhi kebijakan public.
- c. Sebagai sarana checks and balances pemerintah.
- d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah.
- e. Mengembangkan Sumber Daya Manusia

3. Swasta

- a. Menjalankan industry.
- b. Menciptakan lapangan kerja.
- c. Menyediakan insentif bagi karyawan.
- d. Meningkatkan standar hidup masyarakat.
- e. Memelihara lingkungan hidup.
- f. Menaati peraturan.
- g. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.
- h. Menyediakan kredit bagi pengembangan Usaha Kredit Mikro.

6.4. Tujuan dan Manfaat Good Governance

Tujuan Good Governance

Tujuan *Good Governance* ini terbagi menjadi beberapa hal yang diuraikan sebagai berikut ini:

1. **Mensukseskan Program Pemerintah.** Good governance pada dasarnya sangat membantu pemerintah dalam mensukseskan setiap program yang dijalankannya. Dengan penerapan good governance semua program yang telah ditetapkan berbagai rencana yang hendak dilakukannya oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik dan benar.
2. **Membuat keputusan yang baik.** Good governance juga membantu sebuah pemerintah dalam pembuatan keputusan serta mendorongnya agar menjadi pemerintahan yang menjalankan programnya dengan nilai moral tinggi. Karena melalui moral dan landasan-landasan yang benar dan baik, pemerintah akan lebih mudah untuk mengimplementasikan programnya. Oleh karena itu untuk mencapai tersebut pemerintah harus menggunakan Good governance sehingga bisa membuat keputusan yang baik dan benar.

3. **Mendorong Professional, Transparansi, dan Efisien.** Melalui good governance pemerintah dapat menerapkan programnya dengan sangat baik. Salah satu yang menjadi kuncinya karena dengan penerapan good governance pemerintah akan melakukan kegiatan programnya dengan baik dan benar. Hal ini sangat baik untuk mendorong pemerintah untuk lebih maju profesionalisme, transparan, dan efisien sehingga menghindari kecurigaan dari rakyatnya. oleh karena itu, pemerintah melakukan proses tersebut untuk meningkatkan kualitas mpelayanan sekaligus kepercayaan dari rakyatnya.
4. **Meningkatkan Akuntabilitas, Adil, dan dapat Dipercaya.** Prinsip akuntabilitas, adil dan dapat dipercaya merupakan salah satu tujuan dari adanya good governance. Semua prinsip tersebut harus dilakukan secara benar. Disamping itu ada alasan yang kuat agar perintah dipercaya oleh masyarakat, dan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional sehingga mampu mensejahterakan rakyatnya.

Manfaat Good Governance

Manfaat penerapan Good Governance pada sistem pemerintahan memberikan dampak yang luar biasa, untuk tetap berjalannya sistem pemerintahan yang lebih baik dan juga lebih bertanggungjawab. Prinsip good governance akan berdampak pada hubungan baik dengan negara lainnya, ketika pemerintahan mampu menerapkan setiap prinsip good governance pada pemerintahannya

Good Governance jika diterapkan dengan baik membuat sistem pemerintahan mampu berjalan dengan seimbang. Terutama untuk mengakomodir kepentingan dari **“rakyat”** secara

keseluruhan. Tanpa penerapan good governance yang baik, seluruh aspek pemerintahan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika pemerintah menerapkan konsep good governance maka pemerintah akan memperoleh manfaat yang lebih besar.

Good Governance sendiri memiliki lima aspek penting yang harus dipenuhi, untuk dapat mengaplikasikan konsep ini dengan tepat dan baik. Kelima aspek penting tersebut adalah :

1. **Profesionalitas**. Profesionalitas adalah kualitas sikap para aparatur negara atau pemerintah yang mampu menjalankan tugas sesuai dengan profesinya dan derajat pengetahuan serta keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas pelayanan kepada rakyatnya
2. **Tanggungjawab**. Tanggung adalah kewajiban seseorang atau aparatur negara/pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kebijakan yang dilaksanakan baik berupa kebijakan politik maupun administrasi berupa anggaran Negara secara baik dan benar.
3. **Keadilan**. Keadilan merupakan suatu sikap seseorang atau aparatur negara/pemerintah tidak memihak kecuali kebenaran serta mampu berlaku adil kepada setiap warga negara sesuai dengan haknya yang diperolehnya atau suatu kondisi kebenaran secara moral. Dan tidak berpihak karena kelompoknya, kesetaraan ras, kebangsaan atau agama (kepercayaan).
4. **Transparansi**. Transparansi adalah prinsip yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.
5. **Akuntabilitas**. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban

pertanggungjawaban seseorang apatur negara/pemerintah kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan visi dan misi serta tujuan pemerintahan dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.

Kelima aspek tersebut harus terpenuhi agar konsep dari **Good Governance** dapat berjalan dan diaplikasikan dengan baik. Pengaplikasian **Good Governance** secara penuh dan secara tepat utuh memberikan banyak sekali manfaat bagi baik pemerintahan. Saat ini sudah banyak sekali pemerintahan di dunia yang sudah mengoptimalkan konsep **Good Governance** ini.

Beberapa *manfaat* dari **Good Governance** dijabarkan rinci berikut ini:

1. **Implementasi Kebijakan dengan baik.** Pembuatan kebijakan dan implementasi yang diwujudkan dengan prinsip **Good Governance** akan membuat rakyat lebih mempercayai. Sehingga pemerintah dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan dengan baik dan benar.
2. **Mewujudkan Tanggungjawab Sosial.** Tangung jawab sosial sangat penting untuk setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu dampak jangka panjangnya adalah munculnya kebijakan yang akan menunjang kelestarian lingkungan sekitarnya. Sejatinya tanggung jawab sosial dan moral akan terbentuk jika sistem pemerintahan mampu menerapkan good governance dengan baik.
3. **Terciptanya Iklim Kondusif.** Iklim kondusif inilah yang nantinya akan menciptakan kestabilan kondisi internal yang akan berdampak pada kondisi stabilitas hubungan dengan dunia internasional. Apabila kondisi di dalam negeri lebih stabil dan kondusif maka tingkat kepercayaan dunia terhadap

pemerintahan suatu negara akan jauh lebih baik. Itulah sebabnya mengapa penerapan good governance menjadi pertimbangan utama bagi para pelaku pemerintahan yang memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun negara.

4. **Mewujudkan Sumber Daya Lebih Efektif dan Efisien.** Pemerintah dengan penyelenggaraan good governance dapat mengarahkan anggaran ke arah yang lebih baik efektif dan efisien. Setiap kegiatan maupun program dari pemerintah di jalankan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai moral yang tinggi. Bahkan setiap tindakan maupun keputusan yang hendak di ambil selalu di pikirkan terlebih dahulu dengan begitu baik dan melihat hasilnya dalam jangka panjang agar setiap tindakannya tersebut tidak mengalami kegagalan.
5. **Mewujudkan Keputusan baik.** Keputusan pemerintah dapat diambil dengan begitu baik dan optimal. Agar pemerintah memiliki nilai efisiensi budaya kerja yang lebih sehat dan membuat kinerja semakin baik, maka pemerintah harus dapat mewujudkan keputusan yang lebih baik. Keputusan yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan dari sebuah pemerintahan. Ketika putusan baik maka hasilnya akan baik, begitupun sebaliknya.
6. **Menghindari KKN.** KKN atau yang sering kita kenal dengan istilah korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan salah satu faktor penghambat dari kemajuan suatu pemerintahan. Prinsip good governance yang konsisten dapat menghalangi kemungkinan dilakukannya KKN yang bisa berhubungan dengan masalah keuangan. Karena segala prinsip-prinsip penyelenggaraan good governance dirancang dengan baik mulai dari transparansi hingga keadilan. Maka pemerintahan akan berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Alasannya karena keberadaan pemerintah untuk melayani

warga negaranya. Terlebih lagi pemerintah didirikan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip good governance. Pemerintah bisa bekerja dengan baik dan menghindari KKN. Dengan adanya KKN di pemerintahan dapat menyebabkan :

- a. Pemerintah atau negara bisa runtuh.
- b. Merusak sendi-sendi perekonomian bangsa.
- c. Rakyat menjadi miskin dan menderita.

Dengan menerapkan prinsip good governance ini, maka KKN yang sering terjadi pada pemerintahan dapat dikurangi dan ditekan jumlahnya.

7. **Meningkatkan Kepercayaan Investor.** Pemerintahan bisa bekerja dengan beberapa prinsip yang telah dipegangnya mulai dari kemandirian, akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, dan lain sebagainya. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka pemerintahan dapat memberikan hasil yang maksimal dan menunjukkan sistem kerjanya tidak dapat diragukan lagi oleh banyak orang. Sehingga dengan demikian banyak investor yang sangat tertarik untuk menanamkan modal di negara yang pemerintahannya yang menerapkan *Good Governance* karena adanya rasa kepercayaan dari mereka terhadap pemerintah.
8. **Meningkat Kinerja.** Pemerintah yang menerapkan *Good Governance* dengan begitu baik, secara tidak langsung mempengaruhi setiap karyawan atau Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memiliki semangat kerja yang lebih tinggi. Membuat karyawan untuk selalu meningkatkan kualitas kerjanya. Disamping itu dengan menerapkan Good governance juga bermanfaat untuk meningkatkan lingkungan bekerja menjadi lebih baik. Setiap karyawan akan merasa dihargai dan membuat mereka akan merasa nyaman.

9. **Meningkatkan Laporan Pertanggungjawaban yang lebih baik.** Kualitas laporan keuangan atau pertanggungjawaban anggaran yang dipergunakan pemerintah dapat ditingkatkan lebih baik. Karena adanya prinsip transparansi, dan pertanggungjawaban dari setiap proses maupun langkah-langkah yang diambil pemerintah secara baik dan benar. Sehingga secara tidak langsung pemerintah akan menunjukkan hasil laporan pertanggungjawaban keuangan dengan lebih baik sesuai prinsip good governance.



6.5. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Pierre, J. and Peters, G.B. (2000), *Governance, Politics and the State*, Macmillan, New York, NY.
- [2]. Supriyatno, Budi (2009). *Manajemen Pemerintahan (Plus Duabelas Langkah Strategis*. Media Brilian. 2009).
- [3]. Supriyatno, Budi (2019). *Artikel Penelitian Korupsi di Negara Berkembang*. 17 Juli 2019.
- [4]. UNDP (1997). *About Principles Good Governance*. In 1997, UNDP formulated 9 Principles Good Governance that must be upheld in order to implementation.
- [5]. World Bank (1983). *World Development Report*. Washington : World Bank. 1983. Read also: *The World Bank (2019), “Worldwide Governance Indicators”*, available at: [.https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world wide-governance-indicators](https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-wide-governance-indicators) (accessed 15 May 2020).





BAB 7

PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Daerah merupakan sub-sistem dari negara kesatuan, oleh karena itu tugas negara atau pemerintah pusat juga merupakan tugas-tugas pemerintah daerah. Namun tidak semua tugas-tugas atau urusan-urusan pemerintahan pusat diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional. Pemerintah Daerah tidak hanya untuk mengelola rutinitas operasi program yang sedang berjalan saja. Tetapi juga melakukan inisiatif perubahan yang besar untuk menyediakan program layanan baru yang dapat mengadaptasi dan meningkatkan program yang sedang berjalan secara cepat pada permasalahan lingkungan yang berubah. Tantangan utama pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan aparatur untuk mendukung pengembangan program pembangunan dalam melayani masyarakat yang akuntabel harus dibuktikan secara serius.

7.1. Langkah Tindakan Pejabat Daerah

Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bisa dilepaskan dari pemahaman pengertian “*pemerintahan*” itu sendiri. *Budi Supriyatno* dalam bukunya *Manajemen Pemerintahan* mengemukakan pendapatnya *pemerintah adalah badan-badan publik yang memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif dan*

*yudikatif dalam mencapai usaha tujuan Negara.*¹²⁷⁶¹ Badan publik, pemerintahan sebagai wadah atau tempat aparaturnegara adalah memiliki kelengkapan negara seperti *eksekutif, legislatif, dan yudikatif*. Badan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang dan tanggungjawab tertentu. Wewenang diberikan "*kekuasaan*" untuk melakukan suatu tindakan karena jabatannya. Oleh karena itu disebut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan ini tidak hanya di pemerintah pusat, namun juga berada di lingkungan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memiliki tujuan ganda. Tujuan pertama adalah tujuan administrasi penyediaan barang dan jasa untuk kebutuhan warga negaranya. Tujuan kedua adalah untuk mewakili dan melibatkan warga negara dalam menentukan kebutuhan publik yang khusus dan bagaimana kebutuhan khususnya ini dapat dipenuhi secara baik. Pemerintah daerah merupakan proses perwakilan yang merentang dan menghubungkan representasi dan administrasi di tingkat lokal tingkat dalam struktur di daerah. Untuk memahami tentang pemerintah daerah, perlunya memberikan pemahaman pemerintah daerah tentang hakekat dan kewenangan pemerintah daerah.

Dalam Bab 7 ini akan dibahas hakekat, asas, fungsi dan kewenangan dan demokrasi pemerintah daerah.

Pemerintah daerah merupakan sub-sistem dari negara kesatuan, oleh karena itu tugas negara atau pemerintah pusat juga merupakan tugas-tugas pemerintah daerah. Namun tidak semua tugas-tugas atau urusan-urusan pemerintahan pusat diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan

¹²⁷⁶¹ Lihat, Budi Supriyatno (2009). Manajemen Pemerintahan (Plus duabelas Langkah Strategis). Penerbit : CV. Media Brilian. 2009, hal. 23.

daerah serta kepentingan nasional.

Pemerintah daerah merupakan salah satu pemerintahan "*komparatif*" atau perbandingan yang secara jelas mengungkapkan "*kontingensi*" atau ketidakpastian institusi karena dengan keragaman latar belakang proses politik. Karena proses politik sangat berpengaruh besar terhadap keberadaan pemerintah daerah. Intervensi politik selalu kelihatan dalam memutuskan kebijakan. Contohnya, dalam peraturan menunjukkan kekuasaan dan kewenangan ada di pemerintah daerah, namun dalam praktiknya di kerjakan oleh pemerintah pusat, karena alasan politik.

Di beberapa negara menunjukkan pemerintahan daerah sering disebut sub-nasional atau sub-sistem dari negara yang sangat kuat, seperti negara bagian dalam sistem politik federal misalnya, *Amerika* atau *Swiss*. Negara ini pemerintah daerahnya kuat, sehingga mampu membuat keputusan yang tepat tanpa adanya intervensi politik. Dampak yang lebih besar mampu memberikan pelayanan yang tepat untuk warga negara tanpa adanya intrik-intrik dari pemerintah pusat. Sementara di negara lain tidak memiliki pemerintah daerah sama sekali seperti di negara bagian yang terpusat seperti *Yunani* tidak kuat. Melihat varian kompleksitas daerah sering hidup "*berdampingan*" dengan unit sub-regional lain seperti kabupaten, provinsi, dengan kementerian atau lembaga pusat. Dan di lain pihak menunjukkan otoritas hukum dan fiskal yang sangat berbeda di tingkat pemerintah teritorial yang lebih rendah.

Varian ini menunjukkan bahwa melakukan *analisis* pemerintah daerah sama sekali tidak sederhana bahkan sangat rumit sekali. Gagasan menyamakan secara "*universal*" bentuk atau ciri umum lembaga daerah tidak mungkin bisa dilaksanakan, bahkan di wilayah negara barat yang demokrasi sangat kuatpun

bisa *“menyesatkan”*. Pemerintah daerah tidak dapat dianalisis secara independen dari konteks politik di mana pemerintah daerah berlangsung. Pemerintah daerah harus mengacu pada proses umum pembangunan negara dan *“tradisi kenegaraan”*, serta dipahami sebagai produk dari *tren regionalisasi* yang berbeda.^[277]

R. Balme. (2001) menyatakan dalam arti *restriktif*, pemerintah daerah dapat didefinisikan sebagai aktivitas otoritas politik yang dirancang khusus sebagai tingkat perantara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan didasarkan pada legitimasi yang diberikan dalam bentuk representasi politik daerah.^[278] Oleh karena itu, melibatkan skala otoritas politik tingkat pusat dan daerah. Tujuan pemerintah mengurus masalah daerah, dan alat yang digunakan untuk memenuhi tujuan tersebut desentralisasi dan otoritas.^[279]

Bisa dibayangkan untuk mengamati masalah pemerintah daerah tanpa mekanisme *“perwakilan politik dan atau pemerintah”* yang sesuai di tingkat regional akan kesulitan, sebagai contoh: Kantor Nasional Skotlandia *“sebelum reformasi devolusi”* di *Inggris* atau *Prefet Regional “sebelum reformasi desentralisasi”* di *Prancis* menjadi perdebatan.^[280] Namun demikian, sebagian besar demokrasi barat telah berkembang sejak 1980-an menuju pemberdayaan yang lebih besar dari *“tingkat perwakilan pemerintah daerah”*, yang paling dramatis di

^[277] Budi Supriyatno. (2019). Pemerintahan Daerah. Semina Program Pasca Sarajana. Univeristas Satyagama Jakarta, 2019.

^[278] R. Balme. (2001). Regional Governmentin. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2001.

^[279] Budi Supriyatno.(2019). Government Decentralization. Seminar, Postgraduate Program. Satyagama University, Jakarta, Indonesia. 2019.

^[280] Withers, Charles, W.J. (1984). Gaelic in Scotland, 1698–1981. Edinburgh: John Donald. hlm. 16–41;. ISBN 978-0-85976-097-3.

Spanyol, Prancis, Belgia, Italia, Kanada, dan baru-baru ini *di Inggris*, perwakilan daerah sangat dibutuhkan. Sementara sistem federal beralih ke pola yang lebih saling bergantung dari hubungan antara negara bagian dan pemerintah federal terutama di *Jerman, Amerika Serikat*, dan *Swiss*.

R. Balme. mengatakan *Regional government means any combination of municipalities and counties that enter into a joint powers agreement to provide for economic development projects pursuant to a plan adopted by all parties to the joint powers agreement*. (pemerintah daerah berarti setiap kombinasi kotamadya dan kabupaten yang mengadakan perjanjian kekuatan bersama untuk menyediakan proyek-proyek pembangunan ekonomi sesuai dengan rencana yang diadopsi oleh semua pihak dalam perjanjian kekuatan bersama).^[281] *Balme* menekankan pada perjanjian kekuatan bersama proyek pembangunan.

Pemerintah Daerah tidak hanya untuk mengelola rutinitas operasi program yang sedang berjalan saja. Tetapi juga melakukan inisiatif perubahan yang besar untuk menyediakan program layanan baru yang dapat mengadaptasi dan meningkatkan program yang sedang berjalan secara cepat pada permasalahan lingkungan yang berubah. Contohnya, Wabah Covid 19 menjadi perhatian besar bagi pemerintahan di seluruh dunia, dan menjadi pekerjaan yang berat bagi pemerintah daerah dalam mencegah penyebaran virus^[282] ini hanyalah salah satu contoh dari daftar panjang pekerjaan pemerintah yang harus dilakukan secara cepat. Oleh karena itu harus dilakukan upaya untuk “*merubah*” tatakelola dan perilaku aparatur pemerintah yang lebih cepat, efisien dan efektif.

^[281] *Op.cit.* R. Balme. (2001). Regional Governmentin.

^[282] Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret lalu 2020.

Tantangan utama pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan aparatur untuk mendukung pengembangan program pembangunan dalam melayani masyarakat yang akuntabel harus dibuktikan secara serius. Banyak pendekatan sistematis, didukung oleh swasta, dan masyarakat, akan memfasilitasi lebih cepat untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengembangkan program di seluruh pemerintah daerah. Dalam rangka peningkatan SDM dan akuntabilitas perlu dilakukan langkah tindakan berikut:

1. ***Meningkatkan kompetensi pimpinan daerah.*** Perlunya peningkatan kompetensi manajerial pejabat struktural khususnya pejabat pimpinan tinggi yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyusun kebijakan serta membuat keputusan di pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional yang dapat menciptakan pimpinan yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat kesatuan dan kesatuan bangsa, memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat
2. ***Membuat program pengembangan SDM.*** Perlu melakukan terobosan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sumber daya manusia tingkat manajerial menengah kebawah, baik itu yang bersifat teknis maupun non-teknis. Pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah proses yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan SDM. Demikian juga dengan kompetensi-kompetensi yang dikembangkan melalui pelatihan dan pembelajaran organisasi, manajemen kepemimpinan, dan manajemen pengetahuan untuk kepentingan peningkatan kinerja. Diharapkan SDM daerah bisa meningkatkan kinerja dan mampu melaksanakan

- pekerjaan yang cepat sesuai dengan tuntutan masyarakat.
3. ***Menyusun program prioritas dan sasaran pembangunan daerah.*** Perlunya menyusun program prioritas. Program prioritas merupakan sektor atau bidang unggulan daerah yang dibutuhkan masyarakat saat itu, misalnya vaksinasi covid harus mencapai satu juta perhari. Atau program Pendidikan SMP dan SMA gratis, program pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Prioritas program ***dan sasaran pembangunan daerah*** daerah harus jelas, karena merupakan arahan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar bisa dilaksanakan secara tepat dan konsisten.
 4. ***Penggunaan anggaran yang efektif dan efisiensi.*** Perlunya prinsip pengelolaan anggaran yang baik. Perintah daerah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan atau anggaran daerah yang baik. Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang baik, efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan akan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.
 5. ***Penyelenggaraan good governance.*** Perlunya penyelenggaraan *good governance*. Semangat reformasi terlihat dari ketentuan yang terkait dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang mengakomodasikan praktik-praktik terbaik dalam kaitan dengan penyelenggaraan *good governance*. Diperkenalkannya asas akuntabilitas berorientasi hasil atau yang umumnya dikenal dengan istilah akuntabilitas kinerja dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara merupakan perubahan paradigma yang signifikan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

6. **Mencegah KKN.** Pejabat daerah harus selalu diingat bahwa masyarakat sesungguhnya sangat menghendaki munculnya jiwa kepeloporan dan sifat keteladanan aparatur negara sebagai panutan mereka dengan tindakan nyata mencegah dan memberantas KKN. Dimulai langkah yang terpuji dengan menajalankan tugas secara jujur dan bersih dari KKN.

Langkah tersebut harus dilakukan secara konsisten, sehingga “*melembaga*” di setiap hati nurani aparatur atau pejabat di pemerintah daerah. Seperti di *Jepang* pejabat *malu* melakukan korupsi. Seharusnya pejabat Indonesia mencontohhkan pejabat Jepang. Belum ada jaminan sukses dalam skala besar, karena pemerintahan daerah sangat komplek membutuhkan perubahan yang konsisten. Namun jika aparatur atau pejabat daerah melakukan enam langkah tersebut secara baik, jujur dan profesional serta bebas KKN, saya percaya bahwa kesuksesan dalam menjalankan pemerintah daerah akan tercapai.

7.2. Hakekat Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah selalu ada dalam pemerintahan yang “*demokrasi.*” Artinya pemerintah bisa dikatakan demokrasi apabila di dalamnya ada pemerintahan daerah. Mengapa demikian? Karena pemerintah daerah ada pertimbangan yang sangat penting dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Saya katakan bahwa: “*Tidak ada sistem pemerintahan yang dianggap baik, lengkap dan demokratis jika tidak memiliki sistem pemerintahan daerah.*”^[283]

Pemerintah daerah merupakan produk “*devolusi*” sebagai

^[283] *Op.cit.* Budi Supriyatno.(2019). Government Decentralization.

dimensi desentralisasi.^[284] *Olowu* berkomentar, ada dua pendekatan untuk definisi pemerintah daerah dalam literatur. Salah *satu* pendekatan, yang biasanya diadopsi dalam perbandingan studi, adalah untuk menganggap semua struktur nasional seperti itu di bawah pusat pemerintah sebagai pemerintah daerah. Pendekatan *kedua* lebih kehati-hatian bahwa pemerintah daerah diidentifikasi dengan definisi tertentu karakteristik. Karakteristik ini biasanya fokus pada lima atribut berikut: kepribadian hukum, kekuatan tertentu untuk melakukan berbagai fungsi, anggaran substansial dan otonomi kepegawaian tunduk pada kontrol pusat yang terbatas, partisipasi warga yang efektif dan lokalitas. Ini dianggap penting untuk membedakannya dari semua bentuk lainnya lembaga lokal dan juga memastikan efektivitas organisasinya.^[285]

Adanya pemerintah daerah belum tentu menjamin seratus persen pelaksanaan program pembangunan lancar. Tetapi dengan adanya pemerintah daerah kemungkinan besar pelayanan kepada masyarakat akan lebih cepat dan lebih terjangkau. Namun juga harus waspada terhadap pejabat menyebutkan bahwa pemerintah daerah sudah menjalankan pemerintahan secara baik, kalimat ini *“menyesatkan”*. Karena tidak semua pejabat pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berpartisipasi yang efektif. Bahkan banyak pejabat daerah membuat keputusan cepat dan tidak mengindahkan, mempedulikan keinginan atau masukan dari partisipasi masyarakat, atau dengan kata lain masyarakat ditinggalkan. Oleh karena itu, ada berbagai masalah yang harus dipertimbangkan dengan sejumlah pertanyaan muncul seperti berikut ini:

^[284] *Ibid.* Budi Supriyatno.(2019). Government Decentralization.

^[285] Olowu, D. (1988) African Local Governments as Instruments of Economic and Social Development, No. 1415, The Hague, International Union of Local Authorities, PP 10-17.

1. Bagaimana cara menentukan partisipasi warga negara yang efektif?
2. Apakah pada saat membuat keputusan dan kebijakan daerah, masyarakat terlibat?
3. Apakah dalam hal partisipasi dalam pemilihan Umum saja, hanya dibutuhkan suaranya?
4. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang aktif dalam menyuarakan demokrasi daerah?

Pertanyaan ini menjadi pertimbangan dalam pemerintah daerah. Dalam pelibatan masyarakat dan dasar hukum sangat penting. *Robson* mendefinisikan pemerintah daerah dari segi hukum sebagai berikut: Secara umum, pemerintah daerah dapat dikatakan melibatkan konsepsi masyarakat teritorial, tidak berdaulat yang memiliki hak hukum dan organisasi yang diperlukan untuk mengatur urusannya sendiri. Ini, pada gilirannya, mengandaikan keberadaan otoritas lokal dengan kekuatan untuk bertindak independen dari kontrol eksternal serta partisipasi masyarakat lokal dalam mengurus urusannya sendiri. ^[286]

Gomme mendefinisikan pemerintah daerah sebagai berikut: pemerintah daerah adalah bagian dari keseluruhan pemerintahan suatu bangsa atau negara yang dikelola oleh otoritas yang berada di bawah negara otoritas, tetapi dipilih secara independen dari kontrol oleh otoritas negara, oleh penduduk yang memenuhi syarat, atau memiliki properti di tempat-tempat tertentu, yang daerah-daerah itu telah dibentuk oleh komunitas-komunitas yang memiliki kepentingan dan sejarah yang sama. ^[287]

^[286] Robson W (1937) "The development of Local Government". London, G. Allen & Unwin. PP 750-575.

^[287] Gomme, G.L., (1987) "Lectures on the principles of the local government", delivered at London school of Economics, Lent term 1987, Westminster, whitthall garden. PP 1-2

Baik *Robson* dan *Gomme* tampaknya menekankan kemandirian sementara pemerintah daerah sebenarnya tidak terlepas dari kontrol pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menikmati otonomi relatif, karena pembagian tanggung jawab pelayanan antara pemerintah pusat dan daerah. Seharusnya perlu dicatat bahwa pembagian tanggung jawab adalah masalah politik atau kebijakan. Di sana beberapa prasyarat yang menentukan hubungan yang berhasil antara pemerintah pusat dan daerah seperti yang ditunjukkan oleh *Bank Dunia* dan *Heymans & Totemeyer (1988)* adalah.^[288]

1. Kebutuhan dan desakan akan sistem pemerintahan daerah yang kuat secara demokratis lingkungan politik;
2. Pemerintah daerah diperbolehkan memainkan peran penting sebagai mitra penuh dalam pembangunan daerah dan nasional;
3. Pembagian sumber keuangan yang adil antara pusat dan daerah;
4. Pembagian sumber daya manusia yang adil antara pemerintah pusat dan daerah;
5. Pemeriksaan dan keseimbangan formal dan efektif antara pusat dan daerah;
6. Konsultasi yang lengkap dan memadai serta aliran informasi yang akurat secara teratur di antara semua tingkatan;
7. Partisipasi penuh setiap warga negara, tanpa memandang ras dan gender sama sekali tingkat administrasi dan pemerintahan dengan demikian, perpanjangan dari demokrasi di semua bidang pemerintahan;

^[288] The World Bank, (1989) *Strengthening Local Governments in Sub-Saharan Africa: Proceedings of Two Workshops*, Washington, D.C. and Heymans, C. & Totemeyer, G. (1988) "Government by the people? Politics of local government in South Africa. Kenwyn: Juta & Co. Ltd.pp.65

8. Kerukunan politik dan sosial;
9. Mendefinisikan hubungan hukum antara berbagai tingkat pemerintahan dan kemampuan tekanan lokal pada pemerintah pusat untuk mengubah undang-undang;
10. Kepercayaan dan kejujuran sebagai prinsip dasar pemerintahan; dan
11. Keterbukaan terhadap inovasi. Pemerintah daerah harus dilihat sebagai pilar dalam struktur sistem politik yang demokratis karena pemerintah daerah berfungsi sebagai wahana kewarganegaraan yang cerdas dan bertanggung jawab pada tingkat tertentu.

Marshall (1965) definisi tampaknya mendekati fitur nyata dari pemerintah daerah dan mengidentifikasi tiga karakteristik berbeda: "*operasi dalam batasan*" wilayah geografis dalam suatu bangsa atau negara; pemilihan atau pemilihan kepala daerah; dan kenikmatan ukuran otonomi"^[289]

Menurut *Vincent Lemius*, Otonomi Daerah adalah suatu kebebasan atau kewenangan dalam membuat suatu keputusan politik maupun administrasi yang sesuai dengan yang ada didalam peraturan perundang-undangan.^[290] Di dalam suatu otonomi daerah terdapat sebuah kewenangan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah dalam menentukan apa yang menjadi suatu kebutuhan daerahnya. Namun kebutuhan daerah yang lain masih senantiasa harus disesuaikan dengan suatu kepentingan nasional sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

[289] Marshall, A. (1965), *Financial administration of Local Government*. George Allen & Unwin, London. PP 1-5.

[290] Lemieux, Vincent. (1988). *Sondages et la Democratie*. Published by Institut que?be?cois de recherche sur la culture, 1988.ISBN 10: 2892241154/ ISBN 13: 9782892241150.

Menurut *Mahwood*, Otonomi daerah adalah suatu hak dari masyarakat sipil guna mendapatkan sebuah kesempatan serta perlakuan yang sama, baik dalam hal mengekspresikan maupun memperjuangkan suatu kepentingan mereka masing-masing, dan ikut mengontrol sebuah penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah.^[291]

Menurut *Encyclopedia of Social Science*, Otonomi Daerah adalah suatu hak sebuah organisasi sosial untuk mencukupi diri sendiri dan sebuah kebebasan aktualnya.^[292]

Meyer (1978) mendefinisikan pemerintahan daerah sebagai berikut: Unit pemerintahan demokratis lokal dalam sistem demokrasi kesatuan negara ini, yang merupakan anggota bawahan pemerintah diberikan dengan kekuasaan dan sumber-sumber pemerintah yang ditentukan dan dikendalikan pendapatan untuk memberikan layanan lokal tertentu dan untuk mengembangkan, mengontrol dan mengatur lingkungan geografis, sosial dan ekonomi yang ditetapkan area lokal.^[293] Orang dapat berargumen bahwa kelemahan definisi *Meyer* adalah bahwa definisi tersebut mencakup demokrasi sebagai elemen penting dari pemerintah daerah sementara pemerintah bisa eksis tanpa demokratis dengan cara yang sama seperti pemerintah nasional bisa ada di suatu negara tanpa pemerintah itu demokratis. Misalnya, pemerintah yang berkuasa melalui kudeta de' etat bisa disebut represif dan tidak demokratis. Dengan demikian juga memungkinkan untuk mengacu pada pemerintah daerah yang tidak demokratis.

^[291] Philip Mahwood Wiley. (1983). Local Government in the Third World. the experience of tropical Africa, Chichester, 1983, pp.261.

^[292] The Encyclopaedia of the Social Sciences is a specialized fifteen-volume Encyclopedia first published in 1930 and last published in 1967.

^[293] Meyer, J. (1978) local government law- Volume 1- General principles. Durban, Butterworth.pp.10

Terlepas dari kelemahan dalam definisi *Meyer* ini, tampaknya untuk menangkap esensi dari pemerintah daerah, yang terkait erat dengan karakteristik yang diidentifikasi oleh *Marshall*. Oleh karena itu, esensinya adalah bahwa lokal pemerintah adalah lembaga pemerintah dengan kekuasaan legislatif yang terbatas dan otoritas, yang beroperasi dalam wilayah geografis dan hukum yang jelas yurisdiksi, dalam suatu bangsa atau negara.

Menurut *Budi Supriyatno* (2019) memberikan definisi *Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang dilaksanakan oleh pejabat daerah.*^[294] Definisi ini menekankan kegiatan pelaksanaan di daerah. Daerah diberikan hak untuk melaksanakan program program pemerintahan dan pembangunan termasuk pelayanan kepada masyarakat.

Ciri khas pemerintah daerah adalah “*wewenang*” untuk melaksanakan program pemerintah dan program pembangunan di daerah yang tidak diintervensi pemerintah pusat, namun terkendali artinya tidak menyimpang dari undang-undang sehingga bisa terlaksananya demokrasi di daerah.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang dilaksanakan oleh pejabat daerah.

Pemerintah pusat tetap harus melakukan “*pengawasan*”, tetapi tidak *intervensi*. Oleh karena itu karakteristik pemerintah daerah harus dipertimbangkan dengan *restrukturisasi* pemerintah daerah untuk memastikan bahwa tujuan pemerintah daerah dapat tercapai secara efektif dan efisiensi.^[295]

[294] Budi Supriyatno. (2019). Pemerintah Daerah. Artikel Smeonar Pogram Pasca Sarjana Univeristas Satyagama Jakarta. 20 Juni 2019. Hal. 2-3.

[295] *Ibid.* Budi Supriyatno. (2019). Pemerintah Daerah, hal.4.

7.3. Pemerintah Daerah di Indonesia

Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi menjadi beberapa provinsi. Daerah-daerah provinsi tersebut terdiri atas beberapa daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dapat berupa:

1. **Pemerintah Daerah Provinsi**, yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah
2. **Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** yang terdiri atas Bupati/Wali kota dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala

daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah pasal 18 undang-undang dasar 1945 yang menyatakan : *bahwa pembagian wilayah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan undang-undang. dalam pembentukan daerah besar dan kecil tersebut harus tetap memperhatikan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.*^[296]

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, sistem pemerintahan daerah telah mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan atau pergantian undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. *Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014*, pemerintahan daerah di Indonesia mengacu pada undang-undang tersebut. dengan undang-undang ini kepada daerah diberikan otonomi yang luas nyata dan bertanggungjawab.^[297] *Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang*

^[296] Lihat, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

^[297] Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah provinsi,

kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

disebut kepala daerah. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga memiliki kewajiban untuk :

1. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah.
2. Memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD.
3. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat

Gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah provinsi. Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan 5 tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah

provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, Ekonomis, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

1. **Efisien**, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
2. **Efektif**, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
3. **Ekonomis**, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
4. **Transparan**, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
5. **Akuntabel**, merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.

6. **Bertanggung jawab**, merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
7. **Tertib**, adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Arti lainnya dari tata tertib adalah disiplin.
8. **Keadilan**, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
9. **Kepatutan**, adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
10. **Manfaat**, maksudnya keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
11. **Taat pada peraturan perundang-undangan**, dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Beberapa urusan yang menjadi **kewenangan pemerintah daerah** untuk kabupaten/kota meliputi beberapa hal berikut. ^[298]

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.

^[298] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan.
7. Penanggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertanahan.

Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, adalah meliputi bidang-bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan nasional, sosial, penataan ruang, pertanahan, pemukiman, pekerjaan umum dan perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan daerah, kependudukan, olah raga, hukum dan perundang-undangan, serta penerangan.^[299]

Dalam hal menjalankan otonomi, pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat daerah, yang meliputi kegiatan berikut.

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.

[299] Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
11. Melestarikan lingkungan hidup.
12. Mengelola administrasi kependudukan.
13. Melestarikan nilai sosial budaya.
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Indikator untuk menentukan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik, dapat diukur dari 3 tiga indikasi berikut:

1. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik berskala lokal maupun nasional.
2. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata.
3. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

Sebaliknya, tolok ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikator di atas, aparat pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap kapabilitas (*kemampuan aparatur*), integritas (*mentalitas*), akseptabilitas (*penerimaan*), dan akuntabilitas (*kepercayaan dan tanggung jawab*).

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan

menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi dalam perumusan kebijakan makro atau luas yang sifatnya umum dan lebih mendasar, juga dengan adanya desentralisasi daerah dapat mengalami proses pemberdayaan yang lebih optimal. Sehingga kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, dan dalam mengatasi masalah yang terjadi di daerahnya semakin kuat.

7.4. Asas Penyelenggaraan Pemerintahah Daerah

Pejabat Pemerintah, baik pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab kekuasaan berlandaskan pada asas-asas penyelenggaraan negara. Menegaskan Sembilan asas penyelenggara negara yang terdiri dari:^[300]

1. Asas kepastian hukum.
2. Asas tertib penyelenggara negara
3. Asas kepentingan umum.
4. Asas keterbukaan.
5. Asas proporsionalitas.
6. Asas profesionalitas.
7. Asas akuntabilitas.
8. Asas efisiensi.
9. Asas efektivitas..

^[300] Lihat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme ditambah asas efisiensi dan asas efektivitas.

Asas umum penyelenggara negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme ditambah asas efisiensi dan asas efektivitas. Dengan demikian penciptaan asas **goodgovernance** atau

Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pada dasarnya ada 4 (empat), yaitu Sentralisasi, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas pembantuan.

penghapusan virus KKN di daerah menjadi target strategis yang sangat krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sedangkan asas-asas untuk menyelenggarakan **pemerintahan daerah**, pada dasarnya ada 4 (empat), yaitu :

1. **Sentralisasi** yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.
2. **Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia.
3. **Dekonsentrasi** adalah pelimpahan wewenang dari **pemerintah** kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau sebagai perangkat pusat di daerah.
4. **Tugas pembantuan** adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

1. **Sentralisasi.**

Kata "**sentralisasi**" mulai digunakan di **Prancis** pada tahun 1794 ketika kepemimpinan Direktori Prancis pasca-Revolusi

menciptakan struktur pemerintahan baru.^[301] Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan. *Budi Supriyatno* mengatakan “*Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang dan tanggungjawab kepada pimpinan pemerintahan pusat.*”^[302]

Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh pimpinan yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sistem ini adalah di mana pemerintah daerah tidak terlalu terbebani pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan atau pendapat, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinasi seluruhnya oleh pemerintah pusat.^[303]

Menurut *J. In het Veld*, *kelebihan sentralisasi* adalah :^[304]

1. menjadi landasan kesatuan kebijakan lembaga atau masyarakat.
2. dapat mencegah nafsu memisahkan diri dari negara dan dapat meningkatkan rasa persatuan.
3. meningkatkan rasa persamaan dalam perundang-undangan,

^[301] Vivien A. Schmidt, *Democratizing France: The Political and Administrative History of Decentralization*, Cambridge University Press, 2007, p.22 Archived 2016-05-05 at the Wayback Machine, ISBN 978052-1036054.

^[302] Budi Supriyatno. (2018). Centralized Government. Artikel. Kuliah Umum Program Pasca Sarejana Universitas Satyagama, Jakarta.

^[303] *Ibid.* Budi Supriyatno. (2018). Centralized government.

^[304] Jan in 't Veld, "Nieuwe vormen van decentralisatie in bedrijven," Inaugurele rede Technische Hogeschool Delft, 1968. in: Jan in 't Veld, Pierre Malotau en Henk Lombaers. *Trio-logie: Variaties over een thema uit de bedrijfsleer.* 1969.

pemerintahan dan pengadilan sepanjang meliputi kepentingan seluruh wilayah dan bersifat serupa.

4. terdapat hasrat lebih mengutamakan umum daripada kepentingan daerah, golongan atau perorangan, masalah keperluan umum menjadi beban merata dari seluruh pihak.
5. tenaga yang lemah dapat dihimpun menjadi suatu kekuatan yang besar.
6. meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan meskipun hal tersebut belum merupakan suatu kepastian.

Menurut *J.T. van den Berg*, *kebaikan sentralisasi* meliputi:^[305]

1. meletakkan dasar kesatuan politik masyarakat.
2. merupakan alat untuk memperkokoh perasaan persatuan.
3. mendorong kesatuan dalam pelaksanaan hukum.
4. membawa kepada penggalangan kekuatan.
5. dalam keadaan tertentu, sentralisasi dapat lebih efisien;

Penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem sentralisasi mempunyai kelemahan, antara lain :

Kelemahan sistem sentralisasi :

1. mengakibatkan terbengkalainya urusan-urusan pemerintahan yang jauh dari pusat.
2. menyuburkan tumbuhnya birokrasi (dalam arti negatif) dalam pemerintahan.
3. memberatkan tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat.

^[305] Berg, J. T. van den. *Dienstbaar tot Gerechtigheid*, c1993:t.p.
<https://www.wikidata.org/wiki/Q3282984>.

2. *Desentralisasi*

Kata "*desentralisasi*" mulai digunakan pada tahun 1820-an.^[306] Penyebutan desentralisasi juga pertama kali muncul selama tahun-tahun itu. Pada pertengahan 1800-an *Tocqueville* menulis bahwa Revolusi Prancis dimulai dengan "*dorongan menuju desentralisasi...[tetapi menjadi,] pada akhirnya, perpanjangan sentralisasi.*"^[307] Pada tahun 1863, pensiunan birokrat *Prancis Maurice Block* menulis sebuah artikel berjudul "*Desentralisasi*" untuk jurnal Prancis yang mengulas dinamika pemerintahan dan sentralisasi birokrasi dan upaya Prancis baru-baru ini dalam desentralisasi fungsi pemerintahan.^[308] *Merriam-Webster Dictionary* memberikan definisi *decentralisation is the process by which the activities of an organization, particularly those regarding planning and decision making, are distributed or delegated away from a central, authoritative location or group.*^[309] (*Desentralisasi atau desentralisasi adalah proses di mana kegiatan organisasi, terutama yang berkaitan dengan perencanaan dan pengambilan keputusan, didistribusikan atau didelegasikan jauh dari lokasi atau kelompok yang terpusat dan*

^[306] Vivien A. Schmidt, *Democratizing France: The Political and Administrative History of Decentralization*, Cambridge University Press, 2007, p.22 Archived 2016-05-05 at the Wayback Machine, ISBN 9780-521036054.

^[307] Vivien A. Schmidt, *Democratizing France: The Political and Administrative History of Decentralization*, p. 10 Archived 2016-05-20 at the Wayback Machine.

^[308] Robert Leroux, *French Liberalism in the 19th Century: An Anthology*, Chapter 6: Maurice Block on "Decentralization", Routledge, 2012, p. 255 Archived 2016-05-29 at the Wayback Machine, ISBN 9781136313011.

^[309] Merriam-Webster Dictionary (2013). Definition of decentralisation Archived 2013-01-26 at the Wayback Machine, Merriam-Webster Dictionary, accessed march 5, 2013.

otoritatif). *Budi Supriyatno* menyatakan *desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada daerah berdasarkan asas otonomi yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri.*^[310] Undang-undang nomor 23 tahun 2014 desentralisasi adalah penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.^[311] Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan.

Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini sering kali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional

Lahirnya konsep desentralisasi merupakan upaya untuk mewujudkan sesuatu pemerintahan yang demokratis dan mengakhiri pemerintahan yang sentralistik. Pemerintahan sentralistik menjadi tidak populer karena telah dinilai tidak mampu memahami

^[310] Undang-Undang R I Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah..

^[311] *Ibid.* Budi Supriyatno. (2018). Centralized government.

dan memberikan penilaian yang tepat atas nilai-nilai yang hidup dan berkembang di daerah. Desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan administrasi sendiri, sehingga akan dijumpai proses pembentukan daerah yang berhak mengatur kepentingan daerahnya.

Tujuan Penyelenggaraan Desentralisasi

Pada dasarnya tujuan penyelenggaraan desentralisasi antara lain :

1. dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. sebagai wahana pendidikan politik masyarakat di daerah.
3. dalam rangka memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional.
4. untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah.
5. guna memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan.
6. sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan.
7. sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Ada beberapa alasan perlunya pemerintah pusat memberikan “desentralisasi” kekuasaan kepada pemerintah daerah, yaitu :

1. *Segi politik*, desentralisasi dimaksudkan untuk mengikutsertakan warga dalam proses kebijakan, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional melalui pembangunan proses

- demokrasi di lapisan bawah.
2. *Segi manajemen pemerintahan*, desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik terutama dalam penyediaan pelayanan publik.
 3. *Segi kultural*, desentralisasi untuk memperhatikan kekhususan, keistimewaan suatu daerah, seperti geografis, kondisi penduduk, perekonomian, kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya.
 4. *Segi kepentingan pemerintah pusat*, desentralisasi dapat mengatasi kelemahan pemerintah pusat dalam mengawasi program-programnya.
 5. *Segi percepatan pembangunan*, desentralisasi dapat meningkatkan persaingan positif antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kelebihan dan Kelemahan Desentralisasi

Menurut *Josef Riwu Kaho* **Kelebihan desentralisasi** :

1. mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
2. dalam menghadapi masalah yang mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari pemerintah pusat.
3. dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.
4. mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.
5. dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya lebih langsung.

Menurut *J. In het Veld* desentralisasi mengandung beberapa *kebaikan*, yaitu :

1. memberikan penilaian yang tepat terhadap daerah dan penduduk yang beraneka ragam.
2. meringankan beban pemerintah, karena pemerintah pusat tidak mungkin mengenal seluruh dan segala kepentingan dan kebutuhan setempat dan tidak mungkin dapat mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut sebaik-baiknya.
3. dapat dihindarkan adanya beban yang melampaui batas dari perangkat pusat oleh sebab tunggakan kerja.
4. unsur individu atau daerah lebih menonjol karena dalam ruang lingkup yang sempit seseorang dapat lebih mempergunakan pengaruhnya daripada dalam masyarakat yang lebih luas.
5. masyarakat setempat dapat kesempatan ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga ia tidak akan merasa sebagai obyek saja.
6. meningkatkan turut sertanya masyarakat setempat dalam melakukan kontrol terhadap segala tindakan dan tingkah laku pemerintah.

Kelemahan desentralisasi :

1. karena besarnya organ-organ pemerintah, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi.
2. keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.
3. dapat mendorong timbulnya fanatisme daerah.
4. keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama.
5. diperlukan biaya yang lebih banyak.

3. *Dekonsentrasi*

Dekonsentrasi dalam Belanda: *deconcentratie*, dan Prancis: *deconcentration* adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain.^[312] **Dekonsentrasi** yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Budi Supriyatno, mengatakan *dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan dari pejabat tingkat pusat kepada pejabat di wilayah negara*. Oleh karena itu, di daerah terdapat suatu wilayah yang merupakan wilayah kerja pejabat yang menerima sebagian wewenang dari pejabat pusat. Wilayah kerja pejabat untuk pejabat pusat yang berada di daerah disebut wilayah administrasi. Wilayah administrasi adalah wilayah kerja pejabat pusat yang menyelenggarakan kebijakan administrasi di daerah sebagai wakil dari pemerintah pusat.

Pejabat pusat akan membuat kantor-kantor beserta kelengkapannya di wilayah administrasi yang merupakan cabang dari kantor pusat. Kantor-kantor cabang yang berada di wilayah administrasi inilah yang disebut dengan instansi vertikal. Disebut vertikal karena berada di bawah kontrol langsung kantor pusat. Jadi, instansi vertikal adalah lembaga pemerintah yang merupakan cabang dari kementerian pusat yang berada di wilayah administrasi sebagai kepanjangan tangan dari departemen pusat.

Di Indonesia Penyelenggaraan Dekonsentrasi ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 yang berisi tentang pembagian wilayah dan wewenang yang harus dijalankan oleh badan-badan dari pemerintahan tersebut.^[313]

^[312] Van Hoeve. Ensiklopedia Indonesia, Jilid 7. Jakarta: Ichtiar Baru. hlm. 775.

^[313] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 yang berisi tentang pembagian wilayah dan wewenang.

Dalam peraturan ini tentang wilayah dan wewenang Gubernur berbunyi: *Provinsi mempunyai kedudukan sebagai Daerah otonom sekaligus adalah Wilayah administrasi yaitu Wilayah kerja Gubernur untuk melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan yang dilimpahkan kepadanya.*^[314] Berkaitan dengan itu maka Kepala daerah Otonom disebut Gubernur yang berfungsi pula selaku Kepala Wilayah Administrasi dan sekaligus sebagai wakil Pemerintah. Gubernur selain pelaksana asas desentralisasi juga melaksanakan asas dekonsentrasi. Besaran dan isi dekonsentrasi harus mempunyai sifat dekat dengan kepentingan masyarakat dan bermakna sebagai upaya mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, dan kreativitas masyarakat serta kesadaran nasional. Oleh sebab itu Gubernur memegang peranan yang sangat penting sebagai unsur perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:^[315]

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum;
2. Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara;
3. Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

^[314] Ibid. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001.

^[315] Ibid. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001.

Kelebihan dekonsentrasi adalah sebagai berikut :

1. secara politis, eksistensi dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan-keluhan daerah, protes-protes daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat.
2. secara ekonomis, aparat dekonsentrasi dapat membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan melalui aliran informasi yang intensif yang disampaikan dari daerah ke pusat. Mereka dapat diharapkan melindungi rakyat daerah dari eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memanfaatkan ketidakacuhan masyarakat akan ketidakmampuan masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi modern.
3. kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau kebijakan nasional di bidang politik, ekonomi, dan administrasi
4. dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional.

4. Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan (*asas Medebewind*) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. *Budi Suporiyatno* mengatakan, *tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, dari pemerintah*

kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Tugas pembantuan merupakan tugas pemerintah daerah yang ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan. Tugas pembantuan merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal berikut.

1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonom memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan memungkinkan.
3. Dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja.
4. Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi.

Tujuan Tugas Pembantuan

Tujuan dari tugas pembantuan adalah untuk mengatasi keterbatasan jangkauan dari aparatur pemerintah pusat terhadap urusan di daerah. Sehingga urusan tersebut harus dilimpahkan melalui kewenangan yang diberikan kepada aparatur pemerintah daerah.

Aturan dalam Tugas Pembantuan

Beberapa aturan atau prinsip dalam pelaksanaan tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat berwenang dalam menentukan perencanaan suatu urusan secara umum, memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan dan biaya yang diperlukan. Sementara itu untuk perencanaan yang lebih rinci, pelaksanaan dan pengawasannya diserahkan kepada pejabat

- atau aparaturnya pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah.
2. Dalam menjalankan tugas pembantuan, pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan kebijakan yang diperlukan untuk daerahnya. Adapun kebijakan yang dimaksud adalah hanya berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan tugas pembantuan di daerahnya
 3. Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu tugas pembantuan adalah berasal dari yang memberi tugas. Dokumen anggaran diserahkan oleh aparat yang menerima tugas pembantuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersamaan dengan penyampaian APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
 4. Penerima tugas pembantuan harus menyerahkan laporan pelaksanaan dan penggunaan anggaran kepada DPRD di saat bersamaan dengan menyampaikan laporan keuangan APBD oleh Pemda.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan ada 6 urusan yang menjadi pengecualian. 6 urusan ini sifatnya mutlak, artinya berdasar undang-undang keenamnya hanya bisa ditetapkan dan menjadi kewenangan pemerintahan pusat.

Keenam urusan tersebut adalah:

1. Politik luar negeri;
2. Keamanan.
3. Pertahanan.
4. Yustisi.
5. Agama.
6. Moneter dan fiskal nasional.

Kriteria Tugas Pembantuan

Pelaksanaan tugas pembantuan harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Bukan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
2. Bukan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Tidak dilaksanakan sendiri.
4. Adanya perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan bidang yang di tugas pembantuan.
5. Tersedia sarana dan prasarana yang diperlukan.
6. Ada perangkat daerah dan personel yang menangani tugas pembantuan.
7. Memperhatikan karakteristik daerah.
8. Tidak ada biaya pendamping dari daerah.
9. Lingkup penugasan tepat.

Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Adapun mekanisme pelaksanaan tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

1. Penugasan tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri atau Kepala Lembaga yang memberi penugasan setelah dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri. ^[316] Peraturan Menteri atau Kepala Lembaga tersebut disampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Bappenas.
2. Adapun penugasan dari daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai

^[316] Undang-Undang Nomor.23 tahun 2014, Pasal 19). Tentang Pemerintahan Daerah.

- dengan ketentuan dalam undang-undang
3. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang menerima tugas pembantuan bisa membentuk peraturan daerah mengenai mekanisme atau tata cara pelaksanaan sesuai kriteria tugas pembantuan
 4. Keputusan Kepala Daerah mengenai teknik pelaksanaan tugas pembantuan adalah termasuk di dalamnya menetapkan perangkat daerah

Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah :

Tujuan tugas pembangunan adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat.

Ada beberapa latar belakang perlunya diberikan tugas pembantuan kepada daerah dan desa, yaitu :

1. adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang dilakukannya pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari pemerintah daerah kepada desa.^[317]
2. adanya *political will* atau kemauan politik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan prinsip lebih murah, lebih cepat, lebih mudah dan lebih akurat.
3. adanya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara lebih ekonomis, lebih efisien dan efektif, lebih transparan dan akuntabel.
4. kemajuan negara secara keseluruhan akan sangat ditentukan

^[317] Lihat Pasal 18A UUD 1945 sampai pada UU pelaksanaannya : UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004.

oleh kemajuan daerah dan desa yang ada di dalam wilayahnya.

7.5. Fungsi Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah selaras dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dapat diwujudkan dalam fungsi-fungsi pemerintah daerah. Adapun fungsi pemerintah daerah adalah:

1. ***Fungsi otonomi.*** Fungsi otonomi dari pemerintah daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
2. ***Fungsi pembantuan.*** Merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.
3. ***Fungsi Pembangunan.*** Fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat sehingga tuntutan dari masyarakatpun semakin berkembang dan kompleks.
4. ***Fungsi lainnya.*** Selain ketiga fungsi diatas terdapat fungsi lainnya adalah:
 - a. Pembinaan wilayah.
 - b. Pembinaan masyarakat.
 - c. Pemberian pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum.

Pemerintahan Daerah, fungsi pemerintah daerah dapat dibagi menjadi fungsi pemerintahan absolut, fungsi pemerintahan wajib, fungsi pemerintahan pilihan, dan fungsi pemerintahan umum. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi pemerintahan daerah

dalam pembangunan tersebut :

1. ***Fungsi Pemerintahan Absolut.*** Fungsi yang termasuk dalam fungsi pemerintahan absolut memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini pada pemerintah daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah. Contoh dari fungsi pemerintahan absolut adalah :
 - a. Pertahanan.
 - b. Keamanan.
 - c. Politik luar negeri.
 - d. Yustisi.
 - e. Kebijakan moneter.
 - f. Fiskal nasional, dan
 - g. Agama.
2. ***Fungsi Pemerintahan Wajib.*** Fungsi pemerintahan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan wajib dibagi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib melaksanakan fungsi pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Pada umumnya urusan pemerintahan wajib merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Contoh dari fungsi pemerintahan wajib adalah :
 - a. Kesehatan,
 - b. Pendidikan,
 - c. Sosial,
 - d. Pekerjaan umum,
 - e. Perencanaan ruang,
 - f. Pemukiman,

- g. Tenaga kerja,
 - h. Pangan,
 - i. Pertanahan,
 - j. Pemberdayaan perempuan,
 - k. Perlindungan anak,
 - l. Lingkungan hidup,
 - m. Administrasi pencatatan sipil,
 - n. Pengendalian penduduk,
 - o. Komunikasi dan informasi,
 - p. Perhubungan,
 - q. Investasi,
 - r. Koperasi dan UMKM,
 - s. Kebudayaan, dan
 - t. Olah raga
3. ***Fungsi Pemerintahan Pilihan.*** Fungsi pemerintahan pilihan juga dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada di suatu daerah. Contoh fungsi pemerintahan pilihan adalah :
- a. Pariwisata,
 - b. Kelautan dan perikanan,
 - c. Kehutanan,
 - d. Pertanian,
 - e. Perdagangan,
 - f. Energi dan sumber daya mineral,
 - g. Perindustrian, dan
 - h. Transmigrasi
4. ***Fungsi Pemerintahan Umum.*** Fungsi pemerintahan umum memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh

kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota. Mengenai pelaksanaan ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang bersangkutan. Bupati dan walikota pun memiliki tanggung jawab yang sama namun penyampaianya dilakukan melalui gubernur. Instansi dan perangkat daerah ditunjuk untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan umum ini. Contoh dari fungsi pemerintahan umum adalah :

1. Penanganan konflik sosial yang diatur dalam undang-undang.
2. Koodinasi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memecahkan suatu masalah. Penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan mengingat asas demokrasi, undang-undang, dan keistimewaan suatu daerah.
3. Pembinaan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat dalam berbangsa.
4. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan negara Indonesia secara nasional.
5. Pengamalan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika pada seluruh kehidupan berbangsa.
6. Pembinaan kerukunan antar warga tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan demi kestabilan nasional.
7. Pengaplikasian kehidupan yang berdemokrasi.

Urusan-urusan yang tertera di atas dilaksanakan oleh kepala daerah beserta perangkat DPRD. Urusan yang telah dilaksanakan atau direncanakan selanjutnya dapat dibuat dalam suatu peraturan daerah. Peraturan daerah ini wajib untuk disebarluaskan sehingga

masyarakat umum mendapatkan informasi yang tepat. Dalam pembiayaan urusan tersebut, pemerintah daerah berhak untuk menggunakan *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)* ataupun melalui pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, ataupun pemerintah negara lain secara *government to government*. Selain itu, pembiayaan dapat berasal dari lembaga keuangan dan masyarakat karena pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi.

Fungsi pemerintah daerah diatas dapat dikatakan bahwa pembinaan wilayah adalah upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya wilayah yang masih tertinggal. Dimana wilayah-wilayah tersebut dapat diupayakan untuk meningkatkan sumber daya yang dimilikinya demi meningkatkan wilayahnya.

Adapun upaya pemerintah daerah mengenai pembinaan masyarakat adalah salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Tentunya SDM yang ada dalam suatu wilayah agar lebih mandiri dan berkualitas demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Selain fungsi pembinaan wilayah dan pembinaan masyarakat diatas maka fungsi lain dari pemerintah adalah pemberian pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum.

Ini merupakan salah satu fungsi pemerintah sebagai birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat membutuhkan pelayanan dari pemerintah karena fungsi dari pemerintah itu sendiri adalah memberikan pelayanan. Misalnya pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan perlindungan kepentingan umum bagi masyarakat lemah yang ditindas oleh kaum penguasa. Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dengan cara memberikan advokasi terhadap kaum-

kaum tertindas, misalnya adanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

7.6. Kewenangan Pemerintahan

Kewenangan

Kewenangan atau wewenang sendiri berasal dari suatu istilah yang biasa digunakan dalam sebuah jabatan di pemerintahan. Apabila dicermati terdapat perbedaan antara keduanya. Kewenangan merupakan *“kekuasaan formal”*. Kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundangan seperti pejabat baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif dalam menjalankan kekuasaannya. Sedangkan *“wewenang”* hanya suatu *“alat”* tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan pembentukan undang-undang merupakan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan suatu bangsa, oleh karena secara nyata kedaulatan yang diakui dalam negara tersebut dapat dilaksanakan. Menurut *Budi Supriyatno*, *kewenangan adalah hak seorang pejabat pemerintahan untuk menjalankan tugas, pokok dan fungsi secara baik dan benar.*

Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.^[318] Menurut *G.R.Terry*,

Kewenangan adalah hak seorang pejabat pemerintahan untuk menjalankan tugas, pokok dan fungsi secara baik dan benar.

^[318] Keith's Ferrazzi. (2020). *Leading Without Authority: How Every One of Us Can Build Trust, Create Candor, Energize Our Teams, and Make a Difference*. Published May 26th 2020 by Currency.

Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu.^[319]

Menurut *R.C.Davis* dalam bukunya, *Fundamentals of Management: Authority*/Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah hak yang cukup, yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas/kewajiban tertentu. Jadi, wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas organisasi.Tanpa wewenang orang-orang tidak dapat berbuat apa-apa. menyelesaikan suatu tugas/kewajiban tertentu. Jadi, wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas organisasi.Tanpa wewenang orang-orang tidak dapat berbuat apa-apa.^[320]

Setiap Keputusan atau tindakan dalam pemerintahan harus ditetapkan dan dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya wajib berdasarkan: *Peraturan perundang-undangan; dan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik)*. Oleh karena itu, pejabat pemerintahan “*dilarang*” menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan melakukan keputusan dan tindakan. Hal ini untuk menjaga agar pejabat tidak melakukan penyimpangan dalam pengambilan keputusan. Misalnya melakukan korupsi, atau menguntungkan pihak golongannya.

Di Indonesia, sejak diberlakukannya “*otonomi daerah*” oleh

^[319] George Robert Terry. (1953). Principles of Management. Published by : R. D. Irwin, 1953.

^[320] R.C. Davis (1951). The fundamentals of top management . Published by New York : Harper & Row, 1951

.

.

pemerintahan pusat, kini setiap pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Penyerahan wewenang tersebut menjadikan pemerintah daerah mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri harus menjalankan asas otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

Kata *provinsi* berasal dari kata dalam bahasa Latin "*provincia*" yang berarti daerah kekuasaan. Kata tersebut terdiri atas kata-kata "*pro*" artinya atas nama, dan "*vincia*" atau "*vincere*" artinya menang atau mengendalikan.

Sehingga, *provincia* atau provinsi adalah suatu wilayah teritorial yang dikendalikan oleh seorang pejabat atas nama pemerintahannya sendiri. Pemerintahan provinsi adalah penyelenggara negara di tingkat provinsi.

Namun tidak semua setingkat di bawah negara disebut "*provinsi*". Di negara-negara *Arab* pemerintahan setingkat di bawah negara disebut *muhafazah*, biasanya diterjemahkan sebagai *kegubernuran*. Di *Polandia* setingkat "*provinsi*" adalah *województwo*, dalam bahasa Inggris menjadi *voivodeship*. Di *Peru* provinsi adalah pemerintahan yang berada dua tingkat di bawah negara. Di antara negara dan provinsi terdapat region. Negara *Peru*

terdiri atas 25 region dan di bawahnya terbagi menjadi 194 provinsi. *Chili* memiliki pola yang sama, terbagi menjadi 15 region, di bawah seluruh region terdapat 53 provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh gubernur yang ditunjuk oleh presiden.

Italia juga terbagi atas region-region. Wilayah administratif di bawah region disebut provinsi. Provinsi-provinsi di *Italia* dinamakan sesuai nama kota utamanya dan setiap provinsi terbagi lagi menjadi beberapa *komune*. *Republik Rakyat Tiongkok* adalah negara berbentuk *negara kesatuan*. Negara mempunyai kontrol administratif terhadap provinsi-provinsi yang berada di bawahnya. Pemerintah pusat dapat membentuk atau menghapus suatu provinsi sewaktu-waktu.

Di *Indonesia*, istilah provinsi digunakan untuk menyebut suatu wilayah administratif yang berada di bawah wilayah nasional. Wilayah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten atau kota. Setiap provinsi yang ada di Indonesia dipimpin oleh seorang gubernur. Masing-masing provinsi dibagi atas kabupaten dan kota.

Adapun kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan, dan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum serta penanganan bidang kesehatan.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial dan penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota.
4. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota.
5. Pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan

- termasuk lintas kabupaten/kota, pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.
6. Pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota.
 7. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota

Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi, karena itu bupati atau wali kota tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Kata "***kabupaten***" berasal dari bahasa Jawa kabupaten yang berasal dari kata ***bhupati*** yang diberi ***konfiks ka-an ('ke-bupati-an')***.

Meski istilah kabupaten saat ini digunakan di seluruh wilayah Indonesia, istilah ini dahulu hanya digunakan di pulau Jawa dan Madura saja. Pada era Hindia Belanda, istilah kabupaten dikenal dengan regentschap, yang secara harfiah artinya adalah daerah seorang regent atau wakil penguasa. Pembagian wilayah kabupaten di Indonesia saat ini merupakan warisan dari era pemerintahan Hindia Belanda.

Kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang walikota. Pengetian ini hamper sama dengan kabupaten, namun perbedaannya terletak pada sebutan dan pimpinan dalam pemerintahan.

Menurut ***Merriam-Webster, definition of city: a. an***

inhabited place of greater size, population, or importance than a town or village We spent the weekend in the city. (Pengertian kota : a. tempat berpenghuni dengan ukuran, populasi, atau kepentingan yang lebih besar daripada kota atau desa Kami menghabiskan akhir pekan di kota.)^[321] *b. an incorporated British town usually of major size or importance having the status of an episcopal see.*(sebuah kota Inggris yang tergabung biasanya berukuran besar atau penting memiliki status tahta episkopal).^[322]

Di Amerika Serikat, kota berbadan hukum adalah entitas pemerintah yang ditetapkan secara hukum. Ini memiliki kekuasaan yang didelegasikan oleh negara bagian dan kabupaten, dan undang-undang, peraturan, dan kebijakan lokal dibuat dan disetujui oleh para pemilih kota dan perwakilan mereka. *Matt Rosenberg* dalam artikelnya, *The Difference Between a City and a Town*, menyatakan: a city can provide local government services to its citizens. (Sebuah kota dapat memberikan layanan pemerintah daerah kepada warganya).^[323]

Dalam karya ini *kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang walikota.*

Di Indonesia kabupaten maupun kota merupakan “*daerah otonom*” yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

^[321] City. Definition of City by Merriam-Webster. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/city>.

^[322] Matt Rosenberg. The Difference Between a City and a Town. What Does it Take to Be an Urban Population?. Updated February 02, 2020. <https://www.thoughtco.com/difference-between-a-city-and-a-town-4069700>.

^[323] Matt Rosenberg. The Difference Between a City and a Town. What Does it Take to Be an Urban Population?. Updated February 02, 2020. <https://www.thoughtco.com/difference-between-a-city-and-a-town-4069700>.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum.
3. Penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
4. Pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan, dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal.
5. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Peraturan Perundangan Pemerintah

Peraturan dibuat untuk mengatur manusia - manusia yang terdapat dalam satu kelompok untuk menghindari sikap brutal, mau menang sendiri dan lain-lainnya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia memberikan definisi, peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku; atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu.^[324]

^[324] Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Menurut *Budi Supriyatno*, *peraturan pemerintah merupakan ketertiban yang memiliki kekuatan hukum, ditentukan oleh otoritas yang lebih tinggi atau kompeten, yang berkaitan dengan tindakan yang berada di bawah kendali otoritas tersebut*. Peraturan dibuat dan dikeluarkan oleh kepala pemerintahan (presiden atau perdana menteri), dan juga disahkan oleh parlemen, di *Amerika* sering disebut kongres, di Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan juga dibuat oleh berbagai kementerian atau lembaga pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.

Badan atau lembaga administratif sering disebut "*birokrasi*", melakukan sejumlah fungsi pemerintahan yang beranekaragam termasuk membuat peraturan. Peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga ini disebut peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati/walikota bertujuan untuk melaksanakan aktivitas baik pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan berfungsi untuk memastikan penerapan hukum yang seragam. Para birokrat atau aparatur negara dimulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dan dirancang untuk melaksanakan kebijakan eksekutif (presiden atau perdana menteri).

Kongres/DPR melaksanakan tugas kontrol terhadap eksekutif, dan juga melaksanakan kekuasaan untuk membuat peraturan bersama eksekutif. Di *Amerika* Kongres menciptakan badan-badan administratif yang ada di luar cabang eksekutif dan independen di luar kendali presiden.

Presiden *Franklin D. Roosevelt* menciptakan banyak badan administratif baru. Selama bertahun-tahun lembaga administratif telah menjadi peserta yang lebih kuat dalam keseluruhan struktur pemerintah federal karena kongres dan presiden telah mendelegasikan lebih banyak tugas legislatif dan eksekutif kepada

mereka. Badan-badan administratif juga bertanggung jawab atas banyak fungsi peradilan.^[325]

Fungsi yudikatif dan legislatif dari badan-badan administratif tidak persis seperti pengadilan atau legislatif, tetapi mereka serupa. Karena peraturan bukanlah pekerjaan legislatif, mereka tidak memiliki efek hukum secara teori, tetapi dalam praktiknya peraturan dapat memiliki pengaruh penting dalam menentukan hasil dari kasus-kasus yang melibatkan kegiatan peraturan. Sebagian besar kekuasaan legislatif yang diberikan kepada badan-badan administratif berasal dari fakta bahwa Kongres hanya dapat bertindak sejauh ini dalam memberlakukan undang-undang atau menetapkan pedoman untuk diikuti oleh badan-badan tersebut.

Bahasa yang secara *intrinsik* tidak jelas dan tidak dapat berbicara untuk setiap situasi faktual yang diterapkan, serta faktor-faktor politik, mendikte bahwa lembaga harus banyak menafsirkan dan memutuskan dalam menegakkan undang-undang. Misalnya, undang-undang Sekuritas melarang orang dalam mengambil keuntungan yang bertentangan dengan kepentingan publik, tetapi diserahkan kepada Badan Administratif yang berlaku, Komisi Sekuritas dan Bursa, untuk mendefinisikan "*kepentingan umum*". *Food and Drug Administration*, badan administratif lainnya, harus menjauhkan makanan yang tidak aman dan produk obat yang tidak efektif dari pasar, tetapi penyempurnaan dan interpretasi administratif lebih lanjut diperlukan bagi badan tersebut untuk menentukan produk apa yang "*tidak aman*" atau "*tidak efektif*".

^[325] Franklin D. Roosevelt (1943). War Production Board. _State of the Union History "from time to time give to the Congress information of the state of the Union".

Dalam proses pembuatan aturan, dengar pendapat formal harus diadakan, pihak yang berkepentingan harus diberi kesempatan untuk memberikan masukan rancangan peraturan yang diusulkan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam

Dan Setelah selesai disepakati antara eksekutif/ Pemerintah dan legislatif Dewan harus dipublikasikan.

Peraturan yang diamanatkan negara adalah intervensi pemerintah di pasar swasta dalam upaya untuk menerapkan kebijakan dan menghasilkan hasil yang mungkin tidak akan terjadi, mulai dari perlindungan konsumen hingga pertumbuhan yang lebih cepat atau kemajuan teknologi.^[326] Peraturan tersebut dapat menentukan atau melarang perilaku (*peraturan "perintah-dan-kontrol"*), kalibrasi insentif (*peraturan "insentif"*), atau perubahan preferensi (*peraturan "pembentukan preferensi"*). Contoh umum misalnya: (1) Peraturan termasuk batasan pencemaran lingkungan, (2) undang-undang menentang pekerja anak atau peraturan ketenagakerjaan lainnya, (3) undang-undang upah minimum, (4) peraturan yang mewajibkan pelabelan yang benar dari bahan dalam makanan dan obat-obatan, dan peraturan keamanan makanan dan obat yang menetapkan standar minimum pengujian dan kualitas untuk apa dapat dijual, (5) peraturan zonasi dan persetujuan pengembangan, (6) kontrol pada entri pasar, atau regulasi harga.

Satu pertanyaan kritis dalam peraturan adalah, apakah

^[326] Orbach, Barak, What Is Regulation? 30 Yale Journal on Regulation Online 1 (2012) .

pemerintah memiliki informasi yang cukup untuk membuat peraturan lebih efisien yang bisa memuaskan rakyatnya.? Misalnya membuat peraturan tentang independensi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adanya dewan pengawas. Apakah ini bisa membuat kinerja KPK lebih baik atau justru menghambat kinerja KPK?. Kekuasaan pemerintahan untuk mengatur harus mencakup kekuasaan untuk menegakkan keputusan yang tepat untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemantauan adalah alat penting yang digunakan oleh otoritas pengatur nasional dalam melaksanakan kegiatan yang diatur. Di beberapa Negara, khususnya negara-negara *Skandinavia* hubungan industrial sangat tinggi diatur oleh pihak pasar tenaga kerja itu sendiri (*self-regulation*) berbeda dengan peraturan negara tentang upah minimum dan lain-lain.^[327]

Peraturan dapat menimbulkan biaya serta manfaat dan dapat menghasilkan efek reaktivitas yang tidak diinginkan, seperti praktik defensif.^[328] Peraturan yang efisien dapat didefinisikan sebagai peraturan di mana total manfaat melebihi total biaya.^[329] Peraturan dapat diadvokasi untuk berbagai alasan, termasuk kegagalan pasar - regulasi karena inefisiensi. Intervensi karena apa yang oleh para ekonom disebut kegagalan pasar.

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah

^[327] R.C. Davis (1951). The fundamentals of top management . Published by New York : Harper & Row, 1951.

^[328] Ibid. R.C. Davis (1951). The fundamentals of top management.

^[329] Budi Supriyatno. (2020). Peraturan Pemerintah. Artikel.

sebagai aturan "*organik*" daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.^[330]

Budi Supriyatno menyatakan *peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan*. Definisi tersebut menekankan pada norma hukum yang mengikat. Memastikan posisi hukum setiap orang memiliki hak yang sama. Ada beberapa fungsi peraturan perundang-an antara lain:

- a. Memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak kemanusiaan;
- b. Memastikan posisi hukum setiap orang sesuai dengan kedudukan hukumnya masing-masing;
- c. Sebagai Pembatasan Larangan perintah atau pejabat negara harus dipatuhi dalam melaksanakan kebijakan.

Peraturan perundang-an di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.
2. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR, yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu: *Ketetapan* yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis, *Keputusan* yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.
3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan

^{L330} 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

bersama Presiden.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan : Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut; DPR dapat menerima/menolak Perppu tanpa melakukan perubahan; Bila disetujui oleh DPR, Perpu ditetapkan menjadi Undang-Undang; Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
6. Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
7. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
8. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

Dalam pemerintahan daerah setiap keputusan dan tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan

- b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pejabat Pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam menetapkan dan melakukan Keputusan wajib menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan melakukan keputusan atau Tindakan.

Pelimpahan Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat

Dalam tata pemerintahan seorang pejabat negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan, namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus mempunyai kewenangan yang jelas. Dalam banyak literatur, sumber kewenangan berasal dari ***atribusi***, ***delegasi*** dan ***mandat***. Sebelum mengetahui atribusi, delegasi dan mandat, terlebih dahulu yang perlu dipahami ialah mengenai kewenangan.

Dalam Pemerintahan Daerah kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat.

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “***bevoegdheid***” yang berarti “***wewenang***” atau “***berkuasa***”. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. ^[331]

^[331] Kamus Umum Bahasa Indonesia. Gramedia. 1998.

Dalam pemerintahan daerah ini kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat seperti berikut ini:

Atribusi

Mengenai atribusi ***H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt*** memberikan definisi bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (***toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan***).^[332]

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, ***J.G. Brouwer dan A.E. Schilder***, memberikan penjelasan ***with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.*** (Dengan atribusi, kekuasaan diberikan kepada otoritas administratif oleh badan legislatif independen. Kekuasaan bersifat awal (originair), artinya tidak diturunkan dari kekuasaan yang sudah ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kekuasaan yang independen dan sebelumnya tidak ada dan menugaskannya kepada suatu otoritas). Jadi kewenangan yang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari pembentuk undang-undang orisinal. Pemberi dan penerima wewenang sudah ada. Tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang.

Undang-undang No. 30 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 22 memberikan pengertian atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang

^[332] Wijk, H. D. van, and Konijnenbelt, Willem. (1968). Hoofdstukken van administratief recht . Published by : Gravenhage: Vuga. 1979c.1968.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.^[333] Kemudian pengaturan lebih lanjut mengenai atribusi diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila: 1) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.^[334] Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi adalah bersifat asli atas dasar konstitusi. Organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundangundangan, atau wewenang tersebut melekat pada suatu jabatan atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang.

Sejauh mungkin, kekuasaan harus terkandung dalam undang-undang yang bersangkutan. Namun, atribusi kekuasaan dengan mengacu pada undang-undang lain dapat dianggap tepat untuk alasan-alasan seperti menghindari duplikasi materi yang banyak pada basis ganda dan masalah yang melekat dalam amandemen selanjutnya. *Atribusi seperti yang disebutkan di atas* adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Kemudian pengaturan lebih lanjut mengenai atribusi diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan:^[335]

^[333] Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. pada Pasal 1 angka 22.

^[334] *Ibid.* Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

^[335] *Ibid.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014.

1. Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila:
 - a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
 - b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
 - c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
2. Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
3. Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Delegasi

Dalam bahasa Inggrisnya *delegation*. Definisi *The Delegation of Authority is an organizational process wherein, the manager divides his work among the subordinates and give them the responsibility to accomplish the respective tasks. Along with the responsibility, he also shares the authority, i.e. the power to take decisions with the subordinates, such that responsibilities can be completed efficiently.* (Definisi: Pendelegasian Wewenang adalah proses organisasi dimana, manajer membagi pekerjaannya di antara bawahan dan memberi mereka tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas masing-masing. Selain tanggung jawab, ia juga berbagi wewenang, yaitu kekuasaan untuk mengambil keputusan dengan bawahan, sehingga tanggung jawab dapat diselesaikan secara efisien).

Delegation is the transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that has acquired the power) can exercise

power in its own name. (Delegasi adalah transfer atribusi kekuasaan yang diperoleh dari satu otoritas administratif ke otoritas administratif lainnya, sehingga delegasi (badan yang telah memperoleh kekuasaan) dapat menjalankan kekuasaan atas namanya sendiri).^[336]

Budi Supriyatno memberikan definisi delegasi wewenang adalah penyerahan sebagian hak untuk mengambil keputusan atau mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. ^[337]

Dengan kata lain *Delegasi* weweng adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila:
 - a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
 - c. merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
3. Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, dapat mensubdelegasikan

^[336] J.G. Brouwer dan A.E. Schilder. (2005) *Regelgeving in Nederland*. Kluwer..

^[337] Budi Supriyatno (2019). *Delegatiion*. Artikel.

Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:

- a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
 - b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
 - c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
5. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
 7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

Berdasarkan uraian di atas, delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada, secara logis delegasi selalu didahului oleh atribusi, atau pada delegasi *tidak ada penciptaan wewenang*, namun *hanya ada pelimpahan wewenang* dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Dengan demikian, delegasi bermakna pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawabnya sendiri, atau dalam penyerahan wewenang melalui delegasi, pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pejabat Pemerintahan dapat memperoleh

wewenang melalui delegasi apabila ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah.

Mandat

Budi Supriyatno memberikan pengertian, *mandat adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.*^[338] Pejabat Negara atau Pemerintah memiliki mandat sah untuk memerintah melalui kemenangan yang adil dalam pemilihan umum demokratis. Pemerintahan baru yang berupaya memperkenalkan kebijakan yang tidak diumumkan kepada publik pada saat kampanye pemilu dikatakan tidak mempunyai mandat sah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dalam beberapa bahasa, mandat bisa bermakna kursi parlemen yang dimenangkan dalam pemilu, bukannya kemenangan elektorat.^[339]

Dalam *Algemene Wet Bestuursrecht*, mandat berarti *“het door een ander verlenen van de bevoegdheid in zijn naam besluiten tenemen”* (pemberian wewenang oleh organ pemerintah kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya).^[340] Mandat menurut *H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt*, yaitu *een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namen hem uitoefenen door een ander.* (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh

^[338] Budi Supriyatno. (2019). Desentralisasi. Artikel untuk seminar Program Pasca Sarjana. Jakarta. 18 Oktober 2019.

^[339] Glossary Elections ACT. Jul 2012. <http://www.elections.act.gov.au/glossary> (cf., The Government's claim that once elected they have the right and responsibility to implement their policies.)

^[340] Wet van 4 juni 1992, houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht).

organ lain atas namanya).^[341]

J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, menyatakan: *With mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.* (Dengan mandat, tidak ada pengalihan, tetapi pemberi mandat (mandans) memberikan kekuasaan kepada badan (mandataris) untuk mengambil keputusan atau mengambil tindakan atas namanya).^[342] Mandat terjadi ketika organisasi pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalannya oleh organisasi lain atas namanya.

1. Pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila:
 - a. ditugaskan oleh pejabat pemerintahan di atasnya; dan
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
2. Pejabat Pemerintahan dapat memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya
3. Pejabat pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama pejabat pemerintahan yang memberikan mandat.
4. Pejabat pemerintahan yang memberikan mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui mandat.
5. Pelaksanaan wewenang berdasarkan mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, pejabat pemerintahan yang memberikan mandat dapat menarik kembali wewenang yang telah dimandatkan.
6. Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status

^[341] Wijk, H. D. van, and Konijnenbelt, Willem. (968). Hoofdstukken van administratief recht . Published by : Gravenhage: Vuga. 1979c.1968.

^[342] Op.cit. J.G. Brouwer dan A.E. Schilder.

hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

7. Pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat.

Konsekuensi yuridis wewenang yang dimiliki seorang pejabat akan berbeda apabila wewenang tersebut bersumber dari pelimpahan wewenang maupun mandat. Perbedaan tersebut dapat dilihat Tabel Nomor. 7.1. Bentuk, Mandat dan Delegasi sebagai berikut:

Tabel Nomor. 7.1. Bentuk, Mandat dan Delegasi

NO	BENTUK	MANDAT	DELEGASI
1	Hakikat	Penugasan	Pelimpahan Wewenang
2	Prosedur Pelimpahan.	Dalam hubungan rutin atasan bawahan.	Dari suatu organasasi pemerintahan kepada organanisasi lain
3	Tanggung Jawab Jabatan	Tetap pada pemberi mandat	Tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat beralih kepada delegataris
4	Tanggung jawab pribadi karena mal-administrasi.	Menjadi tanggungjawab pelaku.	Menjadi tanggungjawab pelaku
5	Pemberi menggunakan wewenang lagi	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang itu	Pemberi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan.”

Asas Legalitas Pemerintahan Daerah

Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan

wewenang, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Jadi berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.

Pada awalnya asas legalitas berhubungan dengan teori *Von Feurbach*,^[343] yang disebut dengan teori *Vom Psychologischen Zwang*.^[344] Teori ini berarti anjuran agar dalam penentuan tindakan-tindakan yang dilarang, tidak hanya tercantum macam-macam tindakannya, tetapi jenis pidana yang dijatuhkan.^[345]

Asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris *Von Feuerbach* yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. (*tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya*).^[346] Secara umum, *Von Feuerbach* membagi adagium tersebut menjadi tiga bagian, yaitu:^[347]

1. Tidak ada hukuman, kalau tak ada ketentuan Undang-undang

[343] Ludwig Andreas von Feuerbach German: 28 July 1804 – 13 September 1872) was a German anthropologist and philosopher, best known for his book *The Essence of Christianity*, which provided a critique of Christianity that strongly influenced generations of later thinkers.

[344] Feuerbach, Ludwig (1957). Eliot, George (ed.). *The Essence of Christianity*. New York: Harper & Brothers. pp. 29–30. And Harvey, Van A., "Ludwig Andreas Feuerbach", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.).

Harvey, Van A., "Ludwig Andreas Feuerbach", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.).der.

[346] *Ibid.* Harvey, Van A., "Ludwig Andreas Feuerbach".

[347] *Ibid.* Harvey, Van A., "Ludwig Andreas Feuerbach".

(Nulla poena sine lege);

2. Tidak ada hukuman, kalau tak ada perbuatan pidana (*Nulla poena sine crimine*);
3. Tidak ada perbuatan pidana, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-undang (*Nullum crimen sine poena legali*).

Adagium tersebut menjadi dasar dalam menganggap, kemudian membuktikan sejelas-jelasnya, dari setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana, sehingga patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Oleh karena dalam pelimpahan kewenangan setiap keputusan, tindakan, perbuatan, dan pelaksanaan pejabat pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang "*sah*". Karena tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat tidak dapat melakukan suatu keputusan, perbuatan, dan pelaksanaan pemerintah. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan "*atribut*" atau "*simbul*" bagi setiap pejabat. Kewenangan tidak boleh disalahgunakan, bila terjadi penyalahgunaan kewenangan akan dapat pidana.

Keabsahan tindakan pejabat pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pejabat pemerintah, dengan kata lain setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari pemerintah.

Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat, sedangkan wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Dalam konsepsi negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus, atau bahkan terhadap badan hukum privat.

Sejalan dengan asas-asas diatas, Undang-undang No. 30 Tahun 2014 menentukan bahwa, penggunaan kekuasaan negara bukanlah tanpa persyaratan, keputusan dan/atau tindakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)*, AUPB sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 Undang-undang No. 30 Tahun 2014, ditentukan bahwa syarat terpenuhinya AUPB terdiri dari asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.^[348] Atas asas legalitas dan AUPB Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014, menyatakan bahwa syarat sahnya Keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.^[349] Tidak terpenuhinya komponen dalam tata cara memperoleh kewenangan tersebut dapat berakibat pada cacat kewenangan, konsekuensi atas cacat kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 56 Undang-undang

^[348] Undang-undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

^[349] *Ibid.* Undang-undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 52 ayat (1)

No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa keputusan yang tidak memenuhi persyaratan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang merupakan Keputusan yang tidak sah, dan keputusan yang tidak memenuhi persyaratan dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

7.7. Pembatasan Kewenangan

Pembatasan Kewenangan

Dalam ketentuan peraturan perundangan yang secara sengaja mengatur tentang pembatasan kewenangan sangat diperlukan. Kalau tidak ada pembatasan akan bisa menyimpang dari kewenangan.

1. Wewenang pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas perlu dibatasi oleh:
 - a. masa atau tenggang waktu wewenang;
 - b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
 - c. cakupan bidang atau materi wewenang.
2. Pejabat pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu wewenang tidak dibenarkan mengambil keputusan atau tindakan.

Sengketa Kewenangan

Budi Supriyatno memberikan definisi *sengketa kewenangan adalah pertentangan atau permasalahan yang terjadi antara pejabat pemerintah daerah yang memiliki kepentingan yang sama atas urusan pemerintahan yang tumpang tindih kewenangannya.*

Terjadinya sengketa kewenangan antara dua atau lebih pejabat pemerintahan mempermasalahkan ketidakjelasan atau tumpang tindih kewenangan atas suatu urusan pemerintahan,

menjadi persoalan sendiri. Kewenangan adalah kekuasaan berdasarkan atribusi, delegasi, atau mandat yang melekat pada pejabat untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan dalam urusan pemerintahan atau publik. Sengketa karena ketidakjelasan kewenangan dapat disebabkan dua pejabat atau lebih diberikan kewenangan untuk bertindak dalam satu bidang urusan pemerintahan yang terkait, tidak ada pembagian kewenangan secara jelas, atau bertindak sebagai pejabat tidak definitif.

UU Administrasi Pemerintahan coba mengatur penyelesaian sengketa kewenangan menggunakan prinsip **“koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan”**. Dapat dipahami Pasal 16 UU Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:^[350]

Sengketa kewenangan adalah pertentangan atau permasalahan yang terjadi antara pejabat pemerintah daerah yang memiliki kepentingan yang sama atas urusan pemerintahan yang tumpang tindih kewenangannya.

1. Pejabat pemerintahan mencegah terjadinya sengketa kewenangan dalam penggunaan kewenangan.
2. Bila terjadi sengketa kewenangan di lingkungan pemerintahan, kewenangan penyelesaian sengketa kewenangan berada pada antar atasan pejabat pemerintahan yang bersengketa melalui koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam penyelesaian sengketa kewenangan menghasilkan kesepakatan maka kesepakatan tersebut mengikat para

[350] *Ibid.* Undang-undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 16.

- pihak yang bersengketa sepanjang tidak merugikan keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup.
4. Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan pada tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden.
 5. Penyelesaian sengketa kewenangan yang melibatkan lembaga negara diselesaikan oleh mahkamah konstitusi.
 6. Dalam hal sengketa kewenangan menimbulkan kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup, sengketa tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan “*koordinasi*” untuk menghasilkan kesepakatan tersebut sebenarnya tidak memperjelas penyelesaian sengketa kewenangan. Apabila memahami contoh sengketa tumpang-tindih atas kewenangan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, sebenarnya koordinasi telah dilakukan dan memang kesepakatan tidak mudah disepakati. Tindaklanjut dan bagaimana peran Presiden dalam memutuskan sengketa kewenangan di lingkungan pemerintahan juga belum jelas teknis pelaksanaannya. UU Administrasi Pemerintahan memerlukan penjabaran teknis untuk melaksanakan ketentuan sengketa kewenangan. Cara dan alternatif penyelesaian sengketa pada prinsipnya sudah dikenal, mulai dari negosiasi oleh dua pihak, mediasi yang dibantu oleh pihak ketiga, hingga litigasi melalui badan peradilan umum.

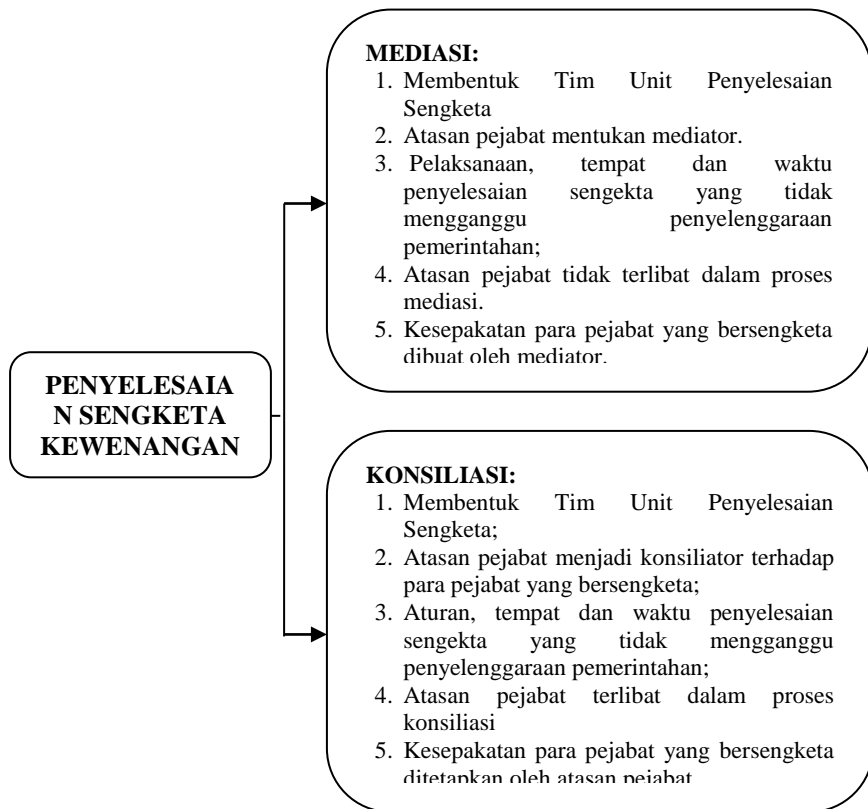
Penyelesaian Sengketa

Pejabat mengemban peran dan tugas penting untuk memahami peta konflik atau sengketa kewenangan yang timbul dalam administrasi pemerintahan. Masalah administrasi

pemerintahan yang terjadi di Indonesia sebagian besar diakibatkan ketidakjelasan dan tumpang-tindih kewenangan. Selain itu, keacuhan dan kurang berdayanya peran atasan pejabat dalam manajemen penyelesaian sengketa menyebabkan masalah atau sengketa kewenangan berlarut-larut dan tentu akan merugikan kepentingan masyarakat. Atasan pejabat harus menggali nilai musyawarah untuk mufakat dalam manajemen penyelesaian sengketa. Nilai perdamaian, kesepakatan tanpa paksaan, dan kemanfaatan bagi masyarakat harus menjadi pertimbangan atasan pejabat dalam menyelesaikan sengketa kewenangan. Atasan pejabat juga sebaiknya mampu memilih dan memberdayakan alternatif penyelesaian yang tepat, seperti mediasi atau konsiliasi yang dimodifikasi agar sesuai konteks administrasi pemerintahan.

Mediasi dan konsiliasi sejatinya adalah alternatif penyelesaian sengketa yang tidak bertentangan dengan undang-undang administrasi pemerintahan. Mediasi dan konsiliasi adalah perundingan antara dua pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, dengan dibantu oleh pihak ketiga yang imparial atau memiliki kewenangan/keahlian. Dalam konteks administrasi pemerintahan, mediasi atas sengketa kewenangan dilakukan antara dua atau lebih pejabat yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan dengan bantuan atasan pejabat selaku mediator. Apabila, diperlukan atasan pejabat selaku mediator juga dapat berperan menjadi konsiliator yang aktif memberikan pendapat sesuai kewenangannya sebagai atasan.

Konsep Pemikiran penyelesaian sengketa kewenangan melalui mediasi dan konsiliasi atas dapat dilihat dalam Gambar 7.1. Penyelesaian Sengketa Kewenangan berikut:



Gambar 7.1. Penyelesaian Sengketa Kewenangan

Konsep Pemikiran penyelesaian sengketa tersebut dapat berlaku internal dalam satu instansi pemerintahan. Apabila sengketa kewenangan timbul di tingkat akhir pimpinan instansi pemerintahan, maka peran Presiden akan lebih strategis dan sangat krusial untuk memutuskan sengketa kewenangan. Sementara, jika lembaga negara menghadapi sengketa kewenangan, maka penyelesaian sengketa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.^[351]

^[351] Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan telah dijabarkan secara teknis

7.8. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Supriyatno, Budi (2009). *Manajemen Pemerintahan (Plus duabelas Langkah Strategis)*. Penerbit : CV. Media Brilian. 2009, hal. 23.
- [2]. Supriyatno, Budi. (2019). *Pemerintahan Daerah*. Semina Program Pasca Sarajana. Univeristas Satyagama Jakarta, 2019.
- [3]. Balme, R. . (2001). *Regional Governmentin*. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2001.
- [4]. Supriyatno, Budi.(2019). *Government Decentralization*. Seminar, Postgraduate Program. Satyagama University, Jakarta, Indonesia. 2019.
- [5]. Withers, Charles, W.J. (1984). *Gaelic in Scotland, 1698–1981*. Edinburgh: John Donald. hlm. 16–41;. ISBN 978-0-85976-097-3.
- [6]. Covid 19. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret lalu 2020.
- [7]. Olowu, D. (1988) *African Local Governments as Instruments of Economic and Social Development*, No. 1415, The Hague, International Union of Local Authorities, PP 10-17.
- [8]. Robson W (1937) “The development of Local Government”. London, G. Allen & Unwin. PP 750-575.
- [9]. Gomme, G.L., (1987) “Lectures on the principles of the local government”, delivered at London school of Economics, Lent term 1987, Westminster, whitall garden. PP 1-2

dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 8/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

- [10]. The World Bank, (1989) *Strengthening Local Governments in Sub-Saharan Africa: Proceedings of Two Workshops*, Washington, D.C. and Heymans, C. & Totemeyer, G. (1988) "Government by the people? Politics of local government in South Africa. Kenwyn: Juta & Co. Ltd.pp.65
- [11]. Marshall, A. (1965), *Financial administration of Local Government*. George Allen & Unwin, London. PP 1-5.
- [12]. Lemieux, Vincent. (1988). *Sondages et la Democratie*. Published by Institut que?be?cois de recherche sur la culture, 1988.ISBN 10: 2892241154 ISBN 13: 9782892241150.
- [13]. Wiley, Philip Mahwood. (1983). *Local Government in the Third World. the experience of tropical Africa*, Chichester, 1983, pp.261.
- [14]. *The Encyclopaedia of the Social Sciences* is a specialized fifteen-volume Encyclopedia first published in 1930 and last published in 1967.
- [15]. Meyer, J. (1978) *local government law- Volume 1- General principles*. Durban, Butterworth.pp.10
- [16]. Supriyatno, Budi. (2019). *Pemerintah Daerah*. Artikel Smeonar Porgram Pasca Sarjana Univeristas Satyagama Jakarta. 20 Juni 2019. Hal. 2-3.
- [17]. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*.
- [18]. *Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- [19]. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- [20]. *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi*

Sebagai Daerah Otonom.

- [21]. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme ditambah asas efesiensi dan asas efektivitas.
- [22]. Schmidt, Vivien A. (2007). *Democratizing France: The Political and Administrative History of Decentralization*, Cambridge University Press, 2007, p. 22 Archived 2016-05-05 at the Wayback Machine, ISBN 9780521036054.
- [23]. Supriyatno, Budi. (2018). Centralized Government. Artikel. Kuliah Umum Program Pasca Sarejana Universitas Satyagama, Jakarta.
- [24]. Jan in 't Veld, "Nieuwe vormen van decentralisatie in bedrijven," Inaugurele rede Technische Hogeschool Delft, 1968. in: Jan in 't Veld, Pierre Malotiaux en Henk Lombaers. *Trio-logie: Variaties over een thema uit de bedrijfsleer*. 1969.
- [25]. Berg, J. T. van den. Dienstbaar tot Gerechtigheid, c1993:t.p. <https://www.wikidata.org/wiki/Q3282984>.
- [26]. Leroux, Robert French Liberalism in the 19th Century: An Anthology, Chapter 6: Maurice Block on "Decentralization", Routledge, 2012, p. 255 Archived2016-05-29 at the Wayback Machine, ISBN 9781136313011.
- [27]. Merriam-Webster Dictionary (2013). Definition of decentralisation Archived 2013-01-26 at the Wayback Machine, Merriam-Webster Dictionary, accessed march 5, 2013.
- [28]. Undang-Undang R I Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [29]. Van Hoeve. Ensiklopedia Indonesia, Jilid 7. Jakarta: Ichtiar

- Baru. hlm. 775.
- [30]. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 yang berisi tentang pembagian wilayah dan wewenang.
- [31]. Undang-Undang Nomor.23 tahun 2014, Pasal 19). Tentang Pemerintahan Daerah.
- [32]. Pasal 18A UUD 1945 sampai pada UU pelaksanaanya : UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004.
- [33]. Ferrazzi,Keith's. (2020). Leading Without Authority: How Every One of Us Can Build Trust, Create Candor, Energize Our Teams, and Make a Difference. Published May 26th 2020 by Currency.
- [34]. Terry, George Robert. (1953). Principles of Management. Published by : R. D. Irwin, 1953.
- [35]. Davis, R.C. (1951). The fundamentals of top management . Published by New York : Harper & Row, 1951
- [36]. Merriam-Webster: City. Definition of City by. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/city>.
- [37]. Rosenberg, . (2020) . The Difference Between a City and a Town. What Does it Take to Be an Urban Population?. Updated February 02, 2020. <https://www.thoughtco.com/difference-between-a-city-and-a-town-4069700>.
- [38]. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- [39]. Roosevelt, Franklin D. (1943). War Production Board. State of the Union History "from time to time give to the Congress information of the state of the Union".
- [40]. Orbach, Barak, What Is Regulation? 30 Yale Journal on Regulation Online 1 (2012) .
- [41]. Davis, R.C. (1951). The fundamentals of top management . Published by New York : Harper & Row, 1951.
- [42]. Supriyatno, Budi. (2020). Peraturan Pemerintah. Artikel.

- [43]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- [44]. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Gramedia. 1998.
- [45]. Wijk, H. D. van, and Konijnenbelt, Willem. (968). Hoofdstukken van administratief recht . Published by : Gravenhage: Vuga. 1979c.1968.
- [46]. Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. pada Pasal 1 angka 22.
- [47]. Brouwer, J.G. dan A.E. Schilder. (2005) Regelgeving in Nederland. Kluwer..
- [48]. Supriyatno, Budi (2019). Delegatiion. Artikel.
- [49]. Supriyatno, Budi. (2019). Desentralisasi. Artikel untuk seminar Program Pasca Sarjana. Jakarta. 18 Oktober 2019.
- [50]. Glossary Elections ACT. Jul 2012. <http://www.elections.act.gov.au/glossary> (cf., The Government's claim that once elected they have the right and responsibility to implement their policies.)
- [51]. Wet van 4 juni 1992, houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht).
- [52]. Wijk, H. D. van, and Konijnenbelt, Willem. (968). Hoofdstukken van administratief recht . Published by : Gravenhage: Vuga. 1979c.1968.
- [53]. Ludwig Andreas von Feuerbach German: 28 July 1804 – 13 September 1872) was a German anthropologist and philosopher, best known for his book *The Essence of Christianity*, which provided a critique of Christianity that strongly influenced generations of later thinkers.
- [54]. Feuerbach, Ludwig (1957). Eliot, George (ed.). *The Essence of Christianity*. New York: Harper & Brothers. pp. 29–30. And Harvey, Van A., "Ludwig Andreas

- Feuerbach", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
- [55]. Harvey, Van A., "Ludwig Andreas Feuerbach", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.).der.
- [56]. Undang-undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- [57]. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 8/PMK/2006 tentang Pedom



INDEX

A

acuan, 6, 7, 9, 30, 31
agama, 2, 33, 35, 36, 48,
64, 78
akamodasi, 9
akhlak, 3, 74, 103, 114
Aktuil, 74
Aktuilnya, 74, 75
antropologi, 14, 54
aparatur, 5, 28, 29, 32,
57, 67, 83, 92, 126
Aristoteles, 15, 21, 40,
135
arogansi, 26
asasi, 4, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 100
Atheisme, 64
aturan, 3, 8, 43, 80, 88,
90, 95, 97

B

bahasa, 2, 20, 99, 127

beradab, 6, 30
bermuara, 33
bertindak, 6, 7, 9, 77,
78, 103, 142
Bertrand Russel, 17

budaya, 33, 34, 35, 36,
66, 77, 78, 90, 95, 97
BUDI SUPRIYATNO,
25, 28, 31
Budi Utomo, 34
buruk, 6, 21, 22, 23, 24,
31, 32, 39, 67, 76, 80

C

cardinal, 70
catur murti, 70
cinta kasih, 71, 131
Citra, 6, 29
code, 7
conduct, 7
Corak, 58
Custom, 21

D

De Vos, 48, 49, 146
Descartes, 64, 66
deskripsi, 26
dinamis, 26, 27
direvisi, 7
ditegakkan, 8, 9
dogmatik, 72
dogmatis, 48
dominasi, 63, 64, 66,
111

dunia, 6, 19, 30, 37, 47,
64, 65, 66, 94, 97, 108

E

ekonomi, 2, 16, 90, 97,
110, 133, 142

eksak, 20

eksistensi, 9

encyclopedia, 41

Epistemolog, 41

epistemologis, 38

epistimologi, 57, 60, 61

estetika, 2, 16, 39, 44,
46, 55

estetis, 39, 123, 130

etika, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 14, 16, 21, 22,

23, 24, 29, 30, 31, 32,

33, 36, 46, 49, 55, 63,

67, 68, 69, 71, 76, 77,

78, 79, 80, 82, 83, 93,

94, 95, 98, 106, 127,

128, 131, 133, 134,

136, 137, 140, 142

etis, 3, 5, 22, 29, 33, 39,
43, 72, 77, 79, 83,

117, 121

Etos, 2

F

filosofis, 6, 56, 61

Filsafat, 1, 3, 4, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20,

25, 27, 37, 44, 46, 47,

48, 49, 50, 51, 53, 54,

55, 56, 57, 58, 59, 63,

69, 71, 72, 76, 108

Fundamentil, 73, 74

fungsi, 10, 27, 31, 35,

60, 83, 138, 141

G

Gajah Mada, 34

George Klubertanz, 52,
53

good Governance., 58

Grunwissen-schat, 18

H

hakekat, 2, 18, 40, 58,

60, 69, 82

Hans Kelsen, 72, 73,
147

harapan, 71

Harold H. Titus, 16, 17

History, 47, 149

Honestum, 70

horizontal, 35, 36

hukum, 3, 8, 9, 10, 11,
72, 75, 77, 81, 89, 90,

93, 95, 97, 101, 109,

- 110, 111, 134, 137,
138, 139
human, 21
humanoria, 61
- I*
ideologi, 2
Idiil, 73
Immanuel Kant, 14, 66,
147
individu, 33, 84, 99,
119, 120
intelektual, 44, 48, 58,
120, 121, 130
- J*
J Donald Butler, 41, 145
jasmani, 4, 109, 129
Johann Gotlich Fickte,
17
- K*
K. Bertens, 22, 23, 147
kaedah, 72, 75, 76
kaidah, 3
Kant, 14, 64, 147
karakteristik, 25, 26, 27
kebahagiaan, 71
kebaikan, 5, 29, 74, 114,
122, 123, 124, 125,
126, 127, 136
kebenaran, 2, 15, 16, 18,
19, 49, 61, 72, 103,
106, 110, 112, 122,
123, 124, 125, 130,
131
kebiasaan, 2, 20, 21, 34,
35, 104
Kebijaksanaan, 70
kebudayaan, 1, 3, 13
kehormatan, 9
kejelasan, 26
kejujuran, 48, 103, 114
kematangan, 4
Kenyataan, 73
Kepercayaan, 71, 73
kesatuan, 5, 18, 85, 103
Kesusilaan, 74, 113
keutamaan, 34, 69, 70,
71, 77, 79, 80, 82
kewajiban, 26, 35, 57,
70, 77, 133, 136, 143
Kewenangan, 35
kinerja, 25, 93, 143
klasik, 45
kodrat, 21, 53, 69, 82
kolektif, 6
komitmen, 5, 12, 29, 97
komunitas, 1
konsep, 1, 13, 21, 23,
44, 60, 83, 86, 88, 131
konteks, 26, 89, 101

- Kristen*, 45, 64
kritis, 3, 16, 18, 23, 28,
40, 44
kualitas, 4, 20, 90, 102
- L**
landasan, 6, 9, 10, 56,
57, 60, 63, 66, 108,
139
larangan, 35
lembaga, 35, 77, 90, 94,
95, 96, 107
lingkungan, 2, 5, 7, 8, 9,
91, 93
logika, 2, 16, 20, 39, 45,
49, 55, 66
Logika, 20, 43
logika, 2, 16, 39, 45,
49, 55
- M**
Manner, 21
Marcus Tullius Cicero,
14, 15
Martin, 23, 24, 148
Masehi, 22
masyarakat, 4, 5, 6, 7,
11, 30, 32, 36, 58, 64,
68, 76, 84, 86, 91, 94,
96, 108, 109, 110,
112, 113, 114, 121,
127, 131, 132, 135,
136, 137, 138, 141
materialisme, 64, 66
mematuhi, 3
membangun, 5, 29, 48,
60, 85
mendalam, 19, 25, 26,
27
menjaga, 6, 9, 29, 75, 85
menyelidiki, 16, 54
menyingkirkan, 26
metafisika, 2, 14, 16, 39,
40, 45, 55
metafisis, 38
Metodologi, 26, 42
misi, 11, 68
moral, 2, 4, 7, 8, 10, 12,
21, 26, 43, 70, 76, 83,
108, 110, 125, 128,
136
moralitas, 3, 5, 6, 29,
39, 43, 55, 70, 76, 77,
78, 82, 110
mutlak, 20, 36, 54
- N**
nation, 47
nature, 21
negara, 2, 57, 67, 78,
79, 80, 85, 92, 94, 99,
133

- negatif*, 7
norma, 3, 7, 24, 83, 97,
103
normatif, 3, 23, 79
- O**
obyek, 25, 26, 27, 40,
52, 53, 107, 116, 118,
128
ontologis, 27
organisasi, 32, 33, 35,
81
orientasi, 2
otomatis, 9
otoritas, 17, 26
- P**
paham, 66
Pancasila, 35, 80, 139
Paul Nartorp, 18
pedoman, 4, 7, 31, 32,
51, 58, 71, 73, 132
Pegawai, 11, 103, 140,
146
Pejuang, 34
pelanggaran, 7, 8, 10,
11, 99
pelayanan, 10, 86, 100,
127, 138, 141
pembangunan, 11, 57,
67, 69, 77, 85, 88, 90,
91, 92, 96, 97, 106,
138
pemberdayaan, 10, 89,
138, 141
pemerintahan, 4, 5, 7, 9,
10, 25, 27, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36, 51, 52,
56, 57, 58, 60, 63, 67,
68, 69, 71, 72, 76, 77,
79, 80, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 98,
100, 106, 108, 127,
128, 132, 133, 134,
136, 137, 139, 140,
141, 142
pemikir, 14
pemikiran, 1, 13, 16, 17,
18, 28, 32, 37, 44, 45,
55, 56, 57, 65, 72, 87,
107, 116
Pemikiran, 1, 13, 30,
103, 146
pencerahan, 71
penerapan, 21, 27, 110,
132
pengetahuan, 2, 3, 14,
15, 16, 17, 18, 21, 38,
39, 41, 42, 48, 52, 53,
55, 56, 60, 61, 89,

- 107, 120, 121, 123,
126, 130, 142
penggalan, 26
penghayatan, 5, 29
penuntun, 31
Peraturan, 35, 140
perilaku, 3, 24, 28, 29,
32, 35, 36, 39, 104,
142
persoalan, 14, 38, 39,
42, 43, 44, 51, 55, 56,
83
pertengahan, 45, 71
petunjuk, 27, 32, 102
philosophy, 14, 41, 118,
124, 147, 148
pidato, 14, 150
Plato, 15, 16, 42, 107,
109, 145, 149
politik, 2, 16, 70, 79, 81,
82, 84, 89, 90, 92, 93,
97, 137
positif, 8, 10, 68
practical philosophy, 22
praktis, 3, 5, 6, 22, 72,
125
pribadi, 4, 7, 11, 58, 71,
73, 74, 90, 103, 104,
106, 113
profesi, 6, 7, 8, 30, 33
profesional, 6, 143
progresif, 26, 99
Proklamasi, 34, 80
proses, 9, 16, 19, 42, 51,
55, 57, 89, 90, 93, 94,
101, 137, 141
punishment, 8
- R
Rabi'ah al-Adawiyah,
65
Radhakar ishnan, 47, 149
raksasa, 14
ras, 47
rasional, 65, 66
realitas, 27, 61
referensi, 31, 32
refleksi, 3, 22
reflektif, 38, 45, 56
renaisanse, 45
retorika, 2, 16, 150
reward, 8
roh, 61
rohani, 4, 119
Romawi, 14, 70, 82,
110, 127, 150
sakral, 7
sekumpulan, 16, 27
sistematik, 73
social, 17, 33, 85, 92,
117, 118, 129, 138,
141, 145

- Socrates*, 15, 63, 107,
149
sosial, 2, 5, 34, 35, 36,
78, 90, 94, 97, 98
spesifik, 4, 56, 99
spirit, 61
St. John of Damascus,
22, 149
studi, 20, 23, 40, 41, 42,
43, 51, 55, 83, 117
sufi, 65
sumber, 8, 33, 44, 51,
89, 90
Sumpah Palapa, 34
Sumpah Pemuda, 34
- T**
tashawauf, 65
tender, 10
teoritis, 5, 72, 125
tercela, 5, 29, 31
tercermin, 6, 29
terformalisasi, 9
terpanggil, 5, 29
terpuji, 3, 31
tersentuh, 20
terwujud, 12, 116
Thales, 63, 66
tingkah laku, 2, 3, 4, 6,
12, 22, 23, 29, 80
Tiruan, 73
- tradisi*, 2, 17
tugas pokok, 35
Tuhan, 48, 74, 134
- U**
ukuran, 3, 5, 6, 104,
111, 124, 134
Undang-Undang Dasar
1945, 35, 81, 84
universal, 47, 89
usang, 48
- V**
virtues, 70
visi, 1, 9, 13, 68
- W**
wahyu, 17
wajar, 5, 6, 12, 67
wajib, 3, 4, 99, 102, 111,
114
William James, 42, 43
wisdom, 47
Wissenschaftslehre, 18
- Z**
Zaman, 45
Zunnun Al-Mishri, 65



TENTANG PENULIS



Profesor. Dr. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi. Lahir di Sragen, Jawa Tengah. Indonesia, 6 Oktober 1959. Trah Mojopahit, Keturunan Joko Tingkir, Anak dari Almarhum Sersan Mayor Dakir Santoso, Tentara Veteran/Pejuang Kemerdekaan 1945 dan Ibu Moeniroh.

PENDIDIKAN :

- 1 Lulus Sarjana Administrasi Negara di Universitas Krisnadwipayana Jakarta pada 1988.
- 2 Lulus Magister Manajemen STIE Jakarta pada 1998.
- 3 Lulus Magister-Doktor Ilmu Manajemen Pemerintahan Universitas Satyagama Indonesia pada 2005.
- 4 Profesor, sejak 1 November 2022.

PENDIKAN PELATIHAN/TRAINING/ KURSUS:

- 1 Manajemen Proyek di Jakarta (1987).
- 2 Pelaksanaan Teknis Penanganan Proyek di Jakarta (1988).
- 3 Pejabat Inti Proyek di Jakarta (1989).
- 4 Urban Planning di Manila (1994).
- 5 Sewage Works Engineering di Jepang (1995).
- 6 Environmental Training Institute States di New York Amerika (1996).
- 7 Standar Kualifikasi Ketrampilan Bidang Manajemen Jakarta (1997).
- 8 Manajemen Proyek Jakarta (1998).
- 9 Manajemen Communication Skill di Singapura (1999).
- 10 Pelatihan Teknik Kehumasan di Bandung (1999).
- 11 Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Jakarta (2000)

PEKERJAAN :

- 1 Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen PU (1982-1986).
- 2 Proyek Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang, Cipta Karya (1986-1990).
- 3 Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Perkotaan, Cipta Karya (1990-1994).
- 4 Proyek Perencanaan Tata Ruang Propinsi, Cipta Karya (1994-1996).
- 5 Direktorat Bina Teknik, Cipta Karya (1996-2000).
- 6 Deputi Meneg PU Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Terbangun (2000-2001).
- 7 Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Sekertaris Jenderal Kementerian PU (2001-2010).
- 8 Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian PU (2007-2010).
- 9 Pusat Penelitan dan Pengembangan Permukiman Bandung (2010-Sampai 2013).
- 10 Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Jawa Tengah (Sragen, Karanganyar, Wonogiri Tahun 2014).

DOSEN :

- 1 Dosen Universitas Krisnadwipayana (1992-2005).
- 2 Dosen Pasca Sarjana Universitas Satyagama Jakarta, (2005-sekarang).
- 3 Dosen Universitas Jakarta (2010-2015)
- 4 Dosen Universitas Krisnadwipayana, sejak April 2023 sampai sekarang.

ORGANISASI :

- 1 Ketua Kelompok Perhimpunan Pakar Manajemen Pemerintahan Indonesia.
- 2 Calon Legislatif Pemilihan Umum dari Partai Gerindra (2014).

SEMINAR/SIMPOSIUM:

- 1 Regional Government France (1991)
- 2 Studi Management Case di Kualalumpur Malaysia (1993).
- 3 Urban Manajemen di Bangkok Thailand (1994).
- 4 Project Management Singapore (1995).
- 5 Public Speaking Singapura (1996)
- 6 Institutional Development Manila (1997).
- 7 Invironment Study Ammerika Serikat (1998)

BUKU YANG SUDAH DITERBITKAN:

- 1 Tata Ruang dalam Pembangunan Nasional, Suatu Strategi dan Pemikiran (1996).
- 2 Manajemen Pemerintahan (Plus Duabelas langkah Strategis) (2009).
- 3 Manajemen Tata Ruang. (2009)
- 4 Korupsi (2009).
- 5 Budaya Kerja Birokrasi (2010).
- 6 Sang Pmimpian Sejati (2013).
- 7 Job Analysis (2013).
- 8 Human Resource Planing (2013).
- 9 Manajemen Sumber Daya Manusia (2013).
- 10 Human Resource Development (2014)
- 11 Career Management (2014).
- 12 Employee Promotion (2014).
- 13 Performance Evaluation (2014).
- 14 Employee Relation (2014).

Prof. DR. Drs. H. BUDI SUPRIYATNO, MM.,MSi
FILSAFAT PEMERINTAHAN

- 15 Compensation (2014).
- 16 Human Resource Management (2014).
- 17 Teori Pembangunan Dalam Pemerintahan (2015).
- 18 Civic Education (2015)
- 19 Pendidikan Kewarganegaraan (2015)
- 20 Teknik Supervisi (2016).
- 21 Filafat Pemerintahan (2022).
- 22 Juga Aktif meneliti dan menulis di Journal Interna-
sional.

الله

